



**PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021-2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Perda RPJPD dan rancangan Perda PJMD kepada DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan:

- a. Penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) PD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
- c. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.

BAB III RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD Kabupaten Rokan Hulu memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja;
- (2) RPJMD disusun mempedomani RPJMN, RPJPD dan RTRW.

Pasal 5

- (1) RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|------------|---|
| a. BAB I | : PENDAHULUAN |
| b. BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| c. BAB III | : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| d. BAB IV | : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH |
| e. BAB V | : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN |
| f. BAB VI | : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH |
| g. BABVII | : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |

- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- i. BAB IX : PENUTUP

(2) RPJMD Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- b. Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026 sebelum tersusunnya RPJMD tahun 2026-2031, mengingat tahun 2026 masih bagian tahun rencana RPJMD Tahun 2021-2026 sampai tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU : 4.69.A/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2026**

I. UMUM.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Rokan Hulu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 27



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	xi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-8
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1 Letak, Batas, dan Luas Wilayah	II-1
2.1.2 Kondisi Topografi	II-2
2.1.3 Kondisi Klimatologi.....	II-4
2.1.4 Kondisi Geologi	II-6
2.1.5 Kondisi Hidrologi.....	II-7
2.1.6 Wilayah Rawan Bencana	II-8
2.1.7 Kondisi Demografi	II-10
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-13
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-22
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-27
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-28
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-28
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-77
2.3.3 Urusan Pilihan	II-131
2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan	II-138
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-145
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-145
2.4.2 Fokus Wilayah dan Infrastruktur	II-149
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-153
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-155
2.5 EVALUASI HASIL RPJMD PERIODE TAHUN 2016-2021	II-156
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2 Neraca Daerah	III-9
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-14
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-14
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	III-16
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-19
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-19
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2 Isu Strategis Pembangunan	IV-7
4.2.1 Isu Internasional	IV-8
4.2.2 Isu Strategis Nasional.....	IV-9
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Riau	IV-11
4.2.4 Hasil Telaah RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	IV-13



4.2.5 Hasil Telaah RTRW Kabupaten Rokan Hulu	IV-14
4.2.6 Hasil Telaah KLHS Kabupaten Rokan Hulu	IV-30
4.2.7 Isu Strategis Kabupaten Rokan Hulu.....	IV-32
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1 VISI.....	V-1
5.2 MISI	V-2
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V-3
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VI-7
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial .	VI-8
6.3.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.....	VI-10
6.3.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	VI-14
6.3.3 Penetapan Kawasan Strategis wilayah Kabupaten .	VI-18
6.4 Integrasi KLHS Terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Rokan Hulu	VI-18
6.5 Kebijakan Khusus Daerah	VI-28
6.6 Program Pembangunan Daerah	VI-30
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1
BAB IX. PENUTUP	IX-1



Daftar Tabel

Tabel II- 1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu	II-2
Tabel II- 2	Tinggi Rata-Rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Rokan Hulu.....	II-3
Tabel II- 3	Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha).	II-9
Tabel II- 4	Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2016-2020	II-9
Tabel II- 5	Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur	II-11
Tabel II- 6	Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-12
Tabel II- 7	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu (Dalam Milliar Rupiah) Tahun 2016-2020.....	II-15
Tabel II- 8	Ketimpangan Williamson Kabupaten Rokan Hulu dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2017 – 2019	II-21
Tabel II- 9	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-27
Tabel II- 10	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-29
Tabel II- 11	Capaian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020	II-31
Tabel II- 12	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-32
Tabel II- 13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-33
Tabel II- 14	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu	II-33
Tabel II- 15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kab. Rokan Hulu.....	II-34
Tabel II- 16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-34
Tabel II- 17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-35
Tabel II- 18	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-35
Tabel II- 19	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab. Rokan Hulu.....	II-36
Tabel II- 20	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-37
Tabel II- 21	Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-39
Tabel II- 22	Rasio posyandu per satuan balita Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-39
Tabel II- 23	Rasio dokter per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-40
Tabel II- 24	Rasio dokter per satuan penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-40
Tabel II- 25	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu.....	II-41



Tabel II- 26	Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-41
Tabel II- 27	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu.....	II-42
Tabel II- 28	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-43
Tabel II- 29	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-44
Tabel II- 30	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-44
Tabel II- 31	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-45
Tabel II- 32	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-46
Tabel II- 33	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-47
Tabel II- 34	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-47
Tabel II- 35	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Rokan Hulu.....	II-48
Tabel II- 36	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-48
Tabel II- 37	Cakupan balita pneumonia yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu.....	II-49
Tabel II- 38	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-50
Tabel II- 39	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	II-50
Tabel II- 40	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-51
Tabel II- 41	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-52
Tabel II- 42	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 ..	II-52
Tabel II- 43	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-53
Tabel II- 44	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-53
Tabel II- 45	Persentase Penderita diare yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu.....	II-53
Tabel II- 46	Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-54
Tabel II- 47	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-55
Tabel II- 48	Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-55
Tabel II- 49	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-55



Tabel II- 50	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-56
Tabel II- 51	Cakupan puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-57
Tabel II- 52	Cakupan puskesmas Pembantu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-57
Tabel II- 53	Cakupan pelayanan nifas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-57
Tabel II- 54	Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.....	II-58
Tabel II- 55	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-59
Tabel II- 56	Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-59
Tabel II- 57	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-60
Tabel II- 58	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-60
Tabel II- 59	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-60
Tabel II- 60	Capaian SPM bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020	II-61
Tabel II- 61	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum.....	II-63
Tabel II- 62	Realisasi Jumlah Unit Rumah yang Sudah Difasilitasi Air Minum (unsur komponen pelayanan air bersih/ SPAM) Tahun 2017-2020	II-64
Tabel II- 63	Realisasi Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020	II-65
Tabel II- 64	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020.....	II-66
Tabel II- 65	Realisasi Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020	II-67
Tabel II- 66	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-68
Tabel II- 67	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	II-69
Tabel II- 68	Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020	II-70
Tabel II- 69	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-71
Tabel II- 70	Jumlah DTKS Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-72
Tabel II- 71	Jumlah PBI JKN Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-73
Tabel II- 72	Jumlah KPM-PKH Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-73



Tabel II- 73	Jumlah BPNT Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-74
Tabel II- 74	Jumlah Pendamping PKH Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.....	II-74
Tabel II- 75	Jumlah TKSK Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-75
Tabel II- 76	Jumlah PSM Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-75
Tabel II- 77	Jumlah Tagana Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-76
Tabel II- 78	Capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-77
Tabel II- 79	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-78
Tabel II- 80	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-80
Tabel II- 81	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-83
Tabel II- 82	Data Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021	II-83
Tabel II- 83	Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017-2020	II-87
Tabel II- 84	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-88
Tabel II- 85	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-89
Tabel II- 86	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Per Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-90
Tabel II- 87	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-91
Tabel II- 88	Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-91
Tabel II- 89	Rasio pasangan berakte nikah per kecamatan Tahun 2020 Semester I	II-92
Tabel II- 90	Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-92
Tabel II- 91	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-93
Tabel II- 92	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam.....	II-94
Tabel II- 93	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu.....	II-94
Tabel II- 94	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-95
Tabel II- 95	Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020.....	II-97
Tabel II- 96	BUMDes dan Unit Usaha BUMDes, Potensi serta Lembaga Ekonomi Lain di Kabupaten Rokan Hulu.....	II-100



Tabel II- 97	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel II- 98	Ratio Akseptor KB Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-112
Tabel II- 99	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Kecamatan Dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-113
Tabel II- 100	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-114
Tabel II- 101	Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kecamatan Dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-115
Tabel II- 102	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020....	II-116
Tabel II- 103	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-116
Tabel II- 104	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-118
Tabel II- 105	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika	II-120
Tabel II- 106	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-121
Tabel II- 107	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-122
Tabel II- 108	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-123
Tabel II- 109	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Statistik Kabupaten Rokan Hulu.....	II-125
Tabel II- 110	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persandian Kabupaten Rokan Hulu.....	II-126
Tabel II- 111	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2017-2020	II-127
Tabel II- 112	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	II-127
Tabel II- 113	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	II-128
Tabel II- 114	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	II-129
Tabel II- 115	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu Kab. Rokan Hulu.....	II-129
Tabel II- 116	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-130
Tabel II- 117	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu.....	II-131
Tabel II- 118	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.....	II-132



Tabel II- 119	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-135
Tabel II- 120	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Rokan Hulu.....	II-136
Tabel II- 121	Realisasi Capaian Indikator Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 ...	II-138
Tabel II- 122	Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-138
Tabel II- 123	Realisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu.....	II-139
Tabel II- 124	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2020	II-140
Tabel II- 125	PNS yang Sudah Mengikuti Uji Kompetensi di Kabupaten Rokan Hulu.....	II-142
Tabel II- 126	Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan pengembangan Tahun 2017-2020	II-143
Tabel II- 127	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2019..	II-143
Tabel II- 128	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020	II-144
Tabel II- 129	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020	II-145
Tabel II- 130	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (Rp)	II-147
Tabel II- 131	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (Rp).....	II-148
Tabel II- 132	Kondisi Jalan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-150
Tabel II- 133	Jumlah pelanggan dan produksi Listrik PLN (persero)	II-151
Tabel II- 134	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 s/d 2020	II-151
Tabel II- 135	Jumlah Pelanggan dan Air Bersih yang Disalurkan menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu.	II-152
Tabel II- 136	Tindak Kriminal dan Pelanggaran Kamtibmas Kabupaten Rokan Hulu.....	II-153
Tabel II- 137	Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-154
Tabel II- 138	Rasio Ketergantungan dan Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Tahun 2019-2020.....	II-155
Tabel II- 139	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-157
Tabel II- 140	Rekapitulasi Capaian Kinerja Per Aspek Berdasarkan RPJMD.....	II-185
Tabel III- 1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-3
Tabel III- 2	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-6



Tabel III- 3	Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020	III-8
Tabel III- 4	Neraca Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020	III-10
Tabel III- 5	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.....	III-13
Tabel III- 6	Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	III-15
Tabel III- 7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-16
Tabel III- 8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-17
Tabel III- 9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam jutaan)	III-18
Tabel III- 10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu (%)	III-19
Tabel III- 11	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2026..	III-23
Tabel III- 12	Proyeksi Belanja Daerah (Dalam Juta) Tahun Anggaran 2022-2026	III-24
Tabel III- 13	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022-2026 (dalam Jutaan).....	III-25
Tabel III- 14	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022-2026.....	III-27
Tabel III- 15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kab.Rokan Hulu Tahun 2022-2026	III-28
Tabel IV- 1	Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040	IV-23
Tabel IV- 2	Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.....	IV-30
Tabel V- 1	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026	V-4
Tabel VI- 1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.....	VI-2
Tabel VI- 2	Rekomendasi Skenario dengan upaya tambahan dan Rekomendasi untuk RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026	VI-20
Tabel VI- 3	Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	VI-20
Tabel VI- 4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rokan Hulu	VI-32
Tabel VII- 1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026	VII-2
Tabel VII- 2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu.....	VII-3
Tabel VIII- 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hulu.....	VIII-2



Tabel VIII- 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu..... VIII-3

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional, Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMD
- Lampiran 2 Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan
Provinsi terhadap Program Prioritas Nasional



Daftar Gambar

Gambar II- 1	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu	II-1
Gambar II- 2	Peta Topografi Kabupaten Rokan Hulu	II-3
Gambar II- 3	Peta Curah Hujan.....	II-5
Gambar II- 4	Peta Kondisi Geologi Kabupaten Rokan Hulu	II-6
Gambar II- 5	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air.....	II-7
Gambar II- 6	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Rokan Hulu	II-8
Gambar II- 7	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (jiwa).....	II-10
Gambar II- 8	Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-12
Gambar II- 9	Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020.....	II-14
Gambar II- 10	Perkembangan PDRB Perkapita (juta rupiah)	II-15
Gambar II- 11	Laju Inflasi (%) Kota Dumai (Sister City) Tahun 2016-2020.....	II-16
Gambar II- 12	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	II-17
Gambar II- 13	Persentase Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020	II-17
Gambar II- 14	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan).....	II-18
Gambar II- 15	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020	II-19
Gambar II- 16	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020	II-20
Gambar II- 17	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2018-2020	II-20
Gambar II- 18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020	II-22
Gambar II- 19	Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu	II-23
Gambar II- 20	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016– 2020.....	II-24
Gambar II- 21	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu	II-25
Gambar II- 22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Kabupaten Rokan Hulu	II-26
Gambar II- 23	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020	II-27
Gambar II- 24	Struktur Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dan tahun 2020.....	II-146
Gambar II- 25	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017-2020.....	II-147
Gambar II- 26	Proporsi Pengeluaran Pangan dan Nonpangan Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2020	II-149
Gambar II- 27	Jumlah Air Bersih yang di Salurkan (m3) Di Kabupaten Rokan Hulu	II-152
Gambar II- 28	Sumber Air Minum Utama Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	II-153
Gambar IV-1	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Rokan Hulu	IV-14



BAB I

PENDAHULUAN

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan *top down-bottom up*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 7 dan pasal 9.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang disusun ini memiliki beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025, penjabaran ke dalam RKPD, ataupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD. Upaya untuk mengawal sinkronisasi RPJMD dengan dokumen RPJPD ini dilakukan selain secara substansi untuk menjaga konsistensi perencanaan, juga secara legal formal telah diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (4) menyebutkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan mengacu pada ketentuan ini, maka RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026



ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Desember 2021. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Sehingga, apabila mengacu pada kedua ketentuan ini, maka, Perubahan RKPD Tahun 2021 akan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021. Kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai tahun transisi. Demikian juga dengan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada bulan Juli 2021 sebelum RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 ditetapkan pada bulan desember 2021 akan dituangkan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi Covid-19. Dampak pandemi tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, namun juga bidang lainnya, seperti pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lain sebagainya. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan dari 4,92 tahun 2019 hingga mencapai angka 1,51 tahun 2020. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu. Gambaran-gambaran visioner atas kondisi di akhir periode RPJMD atau di tahun 2026 nanti menjadi salah satu pemicu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Rokan Hulu dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian visi tersebut.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);



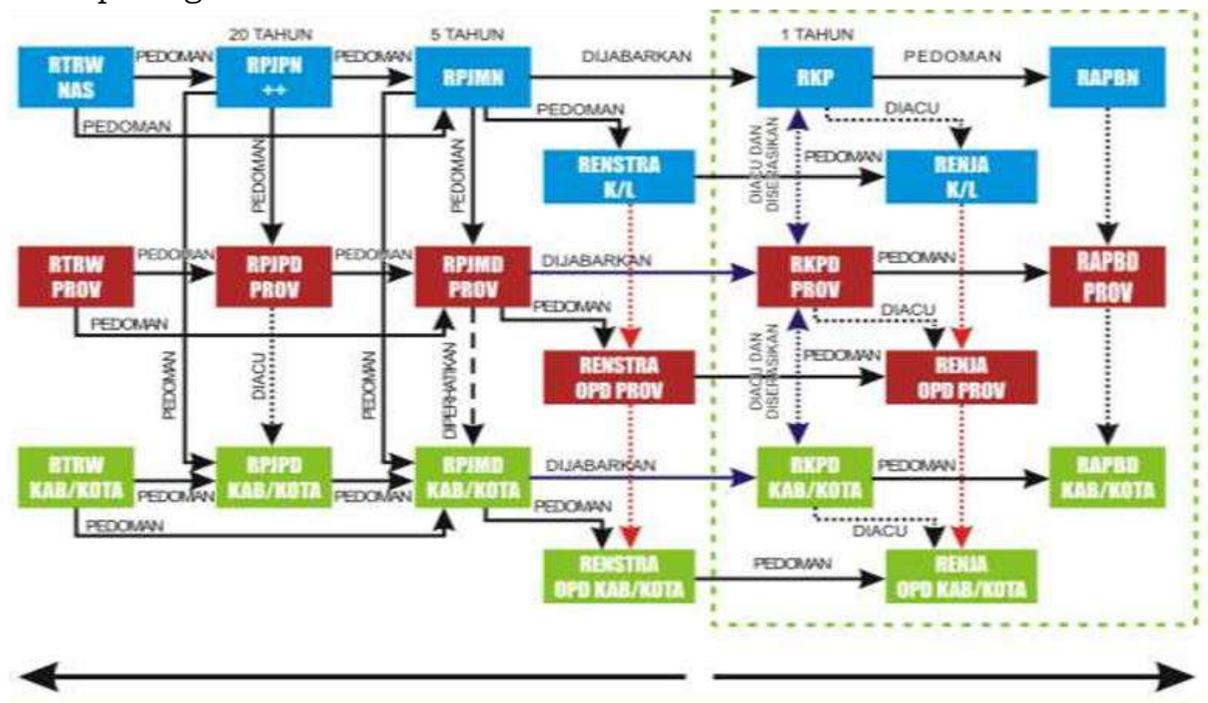
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;



- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Riau, maka RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Selain itu, RPJMD juga mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Adapun Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar I.1.



Gambar I- 1
Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040, sebagai acuan dalam



penentuan lokasi kegiatan dan penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kawasan. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman juga kepada RTRW untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.2 RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap ke-empat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025, sehingga RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu pada RPJPD Tahun 2005-2025 beserta arah pembangunannya. Keseluruhan visi misi dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang berupa program pembangunan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.3 RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu jangka menengah. Secara eksplisit Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka menengah yang disusun oleh setiap perangkat daerah dibawah koordinasi Bappeda Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.4 RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dari Renja PD. RKPD disusun dengan salah satunya melalui pendekatan partisipatif yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.



1.3.5 RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Salah satu dokumen perlu diperhatikan dan diselaraskan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2021-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;



4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026;
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu periode 2021-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan analisis lingkungan strategis.

BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi dan jangka waktunya; pernyataan dan penjelasan masing-masing misi yang merupakan penjabaran dari visi; rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, serta gambaran keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam tabel/matrik.

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi



dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini membahas Penetapan indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

**BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021**



Secara geografis Wilayah kabupaten Rokan Hulu terletak di Ujung Utara wilayah Provinsi Riau dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Rincian pembagian wilayah administrasi menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Luas Total Area (km ² /Sq.Km)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (Persen%)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bangun Purba	150,15	1,98	7
2	Kabun	355,46	4,68	6
3	Kepenuhan	502,81	6,63	10
4	Kepenuhan Hulu	297,33	3,92	5
5	Kunto Darussalam	777,64	10,25	10
6	Pagaran Tapah Darussalam	150,46	1,98	3
7	Pendalian IV Koto	204,24	2,69	5
8	Rambah	343,23	4,52	14
9	Rambah Hilir	279,16	3,68	13
10	Rambah Samo	352,33	4,64	14
11	Rokan IV Koto	952,31	12,55	14
12	Tambusai	775,16	10,22	12
13	Tambusai Utara	951,48	12,54	11
14	Tandun	355,46	4,68	9
15	Ujung Batu	99,27	1,31	5
16	Bonai Darussalam	1.119,49	14,75	7
Rokan Hulu		7.588,13	100,00	145

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka 2021

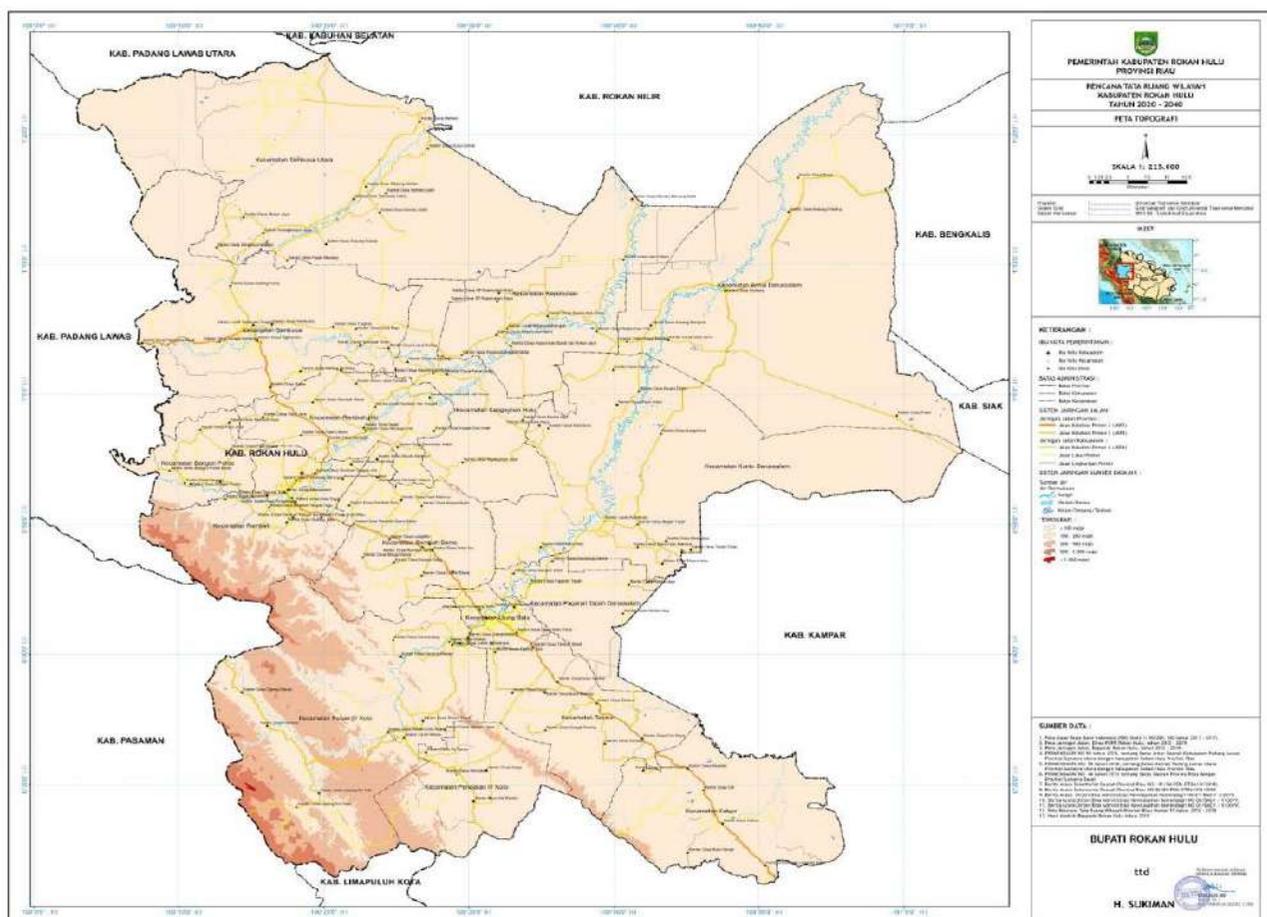
Kecamatan dengan wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 1.119,49 km² atau 14,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km² atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa.

2.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian wilayah cukup beragam dengan rata-rata berada pada ketinggian 72 mdpl. Daerah dataran tinggi di



bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Rokan IV Koto, Tandun, Kabun dan Kecamatan Bangun Purba, kemudian Kecamatan Rokan IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata paling tinggi 111 mdpl. Sedangkan daerah dataran rendah terletak di daerah bagian timur dan daerah rawa terdapat di daerah yang berhadapan langsung dengan aliran Sungai Rokan yang meliputi Kecamatan Bonai Darussalam dengan rata-rata tinggi wilayah 21 mdpl. Kondisi topografi Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II- 2 Peta Topografi Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, dengan cakupan luas mencapai 7.375,68 km² atau 97,20 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 1 Kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (m dpl), yaitu Kecamatan Pendalian IV Koto (111 m dpl). Tinggi rata-rata masing-masing kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 2

Tinggi Rata-Rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Rokan IV Koto	97
2	Pendalian IV Koto	111
3	Tandun	70



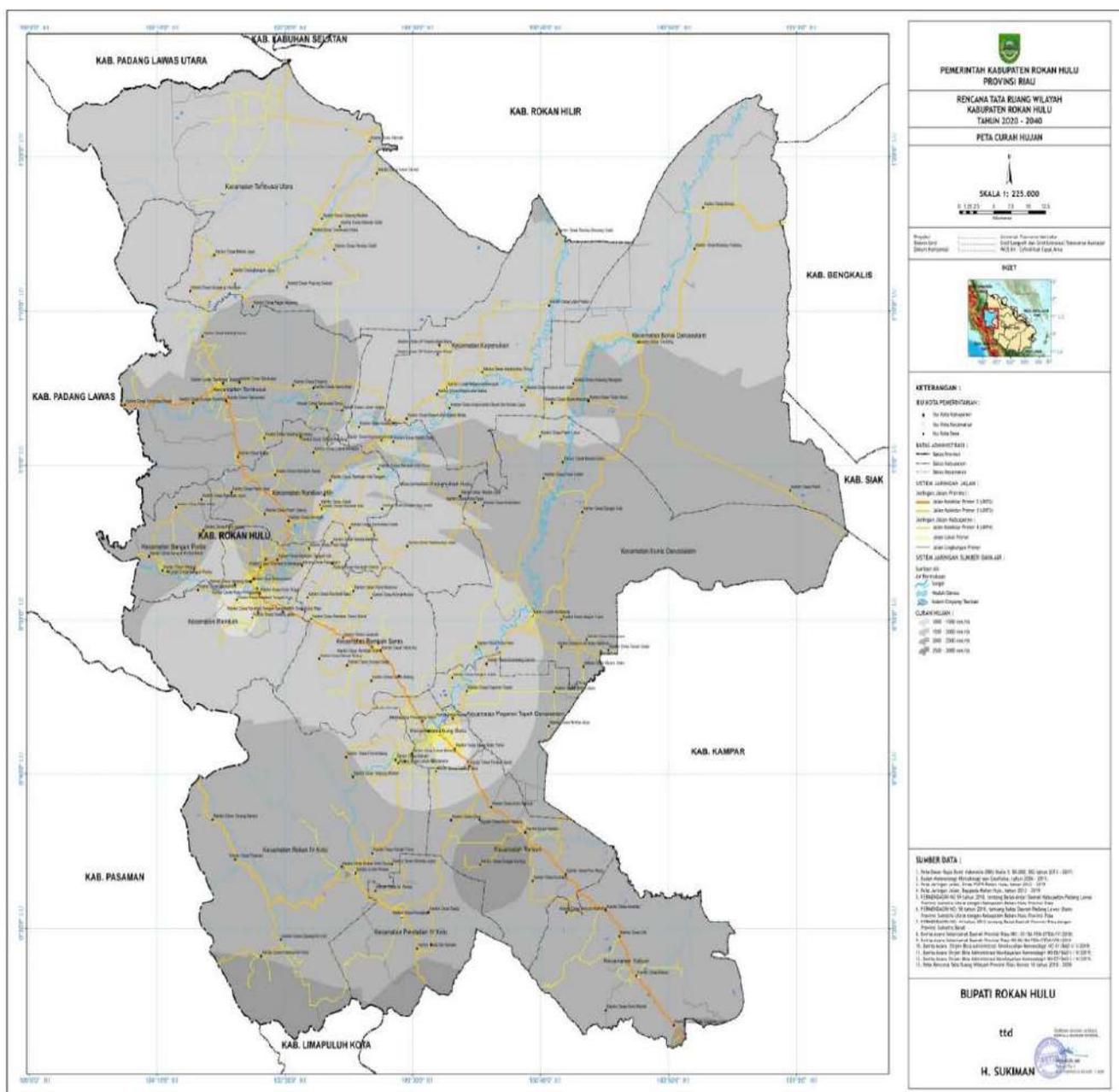
No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
4	Kabun	63
5	Ujung Batu	66
6	Rambah Samo	69
7	Rambah	67
8	Rambah Hilir	55
9	Bangun Purba	77
10	Tambusai	64
11	Tambusai Utara	49
12	Kepenuhan	29
13	Kepenuhan Hulu	49
14	Kunto Darussalam	41
15	Pagaran tapah Darussalam	52
16	Bonai Darussalam	21

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka 2021

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Sebagian besar daerah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai suhu berkisar 20-39 C. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari pengaruh letak yang dekat dengan khatulistiwa sehingga Kabupaten Rokan Hulu mempunyai iklim tropis dan masuk dalam zona iklim hutan hujan basah. Pola curah hujan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan topografi.

Secara umum, wilayah kabupaten ini memiliki bulan basah (dengan curah hujan lebih dari 200 mm) dari 6 bulan per tahun, kecuali untuk tahun-tahun tertentu dimana musim kemarau berlangsung. Kondisi agroklimat Kabupaten Rokan Hulu tersebut menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya sangat menunjang untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.



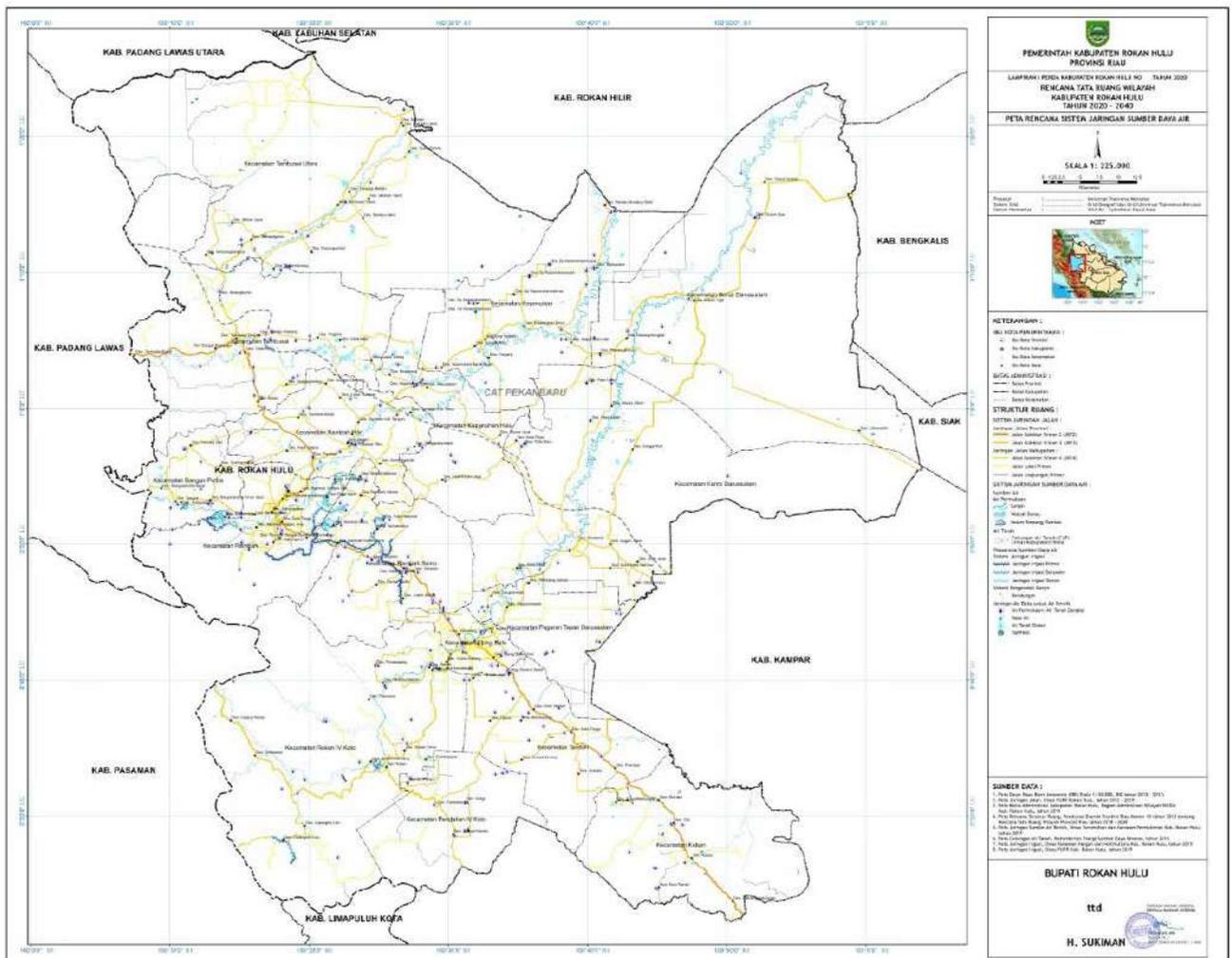
Sumber : RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040
Gambar II- 3 Peta Curah Hujan



2.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi distribusi dan pergerakan air di Kabupaten Rokan Hulu banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Rokan Hulu bersifat perennial yang mengalir sepanjang tahun dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (*base flow*) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Sepanjang aliran sungai tidak dimanfaatkan aktivitas merusak aliran sungai, seperti tambak atau pertanian dan lainnya. Daerah aliran sungai bagian hulu perlu tetap dijaga untuk mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir.

Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama akan membentuk pola-pola aliran sungai di Kabupaten Rokan Hulu. Pola aliran sungai pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungai mengalir pada lembah perbukitan menuju sungai utama. Sungai -sungai utama di Kabupaten Rokan Hulu meliputi Sungai Rokan, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosah, Sungai Batang Kumu, dan Sungai Mahato. Sementara air tanah di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari peresapan air hujan, peresapan air sungai dan sebagian peresapan dari air irigasi. Daerah tangkapan air tersebar (*recharge area*) berasal dari daerah penggunaan lahan hutan. Untuk melihat secara rinci peta hidrologi dapat dilihat pada gambar berikut.



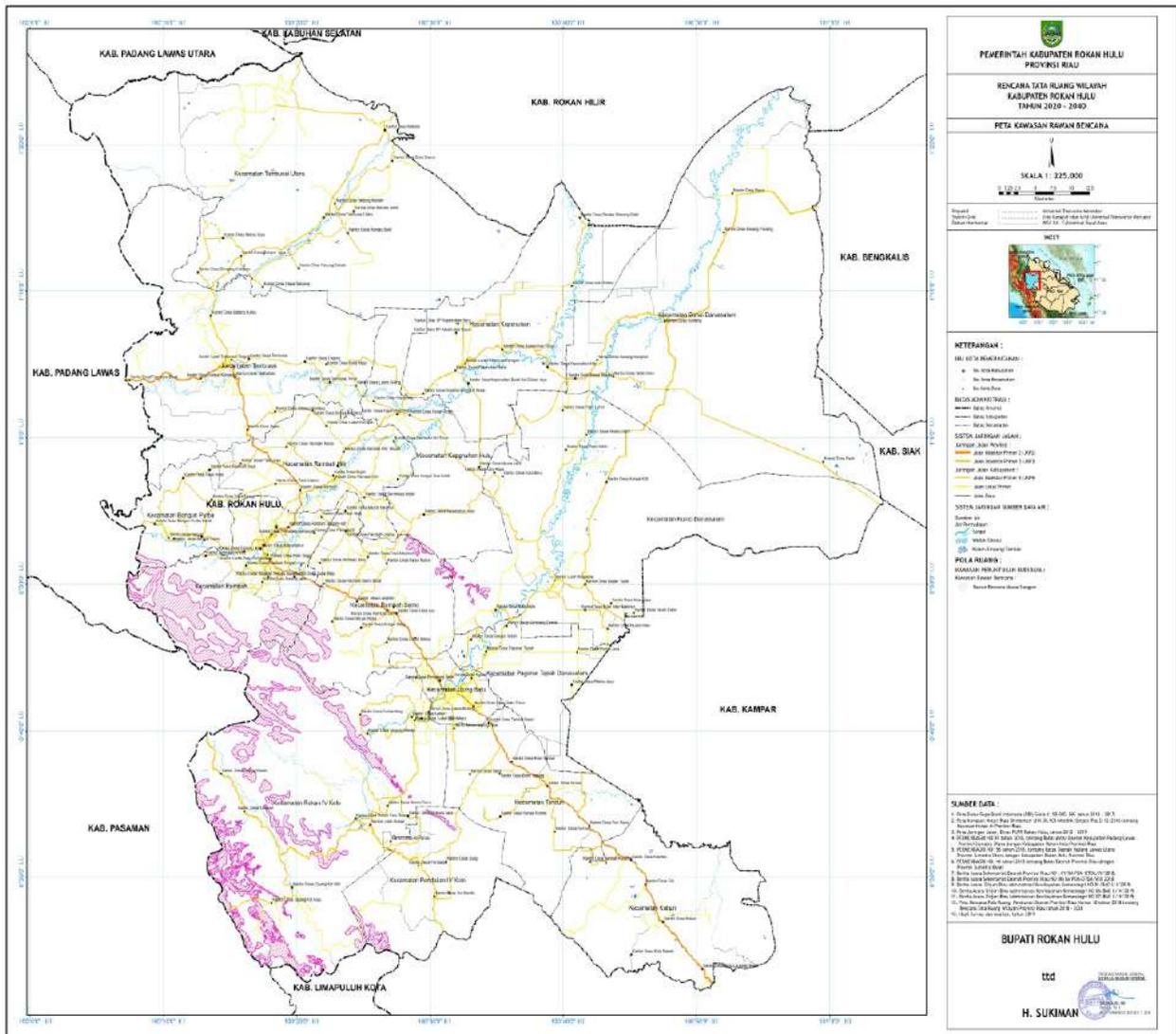
Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II- 5 Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air



2.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan rawan banjir. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Gambar II- 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Rokan Hulu

Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Bencana banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sejak Tahun 2002 hingga Tahun 2018. Hampir setiap tahun sungai Rokan, mengalami banjir, bahkan dalam beberapa tahun terakhir frekuensi dan volume banjir cenderung meningkat, sehingga menimbulkan banyak kerugian baik secara fisik maupun non fisik, antara lain keresahan penduduk meningkat, rusaknya bangunan infrastruktur serta rusaknya lahan pertanian dan perikanan. Luas



Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Rokan Hulu lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 3
Rencana Luas Kawasan Rawan Bencana Menurut Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Ha)

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana			
		Luas Kawasan Rawan Banjir (Ha)	Luas Kawasan Rawan Longsor (Ha)	Total	Persentase (%)
1	Rokan IV Koto	4,320.83	17,432.85	21.753.68	23.59
2	Tandun	829.22	1,444.67	2.273,89	2.47
3	Kabun	443.33	1,453.27	1.896.6	2.06
4	Ujungbatu	1,922.80	1.922.8	2.09	1,922.80
5	Rambah Samo		742.83	742.83	0.81
6	Rambah	2,326.03	7,014.88	9.340.91	10.13
7	Rambah Hilir	2,553.99	17.96	2.571.95	2.79
8	Bangun Purba	1,236.22	38.15	1.274.37	1.38
9	Tambusai	5,644.01	5.644.01	6.12	5,644.01
10	Tambusai Utara	8,201.53	8.201.53	8.89	8,201.53
11	Kepenuhan	11,245.09	0.25	11.245.34	12.20
12	Kunto Darussalam	7,657.47	7.657.47	8.30	7,657.47
13	Pagaran Tapah Darussalam	3,771.50	12.25	3.783.75	4.10
14	Bonai Darussalam	10,202.30	10.202.3	11.06	10,202.30
15	Kepenuhan Hulu	2,576.16	96.1	2.672.26	2.90
16	Pendalian IV Koto		1,024.35	1.024.35	1.11
	Kab. Rokan Hulu (Ha)	62,930.48	29,277.56	92.208.04	100

Sumber: RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Berdasarkan data potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kecamatan Kepenuhan adalah wilayah kawasan rawan banjir terbesar dengan luas 11.245,09 ha dan Kecamatan Rokan IV Koto menjadi wilayah terbesar berpotensi rawan longsor dengan luas 17.432,85 ha. Berdasarkan rekaman data yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu secara *offline*, kejadian banjir cenderung berfluktuasi dari tahun 2016 hingga Tahun 2020, Tahun 2016 banjir terjadi 57 kali dan tahun 2017 banjir terjadi sebanyak 29 kali, meningkat di tahun 2018 dengan kejadian sebanyak 49 kali dan cenderung menurun pada tahun 2019- 2020 dengan kejadian sebanyak 44 dan 27 kali. Selain faktor iklim angka kejadian banjir dapat menurun dikarenakan telah dibangunnya beberapa infrastruktur didaerah aliran sungai. Lebih rinci mengenai rekapitulasi peristiwa bencana (kejadian) di Kabupaten Rokan Hulu pada table berikut:

Tabel II- 4
Rekapitulasi Peristiwa Bencana (Kejadian) Tahun 2016-2020
Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran					
2	Kebakaran Hutan dan lahan	40	14	5	8	20
3	Kebakaran rumah	13	7	22	38	29
4	Kebakaran pabrik	-	-	-	-	-
5	Kebakaran bangunan	-	-	-	-	-
6	Kebakaran gedung kantor	-	-	-	-	-
7	Kebakaran rumah toko	-	-	-	-	-

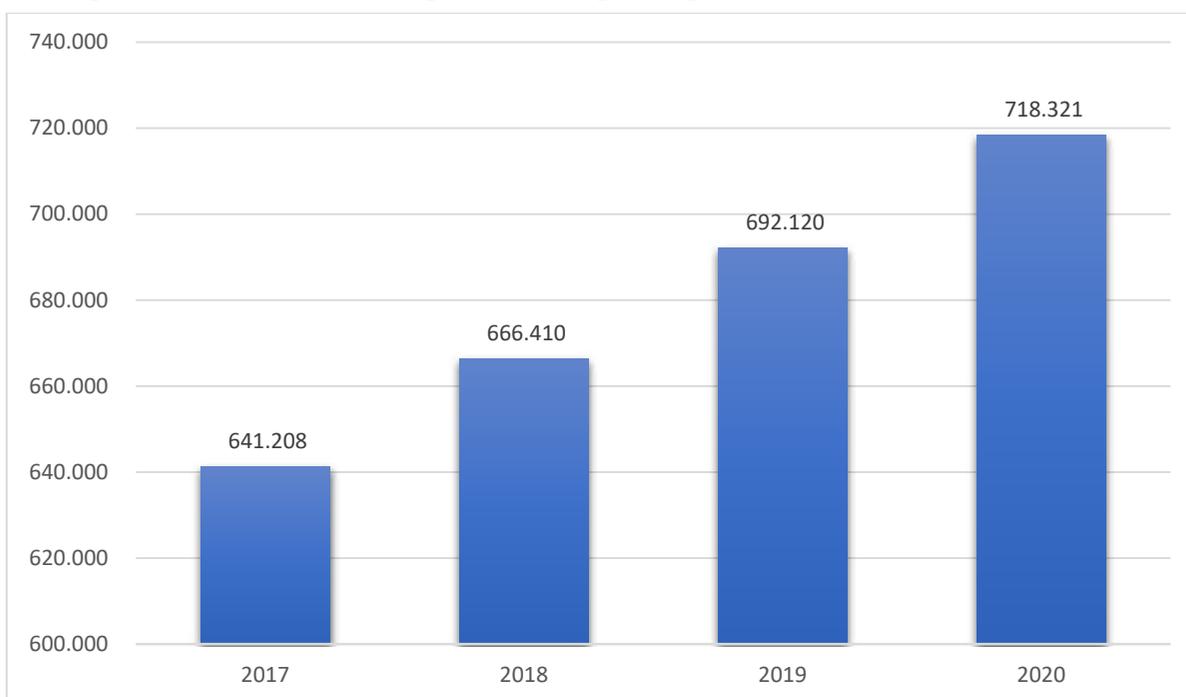


No	Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
8	Kebakaran kios pasar	-	-	-	-	-
9	Kebakaran Rumah Makan	-	-	-	-	-
10	Angin puting beliung	4	2	-	4	2
11	Banjir	57	29	49	44	27
12	Tanah longsor	-	-	-	1	-
13	Orang tenggelam	4	-	-	3	3
Jumlah		118	52	86	98	81

Sumber: BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu Tahun 2020

2.1.7 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 641.208 jiwa dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 718,321 jiwa. Berdasarkan dari data jumlah penduduk, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu per tahun meningkat sebesar 3,90 persen. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Secara rinci jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 7

Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (jiwa)

Komposisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kelompok umur, didominasi oleh kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu sangat tinggi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 84.764 jiwa atau 11,80%. Sedangkan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 76.500 jiwa atau 10,64%, sedangkan kelompok umur 75+ sebanyak 6.086 jiwa atau 0,84%.

Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 64,56 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 35,46%. Tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif, (*dependency ratio*) sebesar 54,93%, yang mengindikasikan bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung hampir satu orang (0,8 orang) penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II- 5

Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)			
	2019	Persen	2020	Persen
0-4	83.042	12,00	84.764	11,80
5-9	76.500	11,05	78.443	10,92
10 -14	65.705	9,49	68.248	9,50
15-19	55.610	8,03	57.531	8,01
20-24	56.832	8,21	58.174	8,10
25-29	64.014	9,25	65.347	9,10
30-34	59.481	8,59	61.877	8,61
35-39	52.227	7,55	53.771	7,49
40-44	47.444	6,85	49.357	6,87
45-49	39.599	5,72	41.915	5,84
50-54	31.333	4,53	33.472	4,66
55-59	22.946	3,32	24.683	3,44
60-64	16.116	2,33	17.506	2,44
65-69	9.967	1,44	11.019	1,53
70-74	5.624	0,81	6.128	0,85
75+	5.680	0,82	6.086	0,85
Rokan Hulu	692.120	100	718.321	100

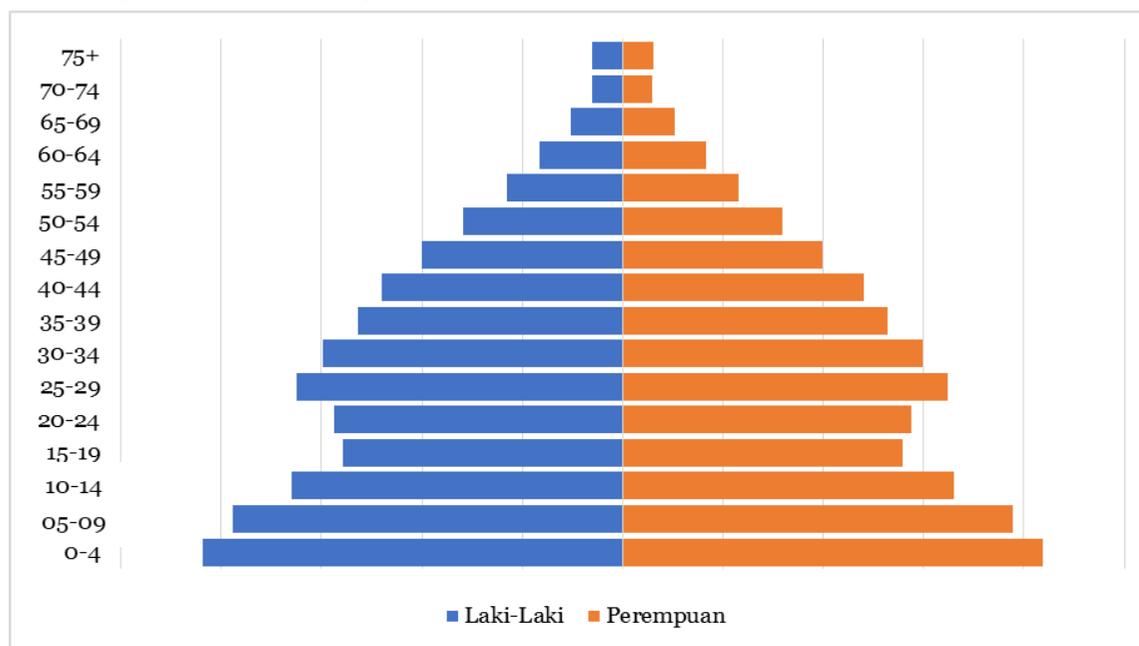
Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2017, rasio jenis kelamin sebesar 105,41 kemudian pada tahun 2020 menjadi 105,15 hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Piramida penduduk Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam kategori piramida penduduk *expansive*, yang berarti penambahan penduduk yang sedang tumbuh. Hal ini mengindikasikan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah. Komposisi penduduk yang demikian ditandai dengan penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk usia tua dengan jumlah makin sedikit. Penduduk usia produktif (15-64) di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 463.633 jiwa pada tahun 2020.



Sedangkan penduduk yang berada pada kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 231.455 jiwa dan penduduk pada usia tidak produktif (>64 tahun) berjumlah 23.233 jiwa.



Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 8
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Rokan Hulu 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2016-2020 terus mengalami penurunan pertumbuhan. Tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 616.466 jiwa dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,01% pada tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 641.208 jiwa lalu mengalami pertumbuhan sebesar 3,93% menjadi 666.410 jiwa pada tahun 2018. Pertumbuhan penduduk Rokan Hulu pada tahun 2019 sebesar 3,86% dengan jumlah penduduk mencapai 692.120 jiwa. Terakhir, pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 3,79% menjadi 718.321 jiwa.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Rokan Hulu juga ikut meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 73,98 penduduk/km. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu meningkat menjadi sebesar 85 jiwa/km². Selanjutnya pada tahun 2018 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 88 jiwa/km². Kemudian, pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu menjadi 91 jiwa/km². Hingga tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu mencapai 95 jiwa/km². Lebih rinci mengenai indikator kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 6
Indikator Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

Indikator	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	616.466	641.208	666.410	692.120	718.321
-Laki-Laki	316.506	329.047	341.765	354.914	368.181
-Perempuan	299.960	312.161	324.645	337.206	350.140

Indikator	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Penduduk (%)	4,08	4,01	3,93	3,86	3,79
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	73,98	85	88	91	95
Rasio Jenis kelamin (<i>sex ratio</i>)	105,52	105,41	105,27	105,25	105,15

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

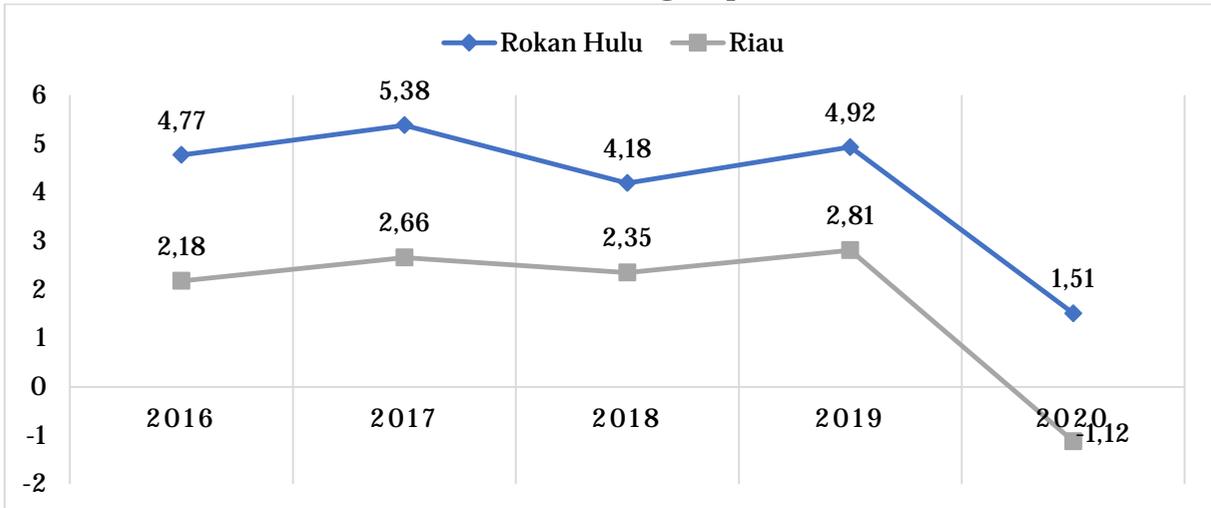
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu gambaran kinerja perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam gambar II- 9 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,77%, kemudian meningkat pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,38%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari tahun 2017 menjadi 4,18% akan tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami kenaikan menjadi 4,92%. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup signifikan menjadi 1,51%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pertumbuhan negatif di beberapa sektor, jasa perusahaan sebesar (21.93) persen, Jasa lainnya sebesar (20.71) persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar (17.70) persen, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar (12.75) persen, Transportasi dan pergudangan sebesar (7.87) persen, Pertambangan dan penggalian sebesar (5.09) persen, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar (3.36) persen, dan Konstruksi sebesar (3.23) persen. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 menjadi salah satu pemicu penurunan produksi pada berbagai sektor perekonomian yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, sektor pertanian menjadi salah satu sektor penyangga perekonomian Kabupaten Rokan Hulu di masa pandemi covid-19, dapat dibuktikan secara riil sektor pertanian Rokan Hulu masih tumbuh sebesar 3,69%, hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi pergerakan perkembangan output disektor pertanian Kabupaten Rokan Hulu, 3,44% bersumber dari perkebunan kelapa sawit dan 0,25% bersumber dari lainnya (Perikanan, Ternak, dan Kehutanan).

Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 lebih utama disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang membuat beberapa sektor ekonomi tidak bekerja



dengan maksimal. Namun, meski mengalami penurunan hingga 1,51% pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan nasional ditengah pandemi Covid-19.



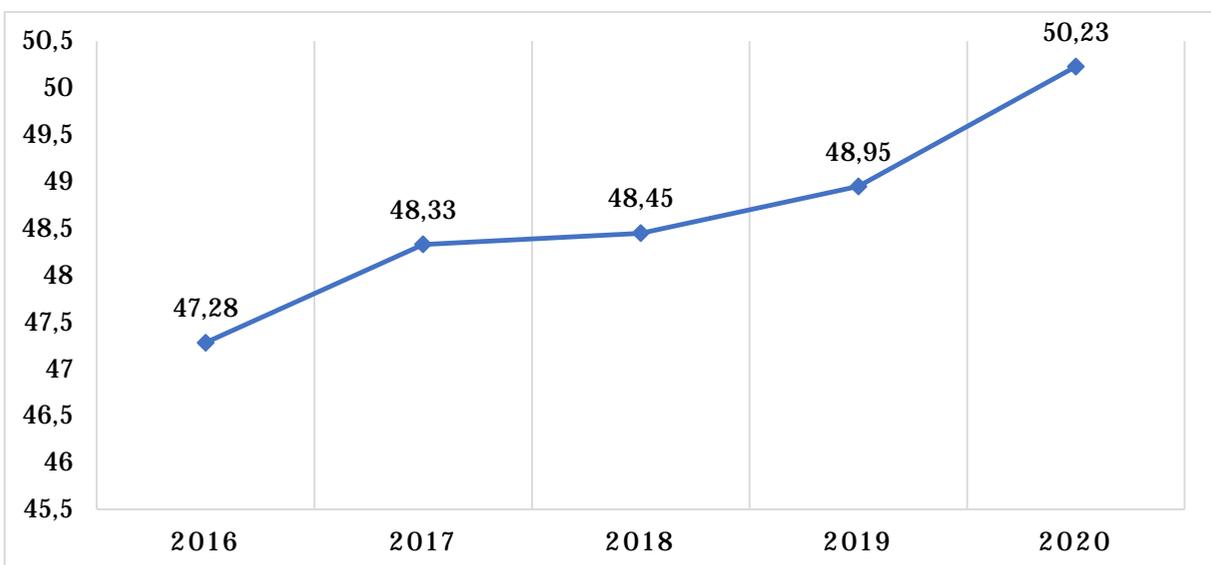
Sumber : Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka 2021

Gambar II- 9

Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

2.2.1.2 PDRB Perkapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka, 2021



Gambar II- 10
Perkembangan PDRB Perkapita (juta rupiah)

PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu sebesar 48,33 juta rupiah, pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 48,45 juta rupiah, selanjutnya pada tahun 2019 PDRB perkapita kabupaten Rokan Hulu juga mengalami peningkatan menjadi 48,95 juta rupiah. Kemudian di tahun 2020 PDRB perkapita kembali mengalami peningkatan menjadi 50,23 juta rupiah.

Kenaikan PDRB perkapita saat pertumbuhan ekonomi riil melambat pada tahun 2020 dikarenakan secara nominal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tumbuh sebesar 6,50%, lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk yang hanya tumbuh sebesar 3,79%. Hal ini disebabkan saat pandemi covid-19 melanda harga komoditas cenderung naik terutama untuk komoditas TBS kelapa sawit yang dipengaruhi oleh kenaikan harga CPO yang merupakan beberapa sektor dominan penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. Berikut tabel PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II- 7
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu (Dalam Milliar Rupiah)
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)						
1	ADHB	29.145,61	30,992,30	32.290,19	33.882,24	36.083,71
2	ADHK	21.792,97	22.965,45	23.925,69	25.101,65	25.479,88
PDRB perKapita (Juta Rupiah)						
1	ADHB	47.28	48.33	48.45	48.95	50,23
2	ADHK	35.35	35.82	35.90	36.27	35,47
3	Pertumbuhan PDRB perKapita ADHK	0.66	1.31	0,24	1,02	(2,20)
4	Jumlah penduduk (orang)	616.466	641.208	666.410	692.120	718,321
5	Pertumbuhan jumlah penduduk (persen)	4.08	4.01	3,93	3,86	3,79

Sumber : PDRB Kabupaten Rokan Hulu menurut Pengeluaran 2016-2020

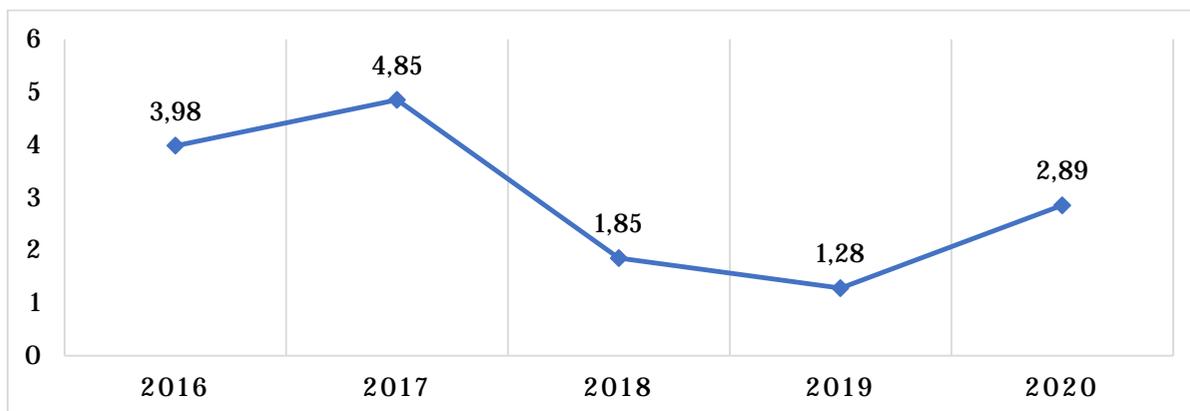
2.2.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Rokan Hulu belum di hitung oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk melihat Laju Inflasi di Kabupaten Rokan Hulu metode yang di gunakan melihat Kabupaten/ kota yang struktur PDRB nya mirip dengan kabupaten Rokan Hulu (*sister city*), untuk di Provinsi Riau struktur PDRB nya yang mendekati Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Dumai.

Laju inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kota Dumai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 laju inflasi Kota Dumai sebesar 4,85 persen. Selanjutnya Pada tahun 2018 dan tahun 2019, Kota Dumai mengalami penurunan tingkat inflasi menjadi 1,85 persen dan 1,28 persen. Pada tahun 2020 laju inflasi Kota Dumai mengalami kenaikan menjadi 2,89 persen. Melihat kondisi inflasi Dumai yang masuk dalam kategori inflasi rendah, maka secara umum dalam lima tahun terakhir tingkat inflasi di



Rokan Hulu juga diperkirakan berada pada tingkat inflasi rendah. Ini berarti kenaikan harga barang-barang secara umum masih rendah dan jumlah uang beredar di masyarakat masih dalam kondisi yang baik. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



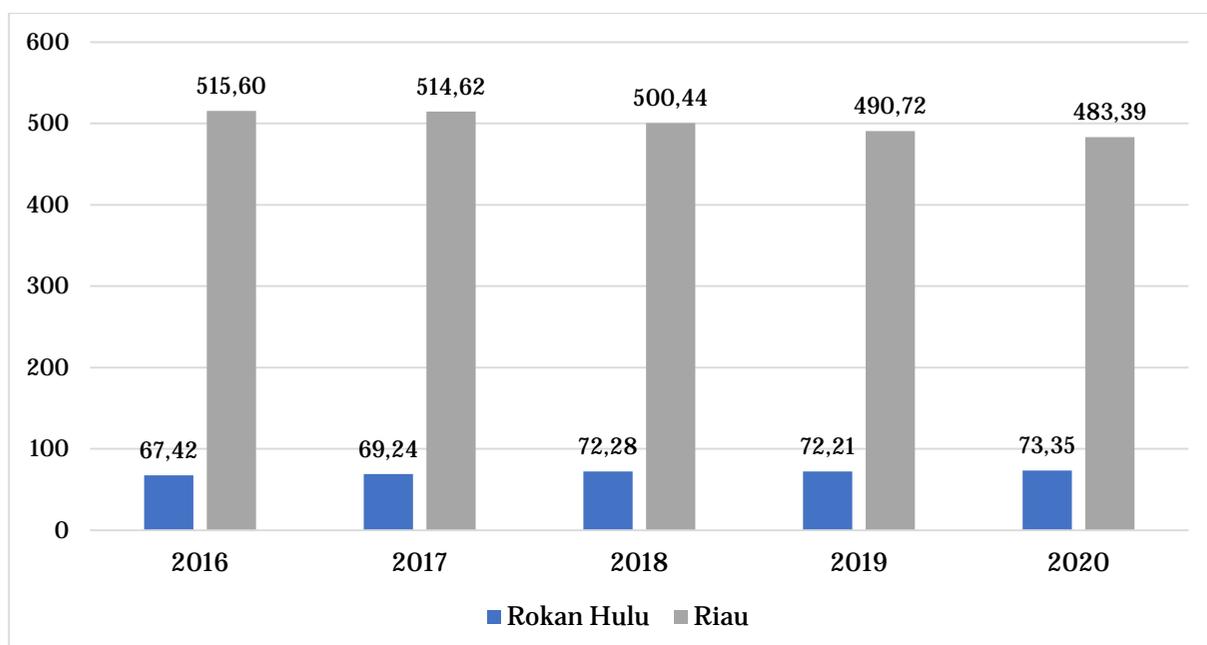
Sumber : BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar II- 11
Laju Inflasi (%) Kota Dumai (Sister City) Tahun 2016-2020

2.2.1.4 Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2016 sebesar 67,42 ribu jiwa lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi 69.24 ribu jiwa. Pada tahun 2018 jumlah masyarakat miskin kembali naik menjadi 72,28 ribu jiwa dan pada tahun 2019, jumlah masyarakat miskin menurun menjadi 72,21 ribu jiwa. Terakhir pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 73,35 ribu jiwa.

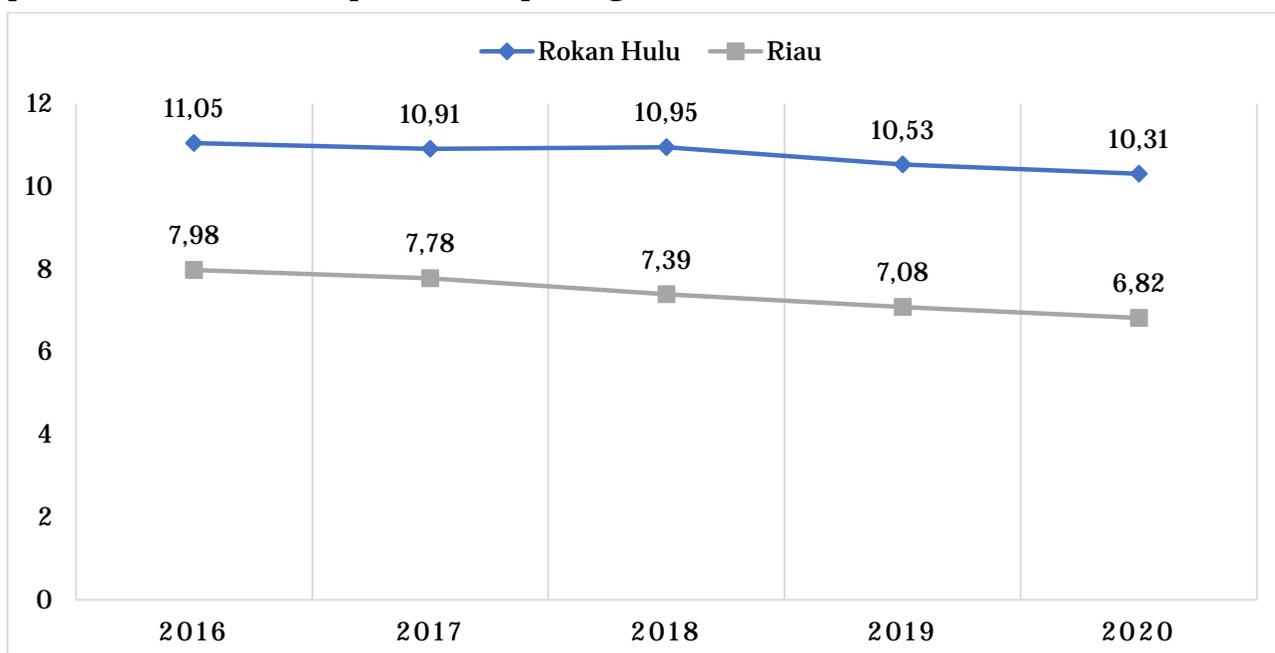
Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu ini cukup berlawanan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Secara umum jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 12
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami penurunan, meskipun secara absolut jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, kecuali tahun 2019 sedikit mengalami penurunan. Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017 sebesar 10,91 tahun 2018 tetap sebesar 10,95 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10,53 persen. Kemudian pada tahun 2020 persentase masyarakat miskin mengalami penurunan menjadi 10,31 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

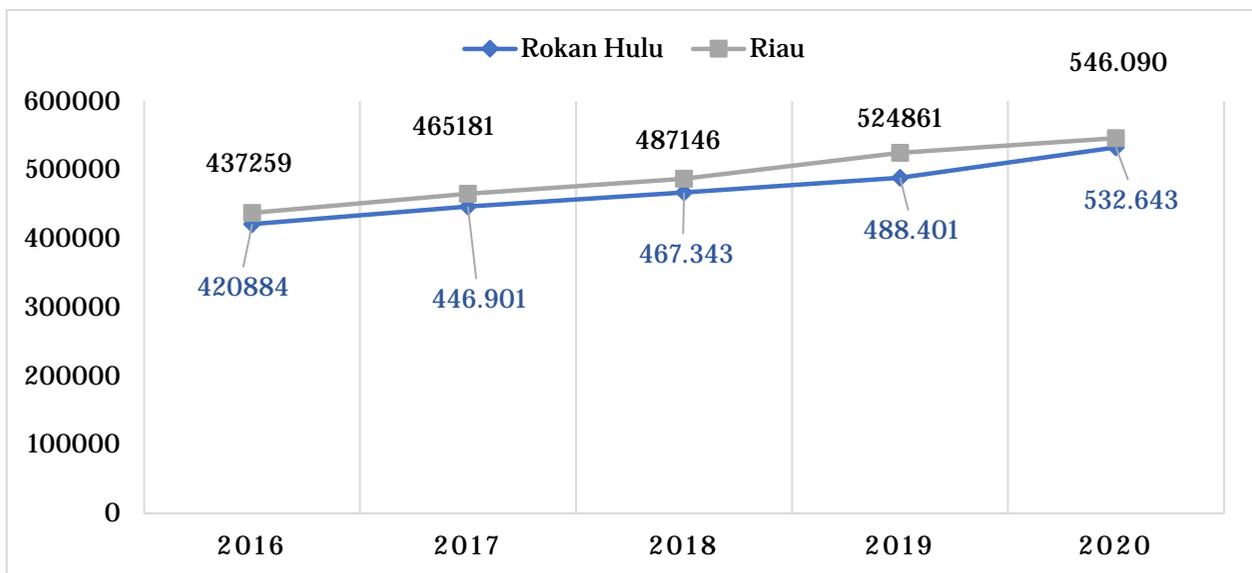


Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 13
Persentase Masyarakat Miskin Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020



Meskipun secara persentase tingkat kemiskinan Rokan Hulu selalu menurun, namun tingkat kemiskinan di Rokan Hulu ini terbilang masih tinggi terutama apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang merupakan tertinggi kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Kepulauan Meranti pada lima tahun terakhir. Persoalan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu salah satunya dapat dilihat dari tingkat daya beli masyarakat yang rendah. Garis kemiskinan adalah sejumlah uang yang diperlukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan dalam satu bulan. Secara umum garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu berada sedikit dibawah garis kemiskinan rata-rata Provinsi Riau. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut.

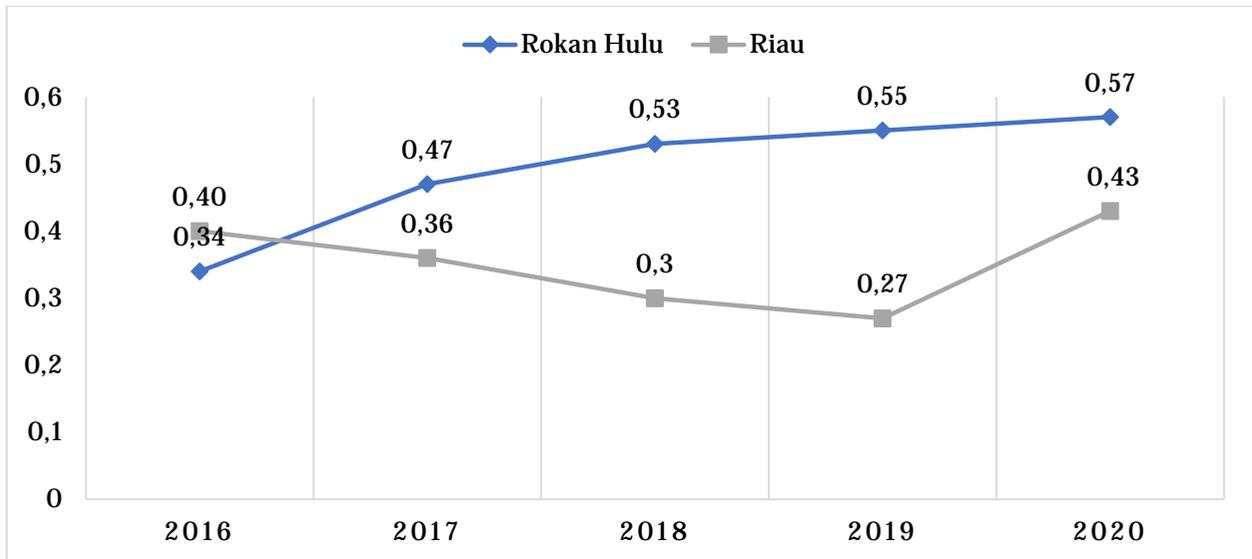


Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 14

Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Riau pada periode 2016-2020 dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 0,57 lebih tinggi dibanding Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Riau yang berada pada angka 0,43. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu lebih tinggi dibanding ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara keseluruhan pada Provinsi Riau. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:

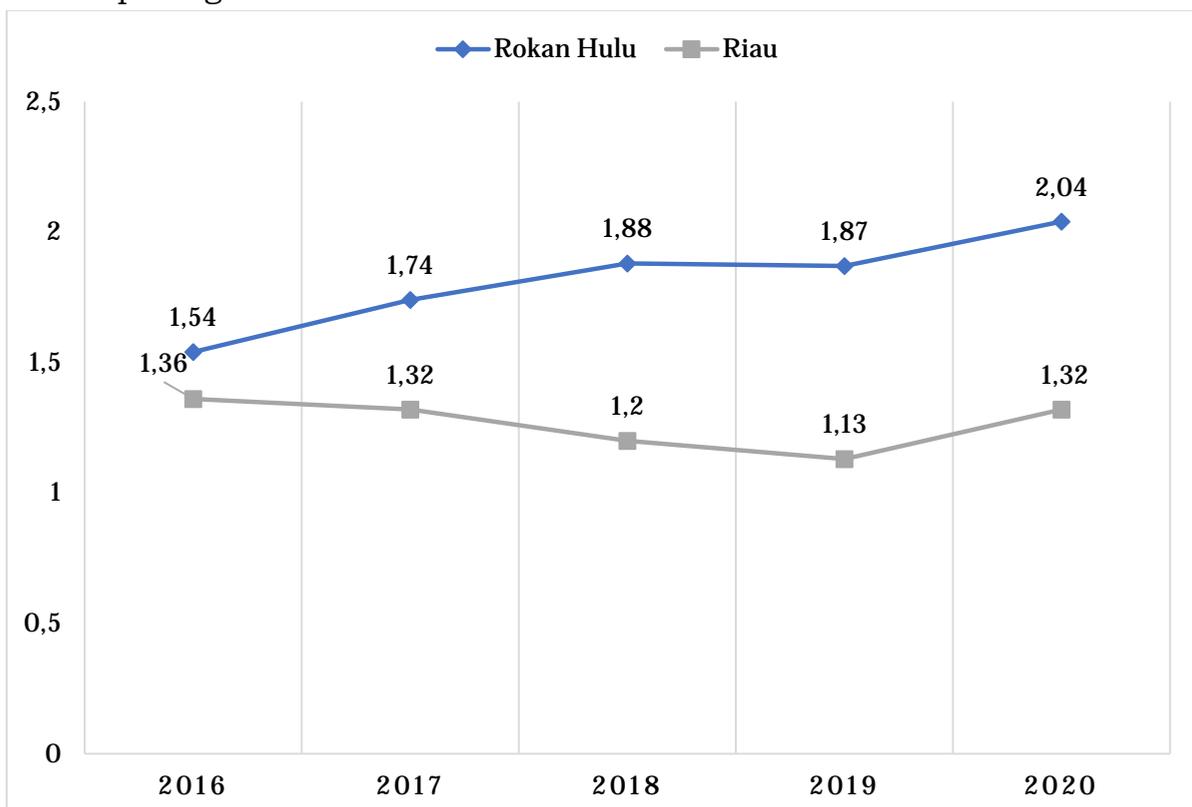


Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 15

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau
Tahun 2016-2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Untuk Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Riau pada periode 2016-2020 dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 2,04 lebih tinggi dibanding Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Riau pada tahun yang sama berada pada angka 1,32. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

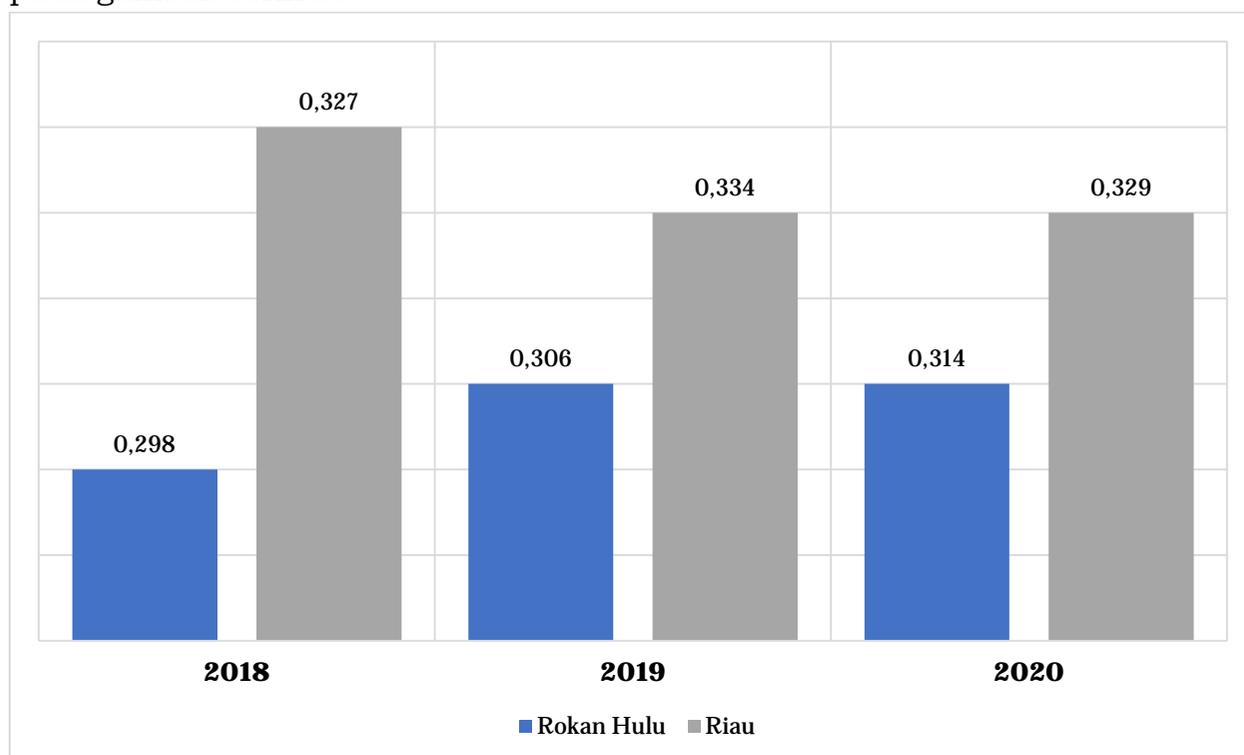


Gambar II- 16
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau
Tahun 2016-2020

2.2.1.5 Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30 -0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah. Perkembangan indeks gini Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 17
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau
Tahun 2018-2020

Gini Ratio Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pada tahun 2018 gini ratio Kabupaten Rokan Hulu sebesar 0,298 dan pada tahun 2019 gini ratio Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi 0,306. Tahun 2020 gini ratio Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi 0,314. Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kategori sedang, akan tetapi hal tersebut harus menjadi

perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan tersebut dapat ditekan dan diturunkan ke tingkat ketimpangan rendah.

2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Table berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2017-2019.

Tabel II- 8

Ketimpangan Williamson Kabupaten Rokan Hulu dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2017 – 2019

No.	Kabupaten	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	0.053	0.060	0.071
2	Indragiri Hulu	0.027	0.018	0.011
3	Indragiri Hilir	0.271	0.217	0.169
4	Pelalawan	0.004	0.001	0.000
5	Siak	1.665	1.537	1.418
6	Kampar	0.248	0.258	0.234
7	Rokan Hulu	1.661	1.678	1.695
8	Bengkalis	5.967	5.236	4.478
9	Rokan Hilir	0.010	0.030	0.054
10	Kepulauan Meranti	0.015	0.006	0.003
11	Pekanbaru	0.307	0.222	0.147
12	Dumai	0.012	0.030	0.055

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, ditemukan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki ketimpangan pembangunan yang sangat senjang terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau selama periode 2017-2019. Potensi sumberdaya perkebunan di Kabupaten Rokan hulu menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

Nilai PDRB atas dasar harga konstant (2010) Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu pada sektor pertanian 52,45 persen dan Industri Pengolahan 27,85 persen pada tahun 2019 di diduga menjadi penyebab tingginya nilai

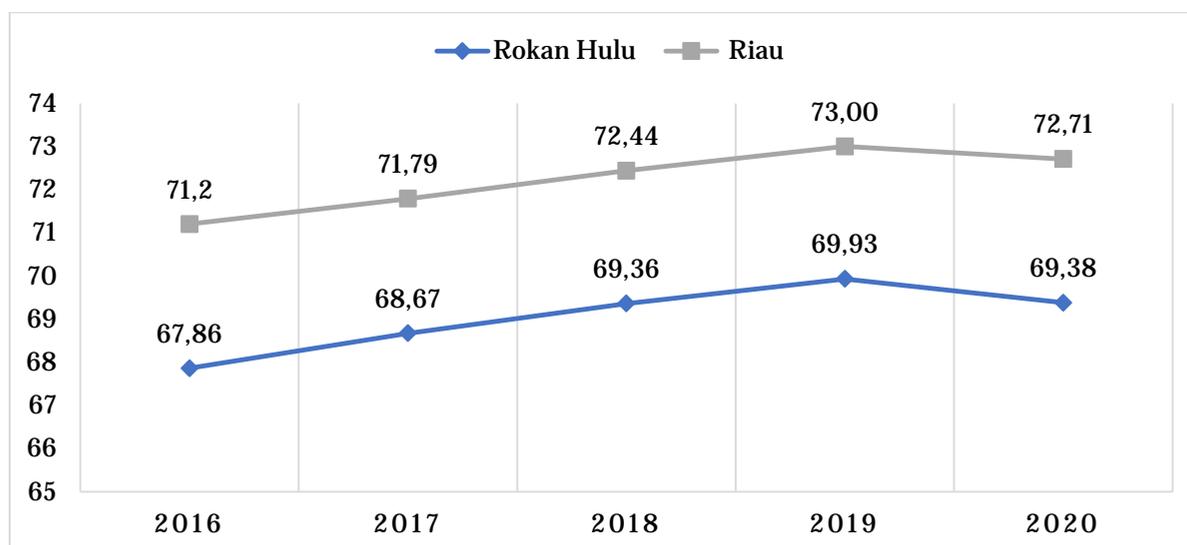


ketimpangan wilayah pada Kabupaten Rokan Hulu. Nilai ini merupakan yang terbesar kedua dari seluruh kabupaten/kota lainnya dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 berjumlah 692.120 jiwa.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 18
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

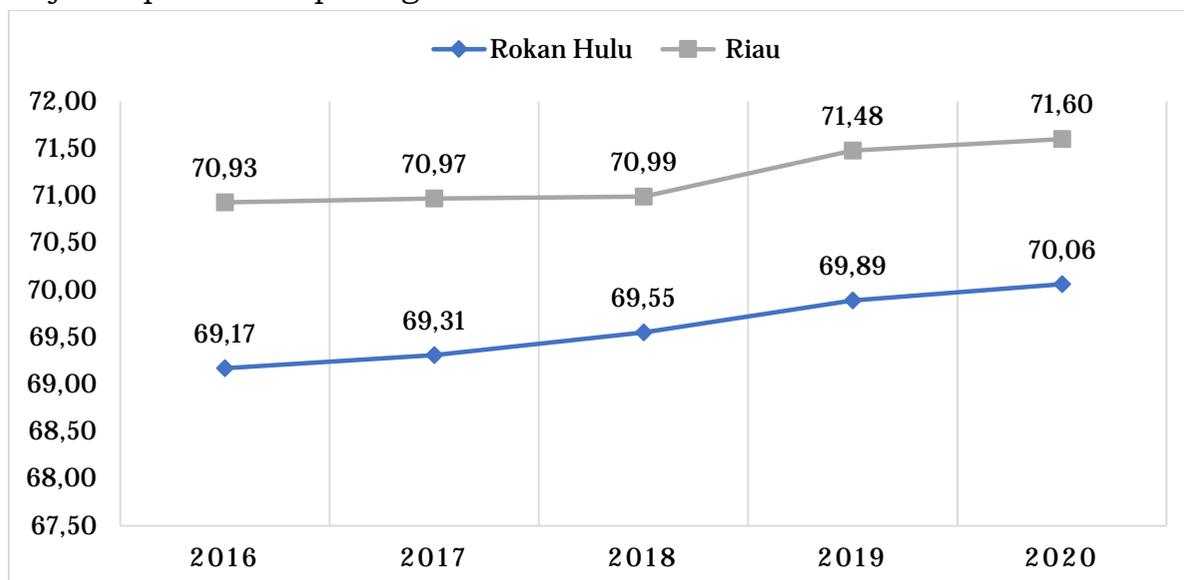
Angka IPM Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 67,86, kemudian meningkat pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu sebesar 68,67. Pada tahun 2018 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu kembali mengalami peningkatan menjadi 69,36 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 69,93. Sedangkan pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 69,38. Secara umum selama periode 2016-2020 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Riau, ini artinya Kabupaten Rokan Hulu masih sedikit tertinggal dalam mencapai indeks pembangunan dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Riau.

IPM Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2020 masih terkategori sedang yang bermakna bahwa tingkat keberhasilan pembangunan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik. Dengan demikian secara umum tingkat keberhasilan pembangunan kualitas sumber



daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau yang sudah masuk kategori Tinggi.

Salah satu komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Statistik Riau, 2021

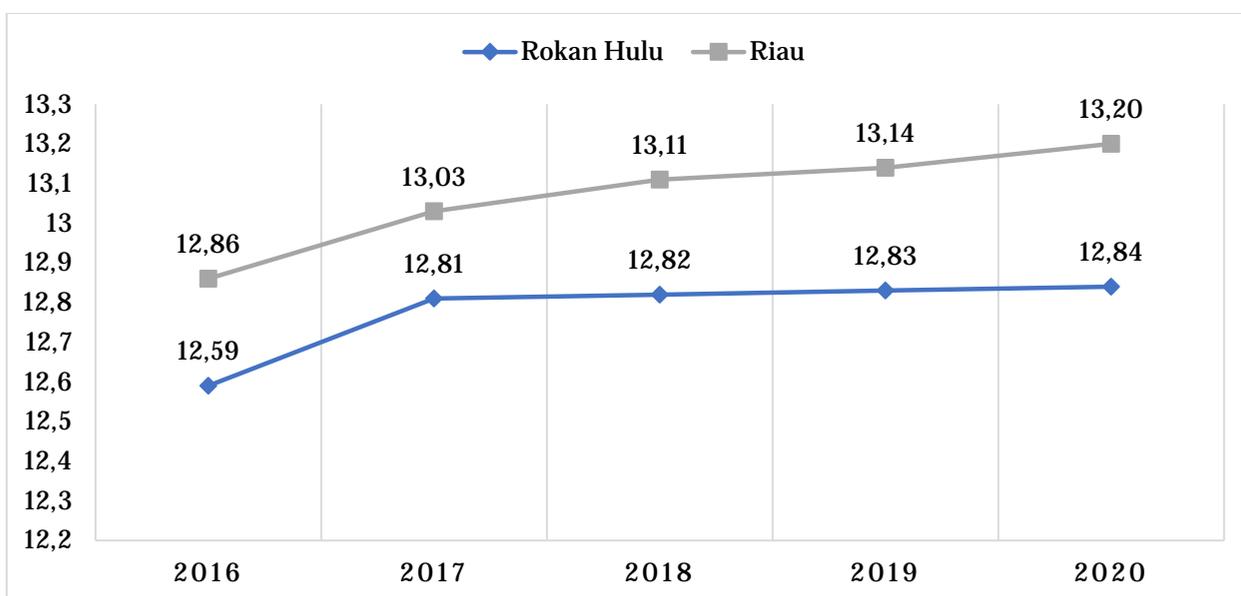
Gambar II- 19
Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016 – 2020

Secara umum, angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu berada di posisi kesembilan di antara kabupaten/kota lainnya. Dalam hal ini Kabupaten Rokan Hulu hanya lebih baik dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi. Meski lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Riau, angka harapan hidup kabupaten Rokan Hulu terus menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun selama periode 2017-2020. Hingga tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu telah berada pada usia 70,06 tahun sedangkan Provinsi Riau berada pada angka 71,60 tahun

Salah satu komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah harapan Lama Sekolah. Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan



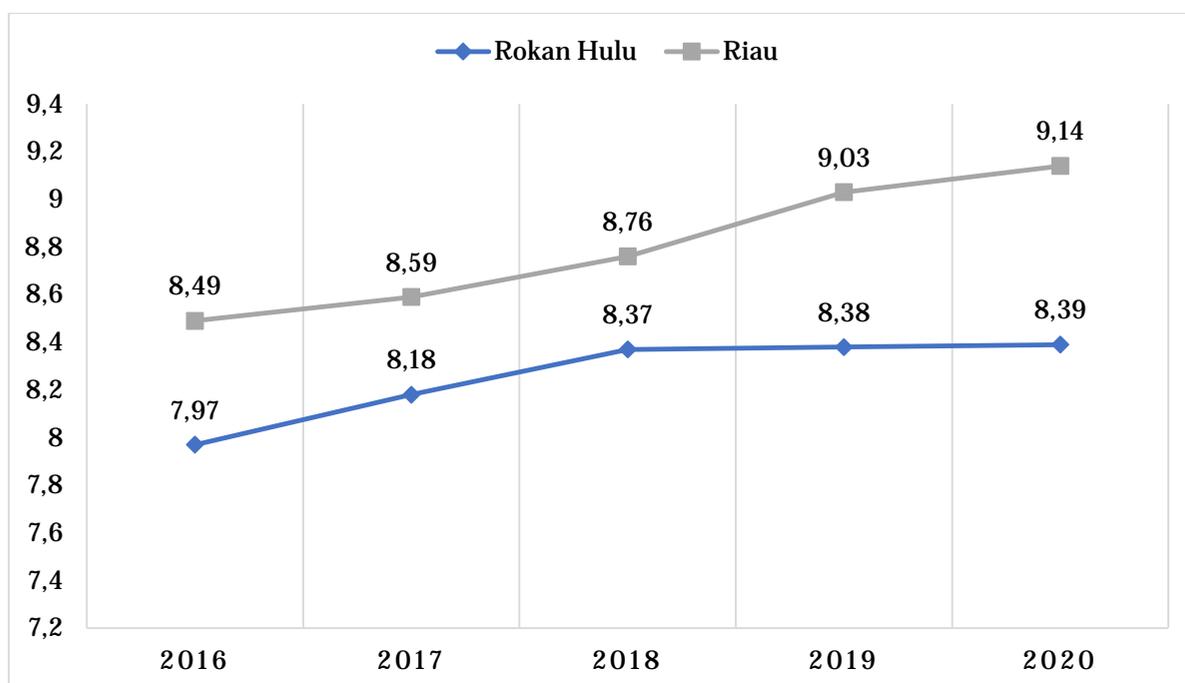
untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada penduduk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu berada di posisi keenam di antara kabupaten/kota lainnya. Dalam hal ini Kabupaten Rokan Hulu lebih baik dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Statistik Riau, 2021

Gambar II- 20
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016– 2020

Komposisi selanjutnya dari Indeks Pembangunan Manusia adalah Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) yang merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2020, masih diperlukan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 6,61 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah bagi Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka 2021

Gambar II- 21
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2017 – 2020

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Rokan Hulu dalam tiga tahun terakhir terlihat tidak mengalami perkembangan berarti. Dengan angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,39 pada tahun 2020 membuat Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu daerah dengan angka Rata-rata lama sekolah yang berada dibawah rata-rata provinsi, yaitu menempati urutan kedelapan dari 12 kabupaten/kota yang ada. Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Rokan Hulu masih belum baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau.

2.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

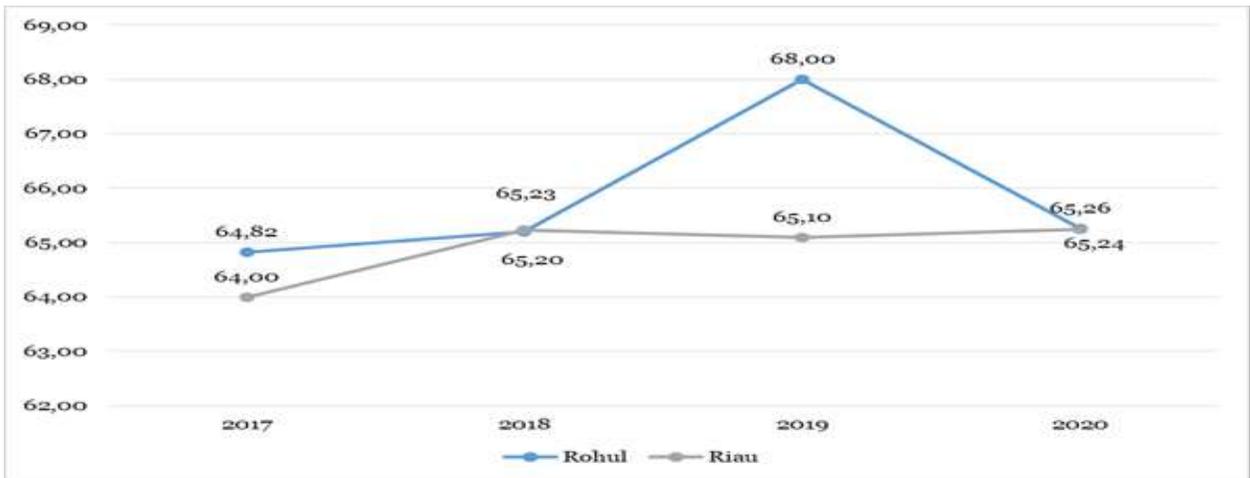
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Berdasarkan tabel, TPAK Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, TPAK Kabupaten Rokan Hulupada tahun 2017 sebesar 64,82 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Rokan Hulu terdapat 64 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 65,20 persen, dan selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 68,00 persen. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 65,26 persen. Penurunan pada tahun 2020 ini disinyalir sebagai akibat banyaknya tenaga kerja yang kehilangan lapangan pekerjaan diakibatkan pandemi Covid-19.

TPAK Kabupaten Rokan Hulu secara umum pada tahun 2017-2020 lebih tinggi dibanding TPAK Provinsi Riau. Ini berarti dalam periode tersebut



tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hulu lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Rokan Hulu sebesar 65,26 persen, sedikit lebih tinggi dibanding TPAK Provinsi Riau sebesar 65,24 persen. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

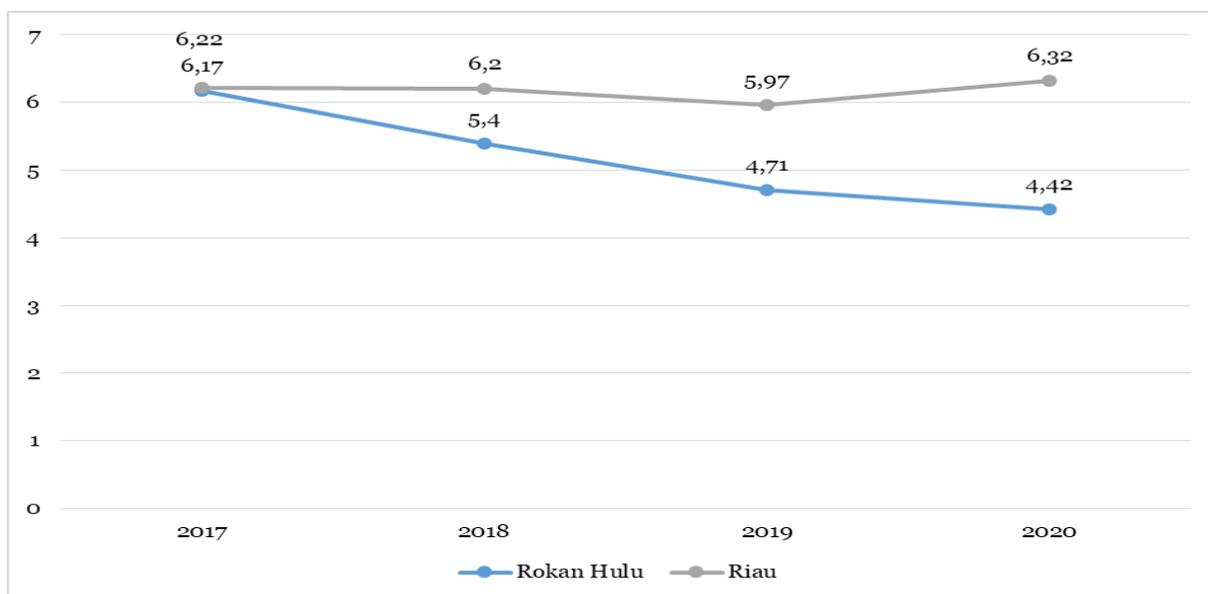
Gambar II- 22

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2017-2020

2.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 6,17 persen, dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 5,40 persen, kemudian selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 4,71 persen. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 4,42 persen. Secara umum pada periode 2017-2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hulu jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Rokan Hulu jauh lebih baik dibanding Provinsi Riau. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2021

Gambar II- 23

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Rokan Hulu setidaknya memiliki 381 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dari 11 kecamatan tersebut, Kecamatan Rambah memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya paling banyak berjumlah 233. Ini artinya sebanyak 61% Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya berada di kecamatan Rambah.

Dari 381 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya tersebut, baru sebanyak 20 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2020. Ini artinya baru sebanyak 5,25% Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang berhasil dilestarikan pada tahun 2020.

Tabel II- 9

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Persentase
1	Bangun Purba	-	-	-
2	Bonai Darussalam	-	-	-
3	Kabun	-	1	0,00%
4	Kepenuhan	2	15	13,33%
5	Kepenuhan Hulu	-	-	-
6	Kunto Darussalam	3	40	7,50%
7	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-
8	Pendalian IV Koto	-	-	-
9	Rambah	7	233	3,00%
10	Rambah Hilir	1	2	50,00%
11	Rambah Samo	1	3	33,33%
12	Rokan IV Koto	3	63	4,76%
13	Tambusai	2	10	20,00%
14	Tambusai Utara	1	8	12,50%



No	Kabupaten/Kota	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Persentase
15	Tandun	-	5	0,00%
16	Ujung Batu	-	1	0,00%
	Rokan Hulu	20	381	5,25%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada aspek pelayanan umum menjelaskan bagaimana perkembangan dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada layanan urusan wajib dan urusan pilihan Kabupaten Rokan Hulu.

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah Daerah terus melakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bertujuan agar setiap penduduk memperoleh kesempatan dan peluang yang sama mendapatkan manfaat dari pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur dan mengevaluasi pembangunan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan, diantaranya yaitu angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah di semua tingkat dan jenjang pendidikan.

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016-2020 sudah sangat baik untuk kategori PAUD, SD/MI dan SMP/Mts. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 untuk tingkat PAUD sebesar 112,25 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 114,54 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 95,40 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 untuk tingkat PAUD sebesar 117,95 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 113,80 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 102,20 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 untuk tingkat PAUD sebesar 120,15 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 109,33 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 101,96 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 untuk tingkat PAUD sebesar 120,15 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 112,80 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 102,70 persen. Sedangkan pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat PAUD sebesar 121,17 persen, untuk

tingkat SD/MI sebesar 105,86 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 91,80 persen. Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) yang telah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa untuk tingkat Pendidikan PAUD telah melihat kemajuan yang konstan dari tahun 2016-2020. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan SD/MI terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan oleh tahun 2020 adanya Pandemi Covid19, demikian juga untuk tingkat Pendidikan SMPT/Mts tahun 2020 terjadi juga penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) akibat dampak dari kondisi Pandemi yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016-2020 sudah sangat baik untuk kategori PAUD, SD/MI dan SMP/Mts. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 untuk tingkat PAUD sebesar 31,67 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 99,87 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 97,5 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 untuk tingkat PAUD sebesar 32,54 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 99,88 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 97,81 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 untuk tingkat PAUD sebesar 33,48 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 94,52 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 96,97 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 untuk tingkat PAUD sebesar 32,19 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 95,53 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 96,58 persen Sedangkan pada tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rokan Hulu untuk tingkat PAUD sebesar 46,63 persen, untuk tingkat SD/MI sebesar 98,27 persen dan untuk tingkat SMP/Mts sebesar 83,03 persen. Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) tersebut diatas dari tahun ke tahun masih terjadi variasi peningkatan hal ini disebabkan oleh kondisi Pandemi Covid19 dan terbatasnya Anggaran Belanja Daerah.

Sementara itu indikator lain dalam urusan Pendidikan adalah angka kelulusan yang sudah mencapai 100% selama lima tahun terakhir baik untuk tingkat PAUD, SD/MI maupun untuk tingkat SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran di sekolah dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik dalam memberikan suasana belajar yang nyaman dan sesuai dengan target pembelajaran pada jenjang pendidikan terkait.

Pada sisi lain angka putus sekolah di Kabupaten Rokan Hulu juga menunjukkan persentase yang sangat kecil. Dimana Angka Siswa Putus sekolah selama lima tahun terakhir di bawah 1%. Artinya sangat sedikit siswa yang putus sekolah di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa pelayanan Pendidikan sudah baik dan nyaman bagi siswa. Lebih rinci Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 10
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Indikator	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	TK / Paud (%)	112,25	117,95	120,15	120,15	121,17



No	Indikator	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	SD/MI (%)	114,54	113,80	109,33	112,80	105,86
	SMP/MTS (%)	95,40	102,20	101,96	102,70	91,80
	Keaksaraan Fungsional (KF)	75	80	85	90	98
2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	TK / Paud (%)	31,67	32,54	33,48	32,19	46,63
	SD/MI (%)	99,87	99,88	94,52	95,53	98,27
	SMP/MTS (%)	97,5	97,81	96,97	96,58	83,03
3	Angka Melanjutkan Sekolah					
	TK / Paud (%)	100	100	100	100	100
	SD/MI (%)	100	100	100	100	100
	SMP/MTS (%)	100	100	100	100	100
	Keaksaraan Fungsional (KF)	550	0	0	1354	1332
4	Angka Siswa Putus sekolah					
	TK / Paud (%)	0,78	0,70	0,75	0,93	0,90
	SD/MI (%)	0,21	0,08	0,71	0,82	0,80
	SMP/MTS (%)	0,30	0,03	0,18	0,38	0,40
5	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	TK / Paud (%)	209,05	331,15	373,5	350,1	304,3
	SD/MI (%)	356,6	421,77	4,232	4,433	4,487
	SMP/MTS (%)	141,69	203,69	294,3	2,975	2,980
	Keaksaraan Fungsional (KF)	21	17	17	17	15
6	Rasio Guru / Murid					
	TK / Paud (%)	56,15	59,25	60,15	53,91	67,15
	SD/MI (%)	62,91	59,17	55,49	64,76	65,35
	SMP/MTS (%)	51,56	94,23	72,65	78,63	80,45
	Keaksaraan Fungsional (KF)	205	272	272	272	240
7	Rasio Guru/ Murid perkelas rata-rata					
	TK / Paud (%)	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
	SD/MI (%)	1:26	1:30	1:30	0:10	0:09
	SMP/MTS (%)	1:36	1:26	1:26	1:16	0:10
8	Rasio guru per sekolah					
	TK / Paud (%)	2	3	3	4	4
	SD/MI (%)	1:24	1:12	1:12	1:08	1:05
	SMP/MTS (%)	1:19	1:15	1:15	1:13	1:08
9	Angka Kelulusan (AL)					
	TK / Paud (%)	100	100	100	100	100
	SD/MI (%)	100	100	100	100	100
	SMP/MTS (%)	100	100	100	100	100
	Keaksaraan Fungsional (KF)	550	605	497	620	531
10	Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi					
	TK / Paud (%)	159	250	380	386	386
	SD/ MI (%)	150	200	242	358	358
	SMP / MTS(%)	95	102	118	118	118
	Keaksaraan Fungsional (KF)	0	0	0	0	0
11	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) (%)	373,076	386,458	386,458	399,84	399,89
12	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ DIV (Orang)					
	TK / Paud	132	136	144	146	175
	SD / MI	1225	1312	1342	1492	1492
	SMP / MTS	156	213	383	479	479
	Keaksaraan Fungsional (KF)	165	247	261	261	232
13	Jumlah Guru yang Telah Sertifikasi (Orang)					
	TK / Paud	118	132	145	150	158
	SD / MI	1225	1312	1342	1492	1507
	SMP / MTS	156	213	383	479	479
	Keaksaraan Fungsional (KF)	0	0	0	0	0
14	Persentase Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi dan Jenjang Pendidikan					



No	Indikator	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	TK / Paud (%)	80,05	80,15	80,15	82,01	90,5
	SD/ MI (%)	83,70	86,7	87,8	95,9	97
	SMP / MTS(%)	84,20	84,8	84,1	84,3	84,5
	Keaksaraan Fungsional (KF)	8	8	8	8	8
15	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Rusak Ringan (%RKrr)					
	TK / Paud (%)	19,18	20,00	19,25	19,25	18,15
	SD/ MI (%)	15,87	17,5	19	21,5	21,2
	SMP / MTS(%)	13,50	16,6	21,5	13,3	12,7
16	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Baik					
	TK / Paud (%)	80,5	82	85,5	90,5	90,5
	SD/ MI (%)	83,7	86,7	87,8	90,5	90,5
	SMP / MTS(%)	84,2	84,8	84,1	84,3	84,3
	Keaksaraan Fungsional (KF)					
17	Angka Melek Huruf (%)	100	100	100	100	100
18	Angka Partisipasi Sekolah					
	TK / Paud (%)	115,15	120,75	120,50	125,06	130,5
	SD/ MI (%)	100	100,20	117,89	102,09	100,09
	SMP / MTS(%)	65	67,20	62,41	67,62	67,83
	Keaksaraan Fungsional (KF)	21	17	17	17	15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Rokan Hulu dan Dinas Pendidikan & Olahraga Kab Rokan Hulu, 2021

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari empat indikator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar SD/MI, Pendidikan Dasar SMP/MTS dan pemenuhan pendidikan kesetaraan. Pencapaian SPM bidang pendidikan dasar belum ada indikator yang mencapai target nasional (100%). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 11

Capaian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)
1	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	70,83	15,02
2	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Dasar	95,63	94,93
3	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama	84,38	62,30
4	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan	0,03	10,34
Total		62,72	45,65

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2020

2.3.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja penurunan dan pencegahan stunting Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, Kabupaten Rokan Hulu menjadi daerah tertinggi dengan prevalensi stunting mencapai 58,9 persen dan menurun menjadi 27,3 persen pada tahun 2018. Sedangkan prevalensi stunting Rokan Hulu berdasarkan data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada tahun 2019 adalah 24,37 persen. Untuk tahun 2020 target prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu yang akan dicapai adalah 16,9 persen.

Hasil Penilaian Kinerja Konvergensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam 8 Aksi konvergensi stunting yang dinilai oleh Tim Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2019 untuk Aksi Tahun 2018 dengan nilai C;
- b. Tahun 2020 untuk Aksi Tahun 2019, dengan nilai 70 dari dua Kabupaten yang dinilai;
- c. Tahun 2021 untuk Aksi Tahun 2020, dengan nilai 76. Peringkat ketiga dari lima Kabupaten yang dinilai.

Selain permasalahan stunting, indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu adalah persentase balita gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 sebesar 0,03 kemudian sedikit meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,04. Persentase gizi buruk kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,02, pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,01. Tahun 2020 persentase balita gizi buruk naik menjadi 0,04.

Tabel II- 12

Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	20	30	15	12	31
2	Jumlah Balita	75.513	77.582	95.662	97.762	84.765
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,03	0,04	0,02	0,01	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sedangkan untuk perawatan terhadap balita gizi buruk sudah dilakukan dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari angka cakupan balita gizi buruk yang mendapat Perawatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 100% pada tahun 2016-2020. Lebih lanjut untuk cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II- 13
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	20	30	15	12	31
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	20	30	15	12	31
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Prevalensi gizi kurang di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 adalah sebesar 4,07. Artinya, sebanyak 4,07% atau 2.022 balita mengalami gizi kurang pada tahun 2020. Sementara itu apabila dilihat dari prevalensi gizi kurang per kecamatan dapat diketahui bahwa kecamatan Rambah Samo dan Bangun Purba merupakan dua kecamatan dengan prevalensi gizi kurang paling tinggi di Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah Samo memiliki prevalensi gizi kurang sebesar 10,9 sementara Kecamatan Bangun Purba memiliki prevalensi gizi kurang sebesar 7,8. Sedangkan kecamatan dengan prevalensi gizi kurang paling sedikit adalah Kecamatan Kepenuhan dengan angka prevalensi gizi kurang sebesar 1. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 14
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita Gizi Kurang	Jumlah Balita	Pravalensi Balita Gizi Kurang
1	Rambah	Rambah	283	3,994	7.1
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	100	2,617	3.8
		Rambah Hilir II	121	1,342	9
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	303	2,442	12.4
		Rambah Samo II	93	1,206	7.7
4	Kepenuhan	Kepenuhan	25	2,447	1
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	201	1,655	12.1
6	Tambusai	Tambusai	83	5,777	1.4
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	67	4,972	1.3
		Tambusai Utara II	32	1,955	1.6
8	Rokan IV Koto	Rokan Iv Koto I	8	1,289	0.6
		Rokan IV Koto II	43	295	14.6
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	70	1,076	6.5
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	39	774	5
11	Ujungbatu	Ujungbatu	54	4,531	1.2
12	Tandun	Tandun I	33	1,534	2.2
		Tandun II	25	1,424	1.8
13	Bangun Purba	Bangun Purba	150	1,923	7.8
14	Kabun	Kabun	38	2,103	1.8
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	36	1,996	1.8
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	110	2,559	4.3
		Kunto Darussalam II	108	1,823	5.9
Jumlah			2,022	49,734	4.07



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator lain yang menjadi tolak ukur urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Bayi. Angka kematian bayi di kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 angka kematian bayi mengalami kenaikan menjadi 2,44 per 1000 kelahiran hidup. Penanganan Angka Kematian ini sangat berkaitan dengan peningkatan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah tenaga kesehatan berkompetensi, peningkatan pengetahuan ibu serta pengurangan pasangan nikah muda. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 15
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kab. Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	39	16	18	19	37
2	Jumlah Kelahiran Hidup	13.666	10.752	15.134	14.693	15.177
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2,8	1,4	1,18	1,29	2,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sementara itu apabila dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup per kecamatan dapat diketahui bahwa Kecamatan Pendalian IV Koto mengalami angka kematian bayi yang cukup tinggi pada tahun 2020. Pada Kecamatan Pendalian IV Koto terjadi kematian bayi sebanyak 2 orang per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran di Kecamatan Pendalian IV Koto jauh lebih tinggi dibanding kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 16
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
1	Rambah	Rambah	8	1.002	8.0
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	4	657	6.1
		Rambah Hilir II	1	384	2.6
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	0	497	0.0
		Rambah Samo II	2	231	8.7
4	Kepenuhan	Kepenuhan	2	713	2.8
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	2	544	3.7
6	Tambusai	Tambusai	6	1574	3.8
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	2	1231	1.6
		Tambusai Utara II	1	823	1.2
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	0	460	0.0
		Rokan IV Koto II	0	179	0.0
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	2	181	11.0
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	0	343	0.0
11	Ujungbatu	Ujungbatu	0	2768	0.0



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
12	Tandun	Tandun I	0	496	0.0
		Tandun II	1	226	4.4
13	Bangun Purba	Bangun Purba	2	326	6.1
14	Kabun	Kabun	2	538	3.7
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	2	531	3.8
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	0	1.099	0.0
		Kunto Darussalam II	0	374	0.0
Jumlah			37	15.177	2.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator lain yang menjadi tolak ukur urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Balita. Angka kematian Balita di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 angka kematian Balita sebesar 2,4 per 1000 kelahiran hidup meningkat dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2019 hanya sebesar 1,29 kematian per 1000 kelahiran hidup. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 17

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	39	16	18	19	37
2	Jumlah Kelahiran Hidup	13.666	10.752	15.134	14.693	15.177
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2,8	1,4	1,18	1.29	2.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sementara itu apabila dilihat dari Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup per kecamatan dapat diketahui bahwa Kecamatan Pendalian IV Koto mengalami angka kematian Balita yang cukup tinggi pada tahun 2020. Pada Kecamatan Pendalian IV Koto terjadi kematian Balita sebanyak 2 orang per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Jumlah kematian Balita per 1000 kelahiran di Kecamatan Pendalian IV Koto jauh lebih tinggi dibanding kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 18

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
1	Rambah	Rambah	8	1002	8.0
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	4	657	6.1
		Rambah Hilir II	1	384	2.6
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	0	497	0.0
		Rambah Samo II	2	231	8.7
4	Kepenuhan	Kepenuhan	2	713	2.8
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	2	544	3.7
6	Tambusai	Tambusai	5	1574	3.2
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	2	1231	1.6



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
		Tambusai Utara II	1	823	1.2
8	Rokan Iv Koto	Rokan IV Koto I	0	460	0.0
		Rokan IV Koto II	0	179	0.0
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	2	181	11.0
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	0	343	0.0
11	Ujungbatu	Ujungbatu	0	2768	0.0
12	Tandun	Tandun I	0	496	0.0
		Tandun II	1	226	4.4
13	Bangun Purba	Bangun Purba	2	326	6.1
14	Kabun	Kabun	2	538	3.7
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	2	531	3.8
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	0	1099	0.0
		Kunto Darussalam II	0	374	0.0
Jumlah			36	15177	2.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator lain yang menjadi tolak ukur urusan wajib kesehatan adalah Angka Kematian Neonatal. Angka kematian Neonatal di kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 angka kematian Neonatal sebesar 2,37 per 1000 kelahiran hidup, naik dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 1,29 kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup. Lebih rinci dapat dilihat pada berikut.

Tabel II-19

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab. Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	39	16	18	19	36
2	Jumlah Kelahiran Hidup	13.666	10.752	15.134	14.693	15.177
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2,8	1,4	1,18	1,29	2,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator selanjutnya dalam urusan wajib kesehatan adalah jumlah kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas sebanyak 8 ibu. Kemudian angka tersebut naik menjadi 11 ibu pada tahun 2017, lalu pada tahun 2018 dan 2019 turun menjadi 7 ibu. Terakhir pada tahun 2020 jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas sebanyak 7 ibu. Sementara apabila dilihat dari jumlah Kasus Kematian Ibu per Kecamatan pada tahun 2020 paling banyak terjadi di Kecamatan Tambusai Utara yaitu jumlah kematian sebanyak 2 ibu. Pada Kecamatan Tambusai Utara terjadi kematian ibu sebanyak 162,5 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran di Kecamatan Tambusai Utara jauh lebih tinggi dibanding kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Rokan



Hulu. Ini artinya perlu perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan terutama pelayanan persalinan yang aman di Kecamatan Tambusai Utara. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II-20
Jumlah Kasus Kematian Ibu per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Puskesmas	2016		2017		2018		2019		2020	
			Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)
1	Rambah	Rambah	1208	3	1483	1	1372	2	1321	1	1.002	1
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	492	0	478	0	599	0	861	0	657	0
		Rambah Hilir II	403	0	457	1	447	1	369	0	384	0
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	432	0	436	0	405	1	1617	0	497	0
		Rambah Samo II	257	0	255	0	233	0	1567	0	231	0
4	Kepenuhan	Kepenuhan	565	1	611	0	730	0	492	0	713	1
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	456	0	467	1	535	0	543	1	544	0
6	Tambusai	Tambusai	1494	1	1541	3	1736	3	729	3	1.574	2
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1476	0	1479	0	1439	0	166	0	1.231	2
		Tambusai Utara II	727	1	747	0	776	2	1252	2	823	0
8	Rokan Iv Koto	Rokan IV Koto I	513	0	399	1	480	0	585	0	460	0
		Rokan IV Koto II	198	0	201	1	147	0	244	0	179	0
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	212	0	218	0	220	0	287	0	181	0
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	310	0	331	0	311	0	612	0	343	0
11	Ujungbatu	Ujungbatu	1446	0	1585	0	1731	0	675	0	2.768	1
12	Tandun	Tandun I	506	0	559	0	569	0	1545	0	496	0
		Tandun II	330	0	321	0	249	0	417	0	226	0
13	Bangun Purba	Bangun Purba	443	0	460	0	386	0	349	0	326	0
14	Kabun	Kabun	566	1	596	2	688	0	225	0	538	0

No	Kecamatan	Puskesmas	2016		2017		2018		2019		2020	
			Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)	Jumlah kelahiran hidup (Org)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (Orang)
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	541	0	587	0	630	0	416	0	531	0
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1091	1	1375	1	1451	0	421	0	1.099	0
		Kunto Darussalam II									1099	0
Jumlah			13.666	8	14.586	11	15.134	9	14.693	7	15902	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021



Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah rasio posyandu per satuan balita. Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 sebesar 15,86. Kemudian menurun menjadi sebesar 9,39 per satuan balita pada tahun 2017. Rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 8,14 posyandu per satuan balita. Pada tahun 2019 peningkatan jumlah balita yang tidak diikuti dengan kenaikan posyandu membuat pelayanan posyandu menurun menjadi 4,83 posyandu per satuan balita. Terakhir pada tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita mengalami kenaikan menjadi 10,63. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 21

Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu.	597	578	608	472	445
2	Jumlah balita	37.652	61.531	74.692	97.762	41.871
3	Rasio posyandu per satuan balita.	15,86	9,39	8,14	4,83	10,63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Jika dilihat untuk Rasio posyandu per satuan balita Kecamatan pada tahun 2020, dapat diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita pada Kecamatan Rambah Samo adalah yang tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebesar 21,59. Atau dapat diartikan bahwa Kecamatan Rambah Samo Puskesmas Rambah Samo II memiliki layanan posyandu yang lebih banyak untuk melayani balita. Sedangkan Kecamatan Kepenuhan memiliki rasio posyandu yang lebih sedikit per satuan balita, yaitu sebesar 3,03. Dengan kata lain, pada Kecamatan Kepenuhan, sedikit posyandu melayani lebih banyak balita. Untuk lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II- 22

Rasio posyandu per satuan balita Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu.	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita.
1	Rambah	Rambah	44	3,475	12.66
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	37	1,705	21.70
		Rambah Hilir II	16	1,279	12.51
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	29	1,508	19.23
		Rambah Samo II	20	762	26.25
4	Kepenuhan	Kepenuhan	7	2,313	3.03
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	12	2,140	5.61
6	Tambusai	Tambusai	36	5,340	6.74
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	33	2,217	14.88
		Tambusai Utara II	26	3,273	7.94
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	28	1,503	18.63
		Rokan IV Koto II	3	935	3.21
9	Pendalihan Iv Koto	Pendalihan IV Koto	5	1,536	3.26
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	16	953	16.79
11	Ujungbatu	Ujungbatu	30	3,464	8.66
12	Tandun	Tandun I	14	1,291	10.84
		Tandun II	14	795	17.61
13	Bangun Purba	Bangun Purba	15	965	15.54



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah posyandu.	Jumlah balita	Rasio posyandu per satuan balita.
14	Kabun	Kabun	27	1,530	17.65
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	10	2,846	3.51
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	14	802	17.46
		Kunto Darussalam II	9	1,239	7.26
Jumlah			445	41,871	10.63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu terlihat belum mengalami perbaikan selama periode 2016-2020. Rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2016 sebanyak 0,11 mengalami penurunan menjadi 0,10 pada tahun 2017 kemudian naik kembali menjadi 0,11 pada tahun 2018. Rasio ini kembali mengalami penurunan menjadi 0,04 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan rasio ini ditengarai karena jumlah dokter yang berkurang cukup banyak pada tahun 2019 sementara pada sisi lain jumlah penduduk Rokan Hulu terus mengalami pertumbuhan. Sementara pada tahun 2020 jumlah dokter tetap dan penduduk Rokan Hulu mengalami pertumbuhan. Lebih rinci rasio dokter per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 23

Rasio dokter per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter.	68	61	74	26	26
2	Jumlah Penduduk.	616.466	641.208	666.410	692.120	718,320
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0,11	0,10	0,11	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Secara umum dapat dilihat bahwa sebaran dokter menurut kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu belum merata. Kecamatan Pendalian IV Koto terdapat 4 dokter, sedangkan di Kecamatan lain hanya terdapat 1 atau 2 dokter dan pada Kecamatan Bonai Darussalam belum terdapat dokter. Lebih rinci Rasio dokter per satuan penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 24

Rasio dokter per satuan penduduk Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah dokter	Jumlah Penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk
1	Rambah	Rambah	1	60101	0.002
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	2	46663	0.004
		Rambah Hilir II	1		0.000
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	1	39961	0.003
		Rambah Samo II	1		0.000
4	Kepenuhan	Kepenuhan	1	33437	0.003
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	2	22083	0.009
6	Tambusai	Tambusai	1	76927	0.001
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1	117958	0.001
		Tambusai Utara II	0		0.000
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	1	26850	0.004
		Rokan IV Koto II	2		0.000
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	4	13328	0.030
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	1	19470	0.005



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah dokter	Jumlah Penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk
11	Ujungbatu	Ujungbatu	1	78424	0.001
12	Tandun	Tandun I	1	35132	0.003
		Tandun II	0		0.000
13	Bangun Purba	Bangun Purba	2	20187	0.010
14	Kabun	Kabun	2	31248	0.006
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	28450	0.000
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1	68102	0.001
		Kunto Darussalam II	0		0.000
Jumlah			26	718321	0.004

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tenaga medis dan tenaga kesehatan seringkali diartikan memiliki makna yang sama. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab III Pasal 11 butir 2, Tenaga medis adalah bagian dari Tenaga Kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2020 rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,004 menurun cukup besar dibanding tahun 2019 dengan rasio sebesar 0,04. Ini berarti bahwa pada tahun 2020 hanya terdapat sekitar 0,004 tenaga medis per seribu penduduk. Atau dengan kata lain ada sekitar satu tenaga medis yang melayani seribu penduduk pada tahun 2020. Lebih rinci Rasio tenaga medis per satuan penduduk Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 25

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokter.	68	61	74	26	26
2	Jumlah Penduduk.	616.466	641.208	666.410	692.120	718.321
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0,11	0,10	0,11	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Jika dilihat dari rasio tenaga medis per kecamatan, dapat diketahui bahwa kecamatan Pendalian IV Koto memiliki jumlah dokter yang lebih banyak dibanding kecamatan lain di Rokan Hulu. Hal ini cukup menunjukkan ketimpangan dimana pada kecamatan lain seperti Bonai Darussalam bahkan tidak memiliki dokter di kecamatan. Untuk lebih rinci Rasio tenaga medis per satuan penduduk Tahun 2020 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 26

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah dokter	Jumlah Penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk
1	Rambah	Rambah	1	60101	0.002
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	2	46663	0.004
		Rambah Hilir II	1		0.000
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	1	39961	0.003
		Rambah Samo II	1		0.000
4	Kepenuhan	Kepenuhan	1	33437	0.003
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	2	22083	0.009



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah dokter	Jumlah Penduduk	Rasio dokter per satuan penduduk
6	Tambusai	Tambusai	1	76927	0.001
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1	117958	0.001
		Tambusai Utara II	0		0.000
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	1	26850	0.004
		Rokan IV Koto II	2		0.000
9	Pendalian IV Koto	Pendalian Iv Koto	4	13328	0.030
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	1	19470	0.005
11	Ujungbatu	Ujungbatu	1	78424	0.001
12	Tandun	Tandun I	1	35132	0.003
		Tandun II	0		0.000
13	Bangun Purba	Bangun Purba	2	20187	0.010
14	Kabun	Kabun	2	31248	0.006
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	28450	0.000
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1	68102	0.001
		Kunto Darussalam II	0		0.000
Jumlah			26	718321	0.004

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2016-2018 terakhir terlihat belum mengalami perkembangan berarti. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan masih dalam kisaran 1% dari total komplikasi kebidanan yang terjadi pada tahun 2016-2018. Rendahnya penanganan komplikasi kebidanan ini selain disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten dalam menangani kasus juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran pasien untuk mendapatkan penanganan dan masalah biaya. Namun, pada tahun 2019 jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 83,7%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan dalam menangani komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2020 penanganan komplikasi kebidanan sudah sangat baik, yaitu mencapai 234,95% melebihi komplikasi kebidanan yang diperkirakan. Lebih jelas mengenai Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 27

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di Kabupaten Rokan Hulu	30	36	29	3.627	4.161
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu	3.541	3.541	3.34	3.035	1.771
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0,85	1,02	0,78	83,7	234,95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021



Untuk cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kecamatan pada tahun 2020 rata-rata sudah menunjukkan penanganan yang sangat baik. Hanya saja, masih terdapat beberapa kecamatan yang masih rendah cakupan penanganannya. Diantara kecamatan yang memiliki cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani masih rendah adalah Kecamatan Bonai Darussalam dengan cakupan penanganan baru sebanyak 0.00% dari total 41 komplikasi yang terjadi. Kemudian Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan cakupan penanganan pada tahun 2020 masih sebesar 0,00% dari total 140 komplikasi kebidanan yang terjadi. Ketimpangan yang terjadi pada beberapa kecamatan ini ditenggarai karena kurang meratanya tenaga kesehatan di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelas mengenai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kecamatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 28

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.
1	Rambah	Rambah	42	185	22,70
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	704	198	355,56
		Rambah Hilir II	18	3	600,00
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	2	4	50,00
		RAMBAH SAMO II	208	48	433,33
4	Kepenuhan	Kepenuhan	566	101	560,40
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	140	0,00
6	Tambusai	Tambusai	945	310	304,84
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	0	22	0,00
		Tambusai Utara II	19	13	146,15
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	7	111	6,31
		Rokan IV Koto II	0	44	0,00
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	68	19	357,89
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	30	1	3000,00
11	Ujungbatu	Ujungbatu	10	78	12,82
12	Tandun	Tandun I	343	108	317,59
		Tandun II	307	57	538,60
13	Bangun Purba	Bangun Purba	121	98	123,47
14	Kabun	Kabun	279	66	422,73
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	41	0,00
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	314	35	897,14
		Kunto Darussalam II	178	89	200,00
Jumlah			4161	1771	234,95

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator selanjutnya yang berada pada urusan wajib kesehatan adalah Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu tiga terakhir terlihat sudah baik. Dimana pada tahun



2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebanyak 79,35%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 86,52%. Namun, pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan menjadi 83,1% dan kembali menurun lagi pada tahun 2020 menjadi 78,24%. Meskipun sedikit mengalami penurunan namun angka ini sudah cukup tinggi, yang menandakan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah baik. Lebih jelas mengenai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 29

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	13.417	14.628	15.146	14.693	14.457
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	16.907	16.907	17.823	18.136	18.478
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	79,35	86,52	84,98	83,10	78,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Jika dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terlihat sudah cukup merata antarkecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hingga akhir 2020 hanya pada Kecamatan Pendalian IV Koto yang masih memiliki cakupan yang rendah, yaitu baru mencapai 20,39%. Dengan demikian untuk kecamatan ini masih diperlukan bantuan tenaga kesehatan dalam menolong persalinan di masyarakat. Lebih jelas mengenai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 30

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
1	Rambah	Rambah	1.036	1.558	66,51
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	653	745	87,64
		Rambah Hilir II	390	467	83,50
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	540	730	73,97
		Rambah Samo II	233	293	79,51
4	Kepenuhan	Kepenuhan	718	861	83,35
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	534	572	93,30
6	Tambusai	Tambusai	1.737	2.003	86,71
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	950	1.949	48,75
		Tambusai Utara II	782	1.079	72,49



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
8	Rokan Iv Koto	Rokan IV Koto I	450	506	88,94
		Rokan IVKoto II	176	195	90,14
9	Pendalian Iv Koto	Pendalian IV Koto	260	1.275	20,39
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	340	501	67,92
11	Ujungbatu	Ujungbatu	1.905	2.028	93,92
12	Tandun	Tandun I	486	600	80,96
		Tandun II	240	311	77,18
13	Bangun Purba	Bangun Purba	436	525	83,07
14	Kabun	Kabun	519	797	65,12
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	567	708	80,06
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1.116	333	335,26
		Kunto Darussalam II	389	441	88,21
Jumlah			14.457	18.478	78,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan salah satu target keberhasilan program imunisasi yang menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata di seluruh desa/kelurahan. Adapun target dari Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ini adalah sebesar 80% dari total keseluruhan desa/kelurahan. Maka dapat dilihat pada 35 bahwa pada tahun 2019 target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum tercapai, karena baru 72,4% dari total 145 desa/kelurahan yang terkategori UCI. Artinya, dibanding tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan kinerja dalam mencapai target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Rokan Hulu. Penurunan capaian Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) juga kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 56,60% dari total desa/kelurahan yang ada. Lebih jelas mengenai Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 31

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI.	93	120	123	105	82
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	145	145	145	145	145
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	64,13	82,75	84,82	72,4	56,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sedangkan untuk Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terlihat bahwa pada beberapa kecamatan masih belum memenuhi target Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Kecamatan dengan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yang



berada di bawah 80% adalah Kecamatan Rambah, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah dan Kecamatan Pendalian IV Koto. Dari dibawah terlihat adanya ketimpangan pemerataan pemberian imunisasi pada bayi di beberapa kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II- 32

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
1	Rambah	Rambah	14	6	42,86
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	8	8	100,00
		Rambah Hilir II	5	4	80,00
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	9	9	100,00
		Rambah Samo II	5	3	60,00
4	Kepenuhan	Kepenuhan	10	7	70,00
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	5	1	20,00
6	Tambusai	Tambusai	12	8	66,67
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	10	4	40,00
		Tambusai Utara II	1	0	0,00
8	Rokan Iv Koto	Rokan IV Koto I	10	8	80,00
		Rokan IVKoto II	4	1	25,00
9	Pendalian Iv Koto	Pendalian IV Koto	5	0	0,00
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	3	0	0,00
11	Ujungbatu	Ujungbatu	5	3	60,00
12	Tandun	Tandun I	5	4	80,00
		Tandun II	4	0	0,00
13	Bangun Purba	Bangun Purba	7	2	28,57
14	Kabun	Kabun	6	3	50,00
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	7	1	14,29
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	5	5	100,00
		Kunto Darussalam II	5	5	100,00
Jumlah			145	82	56,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat sudah sebanyak 70,39% dari total 15.716 anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Kemudian meningkat pada tahun 2017 tercatat sudah sebanyak 87,32% dari total 16062 anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak. Persentase ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 90,80% pada tahun 2019. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2019 menurun cukup jauh dibanding tahun 2018, yaitu hanya sebanyak 58,5% anak usia 1 tahun yang diberikan imunisasi campak pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak menjadi 79,10%.



Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 33

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	11.063	14.026	14.459	9.990	13.429
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	15.716	16.062	15.923	17.064	16.976
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak.	70,39	87,32	90,80	58,5	79,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terlihat adanya pemerataan imunisasi campak antarkecamatan. tidak ada kecamatan yang pemberian imunisasi campaknya terkategori rendah di bawah 50%. Ini menunjukkan pelayanan imunisasi campak yang sudah baik antarkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak per kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 34

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
1	Rambah	Rambah	1.011	1.429	70,75
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	599	676	88,61
		Rambah Hilir II	333	434	76,73
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	637	677	94,09
		Rambah Samo II	230	272	84,56
4	Kepenuhan	Kepenuhan	752	796	94,47
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	357	526	67,87
6	Tambusai	Tambusai	1.567	1.829	85,68
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1.231	1.815	67,82
		Tambusai Utara II	679	989	68,66
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	441	462	95,45
		Rokan IVKoto II	135	177	76,27
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	182	316	57,59
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	305	463	65,87
11	Ujungbatu	Ujungbatu	1.367	1.875	72,91
12	Tandun	Tandun I	525	547	95,98
		Tandun II	222	289	76,82
13	Bangun Purba	Bangun Purba	372	480	77,50
14	Kabun	Kabun	482	743	64,87
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	651	672	96,88
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	974	1.090	89,36



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
		Kunto Darussalam II	377	419	89,98
Jumlah			13.429	16.976	79,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Pada tahun 2016 tidak ada kasus SPF non Polio yang dilaporkan. Pada tahun 2017 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk sebesar 2,33 kasus per seratus ribu penduduk. Kemudian Pada tahun 2018 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk menurun menjadi sebesar 1,83 kasus per seratus ribu penduduk. Terakhir pada tahun 2019 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebesar 2,33 kasus per seratus ribu penduduk. Namun, pada tahun 2020 tidak ada kasus SFP non Polio yang dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan hulu. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 35
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	0	5	4	5	0
2	jumlah penduduk < 15 tahun	99.757	214.698	219.169	228.202	0
3	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,00	2,33	1,83	2,19	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Pada tahun 2019 jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan hanya pada beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Bangun Purba. Selebihnya pada 12 kecamatan lain tidak ada kasus SFP polio yang dilaporkan. Lebih jelas mengenai Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 36
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kecamatan dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFI non Polio yang dilaporkan	Jumlah penduduk 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
1	Rambah	Rambah	0	0	0
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	0	0	0
		Rambah Hilir II	0	0	0
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	0	0	0
		Rambah Samo II	0	0	0
4	Kepenuhan	Kepenuhan	0	0	0
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	0	0
6	Tambusai	Tambusai	0	0	0
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	0	0	0
		Tambusai Utara II	0	0	0
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	0	0	0
		Rokan IVKoto II	0	0	0
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	0	0	0
10	Pagaran Tapah	Pagaran Tapah	0	0	0



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah kasus SFl non Polio yang dilaporkan	Jumlah penduduk 15 tahun	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
	Darussalam	Darussalam			
11	Ujungbatu	Ujungbatu	0	0	0
12	Tandun	Tandun I	0	0	0
		Tandun II	0	0	0
13	Bangun Purba	Bangun Purba	0	0	0
14	Kabun	Kabun	0	0	0
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	0	0	0
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	0	0	0
		Kunto Darussalam II	0	0	0
Jumlah			0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator selanjutnya yang terdapat dalam urusan wajib kesehatan adalah Cakupan balita pneumonia yang ditangani. Pada tahun 2016 penanganan balita yang terkena pneumonia sebesar 3,49%. Kemudian pada tahun 2017 penanganan balita yang terkena pneumonia meningkat menjadi sebesar 18,86%. Jumlah penangan balita terkena pneumonia mengalami penurunan menjadi 7,92% pada tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 4,93% pada tahun 2019. Jumlah penanganan pneumonia mengalami peningkatan menjadi 14,92% pada tahun 2020. Jumlah penangan balita yang terkena pneumonia jelas masih belum optimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berbagai penyebab yang mungkin menjadi kendala adalah fasilitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan yang belum memadai, kendala biaya dari pasien hingga rendahnya kesadaran/pengetahuan pasien untuk membawa penderita pneumonia ke fasilitas kesehatan yang memadai. Terlepas dari semua itu dibutuhkan kerja sama yang aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus pneumonia balita ini. Lebih jelas mengenai Cakupan balita pneumonia yang ditangani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 37
Cakupan balita pneumonia yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	99	146	130	81	284
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	2.835	774	1.640	1.642	1.904
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	3,49	18,86	7,92	4,93	14,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk cakupan balita pneumonia yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 terlihat adanya ketimpangan penanganan kasus pneumonia balita. Dimana baru pada kecamatan Bangun Purba yang dapat menanganangi penderita pneumonia mencapai 70%. Sementara itu masih banyak kecamatan yang memiliki cakupan penanganan balita pneumonia di bawah 50% dari total perkiraan penderita pneumonia. Padahal pada 3 kecamatan tersebut jumlah perkiraan penderita pneumonia balita cukup tinggi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II- 38
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani per Kecamatan Di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Cakupan balita pneumonia yang ditangani
1	Rambah	Rambah	2	160	1,3
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	2	76	2,6
		Rambah Hilir II	2	49	4,1
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	3	76	3,9
		Rambah Samo II	4	31	12,9
4	Kepenuhan	Kepenuhan	5	89	5,6
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	7	59	11,9
6	Tambusai	Tambusai	7	205	3,4
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	11	204	5,4
		Tambusai Utara II	9	111	8,1
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	10	52	19,2
		Rokan IVKoto II	11	20	55,0
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	12	36	33,3
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	13	52	25,0
11	Ujungbatu	Ujungbatu	32	209	15,3
12	Tandun	Tandun I	15	61	24,6
		Tandun II	21	32	65,6
13	Bangun Purba	Bangun Purba	38	54	70,4
14	Kabun	Kabun	18	83	21,7
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	19	76	25,0
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	21	122	17,2
		Kunto Darussalam II			
Jumlah			284	1.904	14,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Rokan Hulu selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 kasus TBC per 100.000 penduduk sebanyak 34 kasus. Lalu ada tahun 2017 kasus TBC per 100.000 penduduk meningkat menjadi sebanyak 86 kasus. Pada tahun 2018 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) menurun menjadi sebanyak 65 kasus penderita TBC per seratus ribu penduduk, namun kembali meningkat tajam menjadi 164 kasus TBS per 100.000 penduduk. Pada tahun 2020 tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk mengalami penurunan menjadi 72 penderita. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 39
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	211	553	433	1135	518
2	Jumlah Penduduk	614.114	641.208	666.410	692.120	718.321



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	34	86	65	164	72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terlihat pada beberapa kecamatan terdapat jumlah kasus TBC yang cukup tinggi, sementara pada beberapa kecamatan lain jumlah kasus TBC sudah rendah. Kecamatan Bonai Darussalam menjadi kecamatan dengan prevalensi kasus TBC tertinggi pada tahun 2020 mencapai 137 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) paling rendah adalah Kecamatan Rambah dengan jumlah kasus sebanyak 31,61 kasus per 100.000 penduduk. Lebih jelas mengenai Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 40

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
1	Rambah	Rambah	19	60.101	31,61
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	50	46.663	107,15
		Rambah Hilir II			
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	35	39.961	87,59
		Rambah Samo II			
4	Kepenuhan	Kepenuhan	28	33.437	83,74
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	11	22.083	49,81
6	Tambusai	Tambusai	46	76.927	59,80
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	106	117.958	89,86
		Tambusai Utara II			
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	14	26.850	52,14
		Rokan IV Koto II			
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	5	13.328	37,52
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	20	19.470	102,72
11	Ujungbatu	Ujungbatu	51	78.424	65,03
12	Tandun	Tandun I	24	35.132	68,31
		Tandun II			
13	Bangun Purba	Bangun Purba	19	20.187	94,12
14	Kabun	Kabun	22	31.248	70,40
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	39	28.450	137,08
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	29	68.102	42,58
		Kunto Darussalam II	0		
Jumlah			518	718.321	72,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021



Untuk Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di kabupaten Rokan Hulu pada kurun waktu empat tahun terakhir sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah pasien TB yang meninggal masih berada pada tingkat 3,5 kematian dalam seratus ribu penduduk pada tahun 2020. Bahkan pada tahun 2019 sudah tidak ada kematian pasien TB. Lebih jelas mengenai Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 41
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal.	2	10	9	0	18
2	Jumlah penduduk	61.4114	641.208	666.410	692.120	718.321
3	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,33	1,56	1,35	0	3,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Mengoptimalkan dan mempertahankan kualitas Directly Observe Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan salah satu strategi yang paling ampuh dalam penanganan dan penurunan jumlah kasus baru Tuberkulosis. Dimana Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2018 sudah sangat baik, yaitu mencapai 100%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 50,50% dan pada tahun 2020 menurun lagi menjadi 17,29%. Ini artinya peran DOTS belum cukup optimal dalam mendeteksi kasus TB di Rokan Hulu pada dua tahun terakhir. Lebih jelas mengenai Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 42
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS.	376	154	433	1.105	381
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut.	431	553	433	2.188	2204
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.	87.23	27.84	100	50,50	17,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS pada tahun 2018 sudah sangat baik, yaitu mencapai 100%, namun jumlah ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 hanya sebesar 63,78% proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS. Ini artinya peran DOTS masih perlu lebih dioptimalkan dalam penanganan TB di Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 43

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	376	154	433	859	243
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	431	553	433	1.105	381
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	87,23	27,84	100	77,74	63,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017-2020 sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terbukti dari jumlah penanganan DBD yang sudah mencapai 100% dari total kasus yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih jelas mengenai Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Rokan Hulu 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 44

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	201	321	61	230	162
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	201	321	61	230	162
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dimana, pada tahun 2016 ersentase enderita diare yang ditangani hanya sebesar 59,33% namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2017 menjadi 12,32% dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pada tahun 2018 Persentase Penderita diare yang ditangani menurun kembali menjadi sebesar 11,93% dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2019 Persentase Penderita diare yang ditangani meningkat menjadi sebesar 20,78% dari total perkiraan penderita diare di Kabupaten Rokan Hulu. Namun, pada tahun 2020 Persentase Penderita diare yang ditangani menurun kembali menjadi 11,10%. Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 45

Persentase Penderita diare yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	7.797	6.497	2.146	3.598	2.086
2	Jumlah perkiraan penderita diare	13.142	52.733	17.993	17.311	18.795



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Penderita diare yang ditangani	59,33	12,32	11,93	20,78	11,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk persentase penderita diare yang ditangani per kecamatan secara rata-rata masih rendah dan berada di bawah 50%. Ini berarti masih banyak penderita diare yang belum mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat di sarana kesehatan yang memadai. Lebih rinci mengenai Persentase Penderita diare yang ditangani per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 46

Penderita diare yang ditangani Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Persentase Penderita diare yang ditangani
1	Rambah	Rambah	170	1.623	10,47
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	55	767	7,17
		Rambah Hilir II	138	493	27,99
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	113	769	14,69
		Rambah Samo II	132	310	42,58
4	Kepenuhan	Kepenuhan	152	903	16,83
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	0	328	0,00
6	Tambusai	Tambusai	81	2.077	3,90
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	139	2.062	6,74
		Tambusai Utara II	17	1.123	1,51
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	33	1.238	2,67
		Rokan IV Koto II	34	525	6,48
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	31	360	8,61
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	131	526	24,90
11	Ujungbatu	Ujungbatu	162	2117	7,65
12	Tandun	Tandun I	39	621	6,28
		Tandun II	93	596	15,60
13	Bangun Purba	Bangun Purba	171	545	31,38
14	Kabun	Kabun	34	844	4,03
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	318	768	41,41
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	43	200	21,50
		Kunto Darussalam II	0	0	0,00
	Jumlah		20.86	18.795	11,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Rokan Hulu jika dibanding dengan total populasi masih berada dalam kategori sangat rendah. Secara jumlah penderita juga menunjukkan adanya tren penurunan terutama pada tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah pasien HIV dan AIDS berjumlah 3 orang lalu meningkat pada tahun 2017 dimana jumlah pasien HIV dan AIDS berjumlah 5 orang. Jumlah ini kemudian turun hingga menjadi 2 orang penderita HIV/AIDS pada tahun 2018. Jumlah penderita HIV/AIDS naik menjadi 11 orang pada tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6 orang

penderita. Lebih rinci mengenai Persentase Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 47

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	3	5	2	11	6
2	Jumlah penduduk	614.114	641.208	666.410	692.120	718.321
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi.	0.0004	0.0007	0.0003	0,00159	0,00084

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun menunjukkan kinerja yang baik. Dimana Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 91,35% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 92,09% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Rokan Hulu meningkat kembali menjadi 100%. Terakhir pada tahun 2020 cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu menurun menjadi 79,70%. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 48

Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard	12.456	14.358	14.664	14.693	13.654
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	15.716	15.716	15.923	14.693	17.132
3	Cakupan kunjungan bayi	79.25	91.35	92.09	100	79,70

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di kabupaten Rokan Hulu dalam kurun tiga tahun terakhir sudah menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hingga tahun 2018 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 162,43% dari total sasaran sebanyak 18.688 ibu hamil. Namun pada tahun 2019 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 berkurang cukup drastis menjadi 21,54% dari total sasaran. Terakhir pada tahun 2020 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 kembali meningkat mencapai 80,31% dari total sasaran ibu hamil yang ada. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 49

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	13.998	15.659	30.355	3.600	15.394



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah sasaran ibu hamil	17.105	18.698	18.688	16.714	19.169
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4.	79,06	83,74	162,43	21,54	80,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sementara itu untuk Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 terlihat sudah cukup merata. Terlihat capaian kinerja untuk Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 paling rendah adalah di puskesmas Tambusai Utara 1 dengan capaian baru 50% dari total Ibu Hamil yang menjadi sasaran pelayanan. Lebih rinci mengenai Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 50

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
1	Rambah	Rambah	1071	1630	65,7
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	743	781	95,1
		Rambah Hilir II	390	489	79,8
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	550	765	71,9
		Rambah Samo II	263	308	85,4
4	Kepenuhan	Kepenuhan	763	903	84,5
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	567	600	94,5
6	Tambusai	Tambusai	1875	2099	89,3
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	1020	2042	50,0
		Tambusai Utara II	849	1058	80,2
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	479	530	90,4
		Rokan IV Koto II	183	207	88,4
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	255	349	73,1
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	330	524	63,0
11	Ujungbatu	Ujungbatu	1992	2125	93,7
12	Tandun	Tandun I	552	630	87,6
		Tandun II	295	326	90,5
13	Bangun Purba	Bangun Purba	460	550	83,6
14	Kabun	Kabun	563	835	67,4
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	642	742	86,5
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1140	1214	93,9
		Kunto Darussalam II	412	462	89,2
Jumlah			15394	19169	80,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Cakupan puskesmas dikabupaten Rokan Hulu dari tahun 2016-2020 sebesar 1,31, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,38 dikarenakan adanya penambahan satu puskesmas baru. Ini artinya setiap kecamatan sudah memiliki setidaknya satu puskesmas, dan ada beberapa kecamatan yang memiliki dua puskesmas. Lebih rinci mengenai Cakupan puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 51
Cakupan puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah puskesmas.	21	21	21	21	22
2	Jumlah seluruh kecamatan.	16	16	16	16	16
3	Cakupan puskesmas	1,31	1,31	1,31	1,31	1,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sedangkan untuk cakupan puskesmas pembantu dalam kurun waktu 2016-2020 baru mencapai 53,79% dan meningkat menjadi 57,90 pada tahun 2020. Dimana dari total 145 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baru 84 desa/kelurahan yang memiliki puskesmas pembantu pada tahun 2020. Lebih rinci mengenai cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 52
Cakupan puskesmas Pembantu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas Pembantu	78	78	78	78	84
2	Jumlah seluruh desa	145	145	145	145	145
3	Cakupan puskesmas Pembantu	53,79	53,79	53,79	53,79	57,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk Cakupan pelayanan nifas di kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Selama 2016-2020 tidak ada cakupan pelayanan dibawah 75%. Cakupan pelayanan nifas yang baik ini menunjukkan adanya pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan pasca persalinan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 53
Cakupan pelayanan nifas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	13.634	14.622	15.148	14.693	14.457
2	Jumlah total ibu nifas	16.907	16.907	17.823	17.682	18.478
3	Cakupan pelayanan nifas	80.64	86.48	84.99	83.10	78,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tidak jauh berbeda, cakupan pelayanan nifas per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan merata antar kecamatan. Tidak ada kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 70%, sehingga boleh dikatakan cakupan pelayanan nifas di kecamatan cukup merata. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan nifas kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 54
Cakupan pelayanan nifas Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020

No	Puskesmas	Kecamatan	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Jumlah total ibu nifas	Cakupan pelayanan nifas
1	Rambah	Rambah	1.036	1.558	87,50
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	653	745	93,10
		Rambah Hilir II	390	467	91,70
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	540	730	83,60
		Rambah Samo II	233	293	83,80
4	Kepenuhan	Kepenuhan	718	861	88,40
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	534	572	88,30
6	Tambusai	Tambusai	1.737	2.003	83,20
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	950	1.949	83,50
		Tambusai Utara II	782	1.079	83,80
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	450	506	73,70
		Rokan IV Koto II	176	195	84,30
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	260	1.275	82,60
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	340	501	71,20
11	Ujungbatu	Ujungbatu	1.905	2.028	80,60
12	Tandun	Tandun I	486	600	71,60
		Tandun II	240	311	83,30
13	Bangun Purba	Bangun Purba	436	525	80,60
14	Kabun	Kabun	519	797	79,00
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	567	708	80,00
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	1116	333	88,00
		Kunto Darussalam II	389	441	83,10
Jumlah			14.457	18.478	78,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi sepsis, trauma lahir, BBLR berat badan lahir rendah 2500 gr, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 hanya sebesar 43,49% dari total keseluruhan neonatus dengan komplikasi. Setiap tahun kinerja penanganan neonatus dengan komplikasi terus menunjukkan perbaikan kinerja hingga menjadi 90,4% neonatus berkomplikasi yang ditangani pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 cakupan penanganan neonatus ini mengalami penurunan hingga 42,03%. Lebih rinci mengenai Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 55
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani.	455	670	710	1.992	957
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi	1.046	1.217	1.152	2.204	2.277
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	43,49	55,05	61,63	90,40	42,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup rendah dengan cakupan sebesar 42,03%. Lebih rinci mengenai Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 56

Cakupan pelayanan anak balita per Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2020

No	Puskesmas	Kecamatan	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pe mantauan minimal 8 kali	Jumlah seluruh anak balita	Cakupan pelayanan anak balita.
1	Rambah	Rambah	3.475	7.094	48,99
2	Rambah Hilir	Rambah Hilir I	1.705	3.354	50,84
		Rambah Hilir II	1.279	2.153	59,40
3	Rambah Samo	Rambah Samo I	1.508	3.360	44,88
		Rambah Samo II	762	1.355	56,24
4	Kepenuhan	Kepenuhan	2.313	3.946	58,62
5	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	2.140	2.606	82,12
6	Tambusai	Tambusai	5.340	9.079	58,82
7	Tambusai Utara	Tambusai Utara I	2.217	9.012	24,60
		Tambusai Utara II	3.273	4.907	66,70
8	Rokan IV Koto	Rokan IV Koto I	1.503	2.294	65,52
		Rokan IV Koto II	935	875	106,84
9	Pendalian IV Koto	Pendalian IV Koto	1.536	5.941	25,85
10	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	953	2.297	41,48
11	Ujungbatu	Ujungbatu	3.464	9.255	37,43
12	Tandun	Tandun I	1.291	2.713	47,59
		Tandun II	795	1.433	55,46
13	Bangun Purba	Bangun Purba	965	2.382	40,51
14	Kabun	Kabun	1.530	3.687	41,50
15	Bonai Darussalam	Bonai Darussalam	2.846	3.356	84,81
16	Kunto Darussalam	Kunto Darussalam I	802	1.572	51,01
		Kunto Darussalam II	1239	2094	59,17
Jumlah			41.871	84.765	49,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat di kabupaten Rokan Hulu cukup berfluktuasi. Dimana pada tahun 2016 menuju tahun 2018 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 sudah mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Pada tahun



2017 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 81,16% dari total keseluruhan siswa SD/ sederajat. Namun, pada tahun 2020 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat tidak sebaik tahun 2017. Dimana pada tahun 2020 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat hanya sebesar 60,45% dari total keseluruhan siswa SD/ sederajat. Lebih rinci mengenai Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 57

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/ sederajat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	12.359	12.588	9.402	15.582	15.620
2	Jumlah murid SD dan setingkat	13.393	15.509	26.412	24.649	25.839
3	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	92,27	81,16	35,59	63,20	60,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dalam tiga tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dimana selama periode 2016-2020 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sudah mencapai 100%. Lebih rinci Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 58

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan gawat darurat level 1.	3	3	3	2	2
2	Jumlah RS.	3	3	3	2	2
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator selanjutnya adalah Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. Dimana pada tahun 2017-2018 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sudah mencapai 100%. Sementara itu pada tahun 2019 dan tahun 2020 belum tidak ada KLB di desa dan kelurahan Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 59

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KLB di desa/ kelurahan yang ditangani > 24 jam	4	1	5	0	0



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan	4	1	5	0	0
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan target capaian SPM bidang kesehatan 100% untuk setiap indikatornya. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 untuk menilai penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2020. Dari 12 (dua belas) jenis layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan 12 (dua belas) indikator (100%), namun belum ada indikator yang sudah mencapai target nasional. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 60

Capaian SPM bidang Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Nasional	Capaian Th. 2019 (%)	Capaian Th. 2020 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	86.82	81.84
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	83.10	76.92
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	85.26	84.43
4	Pelayanan kesehatan balita	100	78.10	49.63
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	63.22	14.59
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif.	100	12.77	1.82
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	100	54.14	9.91
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	7.75	88.14
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	47.41	53.20
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	18.11	30.66
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	62.55	18.46
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	3.07	14.59
Total			50,19	47.50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, 2020

2.3.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan Infrastruktur berupa jalan, jembatan dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan



kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 3,79%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu memiliki kecenderungan berada pada pusat-pusat kota. Hal tersebut berdampak kepada munculnya permukiman-permukiman baru yang ditandai dengan berdirinya bangunan dan infrastruktur pendukung. Dari tahun 2017 hingga 2020 tercatat jumlah orang atau perseroan yang mengurus IMB mengalami peningkatan dengan masa puncaknya pada tahun 2019 sebesar 609 izin diterbitkan dengan rasio sebesar 0,04. Kemudian pada tahun 2020, pandemic *covid-19* berdampak pada IMB yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebanyak 583 unit bangunan dengan rasio 0,03.

Salah satu indikator kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu persentase jaringan jalan berdasarkan kondisi baik. Pada tahun 2016 dan 2017 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 45,42 persen, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 47,13 persen. Kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 47,31 persen. Terakhir pada tahun 2020 jaringan jalan dalam kondisi baik sedikit meningkat menjadi 47,68 persen. Dari data dapat diketahui bahwa Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di Rokan Hulu meskipun sedikit meningkat, namun belum menggambarkan adanya perbaikan yang cukup berarti.

Indikator lain yang cukup penting dalam menggambarkan kondisi ususan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah persentase irigasi dalam kondisi baik. Irigasi sebagai sumber pengairan utama lahan pertanian tentu harus selalu dijaga dalam kondisi baik, agar dapat mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 56,54% lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 58,77% jaringan irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 61,95%. Pada tahun 2019 kondisi irigasi dalam kondisi baik jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 64,85%. Terakhir, pada tahun 2020 kondisi irigasi dalam kondisi baik kembali meningkat menjadi 69,81%. Hal ini menunjukkan adanya perluasan irigasi dalam kondisi baik yang dapat melayani perairan pertanian dan kebutuhan masyarakat yang lebih baik.

Indikator drainase di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan. Hingga tahun 2019 telah terdapat setidaknya 19.401,75 drainase dalam kondisi baik. Hal ini tentu sangat baik untuk mendukung lingkungan permukiman dan kawasan yang lebih baik, nyaman dan bersih di Rokan Hulu. Peningkatan perbaikan dan pemeliharaan drainase diharapkan mampu memperlancar aliran air, terutama pada musim hujan.

Sementara itu untuk indikator akses terhadap air minum layak telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Hingga tahun 2020 sudah 51,10% masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan akses terhadap sumber air



minum yang layak. Meski sebagian fasilitas sumber air minum layak sudah tersedia dengan baik, masih terdapat sebagian kecil penduduk yang masih kesulitan mendapatkan sumber air minum yang layak. Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah pedalaman masih kesulitan mendapatkan air minum bersih yang layak.

Selanjutnya indikator akses terhadap sanitasi yang layak di Kabupaten Rokan Hulu juga sudah menunjukkan capaian yang cukup baik. Dimana akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 sudah diatas 50 persen. Pada tahun 2020 sudah mencapai 66,33 persen penduduk memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Terkait ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 67,22 persen.

Untuk indikator jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang dibangun pada tahun 2017 terlaksana 3 unit. Kemudian pada tahun 2018 telaksana 7 unit. Sementara itu pada tahun 2019 jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang dibangun hanya sebanyak 1 unit. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang dibangun sebanyak 2 unit.

Indikator lain pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA dan sarana dan prasarana yang dibangun sebanyak 3 unit pada tahun 2020. Sedangkan untuk indikator Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada program RIS PNPM / PPIP, PAMSIMAS pada tahun 2020 adalah sebanyak 17 desa.

Selain indikator yang dijelaskan di atas, masih terdapat beberapa indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2016-2020 yang dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel II- 61
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	972,14	972,14	996,80	1.007,98	1.015,59
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	2066,01	2.066,01	2.071,51	2.071,51	2.071,51
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	3,44	3,47	3,39	3,22	8,03
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	45,52	45,42	47,13	47,31	47,68
5	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	10.751,15	14.193,15	15.479,15	17.552,15	19.401,75
6	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	9.964,65	11.250,65	13.323,65	9.964,65	14.317,65
7	Rasio jaringan irigasi	56,54	58,8	61,95	64,85	92,83
8	Luas irigasi kabupaten dalam	2633	2.737	2.885	3.020	3.251



No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	kondisi baik					
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	56,54	58,77	61,95	64,85	69,81
10	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,01	0,02	0,02	0,04	0,03
11	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	67,22
12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	61,88	63,39	64,75	65,95	66,33
13	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	48,19	48,67	49,08	50,14	51,10
14	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang dibangun	-	3 unit/ keg.	7 unit/ keg.	1 unit/ keg.	2 unit/ keg.
15	Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA dan sarana dan prasarana yang dibangun	-	9 unit/ keg.	12 unit/ keg.	8 unit/ keg.	3 unit/ke g.
16	Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada program RIS PNPM / PPIP, PAMSIMAS	-	2 desa	24 desa	13 desa	17 desa
17	Jumlah unit pengelolaan air bersih	-	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit
18	Jumlah pembangunan pengelolaan jaringan air bersih air minum	-	2 dok. 7 keg	3 dok. 20 keg.	7 dok. 6 keg.	1 dok. 26 keg.
19	Jumlah penataan areal pemakaman	-	0 keg.	4 keg.	5 keg.	8 keg.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu, 2021 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Pelayanan Air Bersih/ SPAM telah dilakukan hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Persentase rumah yang telah terlayani air bersih/SPAM sebesar 4,14 persen. Selain Unit Pengelolaan Air Bersih tersebut diatas, pelayanan air bersih yang telah dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu ada pembangunan dan pemeliharaan PAMSIMAS.

Tabel II- 62

Realisasi Jumlah Unit Rumah yang Sudah Difasilitasi Air Minum (unsur komponen pelayanan air bersih/ SPAM) Tahun 2017-2020

No	UPTD PAB Unit	Riwayat Sambungan Rumah			
		2017	2018	2019	2020
1	Pasir Pengaraian	1458	1635	1706	1764
2	Tandun	636	676	747	774
3	Ujung Batu	552	454	440	429
4	Tambusai	803	813	822	838
5	Rambah Hilir	391	576	418	426
6	Tambusai Utara	-	89	113	154
7	Bangun Purba	193	200	200	200
8	Kunto Darussalam	-	100	103	99
9	Rokan IV Koto	25	52	64	78
10	Pendalian IV Koto	-	26	48	55



No	UPTD PAB Unit	Riwayat Sambungan Rumah			
		2017	2018	2019	2020
11	Rambah Samo	-	-	49	60
12	Kabun	-	29	13	14
13	Kepenuhan	18	25	26	28
14	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-	-
15	Bonai Darussalam	-	-	-	-
16	Kepenuhan Hulu	-	-	-	-
Jumlah		3769	4675	4749	4919

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 4 indikator dengan batas waktu pencapaian setiap tahun. Capaian indikator kinerja SPM bidang Pekerjaan Umum dari total 4 indikator kinerja, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan sebanyak 3 indikator. Belum ada indikator yang sudah mencapai target nasional. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 63

Realisasi Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020

NO	Indikator	Target Nasional (%)	Capaian 2019 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat	100	3,25	2,89
2	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S Akses Dasar	100	0,075	3,37
3	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Aman	100	0	0
4	Capaian SPM Pelayanan SPALD-T Akses Aman	100	4,89	2,21
Total			2,05	2,11

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, 2020

2.3.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni



merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.

Indikator utama dalam urusan perumahan rakyat dan pemukiman adalah Jumlah pembangunan perumahan murah dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kabupaten Rokan Hulu Jumlah pembangunan perumahan murah dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2020 berhasil dibangun 219 unit rumah. Capaian pada tahun 2020 ini sangat baik terutama apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah terealisasi sama sekali.

Sementara itu untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Rokan Hulu dalam beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Pada tahun 2017 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau sebesar 54,38% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai 63,33%. Meski terlihat bahwa pada tahun 2020 masih terdapat 36,67% rumah tangga yang belum dapat memiliki hunian layak dan terjangkau, namun setidaknya jumlah ini semakin turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perumahan dan hunian di Kabupaten Rokan Hulu semakin layak dan terjangkau. Meski demikian capaian ini masih perlu ditingkatkan hingga semua masyarakat dapat menikmati hunian yang layak dan terjangkau. Lebih lanjut untuk indikator dalam urusan perumahan rakyat dan pemukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 64

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pembangunan perumahan murah dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	0 unit	0 unit	0 unit	219 unit
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	54,38 %	70,25 %	57,09 %	63,33 %

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di Bidang Perumahan Rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi



dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 1 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 2 indikator dan batas waktu pencapaian SPM setiap tahunnya. Pada tahun 2020, SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya menerapkan indikator Standar Pelayanan Minimal. Capaian indikator kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II- 65

Realisasi Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Target Nasional (%)	Capaian Th. 2019 (%)	Capaian Th. 2020(%)
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0	0
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	0	0
	Total		0	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu, 2020

2.3.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Kondusifitas daerah di Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2016-2020 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain konflik sosial dan unjuk rasa. Kondisi politik di Kabupaten Rokan Hulu dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu yang berjalan tertib dan demokratis. Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2016-2020 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 66
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Konflik	6 konflik	6 konflik	5 konflik	7 konflik	5 konflik
2	Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	5 kali
3	Pembinaan politik daerah	12 kali	12 kali	12 kali/ 10 parpol	16 kali/ 10 parpol	1 kali/ 10 parpol
4	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	100 anggota LSM, Ormas dan OKP	100 anggota LSM, Ormas dan OKP	0	170 anggota LSM, Ormas dan OKP	10 anggota LSM, Ormas dan OKP

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Jumlah polisi Pamong Praja pada tahun 2016 sebanyak 433 orang, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 411 pegawai. Pada tahun 2018 jumlah polisi Pamong Praja kembali mengalami penurunan menjadi sebanyak 356 pegawai, pada tahun 2019 sebanyak 356 pegawai dan pada tahun 2020 sebanyak 355 orang pegawai. Berdasarkan data tersebut, jumlah personil polisi Pamong Praja dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini juga berdampak terhadap rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk. Pada tahun 2016, rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah sebanyak 7 polisi pamong praja. Pada tahun 2017, rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 6,4 dan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 5,3 . Terakhir pada tahun 2019 rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk kembali menurun menjadi sebesar 5,1. Artinya, pada tahun 2019 hanya terdapat sebanyak 5,1 satpol PP untuk melayani sekitar 10.000 penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Sementara pada tahun 2020 jumlah ini menurun menjadi 4,9 per 10.000 penduduk.

Cakupan Petugas Linmas pada tahun 2020 sebesar 4,14 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3,30% yang menunjukkan cakupan Petugas Linmas bertambah. Cakupan Linmas bertambah disebabkan berkurangnya Petugas Linmas pada tahun 2020 karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan pada tahun 2020. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100 %. Pelanggaran K3 sampai pada tahun 2020 dapat diselesaikan karena ditangani dengan cepat oleh personil dari Satpol PP. Untuk meningkatkan pelayanan kebakaran, pada tahun 2018 telah bertambah 1 (satu) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran untuk menjangkau 2 kecamatan, sehingga jumlah pos sampai pada tahun 2020 menjadi 3 (tiga) Pos. Tingkat waktu tanggap daerah layanan ditargetkan sampai kelokasi kejadian kebakaran selama 15 menit. Dan sampai saat ini pelayanan kebakaran dapat tertangani dengan mengurangi meluasnya penyebaran api.

Penegakan PERDA pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB serta warung yang tidak memiliki izin menyediakan minuman beralkohol. Dari penegakan yang dilakukan dapat terselesaikan, baik dengan



melakukan pembongkaran bangunan tanpa IMB dan penutupan warung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Selanjutnya, dalam usaha pemerintah untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan pada Kabupaten Rokan Hulu juga terdapat sukarelawan yang terdiri dari berbagai unsur. Untuk jumlah sukarelawan memiliki tren yang baik dengan bertambahnya jumlah sukarelawan dari berbagai kalangan. Hal ini menandakan adanya peningkatan kepedulian masyarakat untuk selalu siap siaga terhadap bencana kebakaran di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 67
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	433 orang	411 orang	356 orang	356 orang	355 orang
2	Jumlah Penduduk	616.466	641.208	666.410	692.120	718.321
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	7,0	6,4	5,3	5,1	4,9
4	Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	12 kali	12 kali	12 kali	5 kali	5 kali
5	Cakupan petugas Perlindungan masyarakat (Linmas)	-	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,keindahan)	-	5,83%	16,08%	16,08%	16,08%
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	5,83%	5,83%	18,06%	18,06%	18,06%
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	30-60 menit	30-60 menit	30-60 menit	30-60 menit	30-60 menit
9	Jumlah aparatur pemerintah/ dunia usaha / masyarakat yang siap siaga terhadap bahaya kebakaran		20 orang aparatur 5 perusahaan	20 orang aparatur 10 perusahaan 30 orang masyarakat	20 orang aparatur 5 perusahaan 30 orang masyarakat	20 orang aparatur 5 perusahaan 60 orang masyarakat

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu,2021

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang SPM yang masuk dalam kategori prioritas nasional. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal nasional, dilakukan beberapa perubahan kebijakan terkait SPM. Penyusunan Laporan Pencapaian SPM tahun 2018 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menerapkan 3 (tiga) jenis pelayanan dan indikator (60%). Dari 3 indikator yang ditetapkan, sudah 2 (dua) indikator mencapai target nasional. Capaian indikator kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan



Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Rokan Hulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II- 68
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020

No	Indikator	Target Nasional (%)	Capaian Th. 2019 (%)	Capaian Th. 2020 (%)
1	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	0	0
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	52,88	45,99
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	0	0
5	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	200	207
	TOTAL		70,57	70,59

Sumber: Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, 2020

2.3.1.6 Urusan Wajib Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Huluyang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PPKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data yang dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui data inilah pemerintah pusat dan daerah memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak dan terdaftar dalam DTKS. Pada tahun 2020 terdapat setidaknya 30.520 penduduk Rokan Hulu yang terdaftar di DTKS dan sebanyak 72,45% dari data tersebut sudah diverifikasi dan validasi oleh dinas berwenang.

Sementara itu, untuk Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,03% dibanding tahun 2019 dengan total penerima manfaat sebanyak 149.309 penduduk. Sedangkan untuk penerima manfaat program PKH terlihat adanya sedikit peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat pada tahun 2020 menjadi 11.760 penerima manfaat.

Pada tahun 2017, jumlah anak terlantar dan orang terlantar yang mendapatkan perlindungan berupa bantuan transport kembali ke daerah



asalnya berjumlah 8 orang, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 12 orang dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5 orang anak terlantar yang diberi bantuan.

Sementara itu jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan pada tahun 2020 mencapai 37.882 orang, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 33.598 orang.

Indikator lain dari Kinerja Sosial adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan. Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Tujuan pemberdayaan sosial terhadap Komunitas adat terpencil (KAT) adalah untuk mewujudkan: 1) Perlindungan hak warga Negara; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar; 3) Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan 4) Kemandirian sebagai Warga Negara.

Adapun kriteria Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 meliputi: 1) Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; 2) Tertutup, homogen, dan penghidupnya tergantung kepada sumber daya alam; 3) Merjinal di perdesaan dan perkotaan; dan/atau 4) Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah dan pesisir pulau-pulau terluar, dan terpencil. Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 231 kk sudah diberdayakan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam bentuk relokasi tempat tinggal ke lokasi yang baru dan biaya hidup selama 1 tahun, dengan sumber dana APBN dan APBD.

Sesuai surat dinas sosial provinsi riau nomor : 467.1/dinsos/2020/239 tanggal 3 April 2020 hal review data base KAT 2020-2024 dimana salah satu poin menyatakan bahwa berdasarkan data base KAT 2015-2019 agar dimuktahirkan kembali dengan mengurangi/menghapus data lokasi KAT yang sudah di berdayakan selama kurun waktu 2015-2019. Sehingga berdasarkan kriteria KAT dan penjelasan surat di atas maka Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Rokan Hulu tidak ada karena sudah diberdayakan. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 69

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah DTKS		30.621	30.630	29.212	30.520
2	Persentase DTKS yang diverivali		-	59%	68,37%	72,45%
3	Jumlah Non DTKS					
4	Jumlah PBI JKN		-	125.084	130.927	149.309
5	Jumlah KPM-PKH	3.677	6.070	12.200	11,332	11.760
6	Jumlah BPNT		17.904	17.904	17.763	24.542
7	Jumlah Pendamping PKH	25	25	58	58	58
8	Jumlah TKSK	16	16	16	16	16
9	Jumlah PSM		50	50	50	50
10	Jumlah Tagana	43	49	44	38	38
11	Jumlah anak terlantar dan orang terlantar/tidak mampu yang mendapatkan perlindungan (berupa bantuan transport kembali ke daerah asal)		8	-	12	5



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Jumlah Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan	6.748	6.864	35.353	33.598	37.882
13	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberdayakan	110	121	37	43	2
14	Jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan	12	6	2	11	0
15	Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PPKS yang diberdayakan	120	17.914	26.603	19.343	2.569
16	Jumlah ODGJ		-	45	43	37
17	Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberikan bantuan		-	37	43	0

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu,2021

Jika dilihat dari sisi kecamatan, kecamatan Tambusai memiliki jumlah DTKS terbanyak di Rokan Hulu, yaitu mencapai 4.471 orang. Sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan kecamatan dengan jumlah DTKS paling sedikit di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebanyak 592 orang. Lebih rinci untuk Jumlah DTKS Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 70

Jumlah DTKS Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Bangun Purba	1.861	1.861	1.859	2.016
2	Bonai Darussalam	1.075	1.075	1.075	1.132
3	Kabun	1.060	1.060	696	697
4	Kepenuhan	1.403	1.403	1.390	1.418
5	Kepenuhan Hulu	735	735	714	804
6	Kunto Darussalam	2.663	2.672	2.681	2.724
7	Pagaran Tapah Darussalam	598	598	586	592
8	Pendalian IV Koto	755	755	735	719
9	Rambah	2.294	2.294	2.242	2.354
10	Rambah Hilir	2.577	2.577	2.074	2.074
11	Rambah Samo	2.671	2.671	2.401	2.625
12	Rokan IV Koto	2.272	2.272	2.273	2.202
13	Tambusai	4.358	4.358	4.360	4.471
14	Tambusai Utara	2.939	2.939	2.690	3.068
15	Tandun	1.987	1.987	2.065	2.238
16	Ujung Batu	1.373	1.373	1.371	1.386
Rokan Hulu		30.621	30.630	29.212	30.520

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu,2021

Untuk sebaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada tahun 2020 kecamatan Tambusai memiliki jumlah PBI JKN terbanyak di Rokan Hulu, yaitu mencapai 19.382 penerima manfaat. Sedangkan Kecamatan Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan jumlah PBI JKN paling sedikit di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebanyak 2.143 penerima manfaat. Lebih rinci untuk Jumlah PBI JKN Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 71

Jumlah PBI JKN Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Bangun Purba	7.558	7.566	8.342
2	Bonai Darussalam	5.425	5.360	4.654
3	Kabun	3.769	4.266	5.906
4	Kepenuhan	5.177	5.186	6.127
5	Kepenuhan Hulu	2.769	4.105	5.062
6	Kunto Darussalam	11.172	1.110	8.064
7	Pagaran Tapah Darussalam	3.094	3.702	6.250
8	Pendalian IV Koto	2.461	2.594	2.143
9	Rambah	12.868	14.121	9.960
10	Rambah Hilir	10.737	11.058	8.846
11	Rambah Samo	10.203	10.522	18.720
12	Rokan IV Koto	9.372	10.330	15.678
13	Tambusai	16.112	16.756	19.382
14	Tambusai Utara	11.361	11.258	13.235
15	Tandun	6.835	6.727	9.531
16	Ujung Batu	6.171	6.266	7.409
Rokan Hulu		125.084	120.927	149.309

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk sebaran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPMPKH), pada tahun 2020 Kecamatan Tambusai memiliki jumlah KPM-PKH terbanyak di Rokan Hulu, yaitu mencapai 1.889 keluarga penerima manfaat atau sebesar 16,67% dari total KPM-PKH. Sedangkan Kecamatan Kepenuhan Hulu merupakan kecamatan dengan jumlah KPM-PKH paling sedikit di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebanyak 172 keluarga penerima manfaat. Lebih rinci untuk Jumlah KPM-PKH Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 72

Jumlah KPM-PKH Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bangun Purba	197	403	819	782	865
2	Bonai Darussalam	121	218	396	373	394
3	Kabun	125	214	448	416	422
4	Kepenuhan	134	230	629	591	654
5	Kepenuhan Hulu	38	143	197	172	242
6	Kunto Darussalam	314	418	904	816	967
7	Pagaran Tapah Darussalam	64	381	425	392	269
8	Pendalian IV Koto	103	212	276	251	260
9	Rambah	369	458	778	745	793
10	Rambah Hilir	272	762	1.002	885	951
11	Rambah Samo	324	441	907	843	930
12	Rokan IV Koto	244	434	995	942	893
13	Tambusai	770	902	2.063	1.889	1.737
14	Tambusai Utara	155	403	1.121	1.067	1.122
15	Tandun	281	224	728	693	788
16	Ujung Batu	167	227	512	475	473
Rokan Hulu		3.677	6.070	12.200	11.332	11.760

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk sebaran Jumlah BPNT per kecamatan, pada tahun 2020 kecamatan Tambusai memiliki jumlah BPNT terbanyak di Rokan Hulu, yaitu



mencapai 3.384 BPNT. Sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan kecamatan dengan jumlah BPNT paling sedikit di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu sebanyak 494 keluarga penerima manfaat. Lebih rinci untuk Jumlah BPNT Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 73

Jumlah BPNT Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Bangun Purba	1.260	1.260	1.191	1.590
2	Bonai Darussalam	671	671	671	743
3	Kabun	629	629	629	763
4	Kepenuhan	845	845	845	1.197
5	Kepenuhan Hulu	354	354	354	583
6	Kunto Darussalam	1.604	1.604	1.604	2.339
7	Pagaran Tapah Darussalam	367	367	367	494
8	Pendalian IV Koto	389	389	389	548
9	Rambah	1.191	1.191	1.191	1.694
10	Rambah Hilir	1.332	1.332	1.332	1.929
11	Rambah Samo	1.414	1.414	1.414	2.163
12	Rokan IV Koto	1.378	1.378	1.378	1.831
13	Tambusai	2.767	2.767	2.767	3.384
14	Tambusai Utara	1.773	1.773	1.773	2.281
15	Tandun	1.113	1.113	1.113	1.847
16	Ujung Batu	817	817	817	1.156
Rokan Hulu		17.904	17.904	17.835	24.542

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk sebaran Jumlah Pendamping PKH per kecamatan, pada tahun 2019 kecamatan Tambusai memiliki jumlah BPNT terbanyak di Rokan Hulu, yaitu mencapai 8 Pendamping PKH. Hal ini bersesuaian karena Kecamatan Tambusai memiliki jumlah keluarga penerima manfaat PKH paling banyak di Provinsi Riau, sehingga membutuhkan lebih banyak pendamping pula. Lebih rinci untuk Jumlah BPNT Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 74

Jumlah Pendamping PKH Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bangun Purba	2	2	3	3	4
2	Bonai Darussalam	1	1	3	3	2
3	Kabun	1	1	2	2	2
4	Kepenuhan	1	1	3	3	3
5	Kepenuhan Hulu	1	1	2	2	2
6	Kunto Darussalam	2	2	5	5	5
7	Pagaran Tapah Darussalam	1	1	2	2	2
8	Pendalian IV Koto	1	1	2	2	2
9	Rambah	2	2	3	3	3
10	Rambah Hilir	2	2	4	4	4
11	Rambah Samo	2	2	5	5	5



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Rokan IV Koto	1	1	5	5	5
13	Tambusai	4	4	8	8	8
14	Tambusai Utara	2	2	5	5	5
15	Tandun	1	1	4	4	4
16	Ujung Batu	1	1	2	2	2
Rokan Hulu		25	25	58	58	58

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Untuk sebaran Jumlah TKSK per kecamatan, pada tahun 2016-2020 terdapat satu TKSK di setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Jumlah TKSK Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 75

Jumlah TKSK Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bangun Purba	1	1	1	1	1
2	Bonai Darussalam	1	1	1	1	1
3	Kabun	1	1	1	1	1
4	Kepenuhan	1	1	1	1	1
5	Kepenuhan Hulu	1	1	1	1	1
6	Kunto Darussalam	1	1	1	1	1
7	Pagaran Tapah Darussalam	1	1	1	1	1
8	Pendalian IV Koto	1	1	1	1	1
9	Rambah	1	1	1	1	1
10	Rambah Hilir	1	1	1	1	1
11	Rambah Samo	1	1	1	1	1
12	Rokan IV Koto	1	1	1	1	1
13	Tambusai	1	1	1	1	1
14	Tambusai Utara	1	1	1	1	1
15	Tandun	1	1	1	1	1
16	Ujung Batu	1	1	1	1	1
Rokan Hulu		16	16	16	16	16

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk sebaran Jumlah PSM per kecamatan, pada tahun 2020 kecamatan Rambah memiliki jumlah PSM terbanyak di Rokan Hulu, yaitu mencapai 17 PSM. Sedangkan Kecamatan Bonai Darussalam, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai Utara dan Ujung Batu belum memiliki pekerja sosial masyarakat (PSM) di kecamatan. Lebih rinci untuk Jumlah PSM Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 76

Jumlah PSM Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Bangun Purba	3	3	3	3
2	Bonai Darussalam				
3	Kabun	2	2	2	2
4	Kepenuhan				
5	Kepenuhan Hulu	5	5	5	5



No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
6	Kunto Darussalam	-	-	-	-
7	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-	-
8	Pendalian IV Koto	-	-	-	-
9	Rambah	17	17	17	17
10	Rambah Hilir	7	7	7	7
11	Rambah Samo	-	-	-	-
12	Rokan IV Koto	-	-	-	-
13	Tambusai	5	5	5	5
14	Tambusai Utara	-	-	-	-
15	Tandun	11	11	11	11
16	Ujung Batu	-	-	-	-
Rokan Hulu		50	50	50	50

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Untuk sebaran Jumlah Tagana per kecamatan, pada tahun 2020 kecamatan Rambah memiliki jumlah Tagana terbanyak di Rokan Hulu, yaitu mencapai 26 Tagana. Sedangkan Kecamatan Bonai Darussalam, Kabun, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Tambusai Utara, Tandun dan Ujung Batu belum memiliki pekerja sosial masyarakat Tagana di kecamatan. Lebih rinci untuk Jumlah Tagana Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 77

Jumlah Tagana Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				
		2017	2017	2018	2019	2020
1	Bangun Purba	2	2	1	1	1
2	Bonai Darussalam	-	-	-	-	-
3	Kabun	-	-	-	-	-
4	Kepenuhan	3	3	1	1	1
5	Kepenuhan Hulu	-	-	2	2	2
6	Kunto Darussalam	-	-	-	-	-
7	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-	-	-
8	Pendalian IV Koto	-	-	1	1	1
9	Rambah	31	37	31	26	26
10	Rambah Hilir	6	6	4	4	4
11	Rambah Samo	1	1	1	1	1
12	Rokan IV Koto	-	-	1	1	1
13	Tambusai	-	-	1	1	1
14	Tambusai Utara	-	-	-	-	-
15	Tandun	-	-	-	-	-
16	Ujung Batu	-	-	-	-	-
Rokan Hulu		43	49	44	38	38

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Capaian SPM bidang sosial



Kabupaten Rokan Hulu pada Indikator Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 80,65% menjadi 168,92% pada tahun 2020. Namun pada indikator lain, capaian SPM bidang sosial cenderung mengalami penurunan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 78

Capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (Tahun) 2019	Capaian (Tahun) 2020	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	
	Indikator	Nilai (%)				
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	2,61	0,12	Dinas/ Instansi Sosial
	2	Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	80,65	168,92	Dinas/Instansi Sosial
	3	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	2,57	2,49	Dinas/Instansi Sosial
	4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100	0,00	0,00	Dinas/Instansi Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5	Persentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	97,344 96	18,546 5	Dinas/Instansi Sosial

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu,2020

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat.

Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2016 untuk angkatan kerja sebanyak 258.412 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 136.665 jiwa. Pada tahun 2017 untuk angkatan kerja sebanyak 279.517 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 151.676 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 293.214 angkatan kerja dan



156.513 bukan angkatan kerja selanjutnya pada tahun 2019 terdapat sebanyak 319.666 angkatan kerja dan 150.427 bukan angkatan kerja. Pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 315.633 angkatan kerja dan sebanyak 168.024 orang merupakan bukan angkatan kerja.

Sementara itu untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 TPAK Kabupaten Rokan Hulu sebesar 64,82% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 65,20%. Kemudian pada tahun 2019 TPAK Kabupaten Rokan Hulu telah meningkat mencapai 68,00%. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi penurunan TPAK hingga mencapai 65,26%.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Rokan Hulu, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu dapat terus di tekan setiap tahunnya dari tahun 2017 sebesar menjadi sebesar 6,17 persen, dan tahun 2018 menurun menjadi sebesar 5,40 persen, kemudian tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 4,71 persen. Terakhir pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu hingga mencapai 4,42% dari total angkatan kerja. Penurunan jumlah pengangguran menjadi indikator pembangunan yang positif dan dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hulu dengan baik.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Lebih rinci mengenai Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 79
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk 15 Th + (ribu jiwa)					
	Angkatan Kerja	258.412	279.517	293.214	319.666	315.633
	Bukan Angkatan Kerja	136.665	151.676	156.513	150.427	168.024
2	TPAK (%)		64,82	65,20	68,00	65,26
	Laki-Laki	-	-	-	-	-
	Perempuan	-	-	-	-	-
3	Tingkat Kesempatan Kerja (%)					
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	6,17	5,40	4,71	4,42
5	Persentase Besar kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	25,00	18,33	5,77	12,82	34,69
6	Persentase Besar pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	-	-	9,80	1,90	15,99

Sumber : Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu, 2021



2.3.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Kebijakan yang telah dilaksanakan Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Pengarusutamaan Gender antara lain: 1) Perbub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; 2) Surat Edaran Nomor 071/SETDA-DINSOSP3A/71.23 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rokan Hulu Melalui Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender; 3) Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.260/DINSOSP3A/278/2020 Tentang Pembentukan TIM Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender; 4) Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor : KPTS.260/DINSOSP3A/335/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Rokan Hulu; 5) Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.260/DINSOSP3A/474/2019 Tentang Penunjukan Perangkat Daerah Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) antara lain: Kegiatan Gerakan Sayang Ibu, Kegiatan P2WKSS, Kegiatan Pemanfaatan, Pengembangan Pangan, Kegiatan Forum Anak, Kegiatan KLA, Kegiatan LK3, Kegiatan P2TP2A, Kegiatan Pelaksanaan ADD, Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik, Pembinaan Minat Bakat Siswa, Pengemabangan BUMDes, Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak, Pembinaan Organisasi Perempuan 2020, Kegiatan Peringatan Hari Ibu, Kegiatan PUG, Pengembangan Media Promosi sadar hidup sehat, dan Penyelenggaraan PILKADES.

Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2016 sebesar 4,67%, kemudian pada tahun 2017 sebesar sebesar 3,78 persen, tahun 2018 sebesar 3,67 persen, lalu pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 3,37 persen. Berdasarkan uraian data diatas menunjukkan



peran serta perempuan dalam kelembagaan pemerintahan cenderung stagnan dan cenderung mengalami penurunan. Hal serupa juga terjadi pada partisipasi perempuan di lembaga legislatif, yaitu hanya sebesar 4,4% pada tahun 2020. Sementara itu untuk indikator persentase tenaga kerja perempuan terlihat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 persentase tenaga kerja perempuan hanya sebesar 32,36%, kemudian meningkat menjadi 33,91% pada tahun 2019.

Rasio KDRT di Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2016-2020 terlihat berfluktuasi, namun cenderung menurun. Pada tahun 2016 rasio KDRT sebesar 44,00 kemudian turun pada tahun 2017 Rasio KDRT di Kabupaten Rokan Hulu menjadi 14,20%. Lalu pada tahun 2018 Rasio KDRT di Kabupaten Rokan Hulu meningkat menjadi 50,00%. Pada tahun 2019 Rasio KDRT di Kabupaten Rokan Hulu menurun menjadi 27,20%. Terakhir pada tahun 2020 rasio KDRT kembali mengalami penurunan menjadi 21,42%. Meskipun cenderung menurun, rasio KDRT ini masih perlu dikurangi hingga mendekati 0. Lebih rinci mengenai Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 80

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	4,67	3,78	3,67	3,37	3,37
2	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	11,11	11,11	11,11	11,11	4,4
3	Rasio KDRT	44,00	14,2	50,00	27,2	21,42
4	Persentase angkatan kerja Perempuan	23,20	32,36	31,37	33,91	-
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	90	-	-	-	78,4
6	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	5	5	5	1	4
7	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	5	6	6	7	2
8	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak	10	1	4	5	22
9	Jumlah Sekolah Ramah Anak		-	58	58	652
10	Jumlah Puskesmas Ramah Anak		-	-	21	21
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		60,75	62,48	52,81	52,08
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		81,84	81,85	82,13	81,88

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dimana pada tahun 2015 terjadi 8 kasus kekerasan terhadap perempuan. Lalu menurun menjadi 5 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan masih berjumlah 5



kasus, namun pada tahun 2019 telah terjadi perubahan yang cukup baik dengan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi 1 kasus saja. Namun, pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 4 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan menjamin adanya pelayanan kesetaraan peran perempuan dalam masyarakat.

Sementara itu dan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2020 cukup memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian serius karena terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari 5 kasus pada tahun 2019 meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2020. Edukasi pada masyarakat, terutama pada anak mesti lebih digiatkan lagi agar kasus pelecehan seksual ini tidak makin meningkat dan supaya lingkungan masyarakat menjadi aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Sementara itu, untuk indikator Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak terlihat mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2017 kekerasan pada anak berjumlah 6 kasus dan sudah menurun menjadi 2 kasus pada tahun 2020.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Indeks Pemberdayaan Gender berada pada angka 60,75% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 62,48. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 52,81 dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 52,08. Penurunan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hulu ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama dengan masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya peran perempuan di masyarakat. Pemerintah bersama dengan masyarakat harus lebih meningkatkan kesempatan pada perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan manajerial. Dengan demikian maka perempuan akan lebih diberdayakan dan tidak terjadi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga perempuan juga mempunyai kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang sama dengan laki-laki.

Sementara itu untuk indeks pembangunan gender di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir terlihat belum mengalami perubahan yang signifikan. Terakhir pada tahun 2020 capaian indeks pembangunan Kabupaten Rokan Hulu adalah 81,88 sedikit menurun dibanding tahun 2019 dengan capaian 82,13. Angka ini masih perlu ditingkatkan agar mendekati 100, sehingga ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rokan Hulu semakin merata.

2.3.2.3 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman



konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017 yaitu sebesar 89.282,60 ton. Pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan Kabupaten Rokan Hulu sempat mengalami penurunan menjadi 89.965,38 ton. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 98.561,35 ton. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama beras mencapai angka 102.954,14 ton.

Jika dilihat ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Rokan Hulu selama empat tahun terakhir sudah memenuhi standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari. Pada tahun 2017 ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein Kabupaten Rokan Hulu sudah sebesar 3.041,48 kkal/kapita/hari dan 73,78 gram/kapita/hari, tahun 2018 sebesar 3.036,02 kkal/kapita/hari dan 73,87 gram/kkapita/hari. Selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 3.041,48 kkal/kapita/hari dan 76,38 gram/kapita/hari. Kemudian pada tahun 2020 ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein Kabupaten Rokan Hulu mencapai angka 3.042,00 kkal/kapita/hari dan 72,87 gram/kapita/hari. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein per kapita di Kabupaten Rokan Hulu sudah lebih mandiri dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Capaian ini merupakan hasil upaya bersama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pangan di daerah. Dalam empat tahun terakhir terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu cukup stabil, yaitu sebanyak 10 kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama untuk konsumsi per kapita khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Hal ini dapat terlihat dari ketersediaan pangan utama yang terus membaik selama lima tahun terakhir, baik ketersediaan beras, daging, telur maupun ikan.

Ketersediaan pangan utama beras pada tahun 2016 sebesar 135,57 kg/kapita/tahun kemudian pada tahun 2017 sebesar 135,52 kg/kapita/tahun. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 137,30 kg/kapita/tahun. Untuk tahun 2019 Ketersediaan pangan utama beras meningkat menjadi 138,60 kg/kapita/tahun. Terakhir pada tahun 2020 ketersediaan beras mencapai 139,50 kg/kapita/tahun. Ketersediaan daging untuk konsumsi per kapita pada tahun 2016 sebesar 5,61 kg/kapita/tahun kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,86 kg/kapita/tahun. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 5,99 kg/kapita/tahun. Untuk tahun 2019 ketersediaan daging mengalami sedikit penurunan menjadi 5,47 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2020 ketersediaan daging sebesar 5,0 kg/kapita/tahun.

Meski ketersediaan pangan utama Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dalam lima tahun terakhir, namun Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu dalam periode 2018-2020 terlihat mengalami penurunan. Pada tahun 2018 indeks



ketahanan pangan berada pada angka 57,76, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 54,25 dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 53,24. Lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II- 81
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Ketahanan Pangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	-	89.282,60	86.965,38	98.561,35	102.954,14
2	Ketersediaan Pangan dalam bentuk energi (kkal/kap/hari)	-	3.014,26	3.036,02	3.041,48	3.042,00
3	Ketersediaan Pangan dalam bentuk protein (gram/kap/hari)	-	73,78	73,87	76,38	72,87
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (komoditas)	-	10	10	5	10
5	Ketersediaan Pangan Utama					
	-Beras (kg/kapita/tahun)	135,57	135,52	137,30	138,60	139,50
	-Daging (kg/kapita/tahun)	5,61	5,86	5,99	5,47	5,40
	-Telur (kg/kapita/tahun)	6,21	6,20	6,36	6,38	6,83
	-Ikan (kg/kapita/tahun)	26,42	25,96	25,96	36,64	23,73
6	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	57,76	54,25	53,24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang Terintegrasi. Kerawanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan FSVA Kabupaten Rokan Hulu, di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat 20 desa yang rawan pangan. Desa Tibawan tergolong sangat rentan, Desa Rantau Binuang Sakti, Desa Ulak Patian, Desa Bonai, Desa Teluk Sono, Desa Pauh, Desa Kepenuhan Hulu, Desa Kepenuhan Barat Mulya, Desa Pasir Indah, dan Desa Kasang Padang tergolong rentan, Desa Sungai Kumango, Desa Sialang Jaya, Desa Rambah Jaya, Desa Sungai Dua Indah, Desa Pasir Luhur, Desa Sungai Kuning, Desa Kepenuhan Jaya, Desa Kepenuhan Barat Sungai Rokan Jaya, Desa Tangun, dan Desa Dayo tergolong agak rentan. Berdasarkan prioritas penanganan, sebanyak 1 desa (0,69%) berada di prioritas 1, 9 desa (6,21%) berada di prioritas 2, 10 desa (6,90%) berada di proritas 3, 58 desa (40,00%) berada di prioritas 4, 49 desa (33,79%) berada diprioritas 5, dan 18 desa (12,41%) berada diprioritas 6. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 82

Data Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	INDEKS KOM	PRIO KOMP
1	RAMBAH SAMO	RAMBAH BARU	68,29	6
2	RAMBAH HILIR	LUBUK KRAPAT	67,49	6
3	ROKAN IV KOTO	ROKAN	66,75	6



No	Nama Kecamatan	Nama Desa	INDEKS KOM	PRIO KOMP
4	RAMBAH	PASIR MAJU	66,73	6
5	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	KEMBANG DAMAI	66,33	6
6	RAMBAH	RAMBAH TENGAH UTARA	64,59	6
7	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH	63,57	6
8	RAMBAH	PEMATANG BERANGAN	63,33	6
9	RAMBAH SAMO	KARYA MULYA	62,70	6
10	ROKAN IV KOTO	CIPANG KIRI HULU	62,25	6
11	RAMBAH	MENAMING	61,68	6
12	RAMBAH	PASIR PENGARAIAN	60,30	6
13	ROKAN IV KOTO	ALAHAN	60,24	6
14	RAMBAH HILIR	SEJATI	60,03	6
15	RAMBAH SAMO	MASDA MAKMUR	59,84	6
16	KEPENUHAN	KEPENUHAN TENGAH	59,80	6
17	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	SANGKIR INDAH	59,79	6
18	TANDUN	KUMAIN	59,42	6
19	RAMBAH	KOTO TINGGI	58,99	5
20	BONAI DARUSSALAM	RAWA MAKMUR	58,98	5
21	RAMBAH SAMO	PASIR MAKMUR	58,64	5
22	ROKAN IV KOTO	ROKAN TIMUR	58,51	5
23	ROKAN IV KOTO	SIKEBAU JAYA	58,46	5
24	ROKAN IV KOTO	LUBUK BENDAHARA	57,87	5
25	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO BARAT	57,70	5
26	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTAMA	57,44	5
27	RAMBAH	PASIR BARU	57,04	5
28	RAMBAH	RAMBAH TENGAH HILIR	55,81	5
29	ROKAN IV KOTO	ROKAN KOTO RUANG	55,74	5
30	RAMBAH HILIR	PASIR UTAMA	55,73	5
31	RAMBAH	SUKA MAJU	55,38	5
32	UJUNG BATU	UJUNG BATU TIMUR	55,28	5
33	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA	54,84	5
34	TAMBUSAI UTARA	TANJUNG MEDAN	54,81	5
35	RAMBAH	BABUSSALAM	54,74	5
36	RAMBAH HILIR	PASIR JAYA	54,35	5
37	RAMBAH HILIR	SUNGAI SITOLANG	54,26	5
38	KABUN	KOTO RANAH	53,78	5
39	UJUNG BATU	UJUNG BATU	53,73	5
40	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR TENGAH	53,53	5
41	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR	53,05	5
42	TAMBUSAI	TAMBUSAI TENGAH	53,01	5
43	TAMBUSAI UTARA	BANGUN JAYA	52,96	5
44	KEPENUHAN HULU	PEKAN TEBIH	52,95	5
45	ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	52,93	5
46	RAMBAH HILIR	RAMBAH	52,85	5
47	TAMBUSAI	SUKAMAJU	52,75	5
48	RAMBAH SAMO	SUNGAI KUNING	52,62	5
49	KEPENUHAN HULU	KEPAYANG	52,57	5
50	KUNTO DARUSSALAM	KOTA RAYA	52,52	5
51	UJUNG BATU	SUKA DAMAI	52,32	5
52	RAMBAH SAMO	TELUK AUR	52,13	5
53	BONAI DARUSSALAM	KASANG MUNGKAL	52,10	5
54	TANDUN	TAPUNG JAYA	51,98	5
55	RAMBAH SAMO	LUBUK BILANG	51,81	5
56	KABUN	KABUN	51,68	5
57	RAMBAH SAMO	MARGA MULYA	51,68	5



No	Nama Kecamatan	Nama Desa	INDEKS KOM	PRIO KOMP
58	PENDALIAN IV KOTO	AIR PANAS	51,65	5
59	TAMBUSAI	TALI KUMAIN	51,32	5
60	TANDUN	TANDUN	51,07	5
61	ROKAN IV KOTO	PEMANDANG	50,93	5
62	UJUNG BATU	NGASO	50,77	5
63	ROKAN IV KOTO	LUBUK BENDAHARA TIMUR	50,55	5
64	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	50,54	5
65	KABUN	GITI	50,53	5
66	KUNTO DARUSSALAM	BUKIT INTAN MAKMUR	50,49	5
67	KEPENUHAN	KEPENUHAN BARU	50,47	5
68	KEPENUHAN	KEPENUHAN BARAT	50,34	4
69	KUNTO DARUSSALAM	KOTA BARU	50,15	4
70	UJUNG BATU	PEMATANG TEBIH	49,97	4
71	KEPENUHAN HULU	MUARA JAYA	49,94	4
72	BANGUN PURBA	PASIR AGUNG	49,93	4
73	TANDUN	PUO RAYA	49,89	4
74	KEPENUHAN	KEPENUHAN RAYA	49,88	4
75	RAMBAH SAMO	SUNGAI SALAK	49,63	4
76	TAMBUSAI UTARA	SIMPANG HARAPAN	49,61	4
77	KABUN	BATU LANGKAH BESAR	49,43	4
78	RAMBAH HILIR	RAMBAH MUDA	49,36	4
79	TAMBUSAI UTARA	RANTAU SAKTI	49,29	4
80	ROKAN IV KOTO	LUBUK BETUNG	49,16	4
81	KUNTO DARUSSALAM	BAGAN TUJUH	48,90	4
82	RAMBAH	RAMBAH TENGAH HULU	48,58	4
83	KABUN	ALANTAN	48,09	4
84	KUNTO DARUSSALAM	KOTA LAMA	47,94	4
85	KABUN	BENCAH KESUMA	47,75	4
86	RAMBAH HILIR	SEROMBAU INDAH	47,74	4
87	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	47,71	4
88	TAMBUSAI	BATAS	47,56	4
89	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	47,50	4
90	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	47,45	4
91	TAMBUSAI UTARA	MAHATO	47,22	4
92	TAMBUSAI UTARA	PAYUNG SEKAKI	47,12	4
93	RAMBAH	TANJUNG BELIT	47,12	4
94	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	47,11	4
95	RAMBAH SAMO	LUBUK NAPAL	47,03	4
96	PENDALIAN IV KOTO	SULIGI	46,84	4
97	TANDUN	BONO TAPUNG	46,73	4
98	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR TIMUR	46,46	4
99	TANDUN	KOTO TANDUN	46,44	4
100	TAMBUSAI UTARA	PAGAR MAYANG	46,40	4
101	TAMBUSAI UTARA	MEKAR JAYA	46,20	4
102	RAMBAH	RAMBAH TENGAH BARAT	46,18	4
103	TAMBUSAI	BATANG KUMU	46,07	4
104	TAMBUSAI	TAMBUSAI BARAT	46,02	4
105	KEPENUHAN	KEPENUHAN HILIR	45,97	4
106	TAMBUSAI	LUBUK SOTING	45,72	4
107	KUNTO DARUSSALAM	SUNGAI KUTI	45,66	4
108	TANDUN	TANDUN BARAT	45,58	4
109	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN	45,56	4



No	Nama Kecamatan	Nama Desa	INDEKS KOM	PRIO KOMP
110	TAMBUSAI UTARA	SUKA DAMAI	45,43	4
111	PENDALIAN IV KOTO	SUNGAI KANDIS	45,26	4
112	RAMBAH SAMO	LANGKITIN	45,03	4
113	TAMBUSAI	SIALANG RINDANG	44,81	4
114	TAMBUSAI	RANTAU PANJANG	44,79	4
115	TAMBUSAI	TINGKOK	44,60	4
116	BANGUN PURBA	BANGUN PURBA BARAT	44,50	4
117	TAMBUSAI	TAMBUSAI TIMUR	44,43	4
118	ROKAN IV KOTO	CIPANG KIRI HILIR	44,40	4
119	TAMBUSAI UTARA	MAHATO SAKTI	44,39	4
120	KEPENUHAN	KEPENUHAN TIMUR	44,39	4
121	RAMBAH HILIR	MUARA MUSU	44,36	4
122	PENDALIAN IV KOTO	BENGKOLAN SALAK	44,33	4
123	KUNTO DARUSSALAM	MUARA DILAM	44,08	4
124	KUNTO DARUSSALAM	KOTA INTAN	43,79	4
125	ROKAN IV KOTO	TANJUNG MEDAN	43,34	4
126	TAMBUSAI	SUNGAI KUMANGO	42,84	3
127	RAMBAH	SIALANG JAYA	42,58	3
128	BANGUN PURBA	RAMBAH JAYA	42,17	3
129	RAMBAH HILIR	SUNGAI DUA INDAH	42,13	3
130	KUNTO DARUSSALAM	PASIR LUHUR	42,08	3
131	TANDUN	SUNGAI KUNING	42,01	3
132	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN JAYA	41,07	3
133	KEPENUHAN	KEPENUHAN BARAT SUNGAI ROKAN JAYA	40,85	3
134	BANGUN PURBA	TANGUN	39,90	3
135	TANDUN	DAYO	37,96	3
136	BONAI DARUSSALAM	KASANG PADANG	36,38	2
137	KUNTO DARUSSALAM	PASIR INDAH	36,12	2
138	KEPENUHAN	KEPENUHAN BARAT MULYA	35,51	2
139	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	34,93	2
140	BONAI DARUSSALAM	PAUH	34,91	2
141	BONAI DARUSSALAM	TELUK SONO	34,66	2
142	BONAI DARUSSALAM	BONAI	33,22	2
143	KEPENUHAN	ULAK PATIAN	33,13	2
144	KEPENUHAN	RANTAU BINUANG SAKTI	27,48	2
145	ROKAN IV KOTO	TIBAWAN	23,94	1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.4 Urusan Wajib Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Realiasi kinerja dalam urusan pertanahan pada kabupaten Rokan Hulu cukup baik hal ini dapat dilihat tren dalam persentase luas lahan bersertifikat selama tiga tahun



terakhir cenderung tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada penyelesaian kasus tanah negara dimana pada tahun 2019 telah terjadi penyelesaian pada 4 lokasi sengketa tanah dan pada tahun 2020 sudah tidak ada sengketa tanah. Sementara itu untuk penyelesaian izin lokasi dalam empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, dari 8 izin pada tahun 2017 menjadi 12 izin pada tahun 2020. Hal ini secara umum menggambarkan adanya peningkatan pelayanan pertanahan di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 83

Realiasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Persentase luas lahan bersertifikat	15,44%	46,40%	75%	
Terhadap luas kabupaten				28,27%
Terhadap luas APL				59,44%
Penyelesaian kasus tanah Negara		1 (dalam Proses)	4 sengketa tanah garapan	tidak ada
Penyelesaian izin lokasi	8 izin lokasi	5 izin Lokasi	9 izin lokasi	12 izin lokasi

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, 2021 dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.5 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu cakupan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Dimana pada lima tahun terakhir belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan dalam penanganan sampah, terutama sampah di lingkungan perumahan permukiman perkotaan yang sangat mengganggu kenyamanan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2017, persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 19.30 persen, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 18.70 persen kemudian tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 19.54 persen. Namun, pada tahun 2020 persentase jumlah sampah yang tertangani kembali mengalami penurunan menjadi 18,83 persen.

Lemahnya penanganan sampah ini ditenggarai karena cakupan area pelayanan persampahan yang masih rendah, yaitu hanya sebesar 3,73% pada tahun 2020 dan hanya terpusat di daerah Ibukota Kabupaten. Penyebab lain dari rendahnya penanganan sampah di Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan penanganan sampah yang belum ditangani oleh pihak swasta. Hingga saat ini belum ada pihak swasta yang terjun dalam penanganan sampah di Kabupaten Rokan Hulu. Padahal peran swasta dapat membantu penanganan sampah



yang lebih baik. Untuk itu maka perlu dibuka kesempatan untuk swasta berupa pembuatan kerja sama yang saling menguntungkan. Penanganan sampah melalui TPS 3R juga telah dilakukan. Pada tahun 2017 penanganan sampah sebesar 0,008 %, selanjutnya tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,009% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yakni 0,012%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 0,011%. Persentase ini adalah hasil perbandingan antara penanganan sampah tertangani dengan jumlah penduduk. Penurunan ini terjadi karena jumlah penduduk yang semakin bertambah sementara penanganan sampah berada pada posisi tidak berubah. Pemerintah telah membangun sarana dan prasarana TPS 3R yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya Kecamatan Rambah, Rambah Hilir dan Rokan IV Koto. Lebih rinci untuk Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 84
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	0	dt	80%	80%	70%	Belum Melakukan Perhitungan
2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	0	90,18%	99,45%	99,45%	90,21%	Belum Melakukan Perhitungan
3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0	0	0	0	31,4 %	Belum Melakukan Perhitungan
4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	dt	40	51	57	58	Perusahaan dan Rumah Sakit
5	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten yang ditandatangani Bupati	dt	0	14	21	22	Izin Penyimpanan Limbah B3
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	47	48	50	53	53	Usaha
7	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kendaraan roda 4
8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	-	-	-	Masih dalam tahap peninjauan
9	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	-	-	-	-	-	Masih dalam tahap peninjauan
10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	-	-	-	Masih dalam tahap peninjauan
11	Penetapan hak MHA	-	-	-	-	-	Masih dalam tahap peninjauan
12	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	-	-	-	Masih dalam tahap peninjauan
13	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	-	-	-	-
14	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-	-	-	-	-
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	-	-	-	-	-



NO	Indikator	Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kecamatan yang ditangani	6 kasus	7 kasus	4 kasus	9 kasus	14 kasus	status terselesaikan
17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen PTMP
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus	-	-	-	-	-	-
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,010	0,008	0,009	0,012	0,011	Persen
20	Persentase cakupan area pelayanan	6,37	3,09	3,09	3,73	3,73	Persen
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19,88	19,3	18,7	19,54	18,83	Persen
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	75	75,16	75,16	-	-	Nilai pemantauan Adipura
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	-	-	-	-	Di Kab. Rohul belum ada dikelola swasta
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	Di Kab. Rohul belum ada dikelola swasta

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.6 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik dan pelayanan dari pemerintah daerah juga sudah baik.

Pada tahun 2016 cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 83,16 persen. Kemudian pada tahun 2017, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu meningkat menjadi 83,83 persen, jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 89,04 persen pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89,20 persen. Tahun 2020, cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 92,62 persen dari total penduduk wajib KTP. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan penerbitan KTP di Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat baik. Lebih rinci untuk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 85

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	304.334	314.291	333.538	334.481	353,079



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah penduduk wajib KTP	365.964	374.906	374.586	374.960	381,196
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	83,16%	83,83%	89,04%	89,20%	92,62%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sementara itu jika dilihat dari Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per kecamatan pada tahun 2020 juga terlihat sudah merata. Tidak ada kecamatan yang memiliki Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di bawah 85%. Artinya tidak ada kesenjangan pelayanan penerbitan KTP di kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 86

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Per Kecamatan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jumlah penduduk wajib KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1	Ujung Batu	31.936	33.597	95,06%
2	Rokan Iv Koto	15.712	16.650	94,37%
3	Rambah	31.970	34.366	93,03%
4	Tambusai	37.709	40.699	92,65%
5	Kepenuhan	14.980	17.525	85,48%
6	Kunto Darussalam	27.637	29.971	92,21%
7	Rambah Samo	22.387	23.369	95,80%
8	Rambah Hilir	26.272	28.456	92,32%
9	Tambusai utara	51.042	57.315	89,06%
10	Bangun Purba	12.552	13.115	95,71%
11	Tandun	21.263	21.974	96,76%
12	Kabun	17.194	17.925	95,92%
13	Bonai Darussalam	14.364	16.827	85,36%
14	Pagaran Tapah Darussalam	7.755	8.079	95,99%
15	Kepenuhan Hulu	11.634	12.268	94,83%
16	Pendalian IV Koto	8.672	9.060	95,72%
	Rokan Hulu	353.079	381.196	92,62%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Rokan Hulu, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah melakukan kunjungan langsung untuk perekaman dan pencetakan KTP di tempat. Data penyandang disabilitas tersebut diambil dari laporan kasus perkasus yang dilaporkan oleh Desa dan langsung diintervensi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Terkait dengan Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pelayanan administrasi kependudukan dilakukan apabila ada laporan dari hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari hasil verifikasi dan validasi tersebut kebijakan yang dilakukan kunjungan langsung untuk perekaman dan pencetakan KTP di tempat.



Indikator selanjutnya dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Pada indikator cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan. Tercatat masing-masing sebesar 92,89 persen dan 90,73 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 77,86 persen dan 45,37 persen. Lebih rinci untuk indikator cakupan penerbitan akta kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 87

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan (0-18 Tahun)	98.936	157.202	180.827	186.110	187.512
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (0-18 Tahun)	218.046	201.896	204.536	205.124	201.858
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	45,37	77,86	88,41	90,73	92,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator lain dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah Rasio pasangan berakte nikah. Dimana pada tahun 2016 Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 12,73%. Jumlah ini setiap tahun mengalami peningkatan, hingga terakhir pada tahun 2020 Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 36,09%. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah. Peningkatan pelayanan dari pemerintah bersamaan dengan peningkatan kesadaran pasangan nikah dapat menjadi solusi untuk membuat pencatatan akte nikah menjadi lebih baik di masa depan. Lebih rinci untuk Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 88

Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	32.006	38.502	53.985	82.547	93.307
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	251.438	255.757	254.646	256.155	258.574
3	Rasio pasangan berakte nikah	12,73%	15,05%	21,20%	32,23%	36,09%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sementara itu jika dilihat dari Rasio pasangan berakte nikah per kecamatan pada tahun 2020 terlihat secara rata-rata masih rendah. Kecamatan Bonai Darussalam rasio pasangan berakte nikah paling kecil, sebesar 31,37%. Sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam memiliki Rasio pasangan berakte nikah paling tinggi dengan 43,01%. Lebih rinci untuk rasio pasangan berakte nikah per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 89
Rasio pasangan berakte nikah per kecamatan Tahun 2020 Semester I
Kab. Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Rasio pasangan beraktenikah
1	Ujung Batu	8.210	22.143	37,08%
2	Rokan IV Koto	3.676	11.045	33,28%
3	Rambah	8.345	22.602	36,92%
4	Tambusai	9.471	26.034	36,38%
5	Kepenuhan	4.748	11.919	39,84%
6	Kunto Darussalam	7.934	21.127	37,55%
7	Rambah Samo	5.792	16.257	35,63%
8	Rambah Hilir	7.092	19.485	36,40%
9	Tambusai utara	12.669	39.528	32,05%
10	Bangun Purba	3.177	9.231	34,42%
11	Tandun	6.048	15.060	40,16%
12	Kabun	4.732	12.649	37,41%
13	Bonai Darussalam	3.380	10.776	31,37%
14	Pagaran Tapah Darussalam	2.344	5.450	43,01%
15	Kepenuhan Hulu	3.127	8.744	35,76%
16	Pendalian IV Koto	2.562	6.524	39,27%
Rokan Hulu		93.307	258.574	36,09%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator lain dalam urusan administrasi dan pencatatan sipil adalah rasio bayi berakte kelahiran. Secara umum rasio ini sudah sangat baik dalam lima tahun terakhir, yaitu sudah berada di atas 99% dari jumlah bayi yang ada memiliki akte kelahiran. Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 99,48 persen. Angka ini sedikit menurun dari tahun 2019 dimana rasio bayi berakte kelahiran adalah sebesar 99,62 persen. Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 90
Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran (0-1 Tahun)	7.458	6.690	8.759	9.212	7.971
2	Jumlah Bayi (0-1 Tahun)	7.804	6.729	8.802	9.247	8.013
3	Rasio bayi berakte kelahiran	95,57	99,42	99,51	99,62	99,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.7 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.



Kabupaten Rokan Hulu memiliki 139 lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Dari 139 LPM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sudah 100% LPM termasuk dalam kategori Aktif pada 2016-2020. Hanya saja, dalam lima tahun terakhir, belum ada LPM yang memiliki kelompok binaan dan belum ada LPM yang berprestasi, terutama pada tingkat provinsi dan nasional.

Sementara itu, dari total 155 PKK yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sudah semuanya terkategori aktif. Selain itu masing-masing PKK di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sudah berhasil membina setidaknya 10 kelompok. Jumlah kelompok binaan PKK ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PKK yang mengemban fungsi pemberdayaan masyarakat desa, sudah memberikan pelayanan dan kinerja yang cukup baik sehingga menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang dibina oleh PKK.

Indikator lain dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah persentase posyandu aktif. Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan pelayanan yang sangat baik pada periode 2016-2020. Hal ini dilihat dari persentase posyandu yang sudah aktif 100% dalam memberikan pelayanan kesehatan di desa. Lebih rinci untuk Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 91

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM	139	139	139	139	139
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	0	0	0	0
3	Persentase LP M aktif	100	100	100	100	100
4	Persentase LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	4,2	4,1	9	10
7	Persentase Posyandu aktif	98,83	75,17	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (dalam persen)	800	53,30	53,30	80,00	100
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (dalam persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sementara itu bila dilihat dari sebaran jumlah kelompok binaan PKK per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antar kecamatan. Pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kepenuhan dan Rambah Hilir memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat tinggi. Sementara beberapa kecamatan lain memiliki jumlah kelompok binaan yang sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Kecamatan Kepenuhan memiliki rata-rata jumlah kelompok binaan PKK paling banyak, dengan rata-rata 34,5 kelompok binaan PKK, sedangkan Kecamatan Pagaran Tapah belum memiliki kelompok binaan PKK sama sekali. Lebih rinci



untuk Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 92
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten dalam
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1	Bangun Purba	22	8	2,8
2	Bonai Darussalam	4	8	0,5
3	Kabun	3	7	0,4
4	Kepenuhan	345	10	34,5
5	Kepenuhan Hulu	2	6	0,3
6	Kunto Darussalam	34	10	3,4
7	Pagaran Tapah Darussalam	0	4	0,0
8	Pendalian IV Koto	12	6	2,0
9	Rambah	58	14	4,1
10	Rambah Hilir	440	14	31,4
11	Rambah Samo	304	15	20,3
12	Rokan IV Koto	50	14	3,6
13	Tambusai	2	12	0,2
14	Tambusai Utara	29	12	2,4
15	Tandun	129	10	12,9
16	Ujung Batu	139	5	27,8
Rokan Hulu		1573	155	10,1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Rokan Hulu terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, LPM dan PKK. Sedangkan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Lembaga Kerapatan Adat yang tersebar di seluruh Kecamatan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 93
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat
Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan											
			RT		RW		K. TARUNA		POS YANDU		LPM		PKK	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Ujung Batu	1	4	47	73	13	30	1	4	1	36	1	4	1	4
Rokan IV Koto	1	12	11	169	4	81	1	13	1	35	1	13	1	13
Rambah	1	11	30	259	14	119	1	13	1	45	1	13	1	13
Tambusai	1	3	21	205	14	89	1	11	1	62	1	11	1	11
Kepenuhan	1	7	27	133	8	65	1	9	1	33	1	9	1	9
Kunto Darussalam	1	2	90	174	16	56	1	9	1	40	1	9	1	9
Rambah Samo		8		233		90		14		57		14		15
Rambah Hilir		8		298		114		13		53		13		14



Kecamatan	Jumlah Lembaga Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan											
			RT		RW		K. TARUNA		POS YANDU		LPM		PKK	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
Tambusai Utara		2		326		119		11		64		11		12
Bangun Purba		4		143		59		7		23		7		8
Tandun		5		164		60		9		31		9		10
Kabun		5		102		41		6		38		6		7
Pagaran Tapah		2		62		24		3		17		3		4
Bonai Darussalam		6		142		57		7		28		7		8
Kepenuhan Hulu		3		92		37		5		25		5		6
Pendalian IV Koto		1		85		33		5		27		5		6
Jumlah	6	83	226	2.660	69	1.074	6	139	6	614	6	139	6	149

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Indikator lain pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik. Pada tahun 2020 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Kabupaten Rokan Hulu sudah sangat baik, dengan rata-rata mencapai 91,30%. Bahkan pada beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Pendalian IV Koto, Rambah, Rokan IV Koto, Tambusai, dan Tambusai Utara Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sudah mencapai 100%. Lebih rinci untuk Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 94

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
1	BangunPurba	7	7	100%
2	Bonai Darussalam	5	7	71.4%
3	Kabun	5	6	83.3%
4	Kepenuhan	9	9	100%
5	Kepenuhan Hulu	5	5	100%
6	Kunto Darussalam	7	9	77.7%
7	Pagaran Tapah Darussalam	2	3	66.6%
8	Pendalian IV Koto	5	5	100%
9	Rambah	13	13	100%
10	Rambah Hilir	11	13	84.6%
11	Rambah Samo	12	14	85.7%
12	Rokan IV Koto	13	13	100%
13	Tambusai	11	11	100%



No	Kecamatan	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
14	Tambusai Utara	11	11	100%
15	Tandun	8	9	88.8%
16	Ujung Batu	3	4	75%
Rokan Hulu		127	139	91.3%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk mengukur perkembangan desa, Kabupaten Rokan Hulu menggunakan indeks desa membangun (IDM), yang dibangun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks tersebut dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, berdasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan intervensi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah desa, baik tipologi maupun modal sosial. Hasil penilaian perkembangan kemandirian desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu: (1) Desa sangat tertinggal, (2) Desa tertinggal, (3) Desa berkembang, (4) Desa maju dan (5) Desa mandiri.

Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020 pada aplikasi *idm.kemendesa.go.id*, menunjukkan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu belum terdapat desa mandiri. Hal ini dikarenakan oleh luasnya wilayah desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang membutuhkan dana yang besar untuk memenuhi ketersediaan pelayanan dasar bagi masyarakat desa untuk kesehatan, pendidikan dan layanan ekonomi, anggaran yang masuk kepada pemerintah desa belum mampu untuk mengejar ketertinggalan segala aspek untuk menuju Desa Mandiri, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa baik pendidikan maupun bimtek/diklat untuk menuju Desa Mandiri. Adapun langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan percepatan pemenuhan desa mandiri, diantaranya: 1) Membangun kapasitas melalui lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang kritis dan dinamis; 2) Memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa dan bpd serta interaksi dinamis antara lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 3) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif; dan 4) Membangun bumdesa dan lembaga ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan produktif. Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 32 desa maju, 97 desa berkembang, 8 desa tertinggal, dan 2 desa sangat tertinggal. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut:



Tabel II- 95
Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
1	UJUNG BATU	SUKA DAMAI	0,9143	0,7833	0,2667	0,6548	BERKEMBANG
		NGASO	0,9371	0,9167	0,3333	0,729	MAJU
		UJUNG BATU TIMUR	0,7429	0,85	0,6667	0,7532	MAJU
		PEMATANG TEBIH	0,8229	0,7	0,5333	0,6854	BERKEMBANG
2	ROKAN IV KOTO	CIPANG KANAN	0,5429	0,4667	0,6	0,5365	TERTINGGAL
		CIPANG KIRI HULU	0,5943	0,55	0,2667	0,4703	SANGAT TERTINGGAL
		CIPANG KIRI HILIR	0,5086	0,5167	0,3333	0,4529	SANGAT TERTINGGAL
		TANJUNG MEDAN	0,7257	0,5667	0,6	0,6308	BERKEMBANG
		LUBUK BENDAHARA TIMUR	0,7829	0,6833	0,8667	0,7776	MAJU
		LUBUK BENDAHARA	0,8629	0,6333	0,8667	0,7876	MAJU
		SIKEBAU JAYA	0,8057	0,5	0,8	0,7019	BERKEMBANG
		ROKAN KOTO RUANG	0,8	0,4667	0,8	0,6889	BERKEMBANG
		ROKAN TIMUR	0,76	0,5	0,6	0,62	BERKEMBANG
		LUBUK BETUNG	0,7886	0,45	0,8667	0,7017	BERKEMBANG
		PEMANDANG	0,7143	0,5167	0,7333	0,6548	BERKEMBANG
		ALAHAN	0,8286	0,6167	0,6667	0,704	BERKEMBANG
		TIBAWAN	0,7314	0,55	0,6667	0,6494	BERKEMBANG
3	RAMBAH	RAMBAH TENGAH UTARA	0,8229	0,9	0,6	0,7743	MAJU
		RAMBAH TENGAH HILIR	0,96	0,6	0,6	0,72	MAJU
		RAMBAH TENGAH HULU	0,7943	0,5	0,5333	0,6092	BERKEMBANG
		RAMBAH TENGAH BARAT	0,8171	0,45	0,6	0,6224	BERKEMBANG
		MENAMING	0,7657	0,6	0,6	0,6552	BERKEMBANG
		PASIR BARU	0,7943	0,5	0,6667	0,6537	BERKEMBANG
		SIALANG JAYA	0,8057	0,65	0,8667	0,7741	MAJU
		TANJUNG BELIT	0,6343	0,6667	0,5333	0,6114	BERKEMBANG
		KOTO TINGGI	0,9143	0,8333	0,6	0,7825	MAJU
		SUKA MAJU	0,8	0,5667	0,6667	0,6778	BERKEMBANG
		PEMATANG BERANGAN	0,92	0,8	0,5333	0,7511	MAJU
		BABUSSALAM	0,8629	0,7167	0,8	0,7932	MAJU
		PASIR MAJU	0,7943	0,5333	0,6667	0,6648	BERKEMBANG
4	TAMBUSAI	TAMBUSAI BARAT	0,7657	0,5833	0,4667	0,6052	BERKEMBANG
		TAMBUSAI TIMUR	0,76	0,5333	0,6667	0,6533	BERKEMBANG
		BATAS	0,8114	0,6667	0,6667	0,7149	MAJU
		TALIKUMAIN	0,8457	0,5833	0,4	0,6097	BERKEMBANG
		RANTAU PANJANG	0,7657	0,55	0,6667	0,6608	BERKEMBANG
		SUNGAI KUMANGO	0,8457	0,5667	0,6667	0,693	BERKEMBANG
		BATANG KUMU	0,7714	0,5833	0,4667	0,6071	BERKEMBANG
		SIALANG RINDANG	0,7829	0,6	0,6667	0,6832	BERKEMBANG
		SUKA MAJU	0,8971	0,6667	0,6667	0,7435	MAJU
		LUBUK SOTING	0,8	0,6	0,8	0,7333	MAJU
		TINGKOK	0,8343	0,7333	0,6	0,7225	MAJU
5	KEPENUHAN	KEPENUHAN BARAT	0,76	0,6667	0,6667	0,6978	BERKEMBANG
		KEPENUHAN HILIR	0,7657	0,6667	0,6	0,6775	BERKEMBANG
		KEPENUHAN TIMUR	0,88	0,6	0,8	0,76	MAJU
		KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	0,7486	0,6	0,4667	0,6051	BERKEMBANG



NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
		KEPENUHAN RAYA	0,8343	0,5833	0,6667	0,6948	BERKEMBANG
		KEPENUHAN BARU	0,9086	0,65	0,6667	0,7417	MAJU
		KEPENUHAN BARAT MULYA	0,8	0,6	0,6667	0,6889	BERKEMBANG
		ULAK PATIAN	0,7829	0,65	0,6667	0,6998	BERKEMBANG
		RANTAU BINUANG SAKTI	0,72	0,55	0,8	0,69	BERKEMBANG
6	KUNTO DARUSSALAM	KOTA INTAN	0,7257	0,5833	0,7333	0,6808	BERKEMBANG
		MUARA DILAM	0,8	0,6333	0,6667	0,7	BERKEMBANG
		KOTA RAYA	0,76	0,6167	0,6667	0,6811	BERKEMBANG
		KOTA BARU	0,8343	0,6	0,6	0,6781	BERKEMBANG
		SUNGAI KUTI	0,7771	0,6333	0,4667	0,6257	BERKEMBANG
		PASIR INDAH	0,72	0,4667	0,6667	0,6178	BERKEMBANG
		PASIR LUHUR	0,7257	0,6	0,6	0,6419	BERKEMBANG
		BUKIT INTAN MAKMUR	0,8114	0,5667	0,6	0,6594	BERKEMBANG
		BAGAN TUJUH	0,8286	0,6	0,6	0,6762	BERKEMBANG
7	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	0,8514	0,5667	0,8	0,7394	MAJU
		RAMBAH SAMO BARAT	0,8571	0,6167	0,6667	0,7135	MAJU
		RAMBAH BARU	0,8229	0,55	0,6667	0,6798	BERKEMBANG
		RAMBAH UTAMA	0,8857	0,6167	0,6667	0,723	MAJU
		PASIR MAKMUR	0,7943	0,5333	0,6667	0,6648	BERKEMBANG
		KARYA MULYA	0,88	0,5167	0,6667	0,6878	BERKEMBANG
		MARGA MULYA	0,8114	0,6	0,6667	0,6927	BERKEMBANG
		LANGKITIN	0,6571	0,4833	0,6667	0,6024	BERKEMBANG
		MASDA MAKMUR	0,8057	0,45	0,6667	0,6408	BERKEMBANG
		LUBUK NAPAL	0,6457	0,35	0,7333	0,5763	TERTINGGAL
		TELUK AUR	0,6971	0,4667	0,8667	0,6768	BERKEMBANG
		SEI SALAK	0,6914	0,65	0,6667	0,6694	BERKEMBANG
		SEI KUNING	0,7771	0,5167	0,5333	0,609	BERKEMBANG
		LUBUK BILANG	0,76	0,45	0,5333	0,5811	TERTINGGAL
8	RAMBAH HILIR	RAMBAH HILIR	0,72	0,6	0,6	0,64	BERKEMBANG
		RAMBAH HILIR TENGAH	0,7257	0,4833	0,8	0,6697	BERKEMBANG
		RAMBAH HILIR TIMUR	0,7886	0,5167	0,8	0,7017	BERKEMBANG
		PASIR UTAMA	0,7829	0,6167	0,6667	0,6887	BERKEMBANG
		PASIR JAYA	0,7943	0,6667	0,6	0,687	BERKEMBANG
		RAMBAH MUDA	0,7943	0,7	0,6	0,6981	BERKEMBANG
		SUNGAI SITOLANG	0,8	0,6	0,6	0,6667	BERKEMBANG
		LUBUK KERAPAT	0,7714	0,5	0,6	0,6238	BERKEMBANG
		RAMBAH	0,8743	0,6833	0,5333	0,697	BERKEMBANG
		SEROMBOU INDAH	0,68	0,55	0,5333	0,5878	TERTINGGAL
		SUNGAI DUA INDAH	0,7714	0,4333	0,3333	0,5127	TERTINGGAL
		MUARA MUSU	0,76	0,4833	0,7333	0,6589	BERKEMBANG
		SEJATI	0,7314	0,5	0,6	0,6105	BERKEMBANG
9	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI UTARA	0,8343	0,6167	0,6667	0,7059	BERKEMBANG
		MAHATO	0,8	0,8167	0,5333	0,7167	MAJU
		BANGUN JAYA	0,8457	0,8167	0,4667	0,7097	MAJU
		SIMPANG HARAPAN	0,7543	0,5667	0,6	0,6403	BERKEMBANG
		PAGAR MAYANG	0,8114	0,5333	0,6	0,6483	BERKEMBANG
		PAYUNG SEKAKI	0,84	0,4	0,6	0,6133	BERKEMBANG
		MEKAR JAYA	0,7943	0,6333	0,6667	0,6981	BERKEMBANG
		TANJUNG MEDAN	0,88	0,6333	0,6	0,7044	BERKEMBANG
		SUKA DAMAI	0,7543	0,55	0,6667	0,657	BERKEMBANG
		RANTAU SAKTI	0,7714	0,5333	0,6667	0,6571	BERKEMBANG



NO	KECAMATAN	DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
10	BANGUN PURBA	MAHATO SAKTI	0,8057	0,5667	0,6667	0,6797	BERKEMBANG
		PASIR AGUNG	0,9029	0,6667	0,6667	0,7454	MAJU
		PASIR INTAN	0,7943	0,5167	0,6667	0,6592	BERKEMBANG
		RAMBAH JAYA	0,84	0,7167	0,6667	0,7411	MAJU
		BANGUN PURBA	0,7314	0,6	0,6	0,6438	BERKEMBANG
		BANGUN PURBA TIMUR JAYA	0,8229	0,6667	0,6667	0,7187	MAJU
		BANGUN PURBA BARAT	0,7657	0,65	0,4667	0,6275	BERKEMBANG
11	TANDUN	TANDUN	0,8857	0,8	0,6	0,7619	MAJU
		KUMAIN	0,7714	0,65	0,5333	0,6516	BERKEMBANG
		BONO TAPUNG	0,7943	0,65	0,6667	0,7037	BERKEMBANG
		DAYO	0,9257	0,5667	0,6667	0,7197	MAJU
		TAPUNG JAYA	0,7657	0,6	0,6667	0,6775	BERKEMBANG
		PUO RAYA	0,7486	0,7833	0,4667	0,6662	BERKEMBANG
		SEI KUNING	0,7314	0,5667	0,5333	0,6105	BERKEMBANG
		KOTO TANDUN	0,7886	0,5667	0,6	0,6517	BERKEMBANG
TANDUN BARAT	0,7771	0,5167	0,6667	0,6535	BERKEMBANG		
12	KABUN	KABUN	0,9486	0,7833	0,6667	0,7995	MAJU
		ALANTAN	0,8171	0,6167	0,7333	0,7224	MAJU
		KOTO RANAH	0,7486	0,65	0,4667	0,6217	BERKEMBANG
		BONCAH KESUMA	0,8	0,6833	0,6667	0,7167	MAJU
		BATU LANGKAH BESAR	0,7543	0,6	0,6	0,6514	BERKEMBANG
		GITI	0,8286	0,5	0,5333	0,6206	BERKEMBANG
13	BONAI DARUSSALAM	TELUK SONO	0,7029	0,5667	0,3333	0,5343	TERTINGGAL
		SONTANG	0,8629	0,6667	0,6	0,7098	MAJU
		BONAI	0,8057	0,5833	0,4667	0,6186	BERKEMBANG
		RAWA MAKMUR	0,7714	0,55	0,6667	0,6627	BERKEMBANG
		PAUH	0,72	0,5833	0,7333	0,6789	BERKEMBANG
		KASANG PADANG	0,5829	0,4167	0,5333	0,511	TERTINGGAL
		KASANG MUNGKAL	0,7486	0,5333	0,8	0,694	BERKEMBANG
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	PAGARAN TAPAH	0,8514	0,55	0,9333	0,7783	MAJU
		KEMBANG DAMAI	0,76	0,75	0,4667	0,6589	BERKEMBANG
		SANGKIR INDAH	0,8	0,6167	0,6667	0,6944	BERKEMBANG
15	KEPENUHAN HULU	KEPENUHAN HULU	0,8343	0,5333	0,6	0,6559	BERKEMBANG
		PEKAN TEBIH	0,8457	0,6167	0,7333	0,7319	MAJU
		KEPAYANG	0,7543	0,3833	0,6	0,5792	TERTINGGAL
		MUARA JAYA	0,8	0,65	0,6	0,6833	BERKEMBANG
		KEPENUHAN JAYA	0,8114	0,55	0,6	0,6538	BERKEMBANG
16	PENDALIAN IV KOTO	PENDALIAN	0,7371	0,6667	0,6667	0,6902	BERKEMBANG
		BENGKOLAN SALAK	0,8114	0,6167	0,6667	0,6983	BERKEMBANG
		SULIGI	0,7886	0,6333	0,6667	0,6962	BERKEMBANG
		AIR PANAS	0,7829	0,6667	0,6667	0,7054	BERKEMBANG
		SEI KANDIS	0,7314	0,6333	0,6667	0,6771	BERKEMBANG

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai kebutuhan dan potensi desa. Jumlah BUMDes yang telah terbentuk di Kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini berjumlah 139 BUMDes dan Unit usaha BUMDes berjumlah 461 unit. Adapun potensi desa di Kabupaten Rokan Hulu didominasi perkebunan. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut:



Tabel II- 96
BUMDes dan Unit Usaha BUMDes, Potensi serta Lembaga Ekonomi Lain di
Kabupaten Rokan Hulu

No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
1	Damai Mandiri	Sukadamai/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. BNI Link 3. Pertanian	PERDAGANGAN, JASA, BATU KALI, GALIAN C, KULINER	PT, SAI
2	BUMDes Ngaso Mandiri	Ngaso / Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Unit Rental Mobil 3. Unit Cucian Hidrolik 4. Budidaya Cacing Sutra	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN,	Nihil
3	Timur Sejahtera	Ujungbatu Timur/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi (Pupuk) 3. BRILink 4. Sewa Kios	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	PUAP
4	BUMDesa TEBIH MANDIRI	Pematang Tebih/ Ujungbatu	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi 3. Gas LPG	INDUSTRI BATU BATA, PERDAGANGAN, PERKEBUNAN	PT, SAI, PT UKL, PT BRJ, PT Syuhada, PT Reval
5	Berkat Yakin	Cipang Kanan/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Edc BRILink	WISATA AIR TERJUN, PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
6	Mentawai Hulu Sepakat	Cipang Kiri Hulu/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Foto Copy dan ATK 3. Wifi 4. Sewa Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PERTANIAN,HASIL HUTAN	Nihil
7	Titian Barokah	Cipang Kiri Hilir/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Mobil Angkutan L300 3. Depot Air Minum 4. Wifi 5. Penjualan Gas Elpiji 6. Sarana Pertanian 7. Sewa Tenda dan Pelaminan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
8	BUMDesa Berkat Usaha	Tanjung Medan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan dan BNI 46	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
9	BUMDesa Luberti Jaya	Lubuk Bendahara Timur/ Rokan IV Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Transaksi Online 4. Perikanan	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Setia, PT SAI
10	Lubend Karya Mandiri	Lubuk Bendahara/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Perikanan	WISATA BUDAYA DAN AIR TERJUN, PERKEBUNAN	Kebun YPLI, PT KCN
11	Jaya Mandiri	Sikebau Jaya/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan 3. Pasar 4. Kolam Pancing	PERKEBUNAN, PERTANIAN	KUD Karya ssepakat, Kube Tunas merapi Manunggal
12	BUMDesa Tuah Bosamo	Rokan Koto Ruang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotran 3. Wisata	PERTANIAN SAWAH, WISATA KERAJAAN ROKAN, DAN PERKEBUNAN	Nihil
13	BUMDesa Rotim Jaya	Rokan Timur/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprotran	PERKEBUNAN, PERTANIAN	Nihil
14	BUMDesa Betung Mandiri	Lubuk Betung/Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Toko Grosir Eceran Barang Harian 3. Serbuk Ayam Pedaging	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan Istiqomah, PUAP mandiri



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
15	BUMDesa Pemandang Indah	Pemandang/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa 3. Wifi Desa	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
16	BUMDesa Alahan Mandiri	Alahan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRilink 3. Pasar Karet Tender 4. Kedai Sembako	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
17	BUMDesa Setia Amana	Tibawan/ Rokan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Wifi dan ATK 3. Pengolahan Makanan	WISATA SPORT PARAHLAYANG, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
18	BUMDes Ratu Jaya	Rambah Tengah Utara/ Rambah	1. Konveksi 2. Penjualan Beras	PERDAGANGAN, JASA DAN KULINER	Pusar Kota
19	BUM Desa Bina Usaha	Rambah Tengah Hilir/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Wisata Danau 4. Unit Pasar 5. Unit TPS 3 R (Tempat Pengelolaan Sampah)	WISARA DANAU, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Gapoktan
20	Maju Bersama	Rambah Tengah Hulu/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
21	BUMDes Haiti Karya	Rambah Tengah Barat/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit Fotocopy ATK 2. Unit Serbuk Gula Aren	PERKEBUNAN AREN, KARET DAN SAWIT	Nihil
22	BUMdes Mekar Jaya	Menaming/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Sembako 3. Kredit Barang 4. Bangunan 5. Perikanan	SAWAH, POTENSI AIR, LAHAN PETERNAKAN LUAS, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani dan PUAP
23	BUMDes Mitra Mandiri	Pasir Baru/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit Toko Bangunan 3. Unit Usaha Saprodi	SAWAH, PERTANIAN, PETERNAKAN	KUD Daya Mak mur, Kopwan Tunas Baru
24	BUMDes Cipta Karya Bersama	Sialang Jaya/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Unit LPG 3 Kg 3. Unit Saprodi	WISATA , PERKEBUNAN, PERTANIAN	Kelompok Tani
25	Tanjung Mandiri	Tanjung Belit / Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Gas LPG 3. Keramba Ikan	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
26	Jaya Bersama	Koto Tinggi / Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Pasar dan Pariwisata	PERDAGANAGAN DAN JASA	Pusat kota
27	Maju Bersama	Suka Maju / Rambah	1. Unit Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	Koperasi Dei Tunggal
28	BUMDesa Pematang Jaya	Pematang Berangan/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Perkreditan Barang 3. LPG 4. Papan Bunga	PUSAT KOTA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
29	BUMDes Babussalam Sejahtera	Babussalam/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Pariwisata	PERDAGANGAN, JASA, REKLAME, PERHOTELAN, PASAR DAN KULINER	Pusat kota
30	BUMDes Maju Lestari	Pasir Maju/ Rambah	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi 3. Brilink 4. Taman Hiburan	PERTANIAN, SAWAH, PERKEBUNAN	KUD Daya Makmur, Kopwan Mekar Bersemi



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
31	BUM Desa Maju Jaya	Tambusai Barat/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN, BATAS KABUPATEN DAN PROVINSI	Koperasi Hati Nurani,PT Genk, Pt Jabal Perkasa, Kopwan
			2. Unit BRllink		
			3. Unit Transfortasi		
			4. Unit Abu Senator		
32	BUMDesa Amanah	Tambusai Timur/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	KUD Kepertam, KUD Siaga Makmur
			2. Saprodi		
			3. Kantin		
33	BUMDes Usaha Sepakat Jaya	Batas/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETANIAN DAN PERDAGANGAN	Koptan Sialang Sakti
			2. Sewa Molen		
			3. Leasing Syariah		
			4. Sewa Tenda		
34	BUM Desa Bertuah	Talikumain / Tambusai	1. Unit BUMDesmart	PERDAGANGAN, DEKAT PUSAT KECAMATAN, JASA	Nihil
			2. Unit Simpan Pinjam dan BRllink		
			3. Unit Futsal		
35	Bina Usaha	Rantau Panjang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT GSM
			2. Saprotan		
36	BUMDesa D.Lima Saroa	Sungai Kumango/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Nihil
			2. ATK		
			3. Transportasi		
			4. Edc BRllink		
			5. Pangkalan LPG 3 Kg		
37	BUMDes Maju Bersama	Tambusai/ Batang Kumu	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNANA	Nihil
			2. Jasa Angkutan		
			3. Unit LPG Belum di Gunakan		
38	BUMDes Usaha Bersama Sialang Rindang	Sialang Rindang/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan dan Gapoktan
			2. Unit Resto		
			3. Unit Lele		
			4. Unit Ubi Casesa		
39	BUM Desa Sumber Rezeki	Suka Maju/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	Kelompok Tani
			2. Wahana Permainan		
			3. Papan Bunga		
			4. Jual Beli Tbs		
40	BUM Desa SAROHA	Lubuk Soting/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN	KUD Sawit Perkasa, KUD Siaga Makmur
			2. Saprotan		
			3. Kebun Sawit		
41	BUMDesa Tingkok Bersatu Insan Lubis	Tingkok/ Tambusai	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani
			2. Saprotan		
			3. Kebun		
42	BUMDesa Bina Usaha	Kepenuhan Barat / Kepenuhan	1. Simpan Pnjam	PERKEBUNAN	Kelompok Tani
			2. PB Sawit		
			3. Saprodi		
43	BUMDes Maju Bersama	Kepenuhan Hilir/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN	Koperasi Kasimang, Koperasi Karya nyata
			2. Unit Dagang		
44	BUM Desa Timur Makmur	Kepenuhan Timur/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Koperasi Sawit Mekar Sari,Kopsatimj a, PT Sji
			2. Unit Dagang Sarana Pertanian		
			3. Unit Toko Bangunan		
			4. Penambahan Modal Usaha Perdagangan		
45	Karya Bina Mulya	Kepenuhan Barat Beroja/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN DAN DAGANG	



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			2. Pangkalan Elpiji 3 Kg		
46	Makmur Sejahtera	Kepenuhan Raya / Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi		
47	BUM Desa Maju Lancar	Kepenuhan Baru/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN DAN DAGANG	KUD Sumber Makmur
48	BUMDes Karya Bina Mulia	Kepenuhan Barat Mulya/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Gas	PERKEBUNAN	KUD Barat Myulya, PT Era sawita
49	BUMDesa ULPA Jaya	Ulak Patian/ Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Pertamina 3. Toko Bangunan	PERKEBUNAN, PERIKANAN	Koperasi BBL, PT Piss 2, PT Sji Coy
50	BUMDesa Bunga Tanjung Jaya	Rantau Binuang Sakti/Kepenuhan	1. Simpan Pinjam 2. Wisata Religi 3. Gas Pengecer	WISATA RELIGI, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Kapsa Muda
51	BUMDes Kota Intan	Kota Intan/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Sarana Produksi Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD kota Intan
52	BUMDesa Bina Usaha	Muara Dilam/Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Kedai BUMDesa	PERKEBUNANA DAN PERDAGANGAN	KUD elok Busamo, Kopwan, PT CBA,PT SIS, PT Hutayan, PT SAM, PT DBC,PT CSA, Pertashop
53	BUM Desa Sumber Rezeki	Kota Raya/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun 3. Ternak Sapi 4. Usaha Kredit Barang 5. Tapak Hunian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN	KUD Sido Muncul, PT Edi, PT CBA, PT EMA
54	BUMDesa Sumber Makmur	Kota Baru/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel + Sperpark	PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
55	BUMDes Karya Mulia	Sungai Kuti/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kebun Sawit 3. Unit Penyewaan Tenda	PERKEBUNAN	
56	BUMDesa Syari'ah Mitra Mandiri	Pasir Indah / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Pertanian 4. BRlink	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	KUD, Kelompok tani 3, kopwan
57	BUMDesa Sri Rejeki	Pasir Luhur / Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Depot Air Minum 4. Penggemukan Sapi 5. Kebun Sawit 6. Kantin Gor	PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN DAGANG	KUD Usaha Bersama, Kopwan
58	BUMDesa Usaha Makmur	Bukit Intan Makmur/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Intan Makmur
59	BUMDes Permata Jaya	Bagan Tujuh/ Kunto Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Kebun Kelapa Sawit 4. Saprotan	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN, JASA	KUD Tujuh Permata, PT SJI
60	BUM Desa Maju Berkah	Rambah Samo/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Kredit Barang 3. Unit TBS Sawit 4. Unit Dagang Sarana Pertanian	PERKEBUNAN DAN DAGANG	Gapoktan Makmur Bersama



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
61	BUMDes Mitra Usaha Mandiri	Rambah Samo Barat / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BUMserda 3. Puyuh Petelur	PERKEBUNAN, REKLAME, LAPANGAN PESAWAT	
62	BUMDes Mekar Sari	Rambah Baru/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Perkreditan Barang 3. Perdagangan Beras 4. Bahan Bangunan 5. Pasar Desa	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan
63	BUMDes Rambah Utama	Rambah Utama/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. BRlink 3. Pasar Desa 4. Unit Toko Bangunan	SAWAH, PETERNAKAN , PERCETAKAN BATU BATA, PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	KUD Sri Rezeki
64	BUMDesa Sarana Makmur	Pasir Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bengkel dan Sperpark 3. Budidaya Ikan	SAWAH YANG LUAS, PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
65	BUMDesa Karya Usaha Bersama	Karya Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Jasa Transportasi 4. Air Masak	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
66	BUMDes Mitra Usaha Mulya	Marga Mulya / Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang & Layanan BRlink 3. Transportasi 4. Peternakan	SAWAH PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	Gapoktan Tani Mulya
67	BUMDesa Langkitin	Langkitin/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Bus Anak Sekolah 3. Bengkel dan Sperpark	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN DAGANG	
68	BUMDes Masda Mandiri	Masda Makmur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang 3. Depot Air Masak 4. Sewa Alat Pertanian 5. Alat Pertanian 6 Unit	SAWAH , PETERNAKAN PERKEBUNAN, PERTANIAN, PERIKANAN	
69	Suka Maju	Lubuk Napal/ Rambah Samo	1.Kredit Barang 2.Dagang Kelontong	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
70	BUM Desa Aur Sejahtera	Teluk Aur/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Sarana Pertanian 3. Unit Wisata Embung 4. Unit Angkutan Hasil Pertanian Dan Perkebunan	WISATA BENDUNGAN, PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan Korojo Busamo, PT KSM
71	BUMDesa Sei Salak Bersatu	Sungai Salak/ Rambah Samo	1. Simpan Pinjam 2. Ternak Lele 3. Pengelohan Pakan Ternak	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
72	BUMDesa Maju Jaya	Sei Kuning/ Rambah Samo	1. Perkreditan Barang 2. Transportasi 3. Gas LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	PT SAI, PT Agro Jaya
73	BUMDesa Cahaya Baru	Lubuk Bilang/Ramba h Samo	1. Saprodi 2. Galon	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	PT SAI, PT Agro Lestari,
74	BUMDesa Rambah Hilir	Rambah Hilir/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Mini Market 3. Edc	PERKEBUNAN, PERDAGANGAN, GALIAN C	



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
75	Karya Muda Mandiri	Rambah Hilir Tengah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Harian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Muman
76	BUMDesa Bersatu	Rambah Hilir Timur/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
77	BUMDesa Jaya Utama	Pasir Utama / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi, Kredit Barang dan Penggemukan Sapi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
78	BUMDes Karya angun	Pasir Jaya/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Usaha Gas 3. Unit Usaha Jasa Listrik 4. Unit Usaha Saprodi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
79	BUMDes Rambah Muda Jaya	Rambah Muda/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang Syariah 3. BRlink 4. Penanaman Semangka	PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERDAGANGAN	KUD, Gapoktan
80	BUMDesa Bina Usaha	Sungai Sitolang/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. ATK 3. Tenda Pelaminan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
81	BUMDesa Berkah Mandiri	Lubuk Kerapat/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Air Isi Ulang 3. Tenda Dan Dekorasi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUBE
82	BUMDesa Kumu Jaya Bersama	Rambah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Usaha Distributor Beras 3. Unit Usaha Kredit Barang 4. Unit Usaha Mandirilink 5. Mesin Produksi	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	
83	BUM Desa Tuah Serombou Jaya	Serombou Indah / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Air Bersih 3. Unit Penyewaan Molen	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
84	BUMDesa Rezki Bersama	Sungai Dua Indah/ Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2 Toko Bangunan	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Gapoktan
86	Tuah Negeri	Muara Musu / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Unit Pangkalan LPG 3kg	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
86	BUM Desa Rahmat Sejati	Sejati / Rambah Hilir	1. Simpan Pinjam 2. Pupuk Subsidi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
87	BUMDes Rantau Kasai	Tambusai Utara/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Pangkalan Gas LPG 3. Penyewaan Alat Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Hati Nurani
88	BUMDesa Arwana	Mahato/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Pangkalan LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Persukuan, KUD Mahato Bersatu, KUD Karya Bakti, KUD Rumpun Melayu
89	BUMDes Mitra Jaya Mandiri	Bangun Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Penggaduhan Sapi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi Dwi Tunggal
90	BUMDesa Harapan Jaya Lesatari	Simpang Harapan/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Perdagangan 3. Ternak Sapi 4. Pertanian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Gapoktan



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
91	BUMDes Sumber Makmur	Pagar Mayang/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
			2. Unit Dagang/Gas LPG		
			3. Unit Peternakan Ayam		
			4. Unit Peternakan Sapi		
92	BUMDes Sumber Mulya	Payung Sekaki/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
			2. Unit Saprotan		
			3. Unit LPG		
			4. Ternak Sapi		
93	BUMDes Maju Jaya	Mekar Jaya/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	PUAP
			2. Peternakan Sapi		
			3. Giling Jenang		
94	BUM Desa Syariah Kembang Setanjung	Tanjung Medan/ Tambusai Utara	1. Simpanan Dan Pembiayaan Syariah	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	Koperasi CU Mandiri
			2. Brilink		
			3. Gas LPG (Subsidi dan Non Subsidi)		
95	BUM Desa Syariah Nur Amanah	Suka Damai/Tambu sai Utara	1. Simpan Pinjam 2. Agen BRI Link 3. Perkreditan Barang 4. Sewa Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Koperasi Karya Bakti
96	BUMDes Sumber Rejeki	Rantau Sakti/ Tambusai Utara	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sumber Ayu, PUAP
			2. Unit LPG		
			3. Depot Air Minum		
97	BUMDesa Syariah Usaha Bersama	Mahato Sakti / Tambusai Utara	1. Pembiayaan Syariah	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Nihil
			2. Pangkalan Gas elpiji 3 kg		
			3. Suplayer TBS Sawit		
			4. Mini ATM EDC BRilink		
98	Karya Agung Mandiri	Pasir Agung / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Gapoktan
			2. Unit BRilink		
			3. Pasar Desa		
			4. Sembako		
			5. Penggemukan Sapi		
			6. Kantin		
99	BUMDes Intan Makmur	Pasir Intan/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Kopwan
			2. Unit Sapi		
			3. Wisata Air		
			4. Digital Aplikasi		
100	BUMDesa Jaya Bersama	Rambah Jaya/ Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	Gapoktan Bina Usaha
			2. Kolam Renang		
101	BUMDes Satahi	Bangun Purba/Bangu n Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	
			2. Toko Bangunan		
102	BUMDes Mekar Serumpun	Bangun Purba Timur Jaya / Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN.	
			2. Unit Ternak Kerbau		
			3. Unit Kebun Desa		
103	BUMDes Tunas Muda	Bangun Purba Barat/Bangun Purba	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Sari Utama dan Kelompok Tani
			2. Pupuk		
			3. Alat Pertanian		
104	BUMDes Harapan Baru	Tangun/Bang un Purba	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	
			2. Ayam Potong		
105	BUMDesa Tandun Mandiri	Tandun/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERDAGANGAN, PASAR, PERKEBUNAN, JASA	KUD Tansba, PKS PTPN
			2. Ram		
			3. Pengetaman Kayu		
106	BUMDes	Desa Kumain	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN,	KUD Mekar



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
	Lestari	/Tandun	2. Pembiayaan 3. Edc 4. Toko Bangunan 5. Depot Air Minum 6. Pangkalan Gas	PERDAGANAN	Jaya, Kopwan Amanah
107	BUMDesa Bono Tapung	Bono Tapung/ Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Ayam Potong 3. Permainan Anak Anak	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Tani Sejahtera
108	BUMDes Dayo Sejahtera	Dayo/ Tandun	1. Simpan Pinjam	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Dayo Mukti
109	BUMDesa Bunga Sari	Tapung Jaya / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Wifi 4. Perikanan & Peternakan	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	KUD Karya Mukti
110	BUMDesa Tunas Harapan Jaya	Puo Raya/ Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Toko Saprotan 4. Toko Bangunan	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
111	BUMDesa Makmur Jaya	Sei Kuning/ Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Ternak Ayam Potong	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
112	BUMDesa Kotan Mandiri	Koto Tandun / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. Edc BRILink 3. Pengelolaan Pasar Kaget 4. Ternak Ayam Pedaging 5. Penyewaan Alat Pertanian	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	
113	Padura Lestari	Tandun Barat / Tandun	1. Simpan Pinjam 2. ATK (Alat Tulis Kantor) 3. Gedung Serbaguna 4. Penggaduhan Sapi	PERKEBUNAN, PERDAGANAN	Nihil
114	BUMDesa Kabun Sejahtera	Kabun / Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Toko Bangunan	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	KUD Bumi Asih
115	BUM Desa Aliantan Sepakat	Aliantan/ Kabun	1. Sp Ditungg 2. Kredit Brg Ditungg 3. Bahan Bangunan 4. Unit Wisata	PERDAGANGAN, JASA DAN PERKEBUNAN	PT Padasa, PT FAA
116	BUMDes Maju Bersama	Koto Ranah/ Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Unit Potocopy & ATK 3. Kebun Kelapa Sawit 4. Sewa Alat Camping 5. Mandiri Link	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Kelompok Tani
117	BUMDesa Artha Mitra Kesuma	Boncah Kesuma/ Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Air Galon 3. Toko Saprotan 4. Toko Bangunan 5. Pasar 6. Sewa Tenda 7. Online BRILink 8. Posfin	PERKEBUNAN DAN PERTANIAN	Koperasi Bangkit Usahan Makmur, dan Kopwan
118	BUMDesa Barokah Jaya	Batu Langkah Besar/ Kabun	1. Toko Saprotan	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	
119	BUMDesa Perdana Bakti	Giti/ Kabun	1. Simpan Pinjam 2. Kredit Barang 3. Online Transfer	PERKEBUNAN , DAN BATAS KABUPATEN	



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
120	BuUMDesa Anugrah Sejahtera	Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. BRilink 3. Dagang 4. Pertanian	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	Kopwan, PT SAM, PT utayan, Pt Andika
121	TUAH KAMPUNG	Sontang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Adc- BRilink	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	KUD Sontang Bertuah, PT RAS, PT GPH, PT SSP, PT APSL, PT BDB
122	BUMDesa Kualo Bonai	Bonai/ Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Fotokopi dan ATK 3. EDC BRilink	PERKEBUNAN DAN PERIKANAN	
123	Mandiri Jaya Makmur	Rawa Makmur / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. ATK & Foto Copy 3. Depot Air Minum 4. Gas elpiji	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
124	BUMDesa Mahligai Sri Pauh	Pauh/ Bonai Darussalam	1. Siman Pinjam 2. Depot Air Minum Isi Ulang	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Cepron, PT Alim Desa, PT Parna, PT Raka
125	BUMDesa Kasang Padang Mandiri	Kasang Padang / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Edc BRilink	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	Kopwan
126	Mekar Bersama	Kasang Mungkal / Bonai Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Dagang 3. Lele	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sungai 2 Cemerlang, Kopwan, PT PIS 2
127	BUMDes Patap Mandiri	Pagaran Tapah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	KUD panca Usaha, PTPN 5 Sei Rokan
128	BUM Desa Kembang Damai	Kembang Damai/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. BRilink 3. Perkreditan 4. Spare Park 5. Molen	PERDAGANGAN DAN PERKEBUNAN	
129	BUMDes Sangkir Sejahtera	Sangkir Indah/ Pagaran Tapah Darussalam	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air "Ro" 3. Lumbung Jeruk	PERKEBUNAN JERUK, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD, PT SAI, Kelompok Tani 3 klp
130	BUM Desa Tangkerang Jaya	Kepenuhan Hulu/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Unit Dagang Wisata Kuliner & Edukasi	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
131	BUMDesa Pekan Tebih	Pekan Tebih/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Kebun Sawit 3. Quari	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
132	Kepayang Abadi	Kepayang / Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Gas LPG 3. Depot Air 4. Kebun Desa	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
133	BUMDesa Muara Jaya	Muara Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Minum 3. Gas LPG	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
134	BUMDes Sinar Gemilang	Kepenuhan Jaya/ Kepenuhan Hulu	1. Simpan Pinjam 2. Depot Air Galon	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Sari Mukti, PT Eka Dura
135	Pendalian Mandiri	Pendalian/ Pen dalian Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRilink 3. Penyewaan Sarana Dan	PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	KUD Tapak Sakti, PT MCM, PTPN V Sei Asam



No	BUMDesa	Desa/ Kecamatan	Unit Usaha	Potensi	Lembaga Ekonomi Lain
			Prasarana Lapangan Sepak Bola		
136	Mitra Bersama	Bengkolan Salak/ Pendalihan Iv Koto	1.Perikanan 2.BRILink	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Hasta Utama, PTPN V sia sam
137	BUMDes Suligi Mandiri	Suligi / Pendalihan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Pinjaman Barang 3. Unit Pengelolaan Pasar 4. Unit Kredit Candak Kulak 5. Unit Perdagangan Skala Mikro 6. Unit Peternakan	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	
138	Usaha Madani	Air Panas/Pendalihan IV Koto	1. Simpan Pinjam 2. BRILink 3. Doorsmeer Hidrolik 4. Kebun 5. Peternakan Kambing	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Wisma Tani dan 25 Kelompok Tani
139	Maju Jaya Sejahtera	Sei Kandis/ Pendalihan Iv Koto	1. Simpan Pinjam 2. Saprodi Pertanian 3. Lebah Kelulut 4. Kebun	PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN	KUD Mekar Bersama

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.8 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu selama 4 (empat) tahun terakhir sebesar 3,90 persen. Secara umum, komposisi penduduk menurut usia produktif dan tidak produktif menunjukkan bahwa kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 64,56 %, sedangkan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif sebanyak 35,46%. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program - program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait banyaknya penduduk usia produktif, sering dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN, 2014). Sementara itu, beberapa tahun terakhir, Kabupaten Rokan Hulu sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50% dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadapi bonus demografi adalah menerapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, serta



mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2021 tentang GDPK Provinsi Riau.

Tujuan GDPK Kabupaten Rokan Hulu antara lain: 1) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan kualitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran penduduk; 2) Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan secara nasional dan regional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk; 3) Mewujudkan keseimbangan sumberdaya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi; 4) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumberdaya keluarga; 5) Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pembangunan system informasi data kependudukan; dan 6) Sebagai pedoman atau acuan bagi pemangku kepentingan dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan kependudukan di Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut: 1) Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak azazi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan; 2) Tercapainya *window opportunity* melalui pengelolaan kualitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk; 3) Terciptanya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumberdaya keluarga secara optimal; dan 4) Terwujudnya pembangunan data base kependudukan melalui pembangunan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah peserta KB aktif dan baru. Pada tahun 2016 jumlah peserta KB baru sebanyak 16.381 peserta dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 82.293 peserta. Pada tahun 2017 jumlah peserta KB baru sebanyak 16.647 peserta dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 93.228 peserta. Pada tahun 2018 jumlah peserta KB baru sebanyak 9.471 peserta dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 64.043 peserta, selanjutnya pada tahun 2019 jumlah peserta KB baru sebanyak 12.231 peserta dan peserta KB aktif sebanyak 78.915 peserta. Terakhir pada tahun 2020 jumlah peserta KB Aktif berjumlah 70.359 orang.

Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga dapat diukur diantaranya melalui indikator Ratio Akseptor KB. Ratio Akseptor KB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 sebesar 18,74% dari total jumlah pasangan usia subur. Jumlah Ratio Akseptor KB ini meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 namun kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 74,33% pada tahun 2020. Perkembangan peningkatan rasio akseptor KB yang cukup signifikan ini menunjukkan



adanya peningkatan kesadaran penduduk Rokan Hulu untuk mengendalikan tingkat kelahiran.

Indikator lain dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB. Dimana pada tahun 2020 sudah sebanyak 13,79% dinas-dinas terkait Perangkat sudah berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB.

Beberapa indikator lain seperti Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Rokan Hulu sudah menunjukkan cakupan yang sangat baik, yaitu mencapai 100% dalam beberapa tahun terakhir. Begitu pula dengan indikator Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, indikator Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan dan indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB yang juga sudah menunjukkan kinerja sangat baik, yaitu mencapai 100%. Lebih rinci untuk Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 97

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB Baru	16.381	16.647	9.471	12.231	11.108
2	Jumlah Peserta KB Aktif	82.293	93.228	64.043	78.915	70.359
3	Jumlah Klinik KB	28	28	28	28	30
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	20	13,79	13,79	13,79	13,79
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	20	13,79	13,79	13,79	13,79
6	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	0	0
7	Jumlah II-11 lector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	6	5	5	-	-
8	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.	1	2	2	-	3
9	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	3	3	2	2
10	Ratio Akseptor KB	18,74	7,20	16,81	66,68	74,33
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49.	50,00	55,54	60,50	66,68	2,50
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	-	-	-	61,62	61,62
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need).	18,74	7,20	16,81	15,46	15,43
14	Cakupan anggota Bina Keluarga	100	100	100	100	100



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Balita (BKB) ber-KB.					
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	58,33	7,5	100	100	100
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	6,25	6,25	50	50	50
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	325	325	325	325	325
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	100	100
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan.	100	100	100	100	100
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	58,33	7,5	100	100	100
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	117	104	111		800
22	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS).	0	0	0	0	0
23	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	98,46	58,49	17,39	2,89	0
24	Jumlah Kelompok Akseptor	na	16	16	16	16
25	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	na	100,461	108,829	118,352	70,359

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Rasio Akseptor KB per Kecamatan di Rokan Hulu terlihat adanya ketidakmerataan persentase pengguna akseptor KB pada pasangan usia subur. Dimana terdapat beberapa kecamatan yang memiliki rasio akseptor KB yang sangat tinggi, sementara beberapa kecamatan lain memiliki rasio akseptor KB yang masih rendah. Ketimpangan pemerataan rasio akseptor KB ini ditengarai karena adanya perbedaan kesadaran dan pengetahuan masyarakat antar kecamatan dan juga adanya perbedaan pelayanan kesehatan pada beberapa kecamatan. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan kecamatan dengan rasio akseptor KB paling tinggi di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu mencapai 91,24% pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB. Sedangkan kecamatan Kabun menjadi kecamatan dengan rasio akseptor KB paling sedikit, yaitu hanya sebesar 51,82% dari total pasangan usia subur. Lebih rinci untuk Ratio Akseptor KB Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 98

Ratio Akseptor KB Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Ratio Akseptor KB
1	Bangun Purba	3170	4.667	67,92
2	Bonai Darussalam	352	539	65,31

No	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Ratio Akseptor KB
3	Kabun	968	1.868	51,82
4	Kepenuhan	2956	5.169	57,19
5	Kepenuhan Hulu	2345	2.741	85,55
6	Kunto Darussalam	6913	9.230	69,13
7	Pagaran Tapah Darussalam	2021	2.215	91,24
8	Pendalian IV Koto	1424	2.538	56,11
9	Rambah	4190	5.343	78,42
10	Rambah Hilir	5131	7.012	73,17
11	Rambah Samo	4290	5.131	83,61
12	Rokan IV Koto	2075	2.887	71,87
13	Tambusai	3168	4.091	77,44
14	Tambusai Utara	2840	3.864	73,50
15	Tandun	3688	4.836	76,26
16	Ujung Batu	6767	8.228	82,24
Rokan Hulu		52.298	70.359	74,33

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 per Kecamatan di Rokan Hulu terlihat adanya ketidakmerataan pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49. Dimana terdapat beberapa kecamatan yang memiliki Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 yang sangat tinggi, sementara beberapa kecamatan lain memiliki Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 yang masih rendah. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan kecamatan dengan Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 paling tinggi di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu mencapai 91,24% pasangan usia subur. Sedangkan Kecamatan Kabun menjadi kecamatan dengan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 paling sedikit, yaitu hanya sebesar 51,82% dari total pasangan usia subur. Lebih rinci untuk Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 99

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
Kecamatan Dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
1	Bangun Purba	3170	4.667	67,92
2	Bonai Darussalam	352	539	65,31
3	Kabun	968	1.868	51,82
4	Kepenuhan	2956	5.169	57,19
5	Kepenuhan Hulu	2345	2.741	85,55
6	Kunto Darussalam	6913	9.230	69,13
7	Pagaran Tapah Darussalam	2021	2.215	91,24
8	Pendalian IV Koto	1424	2.538	56,11



No	Kecamatan	Jumlah Akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
9	Rambah	4190	5.343	78,42
10	Rambah Hilir	5131	7.012	73,17
11	Rambah Samo	4290	5.131	83,61
12	Rokan IV Koto	2075	2.887	71,87
13	Tambusai	3168	4.091	77,44
14	Tambusai Utara	2840	3.864	73,50
15	Tandun	3688	4.836	76,26
16	Ujung Batu	6767	8.228	82,24
Rokan Hulu		52.298	70.359	74,33

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Untuk mengukur dampak hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Rata-rata Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun sangat rendah di Kabupaten Rokan Hulu. Dimana dari 70.359 pasangan usia subur, hanya sebesar 5,13% yang memiliki istri berusia di bawah 20 tahun. Dengan angka yang rendah ini maka akan semakin kecil resiko yang mungkin terjadi saat melahirkan. Lebih rinci untuk Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 100

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	Jumlah pasangan usia subur	Cakupan pasangan usia subur (pus) yang istrinya dibawah 20 tahun
1	Bangun Purba	3	4667	0,06
2	Bonai Darussalam	12	539	2,23
3	Kabun	10	1868	0,54
4	Kepenuhan	3	5169	0,06
5	Kepenuhan Hulu	12	2741	0,44
6	Kunto Darussalam	2	9230	0,02
7	Pagaran Tapah Darussalam	5	2215	0,23
8	Pendalian IV Koto	0	2538	0,00
9	Rambah	8	5343	0,15
10	Rambah Hilir	26	7012	0,37
11	Rambah Samo	15	5131	0,29
12	Rokan IV Koto	3	2887	0,10
13	Tambusai	13	4091	0,32
14	Tambusai Utara	10	3864	0,26
15	Tandun	2	4836	0,04
16	Ujung Batu	2	8228	0,02
Rokan Hulu		126	70.359	5,13

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2021



PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di kabupaten Rokan Hulu cukup rendah, yaitu sebesar 15,43% dari total PUS. Kecamatan Kabun merupakan kecamatan dengan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi paling tinggi, yaitu mencapai 40,69% dari total PUS. Sementara itu Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam merupakan kecamatan dengan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi paling rendah, yaitu hanya sebesar 4,92% dari total keseluruhan PUS. Lebih rinci untuk Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 101

Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kecamatan
Dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jumlah pasangan usia subur	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
1	Bangun Purba	1110	4667	23,78
2	Bonai Darussalam	104	539	19,29
3	Kabun	760	1868	40,69
4	Kepenuhan	1521	5169	29,43
5	Kepenuhan Hulu	195	2741	7,11
6	Kunto Darussalam	1328	9230	14,39
7	Pagaran Tapah Darussalam	109	2215	4,92
8	Pendalian IV Koto	740	2538	29,16
9	Rambah	663	5343	12,41
10	Rambah Hilir	1052	7012	15,00
11	Rambah Samo	393	5131	7,66
12	Rokan IV Koto	368	2887	12,75
13	Tambusai	578	4091	14,13
14	Tambusai Utara	525	3864	13,59
15	Tandun	647	4836	13,38
16	Ujung Batu	762	8228	9,26
Rokan Hulu		10.855	70.359	15,43

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2021

PPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB. Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB. PPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta. Jumlah PPKS di Kabupaten Rokan Hilir baru sebanyak 8 PPKS, sehingga



belum mencakup semua kecamatan yang ada. Masih ada sebanyak 9 kecamatan yang belum memiliki PPKS, padahal sudah seharusnya setiap kecamatan memiliki PPKS sendiri sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat, khususnya masyarakat ber-KB. Lebih rinci untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 102

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PPKS	Jumlah kecamatan	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
1	Bangun Purba	0	16	0
2	Bonai Darussalam	0	16	0
3	Kabun	0	16	0
4	Kepenuhan	1	16	6,25
5	Kepenuhan Hulu	0	16	0
6	Kunto Darussalam	0	16	0
7	Pagaran Tapah Darussalam	0	16	0
8	Pendalian IV Koto	2	16	12,5
9	Rambah	1	16	6,25
10	Rambah Hilir	0	16	0
11	Rambah Samo	1	16	6,25
12	Rokan IV Koto	1	16	6,25
13	Tambusai	0	16	0
14	Tambusai Utara	1	16	6,25
15	Tandun	0	16	0
16	Ujung Batu	1	16	6,25
Rokan Hulu		8	16	50

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa sendiri. Rata-rata sudah terdapat 2 hingga 5 Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa di setiap kecamatan. Lebih rinci untuk Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 103

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PIK R/M	Jumlah kecamatan	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
1	Bangun Purba	5	16	31,25
2	Bonai Darussalam	4	16	25
3	Kabun	3	16	18,75
4	Kepenuhan	2	16	12,5
5	Kepenuhan Hulu	3	16	18,75



No	Kecamatan	Jumlah PIK R/M	Jumlah kecamatan	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
6	Kunto Darussalam	2	16	12,6
7	Pagaran Tapah Darussalam	3	16	18,75
8	Pendalian IV Koto	2	16	12,5
9	Rambah	5	16	31,25
10	Rambah Hilir	3	16	18,75
11	Rambah Samo	3	16	18,75
12	Rokan IV Koto	3	16	18,75
13	Tambusai	4	16	25
14	Tambusai Utara	3	16	18,75
15	Tandun	2	16	12,5
16	Ujung Batu	5	16	31,25
	Jumlah	52	16	325

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.9 Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan Prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang perhubungan adalah jumlah uji KIR angkutan umum. Pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum. Pada tahun 2017, jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1.349 kendaraan dan pada tahun 2018, jumlah uji KIR kendaraan umum sebanyak 1.592 kendaraan, kemudian tahun 2019 sebanyak 1.679 kendaraan. Terakhir pada tahun 2020 jumlah uji kir kendaraan angkutan umum sudah mencapai 1.590 kendaraan.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir terlihat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 31,14%, namun hingga akhir tahun 2020 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum menurun hingga hanya sebanyak 15,67% saja angkutan umum yang memiliki KIR.

Selama tahun 2020 terdapat satu kegiatan yang belum dapat terlaksana pada urusan perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan tersebut adalah kegiatan pemasangan rambu-rambu. Kendala *refocusing* anggaran karena pandemi menjadi penyebab utama kegiatan tersebut belum dapat terlaksana.

Indikator lain yang terdapat pada urusan wajib perhubungan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum. jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu selama lima tahun terakhir cukup berfluktuasi, namun cenderung menurun. Pada tahun 2016 jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 193.278 orang, namun setelah lima tahun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 105.521 penumpang



angkutan umum. Selain adanya pembatasan penggunaan angkutan umum pada masa pandemi, penurunan arus penumpang angkutan umum pada tahun 2020 bisa disebabkan oleh kurangnya pelayanan dan kualitas angkutan umum itu sendiri, serta preferensi penduduk yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi.

Indikator selanjutnya yang terdapat pada urusan wajib perhubungan adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 4,83 menjadi 4,34 pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020, rasio panjang jalan per kendaraan Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan sebesar 4,68. Lebih rinci mengenai indikator kinerja perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 104

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	193.278	147.660	268.175	161.126	105.521
2	Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0
3	Jumlah uji kir angkutan umum	11.793	1.349	1.592	1.679	1.590
4	Jumlah Pelabuhan Laut	0	0	0	0	0
	Bandar Udara	1	1	1	1	1
	Terminal Bis	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	0,12	0,16	0,09	0,11	0,16
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	31,14	37,44	21,73	23,31	15,67
7	Pemasangan Rambu-rambu	0	42	289	152	0
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,83	4,83	4,56	4,34	4,68
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	193.278	147,66	268,175	161,126	105.928
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	193.278	147,66	268,175	161,126	105.928

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Sementara itu, Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Rokan Hulu belum memperlihatkan adanya perkembangan selama 2016-2020, yaitu masih berjumlah 3 yaitu terdiri dari 2 terminal bis dan 1 bandar udara. Ini artinya sarana perhubungan yang ada pada tahun 2016 masih digunakan hingga saat ini. Maka dari itu pemerintah daerah perlu memperhatikan kualitas penjagaan dan pemeliharaan sarana perhubungan tersebut agar masyarakat tetap merasa nyaman dan aman dalam menggunakan sarana perhubungan yang tersedia.

2.3.2.10 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang Komunikasi dan Informasi menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa

urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat.

Perencanaan Penyelenggaraan urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rokan Hulu telah diawali sejak tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 29 tahun 2012 tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu menyusul ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kemudian sebagai tindak lanjut dari rencana pengembangan e-Government Kabupaten Rokan Hulu disusunlah sebuah rencana induk tata kelola TIK yang dituangkan dalam Rencana Induk e-Government Kabupaten Rokan Hulu yang mana sampai dengan sekarang Kab. Rokan Hulu telah membangun jaringan infrastruktur internet dan intranet berupa kabel *Fiber Optic* dan *Tower Wireless* yang mengintegrasikan 27 SKPD dan 16 Kecamatan lingkungan Pemda Kab. Rokan Hulu kedalam satu sistem jaringan intra Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah menyelenggarakan fungsi komunikasi dan informasi publik melalui operasional PPID dan Media Center Kabupaten Rokan Hulu, dan telah mengikuti penilaian kategori kualifikasi keterbukaan informasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Komisi Informasi.

Selain PPID dan Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi publik sampai dengan tahun 2020 telah membangun dan mengembangkan situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.rokanhulukab.go.id> dan juga terdapat 55 sub domain berupa website perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan aplikasi khusus berbasis web yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengembangan dan inovasi diseminasi informasi melalui pemancaran siaran Radio Swara Lima Luhak dengan berbagai program siaran, dan juga telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 5 KIM di Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar di 4 kecamatan. Pada Kecamatan Tandun terdapat KIM Mardeka (Desa Dayo), pada Kecamatan Bangun Purba terdapat KIM Rambah Jaya, pada Kecamatan Rambah Hilir terdapat KIM Pasir Jaya dan pada kecamatan Rambah terdapat KIM desa Kaitu Gula Aren dan KIM KOMPAD Rohul. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 105
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020

No	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah Yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	29 OPD dan 16 Kecamatan	29 OPD dan 16 Kecamatan	29 OPD dan 16 Kecamatan
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	7,326	7,326	7,326
3	Persentase penduduk yang Menggunakan HP/Telepon (BPS)	391.820	406.540	406.540
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (BPS)	157,865	165,064	165,064
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (BPS)	N/A	N/A	N/A
6	Keberadaan Website Milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	53	55	55
7	Jumlah Aplikasi Publik dan pemerintahan yang menggunakan Sistem Penghubung Layanan	0	0	4
8	Nilai SPBE	1,54	2,13	2,13
9	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan	Di Kecamatan Tandun	Di Kecamatan Tandun	Di Kecamatan Tandun
		1. KIM Mardeka (Desa Dayo)	1. KIM Mardeka (Desa Dayo)	1. KIM Mardeka (Desa Dayo)
		Kecamatan Rambah Hilir	Kecamatan Rambah Hilir	Kecamatan Rambah Hilir
		2. KIM Pasir Jaya	2. KIM Pasir Jaya	2. KIM Pasir Jaya
		Kecamatan Bangun Purba	Kecamatan Bangun Purba	Kecamatan Bangun Purba
		3. KIM Rambah Jaya	3. KIM Rambah Jaya	3. KIM Rambah Jaya
10	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik	Kecamatan Rambah	Kecamatan Rambah	Kecamatan Rambah
		4. KIM desa Kaitu Gula Aren	4. KIM desa Kaitu Gula Aren	4. KIM desa Kaitu Gula Aren
		5. KIM KOMPAD Rohul	5. KIM KOMPAD Rohul	5. KIM KOMPAD Rohul
		Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif
		Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif
11	Publikasi Informasi Daerah di media massa dan online	N/A	63	91
12	Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk layanan publik	3	3	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.11 Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.



Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja.

Persentase koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 57,01% dari total 328 koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 dimana terdapat sebesar 65,51% koperasi aktif dari total 316. Pada tahun 2018 Persentase koperasi aktif sebesar 63,89 persen, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 66,23 persen dan tahun 2020 sebanyak 67,90 persen. Persentase koperasi aktif berfluktuasi disebabkan oleh berfluktuasinya pertumbuhan jumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016 sebanyak 328, namun berkurang pada tahun 2017 menjadi sebanyak 316 unit. Pada tahun 2018 jumlah koperasi mengalami penurunan cukup banyak sebesar 8,86% menjadi 288 unit. Kemudian pada tahun 2019, jumlah koperasi mengalami peningkatan sebesar 6,94% menjadi 308 unit koperasi dan pada tahun 2020 kembali naik jumlahnya menjadi 324 unit koperasi.

Sementara itu untuk jumlah usaha mikro kecil dan menengah selama lima tahun terakhir terlihat stagnan pada tahun 2016-2019, yaitu sejumlah 15.355 UMKM. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tidak ada kegiatan pendataan UMKM. Dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebesar 25.486 unit, meningkat hingga 65,98% dibanding tahun 2019 yang hanya terdapat 15.355 unit usaha kecil dan mikro di Kabupaten Rokan Hulu. Peningkatan pada tahun 2020 ini disinyalir sebagai akibat adanya pandemi yang membuat sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan memulai usaha kecil dan mikro. Peningkatan ini juga dikarenakan adanya bantuan tunai dari kementerian Koperasi dan UKM untuk UMKM yang terdampak Covid-19. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 106
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

NO	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	328	316	288	308	324
2	Jumlah Koperasi yang Aktif	187	207	184	204	220
3	Persentase koperasi aktif	57,01	65,51	63,89	66,23	67,9
4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	15.355	15.355	15.355	15.355	25.486

Sumber : Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 2021

2.3.2.12 Urusan Wajib Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak/efek pengganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor.



Kinerja penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, jumlah investor berskala nasional pada tahun 2017 sebanyak 28 investor dan pada tahun 2018 sebanyak 317 investor, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 1.555 investor dan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 2.083. Untuk realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir terus berfluktuasi. Realisasi investasi PMA/PMDN di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dan kurangnya sarana prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan penanaman modal. Tahun 2020 menjadi tahun dengan realisasi investasi terendah dalam empat tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 911.865.180.000,00. Indikator selanjutnya dalam urusan penanaman modal dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dimana dalam empat tahun terakhir terjadi fluktuasi nilai IKM Kabupaten Rokan Hulu dari 83,32 pada tahun 2017 naik menjadi 84,03 pada tahun 2018. Nilai IKM Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 77,67 namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 79,75. Ini berarti dibanding tahun 2017 nilai IKM pada tahun 2020 masih lebih rendah. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 107

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Realisasi Investasi				
-PMA	179.171.170.000	1.027.807.626.780	24.882.000.000	10.270.080.000
-PMDN	932.173.700.000	707.599.400.000	943.566.700.000	901.595.100.000
Jumlah	1.111.344.870.000	1.735.407.026.780	968.448.700.000	911.865.180.000
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	28	317	1555	2083
Nilai IKM	83,32%	84,03%	77,67%	79,75%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.13 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan.

Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan.



Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah organisasi pemuda pada tahun 2016 sebanyak 2 organisasi, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 4 organisasi pemuda aktif. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan karena tidak ada organisasi pemuda yang aktif. Namun, pada tahun 2020, terdapat 4 organisasi pemuda yang kembali aktif.

Sementara itu dari total 480 wirausaha yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020, sebanyak 16,60% merupakan wirausaha muda. Jumlah ini tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, namun memiliki tren yang cenderung meningkat. Pada masa akan datang diharapkan generasi muda lebih banyak lagi terjun dalam berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Jika dilihat dari cakupan pembinaan olahraga, dari seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 23 cabang olahraga, semuanya sudah mendapatkan pembinaan dengan baik pada periode 2016-2020. Dengan begitu cakupan pembinaan di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 100%.

Indikator lain dari urusan kepemudaan dan olahraga yaitu cakupan Pelatih yang bersertifikasi menunjukkan bahwa dari total 324 pelatih, baru sebanyak 138 pelatih atau 43% yang memiliki sertifikasi hingga tahun 2020. Sementara itu untuk indikator cakupan pembinaan atlet muda baru mencapai 20,70% dalam kurun waktu 2016-2020. Karena mayoritas atlet muda masih berada di bangku sekolah, peningkatan cakupan pembinaan atlet muda baru cukup mendapatkan kendala seperti jumlah atlet muda yang sangat banyak, kendala biaya dan juga penyesuaian waktu pembinaan. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 108

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	2	4	0	0	4
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	32	32	32	32	32
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	6,25%	12,50%	0%	0%	12,50%
4	Persentase wirausaha muda	14,50%	14,50%	16,60%	16,60%	16,60%
5	Cakupan pembinaan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	43%	43%	43%	43%	43%
7	Cakupan pembinaan atlet muda	20,70%	20,70%	20,70%	20,70%	20,70%
8	Jumlah atlet berprestasi tingkat Nasional	1	2	2	2	0
9	Jumlah atlet Berprestasi Tingkat Internasional	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.14 Urusan Wajib Statistik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan upaya untuk menyediakan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.



Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah, surat edaran Mendagri RI Nomor 120/066/Bangda per tanggal 7 Januari 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Statistik, dan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penerang daerah yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral.

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan, Pemanfaatan statistik sektoral bersifat terbuka yang bisa diakses secara umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi standar layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010, maka data statistik termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat. Di dalam pemerintahan, statistika mempunyai peranan yang sangat penting, diantaranya untuk perencanaan pembangunan. Data dan informasi statistik dapat digunakan mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang; menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan; memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Dengan data-data yang dimiliki, pemerintah akan lebih mudah untuk mengambil suatu kebijakan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, selain data-data yang bersumber dari BPS diperlukan juga data-data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus statistik sektoral. Banyak sekali data data sektoral bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Sebagai contoh di bidang pertanian, untuk menentukan pola tanam diperlukan mengenai data suhu, kelembaban udara, dan curah hujan; data pendidikan misalnya mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru untuk mengetahui bagaimana rasio kebutuhan guru terhadap ketersediaan sekolah dan murid; data kesehatan misalnya mengenai fasilitas dan tenaga kesehatan, jumlah bayi lahir, jumlah ibu hamil, jumlah kasus penyakit, jumlah klinik, peserta KB, dan pasangan usia subur; data pekerjaan umum misalnya mengenai panjang jalan berdasarkan kondisi (baik, rusak); panjang jembatan kondisi baik/rusak, jumlah irigasi, luasan daerah genangan banjir. Data pada urusan sosial misalnya berapa jumlah PPKS yang mendapat bantuan sosial, jumlah panti sosial pemerintah dan swasta, jumlah KDRT pada perempuan dan anak.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, diperlukan sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penyedia atau sumber statistik sektoral. Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari OPD dalam hal penyediaan data sektoral. Dengan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan



lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing OPD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi. Sistem yang menampilkan indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja pembangunan di daerah. Sudah saatnya Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan BPS untuk membangun ketersediaan statistik sektoral untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Beberapa dokumen yang telah disusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, atau bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait. Dokumen-dokumen statistik tersebut diantaranya yaitu Rokan Hulu Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dokumen statistik lainnya. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri selain telah menbitkan buku statistik sektoral daerah Kabupaten Rokan hulu, sejak tahun 2017 juga telah mengembangkan aplikasi open data sebagai salah satu cikal bakal pengembangan rumah data virtual sebagai data center yang dapat diakses publik.

Tabel II- 109
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Statistik Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem dan data statistik sektoral yang terintegrasi	N/A	1	1	1	1
2	Buku Kabupaten Rokan hulu dalam Angka	1	1	1	1	1
3	Buku PDRB	1	1	1	1	1
4	Buku Statistik sektoral Kab. Rokan Hulu	N/A	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.15 Urusan Wajib Persandian

Pergerakan tata kelola pemerintahan menuju era digital, memunculkan inovasi-inovasi baru. Khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik dan sebagainya. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respons dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya, kemudahan-kemudahan itu memunculkan ancaman keamanan, baik data maupun transaksi informasi, yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Ancaman keamanan data dan tindak kejahatan digital tersebut diantaranya seperti diubahnya latar depan website pemerintah dengan tampilan lain oleh peretas (deface), penyanderaan data digital oleh peretas yang meminta tebusan sejumlah uang guna pembebasan data atau yang dikenal dengan ransomware, dan bentuk-bentuk kejahatan digital lainnya. persandian dan keamanan informasi berperan sebagai entitas pengaman informasi melalui penyelenggaraan

persandian dimana persandian harus mampu memberi jaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Penyelenggaraan persandian era digital mengharuskan sumber daya persandian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat bergerak menuju penerapan keamanan informasi secara digital. Antara lain adalah penerapan tanda tangan elektronik, seiring meningkatnya penggunaan aplikasi elektronik di instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tersebut, tanda tangan elektronik sudah dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang sah atas dokumen atau informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Masih belum optimalnya penyelenggaraan persandian dan kewanaman informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu disebabkan karena belum tersusunnya regulasi dan dasar kebijakan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan persandian dan kewanaman informasi, sehingga berakibat pada masih rendahnya persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, dimana sejak tahun 2017 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah baru sebesar 4,44% dari total keseluruhan OPD. Jumlah ini cenderung stagnan dari tahun ke tahun, hingga pada akhir tahun 2020 jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah baru sebanyak 2 OPD. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Persandian di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 110
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persandian Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	1	2	2	2	2
2	Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu Menggunakan Tanda Tangan Elektronik	na	na	na	na	2
3	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, 2021



2.3.2.16 Urusan Wajib Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan salah satu agenda yang dilakukan pada urusan ini adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada pada wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 111

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya	75 kali	46 kali	73 kali	10 kali
Rinciannya Penampilan kesenian dan event budaya	Festival 1 Event 8 Pawai 3 Penampilan 63	Festival 0 Event 2 Pawai 2 Penampilan 42	Festival 1 Event 0 Pawai 2 Penampilan 70	Festival 0 Event 0 Penampilan 10

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Jumlah penyelenggaraan festival kebudayaan empat tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah penyelenggaraan festival kebudayaan adalah 75 kali, kemudian mengalami penurunan menjadi 46 kali pada tahun 2018. Tahun 2019 jumlah penyelenggaraan festival kebudayaan naik menjadi 73 kali dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 10 kali. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, waktu dan tenaga terutama pada masa pandemi pada tahun 2020 yang membuat kegiatan keramaian harus ditiadakan.

Selain itu telah dilakukan juga pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang berada pada wilayah kabupaten Rokan hulu. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 112

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	2	20	20
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	222	381	381	381
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Makam raja raja rambah dan benteng tujuh lapis	Makam raja raja rambah dan benteng 7 lapis	Rumah Rarangan Boru Namora Suri Andung Jati, Makam Boru Namora Suri Andung Jati, Makam Maruhum Kahar, Komplek Makam Tuan Guru Koto Tongah,	Rumah Rarangan Boru Namora Suri Andung Jati, Makam Boru Namora Suri Andung Jati, Makam Maruhum Kahar, Komplek Makam Tuan Guru Koto Tongah, Kawasan



No	Uraian	2017	2018	2019	2020
				Kawasan Komplek Benteng Daloe-Daloe (Benteng Tujuh Lapis), Komplek Kawasan Underafdeling Pasir Pengaraian, Kantor Underafdeling Peninggalan Kolonial Belanda, Kawasan Komplek Kerajaan Dan Makam Raja-Raja Kerajaan Rambah, Komplek Surau Suluk Ismail, Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, Komplek Kerajaan Kunto Darussalam, Makam Syeh Burhanuddin, Istana Kunto Darussalam, Istana Raja Rokan Iv Koto, Makam Tengku Joman, Komplek Istana Kerajaan Rokan, Makam Sutan Laut Api, Rumah Persinggahan Tengku Zainal Abidin, Makam Boru Namora Di Huta Haiti, Bangunan SD Masa Belanda (SD 001)	Komplek Benteng Daloe-Daloe (Benteng Tujuh Lapis), Komplek Kawasan Underafdeling Pasir Pengaraian, Kantor Underafdeling Peninggalan Kolonial Belanda, Kawasan Komplek Kerajaan Dan Makam Raja-Raja Kerajaan Rambah, Komplek Surau Suluk Ismail, Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, Komplek Kerajaan Kunto Darussalam, Makam Syeh Burhanuddin, Istana Kunto Darussalam, Istana Raja Rokan Iv Koto, Makam Tengku Joman, Komplek Istana Kerajaan Rokan, Makam Sutan Laut Api, Rumah Persinggahan Tengku Zainal Abidin, Makam Boru Namora Di Huta Haiti, Bangunan SD Masa Belanda (SD 001)

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Pelestarian bermakna pada upaya untuk memanfaatkan, melindungi dan mengembangkan. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya untuk memanfaatkan cagar budaya, melindungi dari kemusnahan dan mengembangkannya. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai cagar budaya baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Adapun jumlah cagar budaya yang sudah dilestasikan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 113

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	persentase
1	Bangun Purba	-	-	-
2	Bonai Darussalam	-	-	-
3	Kabun	-	1	0,00
4	Kepenuhan	2	15	13,33
5	Kepenuhan Hulu	-	-	-



No	Kecamatan	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	persentase
6	Kunto Darussalam	3	40	7,50
7	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-
8	Pendalian IV Koto	-	-	-
9	Rambah	7	233	3,00
10	Rambah Hilir	1	2	50,00
11	Rambah Samo	1	3	33,33
12	Rokan IV Koto	3	63	4,76
13	Tambusai	2	10	20,00
14	Tambusai Utara	1	8	12,50
15	Tandun	-	5	0,00
16	Ujung Batu	-	1	0,00
	Rokan Hulu	20	381	5,25

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Pada tahun 2019 jumlah cagar budaya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baik bergerak maupun tidak bergerak yang terinventarisasi sebanyak 381 buah. Sedangkan pada jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan Inventarisasi pada tahun 2017 adalah 2 karya budaya, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 naik menjadi 4 karya budaya. Terakhir pada tahun 2020 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Rokan Hulu menurun menjadi 1 karya budaya. Total karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020 adalah 11 karya budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 114
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	4	4	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Salah satu strategi dalam upaya pelestarian budaya yang lebih terarah dengan pengelolaan cagar budaya terpadu. Selama empat tahun terakhir pengelolaan cagar budaya secara terpadu tidak berubah hanya berjumlah 13 cagar budaya. Untuk kedepannya pengelolaan cagar budaya secara terpadu sangat diharapkan dalam menjamin ke efektivitasan dalam mengelola cagar budaya pada Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel II- 115
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu Kab. Rokan Hulu
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.	13	13	13	13

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2021



2.3.2.17 Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memnuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Jumlah perpustakaan umum di kabupaten Rokan Hulu berjumlah 1 unit pada tahun 2016-2020. Namun, secara keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu setidaknya memiliki setidaknya 32 perpustakaan yang terdapat di seluruh kecamatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah perpustakaan memiliki rasio 0,005 pada tahun 2017-2020. Ini artinya satu perpustakaan di Kabupaten Rokan Hulu melayani setidaknya 21.628 penduduk Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2019 merupakan jumlah kunjungan tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai 12.990 pengunjung. Namun jumlah ini baru 2,33% dari total populasi yang harus dilayani perpustakaan. Hal ini menunjukkan bagaimana rendahnya kunjungan perpustakaan apabila dibandingkan dengan populasi yang harus dilayani. Budaya membaca yang masih lemah membuat perpustakaan cenderung sepi dan sedikit pengunjung. Dengan demikian diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan budaya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 116

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan Umum	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan Desa	32	64	78	78	32
3	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	9.626	4.852	8.620	12.990	2.287
4	Persentase Pengunjung Perpustakaan	-	1,07	1,55	2,33	0,54
5	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	46.745	46.755	47.405	47.405	49.319
6	Rasio Perpustakaan dengan Jumlah Penduduk	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005
7	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.2.18 Urusan Wajib Kearsipan

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada akan menghadirkan kemanfaatan besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada lembaga pemerintahan akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan indikator bukti bagi kepentingan lain.



Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan ketertaaan kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan selama kurun tahun 2016-2020 dapat dilihat pada 114. Secara umum pada urusan ini masih diperlukan upaya lebih banyak lagi dalam upaya penciptaan kearsipan yang tertata dengan baik di kabupten Rokan hulu.

Tabel II- 117
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	50,00	53,33	60,00	60,00	33,33
2	jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	2	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu,2021

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 produksi ikan di Kabupaten Rokan Hulu mencapai 7.739,96 ton. Kemudian terus meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 8.277,50 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 8.500,18 ton. Pada tahun 2019 dan 2020, produksi peikanan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 8.798,07 ton dan sebesar 8.902,05 ton.

Peningkatan produksi ikan di kabupaten Rokan Hulu ditenggarai karena produksi perikanan budidaya yang cenderung membaik. Dimana pada tahun 2016 produksi perikanan budidaya hanya sebesar 5.819,96 ton. Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya sebesar 6328,70 ton, kemudian pada meningkat menjadi 6.537,74 ton pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya kembali meningkat menjadi 6.821,95 ton. Kemudian pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 6.958,36 ton. Sementara untuk produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2017 sebesar 1.948,80 ton, kemudian meningkat menjadi 1.962,44 ton pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 produksi perikanan kelompok nelayan kembali meningkat menjadi 1.976,12 ton. Sedangkan pada tahun 2020 produksi perikanan kelompok nelayan sedikit menurun dibanding tahun 2019, yaitu dengan produksi perikanan sebesar 1.943,69 ton.

Produksi perikanan dari hasil budidaya di Kabupaten Rokan Hulu merupakan penghasil ikan utama bagi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya di Kabupaten Rokan Hulu mencakup lebih dari 78% dari total produksi ikan secara keseluruhan. Sementara untuk produksi perikanan kelompok nelayan hanya menyumbang sebesar 12% pada produksi perikanan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan budidaya memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2016 sebesar 36,30 kg/kapita/tahun. Kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 36,95 kg/kapita, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 37,58 kg/kapita, lalu pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 37,78 kg/kapita dan pada tahun 2020 kembali naik menjadi 41,38 kg/kapita/tahun. Lebih rinci untuk capaian Indikator Kinerja Perikanan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 118
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perikanan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan (ton)	7.739,96	8.277,50	8.500,18	8.798,07	8.902,05
	Produksi prikanan budidaya (ton)	5.819,96	6.327,70	6.537,74	6.821,95	6.958,36
	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	1.920,00	1.948,80	1.962,44	1.976,12	1.943,69
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	36,30	36,95	37,58	37,78	41,38
3	Cakupan bina kelompok nelayan	100 %	55 %	100 %	100 %	50%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.3.2 Urusan Pilihan Pariwisata

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAPROV) Riau menetapkan Rokan Hulu Sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Riau (KPPP) Riau. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) merupakan kawasan di dalam DPP yang dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai visi dan misi pembangunan kepariwisataan. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Riau Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi Riau, Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu termasuk DPP Riau Daratan KPP Pariwisata Religi, Rokan Hulu dan sekitarnya. Dan di tetapkan Pasir Pangaraian sebagai pusat KPP Pariwisata Religi, Rokan Hulu dan sekitarnya.

Di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Rokan Hulu juga terdapat Rencana kawasan pengembangan pariwisata (KPP) di Kabupaten Rokan Hulu terbagi menjadi 4 (empat) diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I (Utama)

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I (Utama) mencakup wilayah Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah, dan Kecamatan Rambah Samo dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Rambah.

1. Tema pengembangan produk pariwisata : Wisata Miniatur Hutan Tropis Indonesia
2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung:
 - a. Wisata unggulan, meliputi Wisata Air Panas Hapanasan, Danau Sipogas, Air Panas Suaman, Air Terjun Aek Martua, Gua Rimba Huta Sikafir, Danau Menaming, Air Terjun Parlakkitangan, Batu Gajah Simalanca, dan Sungai Bungo



- b. Wisata pendukung, meliputi : Mesjid Agung Madani, Air Terjun Geringging, Gula Aren HPR, Surau Syekh Ismail, Taman Bunga S Bunga, Makam Raja-Raja Rambah, dan Makan Suri Andung Jati.
- B. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II
- Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II mencakup wilayah Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rambah, dan Kecamatan Rokan Empat Koto, Kecamatan Pendalian Lima Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Ujungbatu.
1. Tema pengembangan produk pariwisata : Ekowisata Alam Pegunungan Dan Air Terjun
 2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung:
 - a. Wisata unggulan, meliputi Taman Nasional Bukit Suligi, Bukit Langgak, Air Terjun Kajatn Baru, dan Air Terjun Sei Tolang, Air terjun Lobek, Air Terjun Corocai Manih, Bukit Tungkuih Nasi dan Paralayang.
 - b. Wisata pendukung, meliputi : Arum Jeram Sungai Rokan, Rumah Peningalan, S. Prawiranegara, Danau Kembang, Gua Sei Nigi, Goa Sui Puo, Goa Tujuh Serangkai, Pemandian Bongkaran, Rumah Suluk, Tareqat Naqsabandy, Lompatan Harimau.
- C. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III
- Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III mencakup wilayah Kecamatan Rambah Ilir, Kecamatan Tambusai, dan Kecamatan Tambusai Utara dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Tambusai Utara.
1. Tema pengembangan produk pariwisata : Wisata Sejarah Raja Tambusai
 2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung:
 - a. Wisata unggulan, meliputi : Benteng Tujuh Lapis, Balai Adat Tambusai, Rumah Raja Tambusai.
 - b. Wisata pendukung, meliputi : Rumah Batu Sorombou, Danau Kobu dan Sarampang, Taman Simare Hutahean.
- D. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) IV
- Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) IV mencakup wilayah Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto Darusalam, dan Kecamatan Bonai Darussalam dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Kepenuhan.
1. Tema pengembangan produk pariwisata : Wisata Religi dan Sejarah Kunto Darusalam
 2. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung:
 - a. Wisata unggulan, meliputi : Masjid Tua Kunto Darusalam, Rantau Binuang Sakti, Rumah Nogori Tingga/Dili, Istina Raja Kunto
 - b. Wisata pendukung, meliputi : Pasar Lelang Ikan Salai, Danau Ombak, Danau Puar.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hulu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu dari sektor pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kunjungan



wisatawan ke Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 1.230.325 orang. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebanyak 646.970 orang, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 964.607 orang, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.771.876 kunjungan wisata. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, dengan kunjungan wisatawan sebanyak 876.535 kunjungan wisata.

Rata-rata kunjungan wisata di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016-2018 adalah dua hari, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi tiga hari namun kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 2 hari. Ini menunjukkan wisatawan tinggal lebih lama di Kabupaten Rokan Hulu dan menghabiskan lebih banyak uang di Rokan Hulu pada tahun 2019 dibanding tahun-tahun lainnya. Peningkatan lama kunjungan wisata sangat penting untuk meningkatkan perekonomian pariwisata, karena semakin lama wisatawan tinggal, maka akan semakin banyak uang yang mereka habiskan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu. Pada Tahun 2017 PAD Sektor Pariwisata di kabupaten Rokan Hulu hanya berjumlah Rp 3.722.346.320 namun dalam tiga tahun meningkat hingga Rp 5.191.244.604 pada tahun 2019. Keberadaan pandemi yang membatasi perjalanan dan kegiatan pariwisata berdampak cukup buruk terhadap penerimaan PAD Sektor Pariwisata tahun 2020 yang turun drastis hingga Rp 2.497.825.021.

Peningkatan PAD sektor pariwisata selain dapat ditingkatkan dengan lama kunjungan wisata, dapat pula ditingkatkan dengan penyelenggaraan festival budaya dan pelestarian benda dan situs budaya. Penyelenggaraan festival dan pelestarian budaya yang baik akan menambah daya tarik wisata daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Sementara itu untuk indikator jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dalam lima tahun terakhir telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2016-2018, hanya sebanya 2 benda, situs atau kawasan cagar budaya yang dilestarikan, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 sudah terdapat 20 situs atau kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pelestarian situs atau kawasan cagar budaya ini sangat penting selain untuk menjaga warisan budaya juga sebagai daya tarik pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu.

Selain adanya perbaikan dalam pelestarian cagar budaya, Kabupaten Rokan Hulu dalam lima tahun terakhir juga berhasil meningkatkan inventarisasi dan pendataan cagar budaya yang dimiliki pemerintah daerah. Dimana terlihat pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 222 cagar budaya yang dimiliki daerah, namun pada tahun 2018 hingga 2020 sudah mengalami peningkatan menjadi 381 cagar budaya yang dimiliki daerah. Pendataan yang lebih baik ini diharapkan akan semakin meningkatkan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu dalam melihat potensi pariwisata yang ada dan mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 119
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Kunjungan Wisata	2 Hari	2 Hari	2 Hari	3 Hari	2 Hari
2	Jumlah Kunjungan Wisata	1.230.325	964.607	969.189	2.872.889	876.535
3	PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah)	2.633,890	3.722,346	4.397,698	5.191,244	2.497,825
4	Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya (Kegiatan)	7	75	46	73	10
5	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	2	2	20	20
6	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	222	222	381	381	381
7	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	2	4	4	1

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.3.3 Urusan Pilihan Pertanian

Kondisi Kabupaten Rokan Hulu yang agraris dengan komoditas perkebunan dan tanaman pangan, menjadikan sektor pertanian berkontribusi secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja urusan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Pada masa pandemi COVID-19, peningkatan produksi pangan perlu dilakukan agar stok pangan terjaga dan tidak terjadi kelangkaan yang berimplikasi pada kenaikan harga yang dapat mengakibatkan krisis pangan.

Salah satu capaian kinerja sektor pertanian adalah produksi padi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2017, produksi padi Kabupaten Rokan Hulu sebesar 41.933,47 ton. Pada tahun 2018 sempat turun menjadi 38.876,00 ton. Selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 45.185,58 ton dan terus meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 45.381,64 ton. Pada tahun 2017 luas areal tanam padi 10.236,50 Ha, pada tahun 2018 meningkat menjadi 10.986,50 Ha dan pada tahun 2019 semakin meningkat yaitu 11.343,75 Ha. Akan tetapi pada tahun 2020 luas areal tanam padi turun menjadi 7.930,75 Ha. Sementara luas areal panen pada tahun 2017 adalah seluas 10.142,95 Ha, pada tahun 2018 turun menjadi 9.655,75 Ha. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 10.804,00 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 11.426,76 Ha. Produktifitas padi di Kabupaten Rokan Hulu fluktuatif. Pada tahun 2017, produktifitasnya 41,34 kw/ha pada tahun 2018 turun menjadi 40,26 kw/ha. Pada tahun 2019 naik menjadi 41,82 kw/ha dan pada tahun 2020 turun menjadi 39,72 kw/ha.



Indikator lain dari urusan pertanian diantaranya adalah jumlah populasi ternak di Kabupaten Rokan Hulu yang dalam empat tahun terakhir telah meningkat sebesar 14,61% dari sebanyak 788.391 ekor pada tahun 2017 menjadi sebanyak 903.579 ekor pada tahun 2020. Peningkatan jumlah populasi ternak ini disinyalir karena makin bertambahnya rumah tangga peternak di Kabupaten Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 rumah tangga peternak di Kabupaten Rokan Hulu bertumbuh sebesar 6,20%, dari sebanyak 60.523 rumah tangga menjadi 64.277 rumah tangga pada tahun 2020. Peningkatan rumah tangga peternak ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan protein di Kabupaten Rokan Hulu.

Sementara itu indikator lain yang dapat menggambarkan kinerja pertanian adalah kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Dimana kontribusi pertanian terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan. Terutama pada tahun 2020 saat banyak tenaga kerja kehilangan lapangan pekerjaan karena pandemi beralih menekuni usaha tani. Hingga tahun 2020 sektor pertanian berkontribusi sebesar 54,22% terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Rokan Hulu masih bergerak pada sektor primer. Jumlah peningkatan pendapatan petani peternak mengalami stagnan pada tahun 2018 – 2020 yaitu sebesar 26.741.200 rupiah, hal ini terjadi karena imbas dari pandemi covid 19 dan terjadinya serangan penyakit jembrana pada ternak sapi yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan ternak. Lebih rinci untuk Capaian Indikator Kinerja Pertanian di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 120

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Luas areal tanam dan panen padi (ha)				
	- Tanam	10.236,50	10.986,50	11.343,75	7.930,75
	- Panen	10.142,95	9.655,75	10.804,00	11.426,75
2	Jumlah produktivitas padi (kw/ha)	41,34	40,26	41,82	39,72
3	Jumlah produksi padi (ton)	41.933,47	38.876,00	45.185,58	45.381,64
4	Luas areal tanam dan panen palawija (ha)				
	- Tanam	4,422	4,118	3184	2.571
	- Panen	3,499	4,194	2770	2.727
	Jumlah produktivitas palawija (kw/ha)	37,51	31,98	45,30	45,01
	Jumlah produksi palawija (ton)	13,123,14	13.411,69	12.548,25	12.275,55
5	Luas areal tanam dan panen Buah-buahan (ha)				
	- Tanam	-	21.688		15.499,00
	- Panen	-	373.814		145.041,00
6	Luas areal tanam dan panen biofarmaka (ha)				
	- Tanam	-	36		1,26
	- Panen	-	33		2,06
7	Luas areal tanam dan panen sayur-sayuran (ha)				
	- Tanam	-	36	17	50
	- Panen	-	33	17	50



No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
8	Jumlah panjang jaringan irigasi tingkat usaha tani (meter)	-	849	531	303
9	Jumlah embung (unit)	4	1		1
10	Jumlah panjang jalan usaha tani (meter)	-	2.200	736	2.042,00
11	Jumlah penggunaan alat mesin pertanian (unit)	-	318		63
12	Jumlah penyuluh pertanian yang difasilitasi (orang)	118	99	96	96
13	Jenis Teknologi tepat guna di bidang peternakan dan perkebunan (jenis).	5	5	5	5
14	Jumlah peningkatan pendapatan petani peternak (rupiah)	25.012.692	26.741.200	26.741.200	26.741.200
15	Jumlah populasi ternak (Ekor)	788,391	825,001	863,711	903,579
16	Jumlah rumah tangga peternak (RTP Peternak)	60.523	61.871	62.978	64.277
17	Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibina	0	10	10	10
18	Jumlah produktifitas perkebunan rakyat (Kelapa Sawit dan Karet)				
	Sawit	18000	18500	19000	19500
	Karet	2000	2050	2100	2150
19	Jumlah konsumsi protein hewani ternak, (daging kg/kapita/tahun)	10,02	10,13	10,37	10,32
20	Jumlah kelompok usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri peternakan dan perkebunan (Kelompok)	25	15	20	20
21	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (persen)	51,75	51,12	51,16	54,22

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, 2021 dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.3.4 Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu.

Sementara itu kontribusi PDRB dari sektor perdagangan juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan sebesar 5,64%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan sebesar 5,70% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 5,88%. Kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 6,26% dan terakhir pada tahun 2020 kontribusi PDRB sektor perdagangan menurun menjadi 5,35%. Kontribusi PDRB sektor perdagangan pada tahun 2020 menjadi yang terendah dalam empat tahun terakhir dikarenakan situasi pandemi yang membatasi operasional usaha dan membuat banyak usaha tutup. Meski demikian, walau secara persentase menurun, secara nominal kontribusi sektor perdagangan tetap meningkat pada tahun 2020, yaitu meningkat sebesar 1,47% dibanding tahun 2019.

Sementara itu untuk indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu terlihat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tahun 2016 dan tahun 2017 cakupan bina kelompok pengrajin masih berjumlah 20 kelompok. Namun, pada tahun 2018 cakupan bina



kelompok pengrajin meningkat sebesar 200% menjadi 60 kelompok binaan. pada tahun 2019 cakupan bina kelompok pengrajin meningkat sebesar 60% menjadi 85 kelompok binaan. Namun, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 24 kelompok binaan saja. Pembinaan kelompok pengrajin ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas pengrajin, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pengrajin di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih rinci untuk capaian indikator kinerja Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 121
Realisasi Capaian Indikator Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta rupiah)	6.176.381	5.789.420	7.952.050	8.133.500	9.113.040
2	Pertumbuhan Industri Kecil dan rumah tangga	1460	1.480	1.501	834	850
3	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam Juta rupiah)	1.439.490	1.065.780	1.767.230	1.901.010	1.929.000
4	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam persen)	5,64%	5,70%	5,88%	6,26%	5,35 %
5	Ekspor Bersih Perdagangan (dalam juta rupiah)	1.347,28	1.072.840	1.076.950	245.330	5.406.361
6	Cakupan bina kelompok pengrajin	20	20	60	85	24

Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dan BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena menentukan arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan permasalahan dan potensi sumber daya daerah yang dimiliki. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Rokan Hulu telah disusun tepat waktu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tabel II- 122
Dokumen Perencanaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

Dokumen	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
RPJPD Kabupaten Rokan Hulu	Ada	Ada	Ada	Ada
	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009			
RPJMD Kabupaten Rokan Hulu	Ada	Ada	Ada	Ada
	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016			
Renstra OPD	Ada	Ada	Ada	Ada
	Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2011			



Dokumen	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
RKPD Kabupaten Rokan Hulu	Ada	Ada	Ada	Ada
	RKPD tahun 2017 (Perbup Nomor 14 Tahun 2016)	RKPD tahun 2018 (Perbup 21 tahun 2017)	RKPD tahun 2019 (Nomor 50 tahun 2018)	RKPD tahun 2020 (Nomor 23 tahun 2019)
	RKPD Perubahan (Perbup nomor 48 tahun 2017)	RKPD Perubahan (Perbup nomor 60 tahun 2018)	RKPD Perubahan (Perbup nomor 29 tahun 2019)	RKPD Perubahan (Perbup nomor 42 tahun 2020)
RTRW Kabupaten Rokan Hulu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

Sumber : Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.4.2 Keuangan

Didalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengambil beberapa langkah strategis antara lain akuntabilitas dan transparansi diberbagai bidang. Langkah-langkah strategis dan inovatif didalam mengakselerasikan kinerja aparatur pemerintahan pada tingkatan paling tinggi sampai pada tingkatan paling rendah, perlu diupayakan dan dilakukan yaitu melalui dukungan pengawasan yang benar-benar solid dan dipercaya sehingga dapat tercipta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya terhadap hasil pengawasan fungsional pemerintah serta sasaran pembangunan. Hasilnya adalah Pemerintah Rokan Hulu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan daerah tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Dengan empat kali berturut-turut menerima penghargaan ini, membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dalam hal porsi penggunaan anggaran maupun pelaporannya.

Tabel II- 123

Realisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase belanja pendidikan	32,25	31,60	31,06	30,03	32,44
3	Persentase belanja kesehatan	14,88	12,38	10,79	12,00	12,64
4	Penyusunan APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Persentasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	6,63	13,17	5,43	9,24	10,33
6	Persentase SILPA terhadap APBD	3,47	0,57	0,25	0,43	0,44

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Rokan Hulu, 2021 (diolah)

2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melihat gambaran kinerja pada urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tabel berikut.



Tabel II- 124

Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja Utama	2017		2018		2019		2020	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)								
SD	46 orang	14 orang	46 orang	12 orang	44 orang	17 Orang	43 Orang	14 Orang
SMP	55 orang	73 orang	55 orang	69 orang	57 orang	31 Orang	55 Orang	49 Orang
SMA	1.385 orang	2237 orang	1.385 orang	2.190 orang	1.381 orang	1.100 Orang	1.380 Orang	988 Orang
D.I	46 orang	294 orang	46 orang	287 orang	46 orang	211 Orang	46 Orang	1 Orang
D.II	770 orang	249 orang	770 orang	242 orang	770 orang	178 Orang	768 Orang	98 Orang
D.III	430 orang	304 orang	429 orang	310 orang	429 orang	580 Orang	429 Orang	665 Orang
DIV/S1	3.446 orang	2533 orang	3.447 orang	2.460 orang	3.447 orang	3.362 Orang	3453 Orang	3585 Orang
S2	195 orang	16 orang	195 orang	16 orang	197 orang	223 Orang	197 Orang	176 Orang
S3	0 orang	0	0 orang	0 orang	2 orang	2 Orang	2 Orang	0
Jumlah aparatur berdasarkan database kepegawaian				0,8260355		0,84378698		
PNS	6.802 orang	5.720 orang	6.760 orang	5.584 orang	6.760 orang	5.704 Orang	6.783 Orang	5.576 Orang
Honorer	3.973 orang	3.550 orang	3.973 orang	3.636 orang	3.973 orang	3.439 Orang	3.973 Orang	3.805 Orang
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat dan yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya								
PNS Naik Pangkat	950 orang	981 orang	950 orang	1.342 orang	950 orang	1.389 orang	950 Orang	1.212 Orang
PNS Pensiun	71 orang	100 orang	113 orang	146 orang	113 orang	152 orang	135 Orang	144 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil								
DiklatPim II	2 orang	0	4 orang	4 orang	4 orang	0	4 orang	0
DiklatPim III	5 orang	6 orang	5 orang	0				
DiklatPim IV	20 orang	0	20 orang	0				
Tugas Belajar	3 orang	1 orang	5 orang	5 orang	5 orang	0	5 orang	0
Persentase jumlah pegawai yang memenuhi aturan yang berlaku	98,75%	99,93%	98,85%	99,91%	99,15%	99,51%	99,25%	100%
Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	46 kasus	4 kasus	44 kasus	5 kasus	42 kasus	28 kasus	40 kasus	30 kasus
Jumlah pelaksanaan rapat Dewan Pengurus dan anggota Korpri	1 kali	0	1 kali	5 kali	1 kali	5 kali	1 kali	0



Indikator Kinerja Utama	2017		2018		2019		2020	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah pelaksanaan upacara persemayaman anggota Korpri yang meninggal dunia	5 kali	0	5 kali	1 kali	5 kali	0	5 kali	0

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Pada tahun 2020 banyak kegiatan yang belum mencapai targetnya dikarenakan sebagian anggaran yang terkena *refocusing* sehingga anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Pelarangan bepergian keluar daerah dan pelarangan perkumpulan keramaian juga membuat beberapa program pelatihan, rapat dan upacara tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020. Banyak pula kegiatan tersebut yang dialihkan melalui daring.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu mengemban tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah. Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan semakin kompleks dengan adanya arus reformasi birokrasi yang menjadi agenda nasional untuk menciptakan tatanan birokrasi yang mampu menjawab perubahan sosial yang dinamis dan kompleks. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan. Visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya aparatur Negara yang professional dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Misi reformasi birokrasi adalah mengubah pola/alam pikiran (*mindset*), pola budaya (*cultural set*), dan system tata kelola pemerintahan. Adapun sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang : bersih, efektif, efisien, produktif, transparan dan terdesentralisasi. Salah satu indikator pemenuhan dari Indeks Reformasi Birokrasi adalah sistem merit dan manajemen ASN. Di Kabupaten Rokan Hulu, penguatan sistem merit pada urusan kepegawaian dan diklat sudah dilaksanakan dan tertuang dalam aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi) KASN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 203, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. BKPP telah menindaklanjuti melalui surat kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah Nomor: 890/ BKPP-PA/04 tanggal 04 Januari 2021 terkait manajemen kepegawaian yang harus melalui uji kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Salah satu tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah melaksanakan uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kurun waktu 2016-2020, tercatat PNS yang telah mengikuti uji kompetensi berjumlah 136 orang. Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetens mengalami penurunan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2020 tidak ada pegawai yang mengikuti uji

kompetensi, hal ini disebabkan karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan ataupun pengiriman peserta diklat, dan kurangnya informasi untuk pelaksanaan uji kompetensi.

Tabel II- 125

PNS yang Sudah Mengikuti Uji Kompetensi di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH PNS
1	2016	0
2	2017	78
3	2018	34
4	2019	24
5	2020	0

Sumber: *Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, 2021*

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Salah satu hal yang menentukan kemajuan suatu daerah adalah kemajuan dalam mengedepankan *research and development* (RnD) atau penelitian dan pengembangan. Hasil penelitian dan pengembangan dapat berupa konsep, model, ataupun rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik seperti kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan sosial, iptek, dll. Maka dari itu, banyak daerah yang menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai ujung tombak dalam menentukan kebijakan. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berjalan sesuai perencanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kegiatan utama kelitbangan terdiri dari Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya yang merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Kegiatan penelitian harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan penerapan yang dapat memanfaatkan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Untuk melihat kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II- 126

Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan pengembangan Tahun 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	100	100	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	100	100	0
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	6,67	9,30	33,33	11,11
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100	100	100	100

Sumber : *Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, 2021*

Dari empat indikator yang digunakan masih ada indikator yang belum menemui target yaitu pada Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan capain yang masih jauh dari harapan.

Peningkatan persentase penerapan inovasi di daerah sangat penting guna meningkatkan daya saing daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan bahwa Inovasi Daerah yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diciptakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

2.3.4.5 Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan adalah agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan (obrik) meliputi seluruh OPD di jajaran pemerintah daerah. Jumlah temuan atas pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI selama kurun tahun 2017 sampai dengan 2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel II- 127

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2019

No	Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi BPK	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase
1	2017	38	33	86,84%
2	2018	20	16	80,00%
3	2019	17	8	47,06%
4	2020	24	17	71,00%

Sumber : *TL_A.06 TLHP Rohul Sem I 2020*

Jumlah temuan selama kurun waktu 2017-2019 menunjukkan adanya penurunan, namun meningkat pada tahun 2020. Walaupun terjadi penurunan temuan. namun dari sisi administrasi seharusnya seluruh temuan hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hingga tahun 2020 baru 71,00% temuan yang ditindaklanjuti, dengan demikian masih perlu ditingkatkan untuk indikator ini.



2.3.4.6 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga teknis daerah. Berikut ini adalah indikator kinerja pada urusan sekretariat daerah.

Tabel II- 128

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020

No.	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ dan ILPPD yang disampaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2	Jumlah Paket Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hulu	192 Paket	114 Paket	68 Paket
3	Jumlah Pelayanan Protokolera kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Sederetan FORKOPIMDA	448 Kali	162 Kali	106 Kali
4	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepada Kecamatan, Lurah dan Desa	1 Perbup, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 16 Kecamatan	0	0
5	Jumlah Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah Tahunan	1 Kali	1 Kali	0
6	Persentase Pelaksanaan Program dari Kegiatan SKPD yang Terealisasi	96%	87,80%	87,11%
7	Persentase Paket yang dilelang menggunakan Sistem LPSE			100%
8	Jumlah Pelaksanaan Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan Berbasis Kewilayahan			
9	Jumlah Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	2 Perkara	2 Perkara	1 Perkara
10	Jumlah Penyuluhan Hukum pada Masyarakat	800 Orang	14 Desa	0
11	Jumlah Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru	56 Orang, 1 Tahun	0	0
12	Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan	621 Produk Hukum (56 Perbup, 10 Perda, 555 SK) 500 CD	7 Perda, 83 Perbup, 1123 SK	10 PERDA, 71 PERBUP, 1153 SK
13	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		0
14	Jumlah Pelayanan Informasi kepada Stakeholders	4.440 Lembar	114 Lembar	79 Baliho, spanduk
15	Jumlah Media Masa dan Elektronik yang mempublikasikan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah	44 Media Masa, 2 Advetorial Media Cetak dan Elektronik, 8 Orang	2 Media Masa Elektronik	0
16	Jumlah Realisasi Lahan untuk Kepentingan Umum	0	0	0
17	Jumlah Penyelesaian Batas Desa, Kelurahan	2 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan
18	Jumlah Penerbitan Aspek Perizinan mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi, Pendataan dan Pemetaan Penanganan Permasalahan Pertanahan	1 Dokumen	0	
19	Jumlah Dokumen Teknis ke PPAT dan Pemahaman Hukum Pertanahan	1 Dokumen, 2 Kegiatan	1 Dokumen	
20	Jumlah Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi dan Penanganan Konflik	12 Fasilitasi	16 Fasilitasi	12 Fasilitasi
21	Jumlah Dokumen Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Desa	1 Dokumen, 3 Kabupaten	0	1 Dokumen
22	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	0	1 Kegiatan	4
23	Jumlah Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	4 Kali, 2 Kegiatan	2 Kali, 2 Kegiatan	0
24	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Jemaah	2 Kali	2 Kali	0



No.	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
	Haji			
25	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	3 Kegiatan	2 Kali	1 Kali
26	Jumlah Hari-hari Besar Islam Tingkat Kabupaten yang diperingati	8 Kali	3 Kali	2 Kali
27	Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	C	CC	B

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.3.4.7 Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Secara umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah indikator kinerja pada urusan sekretariat DPRD.

Tabel II- 129

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Jumlah penyelenggaraan persidangan/ rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD	Kali	295	231	328
2	Persentase pengaduan (aspirasi) yang disampaikan masyarakat melalui Sekretariat DPRD diterima tepat waktu dan ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen	58,33	60	63,16
3	Jumlah rancangan peraturan yang dibahas DPRD menjadi Peraturan Daerah	Perda	9	8	10
4	Persentase Peraturan Daerah yang di sosialisasikan kepada masyarakat	Persen	0	0	0
5	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis/workshop/seminar	Orang	-	152	102
6	Jumlah pelaksanaan evaluasi terhadap tindaklanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI	Kali	2	1	2
7	Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasikan media massa	Persen	98	98	98

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu, 2021

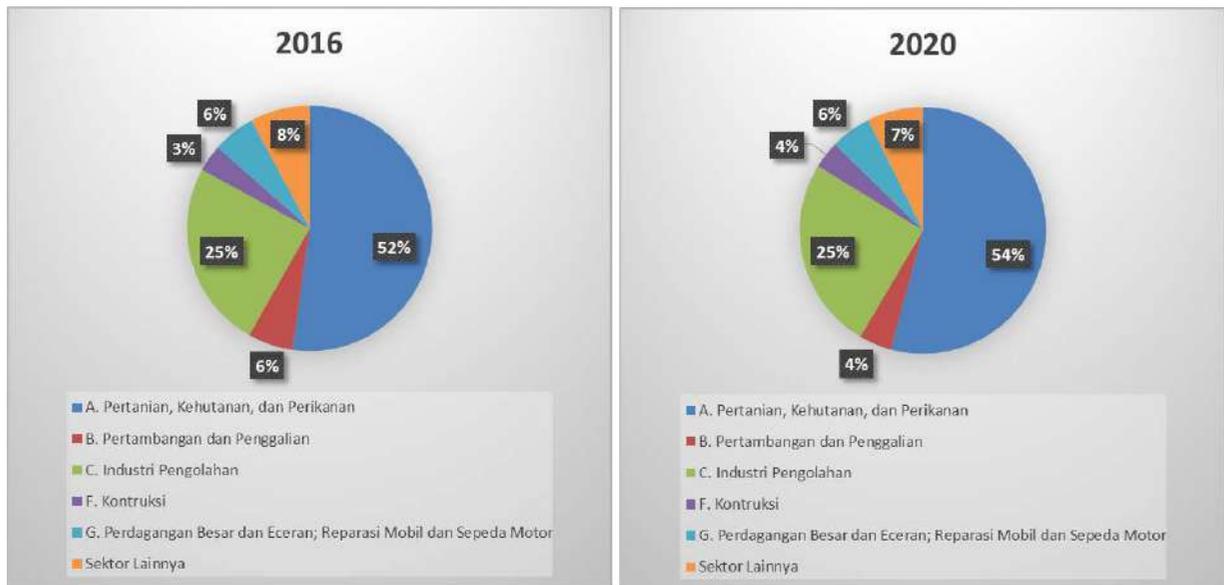
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu ditentukan oleh lima sektor utama, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertambangan dan Penggalan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Konstruksi. Dalam empat tahun terakhir kelima sektor ini tidak banyak mengalami perubahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi *leading sector* perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Struktur



ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh sektor primer. Sektor pertambangan dan penggalan serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih berperan besar dan mendominasi dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi sektor ekonomi andalan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dengan kontribusi pada perekonomian pada tahun 2020 mencapai 54%. Kontribusi ini meningkat lebih tinggi dibanding lima tahun lalu dimana sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 52%.



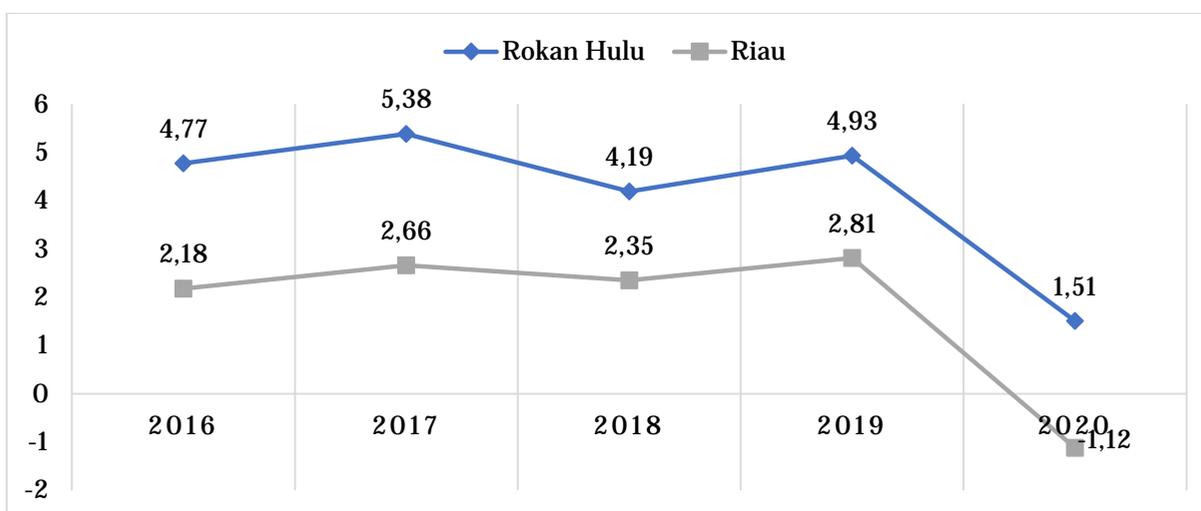
Sumber : PDRB Kabupaten Rokan Hulu, 2020

Gambar II- 24

Struktur Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dan tahun 2020

Peran sektor primer di Kabupaten Rokan Hulu yang masih mendominasi mengindikasikan bahwa Kabupaten Rokan Hulu tergolong ke daerah agraris. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu terhadap hasil sumber daya alam dalam meningkatkan pertumbuhan dan percepatan pembangunan daerah masih tinggi. Akan tetapi, secara perlahan ketergantungan tersebut akan berkurang, seiring dengan pertumbuhan pada sektor sekunder dan tersier. Laju pertumbuhan ekonomi daerah mengindikasikan perkembangan agregat produksi daerah pada satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya, yang dihitung menggunakan angka PDRB harga konstan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang positif menggambarkan perkembangan dan percepatan dalam proses pembangunan, sebaliknya pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan adanya penurunan dalam perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sebesar 5,38 persen, Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi 4,19 persen dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,93 persen. Terakhir pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 1,51 persen. Laju perekonomian yang berfluktuasi ini ditengarai karena naik turunnya harga komoditas perkebunan yang menjadi salah satu sektor pendorong utama perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Gambar II- 25

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017-2020

Peran sektor primer yang masih dominan, memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu. Perlambatan pertumbuhan pada kategori pertambangan dan penggalian serta kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan kategori dari sektor primer, memberikan dampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi, ditambah kondisi harga komoditas yang fluktuatif dan cenderung lebih rendah di bandingkan dengan tahun setelahnya.

Tingkat konsumsi masyarakat dapat menggambarkan karakteristik masyarakat, pada masyarakat yang ekonominya belum mapan biasanya sebagian besar pendapatan akan dialokasikan kepada kebutuhan pokok. Sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mapan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tiga pengeluaran teratas dari kelompok barang makanan adalah pengeluaran untuk Makanan dan Minuman Jadi, Tembakau dan Sirih dan Padi-padian. Sedangkan tiga pengeluaran terbawah adalah pengeluaran untuk Umbi-umbian, Kacang-kacangan dan Konsumsi Lainnya.

Jika dilihat dari komposisi pengeluaran barang makanan ada satu fenomena yang cukup menarik. Dimana pengeluaran tembakau dan sirih jumlahnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan pokok padi-padian atau dengan kebutuhan daging dan ikan. Ini artinya masyarakat lebih suka mengkonsumsi rokok dibanding daging atau ikan atau telur dan susu. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pengeluaran untuk tembakau dan sirih atau dalam hal ini rokok merupakan pengeluaran yang dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti peningkatan konsumsi protein atau pengeluaran untuk akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Tabel II- 130

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (Rp)

No	Kelompok Bahan Makanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	93.709	89.095	83.641	82.766	86.009



No	Kelompok Bahan Makanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Umbi-umbian	6.046	7.123	7.169	6.646	7.624
3	Ikan	48.908	62.264	57.393	66.234	60.793
4	Daging	23.643	28.599	25.811	27.187	23.585
5	Telur dan Susu	31.009	32.671	33.015	31.500	33.100
6	Sayur-sayuran	61.181	64.806	59.545	51.575	69.241
7	Kacang-kacangan	8.630	10.614	9.772	8.777	9.340
8	Buah-buahan	19.304	23.565	23.519	25.009	27.139
9	Minyak dan Lemak	22.764	23.156	21.237	20.037	20.845
10	Bahan Minuman	17.920	19.226	17.646	15.49	19.691
11	Bumbu-bumbuan	11.076	11.635	12.137	11.687	14.512
12	Konsumsi Lainnya	7.330	10.407	9.167	8.408	9.505
13	Makanan dan Minuman Jadi	108.422	137.931	137.886	171.881	158.651
14	Minuman Beralkohol	-	-	-	-	-
15	Tembakau dan Sirih	83.740	100.533	95.179	92.194	89.486
Total Pengeluaran Pangan		543.683	621.626	593.117	619.391	629.519

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka 2021

Sementara itu untuk pengeluaran kelompok barang bukan makanan, terlihat bahwa pengeluaran untuk Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air masih menjadi yang paling besar. Pada tahun 2016 untuk kebutuhan Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air masyarakat Rokan Hulu rata-rata menghabiskan sekitar 235.285 rupiah. Pada tahun 2017 untuk kebutuhan Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air masyarakat Rokan Hulu rata-rata menghabiskan sekitar 241.361 rupiah. Pada tahun 2018 untuk kebutuhan Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air masyarakat Rokan Hulu rata-rata menghabiskan sekitar 265.163 rupiah. Jumlah pengeluaran untuk Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 271.348 rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 272.433.

Semakin meningkatnya pengeluaran untuk Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air ditenggarai karena harga penerangan dan air yang semakin naik setiap tahunnya. Lebih rinci Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 131

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (Rp)

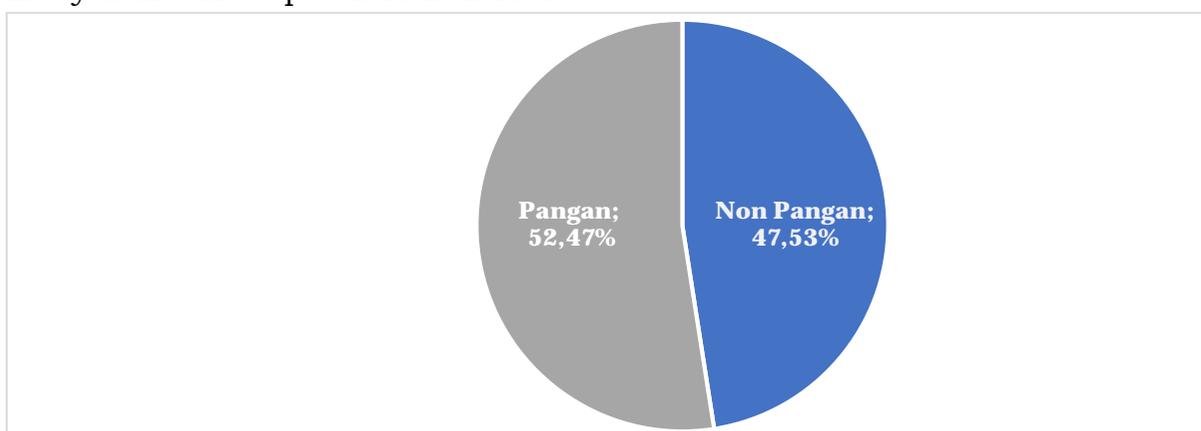
No	Kelompok Barang Bukan Makanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan dan Air	235.285	241.361	265.163	271.348	272.433
2	Aneka Barang dan Jasa	101.827	104.584	111.386	124.942	123.491



No	Kelompok Barang Bukan Makanan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Pakaian, Alas, dan Tutup Kepala	46.791	49.844	44.643	46.133	44.231
4	Barang yang Tahan Lama	34.069	48.122	68.986	56.212	56.235
5	Pajak, Pungutan, dan Asuransi	18.355	20.942	27.709	29.728	32.051
6	Keperluan Pesta dan Upacara	7.346	8.798	25.624	28.311	41.795
Total Pengeluaran Non pangan		443.673	473.652	543.511	556.674	570.236

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu 2021

Secara proporsional untuk pengeluaran pangan dan non pangan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Rokan Hulu lebih besar digunakan untuk pengeluaran pangan. Pengeluaran pangan menghabiskan total 52,47% dari total pengeluaran pada tahun 2020, atau dengan nominal Rp629.519,00. Sementara itu untuk pengeluaran nonpangan pada tahun 2020 secara proporsi sebesar 47,53% dari total pengeluaran masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.



Gambar II- 26

Proporsi Pengeluaran Pangan dan Nonpangan Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2020

2.4.2 Fokus Wilayah dan Infrastruktur

Dukungan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital dalam proses percepatan pembangunan daerah. Dukungan infrastruktur yang memadai dapat dijadikan sebagai keunggulan daya saing daerah dengan daerah lainnya.

Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perekonomian tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah semata, akan tetapi kemajuan perekonomian juga sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Keterlibatan dunia usaha dalam bentuk investasi di daerah, dapat menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, diantaranya yaitu infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan energi. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang layak, dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah.



2.4.2.1 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi di daerah. Infrastruktur jalan merupakan pilar pembangunan yang menentukan kelancaran arus barang, jasa, uang dan orang. Kelancaran mobilitas barang dan jasa ini kemudian menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga barang dan jasa di daerah. Semakin bagus kondisi jalan, maka akan semakin lancar mobilitas barang dan jasa. Semakin lancar mobilitas barang dan jasa maka akan semakin murah biaya yang harus dikeluarkan, dengan demikian harga barang dan jasa akan lebih terjangkau. Selain mempengaruhi harga-harga kondisi infrastruktur jalan juga menentukan keputusan investasi oleh investor. Kelancaran aksesibilitas suatu wilayah merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi industri dan pembangunan karena ia merupakan variabel utama dalam biaya transportasi dan ongkos angkut perusahaan. Untuk itu sangat diperlukan perhatian yang lebih serius dalam pembangunan infrastruktur jalan ini.

Pada tahun 2017 kondisi jalan kabupaten yang berkondisi baik sebesar 645,044 km, kemudian pada tahun 2021 berkurang menjadi hanya 336,960 km jalan kabupaten dalam kondisi baik. Dari data dapat di lihat terjadinya penurunan jalan berkondisi baik yang cukup drastis pada tahun 2021 yang kemudian diikuti dengan kenaikan panjang jalan dalam kondisi sedang dan rusak ringan. Hal ini menunjukkan belum adanya perbaikan dan pemeliharaan jalan yang memadai. Kemudian jalan berkondisi rusak berat berkurang dari tahun 2017 sepanjang 872,112 km menjadi tinggal 182,802 km pada tahun 2021. Selanjutnya panjang Jalan Kondisi Mantap (Baik + Sedang) pada tahun 2021 sepanjang 1158,833 Km. Adapun permasalahan yang kami hadapi dalam beberapa tahun ini akibat adanya Pandemi Covid-19 Pembangunan dan peningkatan jalan menjadi terhambat di akibatkan adanya refocusing anggaran sejak dari tahun 2020-2021. Lebih rinci mengenai perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 132
Kondisi Jalan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Panjang Jalan (Km)	2140,365	2140,365	2140,365	2140,365	2140,365
2	Panjang Jalan Baik (Km)	645,044	662,511	340,240	357,530	336,960
	Persentase	30,14 %	30,95 %	15,90 %	16,70 %	15,74 %
3	Panjang Jalan Sedang (Km)	327,102	334,291	667,733	658,058	821,873
	Persentase	15,28 %	15,62 %	31,20 %	30,75 %	38,40 %
4	Panjang Jalan Rusak Ringan (Km)	296,107	289,004	306,704	328,832	798,730
	Persentase	13,83 %	13,50 %	14,33 %	15,36 %	37,32 %
5	Panjang Jalan Rusak Berat (Km)	872,112	854,559	825,688	795,945	182,802
	Persentase	40,75 %	39,93 %	38,58 %	37,19 %	8,54 %

Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka, 2021

2.4.2.2 Kelistrikan

Selain infrastruktur jalan, tenaga listrik merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Pada tahun 2017 hingga 2020 tercatat bahwa konsumsi listrik oleh rumah tangga masih menjadi yang terbesar di Kabupaten Rokan Hulu. Pelanggan PLN dari Rumah Tangga tercatat mencapai 121.205 pelanggan pada tahun 2020. Sementara itu pelanggan industri yang menjadi pelanggan paling kecil, hanya berjumlah 28 pelanggan pada tahun 2020.

Apabila dilihat dari produksi listrik, Pada tahun 2020 Produksi listrik Kabupaten Rokan Hulu pada satuan PLN yang ada di daerah mencapai 247.757.437 KWh dengan 60.000 KW daya terpasang. Dari total produksi



listrik ini sebagian sebanyak 221.434.417 KWh terjual dan sebanyak 1.175.247 KWh dipakai sendiri. Sementara itu untuk produksi listrik yang susut/hilang pada tahun 2020 sebesar 10,62% atau sebanyak 26.323.020 KWh produksi listrik total di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah listrik yang susut/hilang ini umum terjadi karena adanya KWH yang hilang selama proses transmisi dan distribusi listrik di daerah.

Tabel II- 133
Jumlah pelanggan dan produksi Listrik PLN (persero)
Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan					
	a. Rumah Tangga	79.611	94.897	103.586	113.021	121.205
	b. Sosial	1.906	2.374	2.661	3.011	3.368
	c. Perkantoran	338	401	405	442	496
	d. Badan Usaha	2.509	2.878	3.140	3.476	3.637
	e. Industri	7	3	5	8	28
	f. Penerangan Jalan Umum	-	-	27	28	21
2	Produksi Listrik					
	a. Daya Terpasang (KW)	28.000	40.000	40.000	47.800	60.000
	b. Produksi Listrik (RibukWh)	185.791	203.919	195.550	230.786	247.757
	c. Listrik Terjual (RibukWh)	149.777	175.216	173.31	206.376	221.434
	d. Dipakai Sendiri (KWh)	40.790	45.111	154.351	799.474	1.175
	e. Susut/Hilang (RibukWh)	34.347	25.272	22.238	25.746	26.323

Sumber : PLN Kabupaten Rokan Hulu,2021

2.4.2.3 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menambah daya saing Kabupaten Rokan Hulu, karena RTRW bertujuan untuk melihat rencana pemanfaatan ruang daerah berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun. Sehubungan dengan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040. Rasio ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah pada tahun 2020 adalah sebesar 0,6722. Lebih jelas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II- 134

Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 s/d 2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	belum Penetapan RTRW	belum Penetapan RTRW	belum Penetapan RTRW	2408446,66 Ha
2	Rencana Peruntukan RTRW	belum Penetapan RTRW	belum Penetapan RTRW	belum Penetapan RTRW	3582856,19 Ha
3	Rasio	0	0	0	0,6722

Sumber: Bappeda Kab. Rokan Hulu,2021

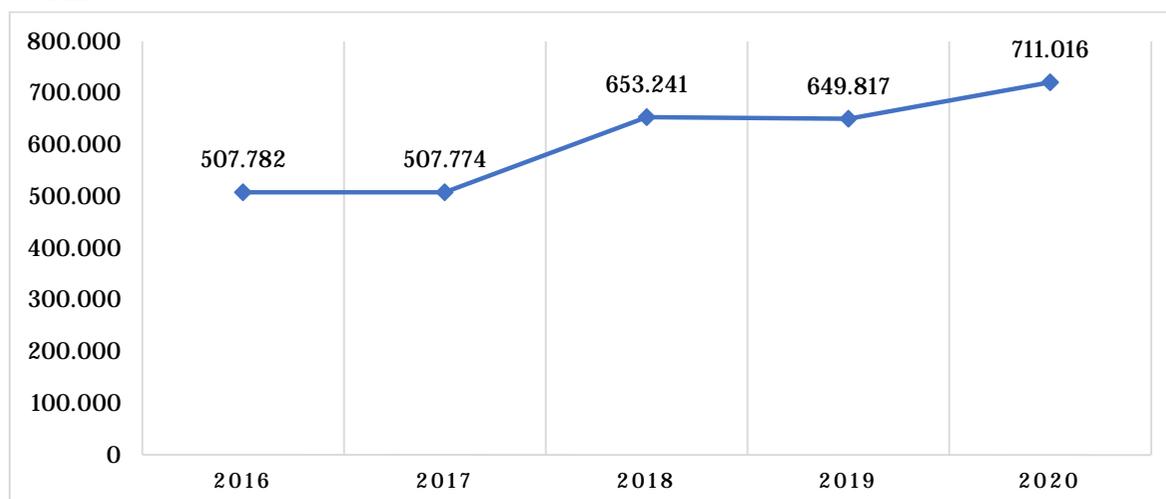
2.4.2.4 Air Bersih

Kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat, hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang semakin bertambah. Kebutuhan akan air minum bersih dan sehat di Kabupaten Rokan Hulu, sebagian masih disediakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bentuk UPT Pengelolaan Air Bersih (PAB) dan belum berbentuk Perusahaan Daerah



Air Minum (PDAM), berikut data air minum yang di salurkan menurut jenis konsumen tahun 2016-2020, pada gambar dibawah.

Sektor rumah tangga merupakan sektor pengguna air minum terbanyak yang disediakan oleh UPT PAB, lebih dari 80 persen air minum yang disediakan oleh UPT PAB disalurkan ke sektor rumah tangga, diikuti oleh sektor toko/industry/perusahaan, dan kantor pemerintah. Lebih jelas mengenai jumlah air bersih yang disalurkan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Rokan Hulu Dalam Angka 2021

Gambar II- 27

Jumlah Air Bersih yang di Salurkan (m³) Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar diatas, data air bersih yang disalurkan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sebesar 711.016 m³. Pada tahun 2020 jumlah pelanggan air bersih sebanyak 4.919 pelanggan dengan nilai Rp. 2.022.376.000, pelanggan terbanyak berada di Kecamatan Rambah yakni 1.764 pelanggan. Lebih rinci mengenai jumlah pelanggan dan air yang disalurkan menurut kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 135

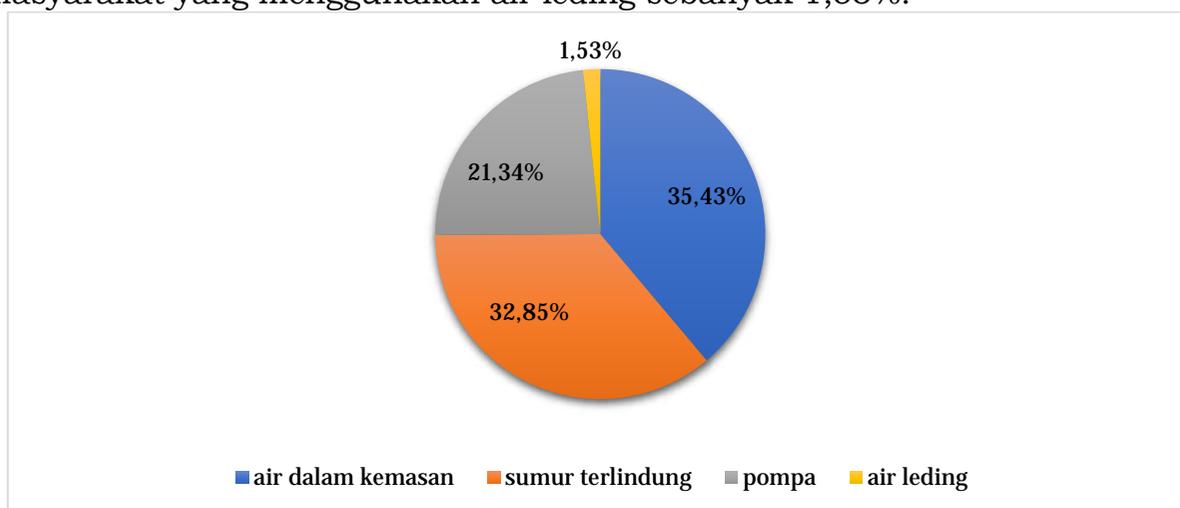
Jumlah Pelanggan dan Air Bersih yang Disalurkan menurut Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan	Nilai (Rp)
1	Rambah	1764	315809	965.187.000
2	Rambah Hilir	426	43000	137.131.000
3	Rambah Samo	60	3953	14.139.000
4	Kepenuhan	28	4968	17.497.500
5	Kepenuhan Hulu	99	7208	20.836.500
6	Tambusai	838	110336	351.094.500
7	Tambusai Utara	154	37863	85.477.000
8	Rokan IV Koto	78	11547	38.685.500
9	Pendalian IV Koto	55	3734	11.067.500
10	Bonai Darussalam	-	-	-
11	Kunto Darussalam	-	-	-
12	Pagaran Tapah Darussalam	-	-	-
13	Tandun	774	84681	200.364.000
14	Kabun	14	1044	2.334.000
15	Bangun Purba	200	13228	48.297.500
16	Ujungbatu	429	73645	130.265.000
Jumlah		4919	711.016	2.022.376.00

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka, 2021



Terkait dengan sumber air minum utama, pada tahun 2020 sebanyak 35,43% penduduk Kabupaten Rokan Hulu menggunakan sumber air minum dari air dalam kemasan. Kemudian sebanyak 32,85% penduduk Kabupaten Rokan Hulu menggunakan sumber air minum dari sumur terlindung. Masyarakat yang menggunakan air minum dari pompa sebanyak 21,34% dan masyarakat yang menggunakan air leding sebanyak 1,53%.



Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka 2021

Gambar II- 28
Sumber Air Minum Utama Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Arus investasi ke daerah harus didukung dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang baik. Kondisi daerah yang sering terjadi konflik, menimbulkan keraguan dan penolakan bagi investor untuk melakukan investasi di daerah. Dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif dan aman, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan instansi terkait, telah melakukan berbagai upaya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.

Tingkat kriminalitas dan pelanggaran kamtibmas di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016-2020 memiliki kecenderungan menurun, sebanyak 1.016 kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2016 telah turun menjadi 725 kasus pada kejahatan pada tahun 2020. Untuk Risiko penduduk terjadi tidak pidana per 100.000 penduduk adalah 101. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya kejahatan pada 100.000 penduduk adalah 101 kali. Sedangkan pada selang waktu tindak pidana juga memiliki kecenderungan menurun dimana pada tahun 2020 satu tindakan kejahatan dapat terjadi pada rentang waktu 28 menit dan 56 detik. Secara umum indikator tindak pidana dalam kurun waktu lima tahun terakhir bergerak kepada arah yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan dan memungkinkan pembentukan iklim usaha yang baik.

Tabel II- 136

Tindak Kriminal dan Pelanggaran Kamtibmas Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	1.016	886	779	736	725
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana	165	139	118	119	101



Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana	37'.19"	19'.49"	14'.43"	19'.49"	28'.56"
Persentase penyelesaian tindak pidana	70,57	78,67	84,34	78,94	74,22

Sumber : Polres Kabupaten Rokan Hulu, 2021

2.4.3.2 Perizinan

Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk di Kabupaten Rokan Hulu, merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan prima. Percepatan dan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Rokan Hulu yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.

Jenis perizinan yang paling banyak diterbitkan oleh Kabupaten Rokan Huludiantaranya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-undang Gangguan/HO/ITU, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN).

Tabel II- 137

Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

No	Jenis Perizinan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	na	na	na	na
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	633	433	na	267
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	659	446	na	na
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	189	375	460	583
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)	75	63	153	na
6	Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet	na	na	na	na
7	Izin Undang-undang gangguan / HO/ITU	na	na	na	na
8	Izin Trayek	na	na	na	na
9	Izin Usaha Angkutan Umum	na	na	na	na
10	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat/Tanah milik	na	na	na	na
11	Izin lembaga Kursus	na	na	na	na
12	Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta	na	na	na	na
13	Izin Pemasangan Reklame	25	40	na	29
14	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	na	na	na	1
15	Izin Toko Obat	6	4	5	1
16	Izin Apotek	17	10	8	16
17	Izin Optik	5	na	na	na
18	Izin Depot Isi Ulang Air Mineral	na	na	na	na
19	Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran non pemerintah	na	na	na	na
20	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	na	na	1	3
21	Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P)	na	na	na	na
22	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	na	na	na	na
23	Tanda Daftar Industri (TDI)	17	14	na	na
24	Izin Usaha Industri (IUI)		4	48	na
25	Tanda Daftar Gudang (TDG)	13	3	1	6

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, 2021



2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun. Berdasarkan data tahun 2019, jumlah penduduk dari kelompok umur 15-64 sebanyak 463,633 jiwa atau 64,56 persen. Sedangkan kelompok umur 0-14 sebanyak 231.455 jiwa atau 32,22 persen dan kelompok umur 64+ sebanyak 23.233 jiwa atau 3,23 persen, kemudian di tahun 2020 kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 645.602 atau 64,38 persen, kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 231.455 atau 32,22 persen dan kelompok umur 64+ sebanyak 23.233 atau 3,23 persen

Dari Data komposisi penduduk tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Rokan Hulu di dominasi oleh kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun), sedangkan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) mengalami penurunan pada tahun 2020, meskipun angka penurunan tidak signifikan. Pada kelompok usia tua mengalami peningkatan, yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 3,07 persen, meningkat menjadi 3,23 persen pada tahun 2020.

Berdasarkan komposisi penduduk tersebut maka didapat rasio ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 sebesar 55,32 dan tahun 2020 sebesar 54,93. Hal ini menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu yang sudah menurun dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Dimana pada tahun 2019 setiap 100 penduduk berusia produktif harus menanggung lebih dari 55 orang penduduk yang berada dalam usia tidak produktif. Sedangkan pada tahun 2020 setiap 100 penduduk berusia produktif harus menanggung kurang dari 55 orang penduduk tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diringi dengan program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II- 138

Rasio Ketergantungan dan Komposisi Penduduk Kabupaten Rokan Hulu
Menurut Tahun 2019-2020

Kelompok Umur (tahun)	Tahun		Tahun	
	2019		2020	
0-14 Tahun	225.247	32,54	231.455	32,22
15-64 Tahun	445.602	64,38	463.633	64,56
Di atas 64 Tahun	21.271	3,07	23.233	3,23
Rasio Ketergantungan	55,32		54,93	

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021



2.5 EVALUASI HASIL RPJMD PERIODE TAHUN 2016-2021

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2020 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah. Secara umum hasil realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan lebih terfokus terhadap realisasi anggaran, adapun yang menjadi penyebabnya yaitu:

- Keterbatasan pemahaman sumber daya aparatur dalam menentukan target kinerja, tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sehingga masih terdapatnya indikator kinerja program yang capaiannya masih jauh dari target akhir RPJMD;
- Keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah daerah menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak optimal dilaksanakan;
- Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 menyebabkan daerah harus melakukan *recofusing* anggaran yang berdampak pada perubahan target kinerja maupun anggaran pada perangkat daerah;
- Belum konsistennya Perangkat Daerah dalam merencanakan program dan kegiatan yang tidak mempedomani target akhir RPJMD;
- Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam merumuskan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah karena cukup rendahnya kesadaran dunia usaha/masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.
- Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil tindakan atau kebijakan sebagai berikut :

- Perangkat Daerah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk merumuskan rencana strategis perangkat daerah periode selanjutnya yang lebih substantif dan integrative sesuai dengan sasaran misi RPJMD;
- Perangkat daerah berupaya secara optimal melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah secara berkala dan menyelaraskannya dengan dokumen RPJMD sehingga antar dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan;
- Perangkat daerah melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens antara Perangkat Daerah dengan Instansi teknis di Pemerintah Provinsi Riau maupun Kementerian/ Lembaga teknis di pusat dalam rangka pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II- 139 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD Tahun Ke-										Capain Target RPJMD Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD	
							K	Rp	1 (2017)		2 (2018)		3 (2019)		4 (2020)		5 (2021)		1 (2017)		2 (2018)		3 (2019)		4 (2020)		5 (2021)		16=11/6 x100		17=12/7 x100		18=13/8x100		19=14/9x100		20=15/10x100		(21)		(22)			(23)
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	%	0,43	16,20	22,00		19,70	18,20		17,70	16,20		4		4		87		16				16,82	-	21,62	-	476,92	-	91,53	-	-	-	16,20	-	100,00	-					
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	%	30,00	100	100,00		100,00			100,00		100,00		87		85		100		100			86,50	-	85,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-					
				Persentase anak 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	70,00	100	100,00		100,00			100,00		100,00		91		27		100		100			91,40	-	26,90	-	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-					
			21	Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	pelatihan	11	24	3.684	2	670	2	672	3	692	3	813	3	837	1	200	2	456	2	598	1	-	50,00	29,79	100,00	67,85	66,67	86,39	33,33	-	-	6,00	1.253,41	25,00	34,02	dinkes				
			22	Peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD	unit website dan SIM RS	1	1	325.570	1	61.130	1	62.964	1	64.851	1	67.299	1	69.326	1	48.583	1	40.025	1	50.513	1	49.941	100,00	79,47	100,00	63,57	100,00	77,89	100,00	74,21	-	-	1,00	189.041,35	100,00	58,07	dinkes			
			23	Keluarga berencana	PUS	91,035	92000	9.681	91572	1.064	91772	2.060	91.872	2.122	91.872	2.185	92000	2.250	91.672	2.728	108.829	1.962	111.450	1.296	70.359	1.225	100,11	256,43	118,59	95,23	121,31	61,08	-	56,06	-	-	70.359,00	7.211,14	76,48	74,49	dppkb			
			24	Pelayanan kontrasepsi	PUS	91,035	92000	3.515	91572	213	91772	790	91.872	813	91.872	837	92000	862	91.672	172	108.829	2.767	111.450	3.525	70.359	2.729	100,11	80,78	118,59	350,24	121,31	433,63	-	326,09	-	-	70.359,00	9.193,74	76,48	261,56	dppkb			
			25	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri	kelompok	0	77	1.109	10	209	13	215	16	222	18	228	20	235	10	209	13	133	16	156	-	-	100,00	99,78	100,00	61,95	100,00	70,06	-	-	-	-	39,00	497,28	50,65	44,84	dppkb			
			26	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	remaja	300	1.165	627	150	-	165	150	170	154	180	159	200	164	150	-	150	-	170	-	-	-	100,00	-	90,91	-	100,00	-	-	-	-	-	470,00	-	40,34	-	dppkb			
			27	Peningkatan penganggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	remaja	300	1.165	1.822	150	166	165	396	170	408	180	420	200	432	150	188	150	199	170	-	-	-	100,00	113,07	90,91	50,22	100,00	-	-	-	-	470,00	386,57	40,34	21,22	dppkb				
			28	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	kelompok	0	2.184	2.509	-	546	600	546	618	546	636	546	655	-	-	546	-	546	153	-	-	-	-	100,00	-	100,00	24,74	-	-	-	-	1.092,00	152,88	50,00	6,09	dppkb				
			29	Keluarga sejahtera	keluarga	2575	26350	594	-	25950	142	26150	146	26250	151	26350	155	29.679	-	34.839	-	34.839	-	36.953	-	-	-	-	134,25	-	133,23	-	140,77	-	-	36.953,00	-	140,24	-	dppkb				

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan										Capain Target RPJMD Tahun Ke-										Yingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan NKPD Kabupaten Tahun Ke-										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		SKPD		
							Target pada Akhir Periode Perencanaan					Capain Target RPJMD Tahun Ke-					Yingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan NKPD Kabupaten Tahun Ke-					Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)																			
							1 (2017)		2 (2018)		3 (2019)		4 (2020)		5 (2021)		1 (2017)		3 (2019)		4 (2020)		5 (2021)		1 (2017)		2 (2018)		3 (2019)		4 (2020)		5 (2021)		(21)		(22)		(23)				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		14	Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	1	Pengembangan data/informasi	Jumlah dokumen profil daerah yang disusun	dokumen	5	10	469	1	85	1	89	1	94	1	98	1	103	1	79	1	54	1	59	1	36	1	100,00	92,78	100,00	61,01	100,00	63,21	100,00	37,08	4,00	228,92	40,00	48,81	bappeda	
				2	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia	dokumen	37	57	217	4	41	4	42	4	43	4	45	4	46	4	74	4	291	4	61	4	340	100,00	180,58	100,00	692,28	100,00	142,83	100,00	755,39	16,00	766,14	28,07	353,06	dikominfo		
				3	Pendataan, penerbitan dan pembinaan ekonomi kerakyatan	Jumlah laporan koordinasi dan pengendalian inflasi daerah (TPID)	dokumen	0	5	5.291	1	1.059	1	1.058	1	1.058	1	1.058	1	1.058	1	95	1	125	1	134	-	-	100,00	9,01	100,00	11,81	100,00	12,68	-	-	3,00	354,56	60,00	6,70	setda		
						Jumlah kerjasama permasalahan ekonomi dan keuangan		0	20		4		4		4		4		4		1		1		2		-	25,00	-	25,00	-	50,00	-	-	-	4,00	-	20,00	-				
MISI 5: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA SEBAGAI LANDASAN BUDAYA SALING MENGHORMATI ANTAR ETNIK DAN AGAMA YANG BERBEDA SEHINGGA TERCIPTA KEAMANAN DAN KETENTAMAN																																											
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1	Penerangan dan bimbingan agama islam	Jumlah penyelenggaraan pelayanan jemaah haji	kali	12	22	82.169	2	14.776	2	16.153	2	16.608	2	17.075	2	17.557	2	3.688	2	7.845	2	8.880	-	2.080	100,00	24,96	100,00	48,57	100,00	53,47	-	12,18	6,00	22.493,35	27,27	27,37	setda		
						Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	kali	12	22		2		2		2		2		2		2		2		2		1		100,00	-	100,00	-	100,00	-	50,00	-	-	7,00	-	31,82	-		
						Jumlah hari-hari besar Islam tingkat Kabupaten yang diperingati	kali	15	30		3		3		3		3		3		3		3		3		2		100,00	-	100,00	-	100,00	-	66,67	-	-	11,00	-	36,67	-		
						Jumlah anggota Korpri yang mengikuti proses pelepasan keberangkatan calon jemaah haji bagi anggota Korpri	orang	412	722		62		62		62		62		62		62		70		-	-	-	-	-	112,90	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	9,70	-		
				2	Pengembangan nilai budaya	Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	set	0	125	3.690	32	-	20	904	23	902	25	928	25	956	-	-	52	64	73	491	-	-	-	-	260,00	7,08	317,39	54,41	-	-	-	-	125,00	554,81	100,00	15,04	disparbud
						Jumlah peristiwa-peristiwa budaya	dokumen	5	9			1		1		1		1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Jumlah alat musik tradisional tingkat SD /SMP sederajat	set	0	133		32		23		25		25		28		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				3	Pengelolaan kekayaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	dokumen	1	6	452	1	85	1	88	1	90	1	93	1	96	1	51	-	-	1	106	-	-	100,00	59,85	-	-	100,00	117,89	-	-	-	-	2,00	156,97	33,33	34,73	disparbud



Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau terkait hasil capaian kinerja pemerintah kabupaten rokan hulu dapat digambarkan pada tabel II-133 dimana terdapat tiga aspek, pada aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 6 IKD dimana bobot sebesar 35% dengan capaian rata-rata 91,10% dengan nilai skor sebesar 31,89%, pada aspek daya saing daerah terdiri dari 2 IKD bobot sebesar 30%, dengan capaian rata-rata sebesar 93,97% dengan nilai skor sebesar 28,19%, dan adapun aspek kegiga yakni aspek pelayanan umum yang terdiri dari 102 IKD dengan bobot 30%, capaian kinerja rata-rata sebesar 87,26% dengan nilai skor sebesar 30,54%, total IKD keseluruhan dari tiga aspek ini adalah sebanyak 110 IKD, dengan capaian rata-rata kinerja daerah sebesar 272,33%, dengan skor 90,62% dengan prediket kinerja “sangat memuaskan”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel II- 140

Rekapitulasi Capaian Kinerja Per Aspek Berdasarkan RPJMD
Tahun 2017 S.D. 2020 Kabupaten Rokan Hulu

No	Aspek	Bobot	Rata-Rata Capain Kinerja	Skor	Keterangan
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35%	91,10	31,89	
2	Aspek Daya Saing Daerah	30%	93,97	28,19	
3	Aspek Pelayanan Umum	35%	87,26	30,54	
Total Skor Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja		100%	272,33	90,62	
Nilai Capaian Kinerja : 90,62					
Kriteria Capaian Nilai Peringkat Kinerja : SANGAT BAIK					



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021



BAB III.

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk digunakan sebagai belanja pendanaan pembangunan.

Oleh karena itu, perlu dicermati terhadap kondisi keuangan masa lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan dalam pengelolaannya. Disamping itu perlu juga dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, maupun mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Melalui hasil perhitungan tersebut, akan dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka pengolahan data dan analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap data APBD dan laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta neraca daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan terhadap Neraca difokuskan pada perkembangan asset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2021 telah dikonversi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pendapatan Daerah



Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (bukan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian Transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel III-1 sebagai berikut:

Tabel III- 1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN	1,445,493,027,548.73	1,515,720,732,291.17	1,577,823,855,313.03	1,734,815,365,605.66	1,521,847,391,961.56	1.66
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95,812,025,221.98	199,642,462,770.33	85,734,030,158.19	160,217,013,093.09	101,038,192,579.64	25.31
1.1.1	<i>Pajak daerah</i>	20,038,971,369.04	49,979,306,505.57	33,439,267,999.04	94,876,718,342.25	38,553,663,462.67	60.17
1.1.2	<i>Retribusi daerah</i>	6,845,121,321.00	5,805,956,600.00	5,809,639,600.00	7,006,004,202.00	6,443,907,628.00	-0.64
1.1.3	<i>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</i>	1,590,062,445.13	2,197,444,175.12	2,136,074,783.00	1,960,311,205.00	1,424,569,020.00	-0.04
1.1.4	<i>Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</i>	67,337,870,086.81	141,659,755,489.64	44,349,047,776.15	56,373,979,343.84	54,616,052,468.97	16.42
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1,349,681,002,326.75	1,300,078,269,520.84	1,408,666,305,154.84	1,493,077,552,512.57	1,340,458,189,381.92	0.11
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,260,233,080,233.72	1,124,414,697,069.00	1,240,249,337,865.00	1,385,797,199,363.00	1,233,841,403,536.00	0.19
1.2.1	Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	1,053,662,417,259.00	1,012,398,394,269.00	1,119,942,706,465.00	1,233,000,357,963.00	1,059,383,430,585.00	0.68
1.2.1.1	<i>Dana Bagi hasil pajak</i>	91,127,421,612.00	59,157,173,048.00	67,647,644,590.00	58,347,328,904.00	49,365,863,595.00	-12.47
1.2.1.2	<i>Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam</i>	142,982,212,799.00	144,681,321,577.00	163,065,226,019.00	231,749,149,769.00	145,468,131,308.00	4.70
1.2.1.3	<i>Dana alokasi umum</i>	641,114,579,000.00	640,900,326,000.00	654,291,480,000.00	693,689,933,000.00	647,253,374,000.00	0.35
1.2.1.4	<i>Dana alokasi khusus</i>	178,438,203,848.00	167,659,573,644.00	234,938,355,856.00	249,213,946,290.00	217,296,061,682.00	6.84
1.2.2	Trasfer pemerintahan pusat lainnya	206,570,662,974.72	112,016,302,800.00	120,306,631,400.00	152.796.841.400,00	174,457,972,951.00	0.70
1.2.2.3	<i>Alokasi dana tunjangan profesi kependidikan</i>	93,205,480,000.00					
1.2.2.4	<i>Dana penyesuaian dan otonomi khusus</i>	113,365,182,974.72	112,016,302,800.00	120,306,631,400.00	152.796.841.400,00	174,457,972,951.00	11.85
1.2.3	Transfer pemerintah provinsi	89,447,922,093.03	175,663,572,451.84	168,416,967,289.84	107,280,353,149.57	106,616,785,845.92	13.84
1.2.3.1	<i>Pendapatan bagi hasil pajak</i>	89,447,922,093.03	90,776,075,489.00	101,547,384,398.97	96,600,353,149.57	88,905,585,845.92	0.13
1.2.3.2	<i>Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya</i>	-	84,887,496,962.84	66,869,582,890.87	10,680,000,000.00	17,711,200,000.00	-13.14
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	16,000,000,000.00	83,423,520,000.00	81,520,800,000.00	80,351,010,000.00	139.23
1.3.1	<i>Pendapatan Hibah</i>	0	16,000,000,000.00	83,423,520,000.00	81,520,800,000.00	80,351,010,000.00	139.23

Sumber : BPKAD Kab. Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)



Data tabel III-1 memperlihatkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,66% per tahun. Dilihat dari masing-masing komponen pendapatan, Pendapatan Asli Daerah pada periode yang sama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,31%. Dalam Komponen PAD, Pajak Daerah masih menjadi komponen PAD yang memiliki pertumbuhan paling besar di Kabupaten Rokan Hulu, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 60,17% , kemudian diikuti dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang tumbuh rata-rata sebesar 16,42%. Sementara itu komponen PAD lainnya yakni Retribusi Daerah mengalami penurunan rata-rata (0,64%) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang turun rata-rata sebesar (0,04%)

Selanjutnya komponen pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer, selama kurun waktu yang sama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,11%. Transfer Pemerintah Pusat masih menjadi komponen penyumbang utama pada Pendapatan Transfer. Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 0,19%. Dilihat dari masing-masing komponen dari Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan rata-rata sebesar (12,47%). Sedangkan Bagi Hasil Sumberdaya Alam meningkat rata-rata 4,70%, Dana Alokasi Umum tumbuh rata-rata 0,35% dan DAK tumbuh rata-rata 6,84%. Transfer pemerintah pusat yang mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi adalah transfer pemerintahan pusat lainnya yang tumbuh rata-rata 17,19%.

Kemudian komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun 2017-2020 mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni rata-rata 139,23%. Namun demikian dilihat dari nominal pendapatan relatif kecil jika dibandingkan komponen pendapatan yang lainnya. Komponen Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah ini berasal dari Hibah yang mulai diterima daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Dilihat dari kontribusi pada masing komponen pendapatan secara keseluruhan, pendapatan transfer masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 88,51%, sedangkan PAD hanya berkontribusi rata-rata sebesar 8,22%

Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini, menunjukkan indikasi bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Rokan Hulu masih berada dalam kategori kurang mampu. Kondisi yang demikian akan menjadi perhatian kedepannya mengingat komponen pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dikelola langsung penerimaannya oleh Pemerintah Daerah yang dapat menunjukkan tingkat kemandirian daerah.

Transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan memberikan berkontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah yang memperoleh DAU yang relatif besar karena komponen luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah pendudukan miskin yang relatif besar. Disamping itu Kabupaten Rokan Hulu juga terdapat minyak dan gas walaupun tidak begitu besar. Terkait dengan sumberdaya alam, minyak dan gas pada beberapa tahun terakhir cenderung menurun produksinya



sementara sumberdaya alam ini sulit diperbaharui. Berkenaan dengan hal tersebut, kedepannya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berangsur-angsur mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Belanja daerah merupakan bentuk upaya untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Hakikat dari belanja daerah sebagai perwujudan dan amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Secara umum komponen belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:

- Belanja Operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek Langsung yang didalamnya terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
- Belanja Modal, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Asset Tetap Lainnya dan Belanja Asset Lainnya.
- Belanja Tidak Terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. , Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
- Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah dihadapkan pada besarnya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan urusan disatu sisi, sementara disisi anggaran yang tersedia sangat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

Belanja Daerah harus diprioritaskan pada pendanaan pada urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka untuk mencapai standar pelayanan minimal, kemudian barulah untuk pendanaan pencapaian visi dan misi dan urusan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja belanja dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang dapat diwujudkan terhadap anggaran yang disediakan. Semakin besar realisasi belanja semakin baik kinerja suatu daerah dalam menggunakan anggaran.

Realisasi belanja daerah tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel III-2 berikut:

Tabel III- 2

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	1.396.524.231.468,26	1.555.198.035.271,80	1.580.180.760.758,13	1.731.040.022.187,96	1.522.580.070.083,16	2.62
BELANJA OPERASI	984,488,911,277.50	1,016,218,977,750.80	1,017,891,346,697.89	1,084,660,004,271.09	1,068,159,342,078.04	2.11
<i>Belanja pegawai</i>	684.206.091.077,00	656.433.082.411,00	591.189.618.310,00	601.921.078.537,00	610.324.628.055,00	(2.70)
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	282.218.730.200,50	343.630.945.339,80	412.200.478.387,89	460.165.075.734,09	384.615.008.023,04	9.23
<i>Belanja bunga</i>						
<i>Belanja subsidi</i>						
<i>Belanja hibah</i>	17.727.090.000,00	15.468.200.000,00	13.894.000.000,00	21.961.350.000,00	72.417.206.000,00	66.22
<i>Belanja bantuan sosial</i>	337.000.000,00	686.750.000,00	607.250.000,00	612.500.000,00	802.500.000,00	31.02
BELANJA MODAL	252.866.981.470,72	330.432.257.917,00	353.287.341.468,24	400.078.364.592,17	188.671.793.994,95	(0.50)
<i>Belanja Modal</i>	252.866.981.470,72	330.432.257.917,00	353.287.341.468,24	400.078.364.592,17	188.671.793.994,95	(0.50)
BELANJA TAK TERDUGA	3.120.425.314,00	716.284.890,00	897.006.945,00	1.787.705.195,00	21.495.223.088,00	287.47
<i>Belanja tak terduga</i>	3.120.425.314,00	716.284.890,00	897.006.945,00	1.787.705.195,00	21.495.223.088,00	287.47
TRANSFER	156,047,913,406.04	207,830,514,714.00	208,105,065,647.00	244,513,948,129.70	244,253,710,922.17	12.68
<i>Bagi hasil pajak ke desa</i>	3.794.641.206,04	4.633.345.471,00		11.565.610.513,70	6.264.732.442,35	(30.93)
<i>Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan desa dan partai</i>	152.253.272.200,00	203.197.169.243,00	208.105.065.647,00	232.948.337.616,00	237.988.978.479,82	12.49
SURPLUS/DEFISIT	48,968,796,080.47	-39,477,302,980.63	-2,356,905,445.10	3,775,343,417.70	-732,678,121.60	(62,34)

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu (Data diolah)



Mencermati data yang disajikan pada tabel III.2 diatas bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 realisasi belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,62% setiap tahunnya.

Dilihat dari masing-masing komponen belanja daerah, komponen belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun yaitu tumbuh rata-rata sebesar 287,47%. Pertumbuhan belanja tidak terduga ini disebabkan terjadinya pandemic Covid-19, kemudian diikuti dengan belanja transfer.

Komponen Belanja Operasional juga menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 2,11%. Belanja barang dan jasa serta belanja bantuan keuangan menjadi belanja dengan pertumbuhan yang cukup besar pada periode 2016-2020. Sementara itu belanja pegawai menunjukkan adanya penurunan sebesar -2,70% selama tahun 2016-2020.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabpaten Rokan Hulu terdiri dari:

- Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Realiasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar -2200.89 %. Penyumbang terbesar dari penurunan tersebut berasal dari Silpa yang turan rata-rata sebesar -2200.89% dalam kurun waktu yang sama. Secara lebih rinci pembiayaan dapat dilihat pada tabel III.3. berikut:

Tabel III- 3
Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(557.916.149,78)	48.410.879.930,69	6.324.874.968,10	3.707.618.683,00	7.482.961.500,70	-2200.89
3.1.1	<i>Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA)</i>	(588.304.789,78)	48.410.879.930,69	6.324.874.968,10	3.707.618.683,00	7.482.961.500,70	-2088.84
3.1.2	<i>Pencairan dana cadangan</i>						
3.1.3	<i>Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan</i>		-	-	-		
3.1.4	<i>Penerimaan pinjaman daerah</i>		-	-	-		
3.1.5	<i>Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah</i>	30.388.640,00	-	-	-		
3.1.6	<i>Penerimaan piutang daerah</i>		-	-	-		
3.1.7	<i>Penerimaan pengembalian dari perusda</i>		-	-	-		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	-	0	0	
3.2.1	<i>Pembentukan dana cadangan</i>	-	-	-	0		
3.2.2	<i>Penyertaan modal pemerintah daerah</i>	-	-	-	-		
3.2.3	<i>Pembayaran pokok utang</i>	-	-	-	-		
3.2.4	<i>Pemberian pinjaman daerah</i>	-	-	-	-		
3.2.5	<i>Pembayaran utang lainnya</i>	-	-	-	-		
	PEMBIAYAAN NETTO	(557.916.149,78)	48.410.879.930,69	6.324.874.968,10	3.707.618.683,00	7.482.961.500,70	-2200.89
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	48,410,879,930.69	8,933,576,950.06	3,967,969,523.00	7,482,962,100.70	6,750,283,379.10	

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)



3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan daerah yang sangat penting bagi manajemen Pemerintahan Daerah, karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan informasi tersebut diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih terarah sehingga pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Neraca daerah berisikan posisi asset daerah, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal diterbitkan neraca tersebut.

Selama kurun waktu 2016-2020 asset yang tercatat dalam Neraca Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,10 %. Diantara komponen asset yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah asset lainnya yang dalam kurun waktu yang sama tumbuh rata-rata sebesar 896,28%. Sementara itu, Aset Tetap yang memiliki jumlah paling besar hanya bertumbuh rata-rata 6,13% pada kurun waktu 2016-2020 Rendahnya tingkat pertumbuhan asset tetap ini disebabkan pertumbuhan belanja modal yang rendah sementara pada sisi lain penyusutan semakin meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Aset Lancar terlihat mengalami penurunan rata-rata sebesar -15,91%. Penurunan ini disebabkan berkurangnya jumlah kas, persediaan dan piutang Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan yang baik dalam menyerap anggaran, sehingga kas daerah tidak bertumpuk dan dapat dimaksimalkan untuk melaksanakan program kerja dengan baik,

Pada Investasi Jangka Panjang selama kurun waktu yang sama mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar (4,15%). Rendahnya tingkat pertumbuhan pada investasi jangka panjang ini disebabkan rendahnya penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan investasi non permanen lainnya,

Selanjutnya dari sisi kewajiban daerah pada neraca daerah, selama kurun waktu 2016-2020 tumbuh secara signifikan yakni, rata-rata tumbuh sebesar 25,61 %. Peningkatan Kewajiban Daerah disebabkan meningkatnya utang pemerintah daerah pada pihak ketiga. Dimana pada kurun waktu 2016-2020 Utang Kepada Pihak Ketiga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 83,49%. Sementara itu Ekuitas dana selama kurun waktu 2016-2020 mengalami sedikit peningkatan yakni tumbuh rata-rata sebesar 4,77%. Peningkatan ekuitas dana ini walaupun tidak signifikan namun menjadi hal yang positif karena meningkatkan kemampuan daerah Rokan Hulu untuk mendanai sendiri kegiatan pembangunan daerah. Secara lebih rinci neraca daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III- 4
Neraca Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	203,889,215,516.96	170,459,946,594.84	177,918,205,069.12	146,912,309,446.39	96,694,403,368.16	-15.91
1.1.1.	Kas	48,107,895,430.69	6,738,393,046.79	4,444,142,247.00	9,349,432,620.70	6,793,465,765.10	-9.25
	Kas di Kas Daerah	45,145,154,344.48	618,933,590.90	185,257,712.05	171,464,098.30	332,330,208.36	-20.58
	Kas di rekening Giro						0.00
	Setara Kas						0.00
	Kas di bendahara Penerimaan	19,625,000.00		354,551,477.00		0.00	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	41,790,218.00	74,048,774.55	68,032,382.00	11,344,839.00	4,383,558.00	-18.90
	Kas di Bendahara BLUD RSUD	1,134,659,273.75	2,998,925,648.34	1,549,578,379.95	4,301,065,171.40	1,906,973,721.74	59.47
	Kas di Bendahara Kapitasi	1,077,754,156.46					
	Kas daerah lainnya						
	Kas di Bendahara BOS	688,912,438.00	3,046,485,033.00	2,286,722,296.00	4,865,558,512.00	4,549,778,277.00	105.89
1.1.2.	Investasi Jangka pendek						
1.1.4.	Piutang	95,208,474,427.67	95,299,643,416.31	106,468,698,057.86	101,323,224,431.75	74,029,216,571.98	-4.99
	Beban dibayar dimuka				41,280,919.27		
1.1.5.	Persediaan	60,572,845,658.60	68,421,910,131.74	67,005,364,764.26	36,198,371,474.67	15,871,721,031.08	-22.81
1.2.	ASET TETAP	2,508,538,148,761.86	2,587,154,499,942.47	2,867,966,900,185.46	2,963,460,465,283.64	3,176,731,879,838.54	6.13
1.2.1.	Tanah	282,407,989,617.07	278,756,410,302.07	394,628,416,402.07	390,625,700,943.07	400,730,099,868.07	10.46
1.2.2.	Peralatan dan mesin	523,083,085,316.44	567,166,475,577.33	589,030,922,550.58	512,691,706,143.05	546,132,450,200.89	1.46
1.2.3.	Gedung dan bangunan	1,311,353,484,662.40	1,316,232,581,880.99	1,380,568,582,147.07	1,377,523,640,896.62	1,445,339,920,171.54	2.49
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1,781,058,785,546.38	1,996,981,002,901.89	2,260,079,207,961.63	2,536,892,295,516.98	2,655,115,463,403.74	10.55
1.2.5.	Aset tetap lainnya	37,687,947,259.00	51,583,247,815.81	71,247,984,189.81	83,452,670,801.81	91,043,132,811.81	25.30
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	64,744,281,654.67	72,514,241,604.66	114,335,622,974.66	130,505,257,550.76	118,190,080,521.84	18.60
1.2.7.	(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	(1,491,797,425,294.10)	(1,696,079,460,140.28)	(1,941,923,836,040.36)	(2,068,230,806,568.65)	(2,079,819,267,139.35)	8.81
1.3.	ASET LAINNYA	7,959,692,130.00	12,344,124,893.00	2,708,113,993.00	101,201,448,241.70	71,984,091,823.02	896.28

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.3.1.	Aset Tidak Berwujud	1,396,790,000.00	2,372,336,492.00	2,890,541,492.00	3,313,781,492.00	3,863,256,492.00	30.73
1.3.2	Aset Lain-lain	11,932,880,755.00	11,646,463,963.00	1,846,615,000.00	45,930,628,529.70	16,278,015,582.94	559.05
1.3.3	(Amortisasi)	(5,369,978,625.00)	(1,746,864,217.00)	(2,098,547,892.00)	(2,473,167,817.00)	(2,588,272,795.92)	-6.21
1.3.4	Kas yang dibatasi penggunaannya		72,188,655.00	69,505,393.00	69,505,393.00	70,391,900.00	
1.3.5	Kemitraan dengan pihak ketiga				54,360,700,644.00	54,360,700,644.00	
1,4	INVESTASI JANGKA PANJANG	83,129,909,702.00	82,119,700,404.00	81,042,275,558.00	69,835,838,098.00	69,669,540,765.00	-4.15
1.4.1	Investasi Non Permanen						
	- Investasi Non Permanen - Dana bergulir	16,581,623,464.00	16,581,602,564.00	16,581,602,564.00			
	- Dana bergulir Diragukan Tertagih	(7,792,972,721.00)	(7,792,951,821.00)	(7,792,951,821.00)			
1.4.2	Investasi Permanen						
	- Penyertaan modal Pemerintah daerah	74,341,258,959.00	73,331,049,661.00	72,253,624,815.00	69,835,838,098.00	69,669,540,765.00	-1.60
	JUMLAH ASET DAERAH	2,803,516,966,110.82	2,852,078,271,834.31	3,129,635,494,805.58	3,281,410,061,069.73	3,415,079,915,794.72	5.10
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42,371,287,754.00	50,287,194,817.44	91,797,965,484.15	85,165,166,605.89	92,333,113,481.54	25.61
2.1.1.	Utang kepada pihak ketiga	10,732,814,297.00	19,451,971,546.89	71,146,014,287.82	65,254,006,769.02	62,166,604,723.23	83.49
2.1.2.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	54,793,637.00	28,125,350.55	476,172,724.00	4,041,320.00	43,071,886.00	602.75
2.1.3.	Utang jangka pendek lainnya	5,865,384,491.00	5,865,384,491.00	5,872,834,491.00	9,172,417,544.40	7,860,757,566.00	10.50
2.1.4.	Utang beban	25,718,295,329.00	24,941,713,429.00	13,633,908,112.00	9,942,323,126.97	21,526,736,759.31	10.27
2.15.	Pendapatan diterima dimuka			669,035,869.33	792,377,845.50	735,942,547.00	
2,2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	0	0,00	0,00		
2.2.1	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	0	0,00	0,00	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN	42,371,287,754.00	50,287,194,817.44	91,797,965,484.15	85,165,166,605.89	92,333,113,481.54	25.61
3	EQUITAS						
	Jumlah EQUITAS	2,761,145,678,356.82	2,801,791,077,016.87	3,037,837,529,321.43	3,196,244,894,463.84	3,322,746,802,313.18	4.77
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN	2,803,516,966,110.82	2,852,078,271,834.31	3,129,635,494,805.58	3,281,410,061,069.73	3,415,079,915,794.72	5.10



No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	EKUITAS						

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)

Analisis terhadap neraca daerah dapat mengetahui fundamental keuangan Pemerintah Daerah. Analisis yang dilakukan melalui analisis rasio-rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan dimaksud terdiri dari tiga jenis yaitu:

rasio likuiditas, yaitu analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat.

rasio aktivitas, adalah rasio untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintahan. Rasio ini terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. dan

rasio solvabilitas (leverage), adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total asset dan rasio total hutang terhadap modal.

Adapun rasio-rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III- 5
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Rasio Likuiditas					
1	Rasio lancar (current ratio)	4,81	3,39	1,94	1,72	1,05
2	Rasio cepat (quick ratio)	3,38	2,03	1,21	1,30	0,88
B.	Rasio Solvabilitas					
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,015	0,018	0,029	0,026	0,027
4	Rasio hutang terhadap modal	0,015	0,018	0,030	0,027	0,028

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)

Merujuk pada tabel III.5 di atas secara ringkas dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (Current Ratio) menunjukkan selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin menurun dari 4,81 pada tahun 2016 menurun menjadi menjadi 1,05 pada tahun 2020. Dari nilai rasio yang didapat maka disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dalam membiayai hutang jangka pendeknya masih cukup baik, yaitu kas, persediaan dan piutang jangka pendek yang ada mampu menutupi kewajiban atau utang jangka pendek yang dimilikinya.
2. Rasio Cepat (Quick Ratio) selama 5 tahun juga menunjukkan trend penurunan namun sampai tahun terakhir nilai nya sebesar 0,88 atau dibawah 1. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan asset lancar dikurangi persediaan berada salam posisi kurang baik.
3. Rasio Hutang terhadap Aset (Debt to Asset Ratio) Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 0.015 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0.018 pada tahun 2017 selanjutnya pada tahun 2018 adalah 0,029 dan sampai dengan tahun 2020 sebesar turun menjadi 0.027. Artinya pada



tahun 2016 hutang sebesar Rp. 0,015 dijamin dengan Rp. 1 rupiah asset, yang kemudian pada tahun 2020 meningkat dimana Rp. 0.027 hutang dijamin dengan Rp. 1 asset. Atau dengan kata lain ada sebanyak 1,4% hutang yang dijamin oleh aset pada tahun 2020 dan ada sebanyak 2,7% hutang yang dijamin oleh total aset yang ada. Ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu dari sisi solvabilitas cukup baik.

4. Rasio Hutang terhadap Modal (*Total Debt to Total Equity Ratio*) Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari 0.015 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0.028 pada tahun 2020 . Ini berarti bahwa pada tahun 2016 ada sebesar 1,5% hutang yang dijamin oleh seluruh modal. Kemudian pada tahun 2019 total hutang yang dijamin oleh seluruh modal meningkat sebanyak 2,8%. Dari nilai Rasio Hutang terhadap Modal selama kurun waktu lima tahun terakhir yang sangat rendah, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat baik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Realisasi Belanja

Dalam struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Masing-masing jenis belanja mendapatkan alokasi, yang mencerminkan kebijakan daerah dalam belanja. Adapun proporsi Belanja Daerah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017–2020 secara nominal dapat dilihat pada tabel III.6.

Tabel III- 6
Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2020

Uraian	Realisasi							
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
BELANJA	1,555,198,035,271.80	100.00	1,580,180,760,758.13	100.00	1,731,040,022,187.96	100.00	1,522,580,070,083.16	100.00
BELANJA OPERASI	1,016,218,977,750.80	65.34	1,017,891,346,697.89	64.42	1,084,660,004,271.09	62.66	1,068,159,342,078.04	70.15
<i>Belanja pegawai</i>	656,433,082,411.00	42.21	591,189,618,310.00	37.41	601,921,078,537.00	34.77	610,324,628,055.00	40.08
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	343,630,945,339.80	22.10	412,200,478,387.89	26.09	460,165,075,734.09	26.58	384,615,008,023.04	25.26
<i>Belanja bunga</i>							0.00	
<i>Belanja subsidi</i>								
<i>Belanja hibah</i>	15,468,200,000.00	0.99	13,894,000,000.00	0.88	21,961,350,000.00	1.27	72,417,206,000.00	4.76
<i>Belanja bantuan sosial</i>	686,750,000.00	0.04	607,250,000.00	0.04	612,500,000.00	0.04	802,500,000.00	0.05
BELANJA MODAL	330,432,257,917.00	21.25	353,287,341,468.24	22.36	400,078,364,592.17	23.11	188,671,793,994.95	12.39
<i>Belanja Modal</i>	330,432,257,917.00	21.25	353,287,341,468.24	22.36	400,078,364,592.17	23.11	188,671,793,994.95	12.39
BELANJA TAK TERDUGA	716,284,890.00	0.05	897,006,945.00	0.06	1,787,705,195.00	0.10	21,495,223,088.00	1.41
<i>Belanja tak terduga</i>	716,284,890.00	0.05	897,006,945.00	0.06	1,787,705,195.00	0.10	21,495,223,088.00	1.41
TRANSFER	207,830,514,714.00	13.36	208,105,065,647.00	13.17	244,513,948,129.70	14.13	244,253,710,922.17	16.04
<i>Bagi hasil pajak ke desa</i>	4,633,345,471.00	0.30	0	-	11,565,610,513.70	0.67	6,264,732,442.35	0.41
<i>Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan desa dan partai</i>	203,197,169,243.00	13.07	208,105,065,647.00	13.17	232,948,337,616.00	13.46	237,988,978,479.82	15.63

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)

Mencermati data pada tabel III.6 diatas terlihat proporsi belanja operasi menunjukkan trend yang semakin meningkat dari 65,34% % tahun 2017 menjadi 70,15% pada tahun 2020. Sementara itu pada komponen belanja modal menunjukkan trend yang menurun selama 4 tahun terakhir, yaitu dari 21,25% pada 2018 menjadi 12,39% pada tahun 2020. Sedangkan belanja transfer dari proporsinya meningkat dari 13,36% tahun 2017 dari total belanja keseluruhan kemudian meningkat menjadi 16,04% 2020.

Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Penyediaan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah adalah rangka untuk menjamin terlaksananya secara baik pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Secara lebih rinci belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III- 7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Rokan Hulu

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)*100 %
1	Tahun Anggaran 2016	684.206.091.077,00	1.396.524.231.468,26	48,99
2	Tahun Anggaran 2017	656.433.082.411,00	1.555.198.035.271,80	42,21
3	Tahun Anggaran 2018	591.189.618.310,00	1.580.180.760.758,13	37,41
4	Tahun Anggaran 2019	601.921.078.537,00	1.730.979.938.952,49	34,77
5	Tahun Anggaran 2020	610,324,628,055.00	1,522,580,070,083.16	40.08

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)

Data tabel III-7 diatas memperlihatkan bahwa secara nominal selama kurun waktu 5 tahun terakhir total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun. Begitu juga bila dilihat dari proporsinya terhadap total pengeluaran daerah untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2016 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 48,99% dari total belanja. Kemudian sedikit menurun menjadi 42,21% pada tahun 2017. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus menurun sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar 34,77%. Kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 40,08%. Keadaan ini menunjukkan alokasi untuk pemenuhan kebutuhan aparatur semakin besar dan ini harus menjadi perhatian kedepannya.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi dalam rangka menutup defisit data menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran dari



pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, analisis ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Silpa tahun lalu penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan maupun penjualan asset yang dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan adalah anggaran hutang, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Kabupaten Rokan Hulu dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III- 8

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.445.493,03	1.515.720,73	1.577.823,86	1.734.815,37	1.521.847
	Dikurangi realisasi:	-	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	1.396.524,23	1.555.198,04	1.580.180,76	1.731.040,02	1.522.580
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
A	Surplus/ Defisit riil	48.968,80	(39.477,30)	(2.356,91)	3.775,35	(732,68)

Sumber: BPKAD Kab. Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)

Merujuk pada data III-8 diatas diatas diketahui bahwa bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat surplus anggaran pada tahun 2016, tahun 2019. Artinya pada 2 tahun tersebut jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja. Akan tetapi pada tahun 2017 , 2018 dan 2020 keuangan daerah berada pada posisi defisit yakni jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja. Untuk lebih jelasnya komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Rokan Hulu 2016-2020 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel III- 9

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam jutaan)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	1.445.493.03	1.515.720.73	1.577.4823.86	1.734.815.37	1.521.847.39
B	BELANJA	1.396.524.23	1.555.198.04	1.580.180.76	1.731.040.02	1.522.580.07
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
A-(B+C)	DEFISIT RIIL	48.968,80	(39.477,30)	(2.356,91)	3.775,35	(732,68)
Ditutup dengan penerimaan pembiayaan:						
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	(588.30)	48.410.88	6.324.87	3.707.62	7.482.96
	Pencairan Dana Cadangan					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	30.39		-	-	-
D	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(557.92)	48.410.88	6.324.87	3.707.62	7.482.96
D+ DEFISIT RIIL	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	48,410.88	8,933.58	3,967.96	7,482.97	6,750.28

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2021 (Data diolah)



Dari tabel III-9 dapat dicermati bahwa SiLPA Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan trend yang semakin menurun. Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya komposisi penutup defisit riil yang terjadi pada tahun 2016-2020. Komposisi penutup defisit pada anggaran dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 menggunakan SiLPA tahun sebelumnya sebesar 108,28 %. Kemudian pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Rokan Hulu kembali berada pada posisi defisit sebesar Rp2,356 Milyar rupiah dan kekurangan dana itu semuanya ditutup oleh SiLPA tahun sebelumnya. Terakhir Pada tahun 2020 kembali terjadi defisit Rp. 732,68 juta ditutup semuanya dengan dana SiLPA. Adapun secara rinci komposisi penutup defesit rill seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III- 10

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hulu (%)
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya		108,28 %	359,78%	-	-
2.	Pencairan Dana Cadangan		-		-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		-		-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah		-		-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-		-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah		-		-	-
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		-		-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2021
(Data diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah lima tahun kedepan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah adalah untuk memperkirakan besaran kemampuan daerah keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah 5 tahun kedepan. Proyeksi pendapatan daerah merupakan rujukan untuk menentukan kapasitas keuangan daerah dan sebagai dasar untuk membuat perkiraan besaran belanja daeran untuk 5 tahun kedepannya.



Pada dasar proyeksi pendapatan dan belanja untuk lima tahun kedepan berdasarkan pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja selama lima tahun kebelakang. Disamping rata-rata pertumbuhan, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi kedepan yang mempengaruhi pendapatan daerah. proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja, dan proteksi kemampuan kapsistas daerah untuk mendanai pembbangunan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Proyeksi Pendapatan**

Proyeksi terhadap pendapatan daerah dalam hal ini berpedoman pada kecenderungan ekonomi saat ini dan kedepannya. Perekonomian saat ini dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang diperkirakan akan berkontribusi bagi penurunan aktivitas perekonomian baik secara nasional maupun secara global. Namun demikian upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah akan terus dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut komponen Pendapatan Asli Daerah diproyeksi akan dapat meningkat. Hal ini dikarena masih terdapat potensi pendapatan asli daerah yang bisa ditingkatkan yang selama ini ini belum digarap secara maksimal. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Asli daerah adalah sebagai berikut;

A. Intensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;
3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (on-line system) serta meningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
5. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Infrastruktur, Sumber daya manusia);
6. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
7. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self assessment;
8. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja;
9. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi;
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.



B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, yaitu upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
2. Penambahan Unit Pelayanan di tingkat Kecamatan potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
3. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
4. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah.

Sementara itu komponen pendapatan dari transfer dana perimbangan pada tahun 2021 diproyeksi menurun dan selanjutnya sampai tahun 2026 akan meningkat. Hal ini didasarkan pada refleksi hingga akhir oktober 2020 Kementerian Keuangan telah menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara Indonesia sudah mengalami penurunan sebesar 15,4% dibanding periode yang sama tahun 2019. Penerimaan perpajakan yang terkontraksi hingga 18,8% menjadi penyebab utama dari menurunnya pendapatan negara. Pada sisi lain, kenaikan belanja negara telah menyebabkan defisit anggaran mencapai 4,67% dari total PDB pada periode yang sama. Perlemahan kondisi fiskal negara ini tentu saja akan berpengaruh signifikan pada keuangan di daerah terutama yang berasal dari dana perimbangan. Upaya yang dilakukan untuk meningkat penerimaan Dana transfer adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana bagi hasil baik sumberdaya alam maupun pajak dan dana alokasi umum
- b. Mendorong perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu untuk menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang.
- c. Memperbaiki basis data perhitungan Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus.
- d. Melengkapi readiness criteria (RC) usulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara lebih rinci proyeksi pendapatan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel III-11.

- **Proyeksi Belanja**

Selanjutnya proyeksi belanja dilakukan berdasarkan pertumbuhan proyeksi dari pendapatan. Artinya besaran belanja sangat tergantung pada perkiraan pendapatan daerah. Penyesuaian belanja daerah pada tahun 2022 mengikuti trend perekonomian nasional yang masih dilanda resesi dan berusaha bangkit dari krisis akibat pandemi. Pada tahun 2022 belanja diperkirakan sedikit akan kembali meningkat seiring perkiraan akan membaiknya situasi perekonomian dan ditemukannya cara dalam mengendalikan pandemi. Berdasarkan besaran perkiraan belanja tersebut untuk periode RPJMD 2021-2026 dapat dilihat perkiraan belanja seperti pada tabel III-12



- **Proyeksi Pembiayaan**

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Rokan Hulu pada dasarnya adalah untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu. Lebih rinci proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel III.13.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya pada Pasal 70 (3) dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan daerah salah satunya dapat bersumber dari penerimaan pinjaman daerah.

Adapun penggunaan pinjaman daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Oleh karena itu, guna mendukung visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026, utamanya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, apabila diperlukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan melakukan pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel III- 11 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2026

Uraian	APBD 2021	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	1,672,320,733,395	1,651,405,654,823	1,698,937,037,105	1,743,281,236,355	1,775,053,444,355	1,790,270,601,655
PENDAPATAN ASLI DAERAH	150,324,601,300	127,897,928,500	131,919,957,700	134,359,652,700	137,219,332,700	139,841,362,700
Pajak daerah	80,151,516,405	55,338,000,000	57,107,850,000	57,992,545,000	59,537,225,000	60,954,255,000
Retribusi daerah	9,320,348,000	10,855,928,500	11,151,157,700	11,621,157,700	11,921,157,700	12,121,157,700
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,153,000,000	2,153,000,000	2,475,950,000	2,475,950,000	2,475,950,000	2,475,950,000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	58,699,736,894	59,551,000,000	61,185,000,000	62,270,000,000	63,285,000,000	64,290,000,000
PENDAPATAN TRANSFER	1,420,550,804,095	1,422,062,398,323	1,465,571,751,405	1,507,476,255,655	1,536,388,783,655	1,548,983,910,955
Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan	1,291,866,598,862	1,274,727,499,323	1,318,236,852,405	1,360,141,356,655	1,389,053,884,655	1,401,649,011,955
Transfer Dana Perimbangan	1,144,531,699,862	1,127,392,600,323	1,170,901,953,405	1,212,806,457,655	1,241,718,985,655	1,254,314,112,955
Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	207,778,199,157	168,572,750,618	172,607,621,600	194,512,125,850	206,424,653,850	207,019,781,150
Dana alokasi umum	641,923,852,000	673,163,214,000	712,637,696,100	732,637,696,100	749,637,696,100	761,637,696,100
Dana alokasi khusus	285,656,635,705	285,656,635,705	285,656,635,705	285,656,635,705	285,656,635,705	285,656,635,705
Transfer pemerintahan pusat lainnya	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000
Dana Desa	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000	147,334,899,000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	128,684,205,233	96,640,887,343	111,205,507,995	112,968,538,152	113,160,651,251	113,431,516,789
Pendapatan Bagi Hasil	128,684,205,233	96,640,887,343	111,205,507,995	112,968,538,152	113,160,651,251	113,431,516,789
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101,445,328,000	101,445,328,000	101,445,328,000	101,445,328,000	101,445,328,000	101,445,328,000

Sumber : Bapenda Tahun 2021 (Data diolah)



Tabel III- 12
Proyeksi Belanja Daerah (Dalam Juta) Tahun Anggaran 2022-2026

Uraian	APBD 2021	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA	1.679.090.337.574	1,659,933,667,330	1,705,934,483,269	1,748,416,205,463	1,778,182,123,631	1,792,510,412,519
BELANJA OPERASI	1,175,417,860,963	1,173,815,110,205	1,196,473,278,340	1,225,209,146,166	1,246,901,249,756	1,254,504,545,936
Belanja pegawai	644,832,767,387	648,056,931,223	661,018,069,847	674,238,431,244	684,352,007,713	687,773,767,752
Belanja Barang dan Jasa	466,550,403,708	471,215,907,745	80,640,225,899	495,059,432,676	504,960,621,330	507,990,385,058
Belanja bunga						
Belanja subsidi						
Belanja hibah	62,906,841,368	53,470,815,162	53,738,169,237	54,812,932,622	56,457,320,601	57,586,467,013
Belanja bantuan sosial	1,127,848,500	1,071,456,075	1,076,813,355	1,098,349,622	1,131,300,111	1,153,926,113
BELANJA MODAL	233,000,468,970	227,634,977,517	245,807,953,729.17	254,280,743,073.73	259,366,357,935.21	263,136,346,494.09
Belanja Modal Tanah	764,750,000	726,512,500	762,838,125	778,094,887	793,656,785	801,593,353
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45,315,907,881	45,769,066,960	49,430,592,316	50,913,510,086	51,931,780,287	52,451,098,090
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84,995,679,365	78,196,025,016	84,451,707,017	86,985,258,227	88,724,963,392	89,612,213,026
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101,659,666,146	102,676,262,807	110,890,363,832	115,325,978,385	117,632,497,953	119,985,147,912
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	264,465,578	267,110,234	272,452,438	277,901,487	283,459,516	286,294,112
BELANJA TIDAK TERDUGA	31,750,741,920	22,225,519,344	22,670,029,730	23,123,430,325	23,585,898,932	24,057,616,910
Belanja Tidak Terduga	31,750,741,920	22,225,519,344	22,670,029,730	23,123,430,325	23,585,898,932	24,057,616,910
BELANJA TRANSFER	238,921,265,721	236,258,060,264	240,983,221,468	245,802,885,898	248,328,617,008	250,811,903,178
Belanja Bagi Hasil	6,849,820005	6,507,329,005	6,637,475,584	6,770,225,096	6,905,629,598	6,974,685,894
Belanja Bantuan Keuangan	232,071,445,716	229,750,731,259	234,345,745,884	239,032,660,801	241,422,987,409	243,354,371,308
Surplus/Defisit	(6.769.604.179)	(8,528,012,506.52)	(6,997,446,164.54)	(5,134,969,108.91)	(3,128,679,276.40)	(2,239,810,864.80)

Sumber : BPKAD Tahun 2021 (Data diolah)

Tabel III- 13
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022-2026 (dalam Jutaan)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN	9,000,000,000	7,000,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	9,000,000,000	7,000,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	--	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	--	-	
Total Penerimaan					
PENGELUARAN					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah					--
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri					
Pemberian Pinjaman Daerah					
ADB					
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga					
Total Pengeluaran					
PEMBIAYAAN NETTO	9,000,000,000	7,000,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000

Sumber : BPKAD Tahun 2021 (Data diolah)



Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang 2022-2026, diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah.

Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam Tabel berikut ini.

Tabel III- 14
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022-2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pendapatan	1,651,405,654,823	1,698,937,037,105	1,743,281,236,355	1,775,053,444,355	1,790,270,601,655
B	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
C	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	9,000,000,000	7,000,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000
D= A-(B+C)	Total Penerimaan	1,660,405,654,823	1,705,937,037,105	1,749,281,236,355	1,779,053,444,355	1,793,270,601,655
E	Belanja Tidak Terduga	22,225,519,344	22,670,029,730	23,123,430,325	23,585,898,932	24,057,616,910
F	Belanja Transfer	236,258,060,264	240,983,221,468	245,802,885,898	248,328,617,008	250,811,903,178
G	Pengeluaran Pembiayaan	-	--	-	-	-
	Belanja Tidak Terduga, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan	258,483,579,608	263,653,251,198	268,926,316,223	271,914,515,940	274,869,520,088
G= D-(E+F)	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,401,922,075,215	1,442,283,785,907	1,480,354,920,132	1,507,138,928,415	1,518,401,081,567

Sumber : BPKAD Tahun 2021 (Data diolah)



Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas, setelah bupati terpilih resmi dilantik.

Tabel III- 15

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kab.Rokan Hulu Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.401.922.075.215	1.442.283.785.907	1.480.354.920.132	1.507.138.928.415	1.518.401.081.567
2	Prioritas I	686.941.816.855,35	706.574.826.715,84	725.225.875.372,67	738.347.361.030,51	743.864.689.859,67
3	Prioritas II	444.939.917.756,65	462.538.233.577,16	478.471.703.633,33	481.208.831.043,49	433.904.697.489,33
4	Prioritas III	270.040.340.603,00	273.170.725.614,00	276.657.341.126,00	287.582.736.341,00	340.631.694.218,00

Sumber : BPKAD Tahun 2021 (Data diolah)

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

- Prioritas I,

Dialokasikan untuk mendanai membiaya belanja langsung wajib mengikat serta pemenuhan penerapan urusan wajib pelayanan dasar, dan di dalamnya termasuk kewajiban mandatori diantara alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan 10% dan anggaran belanja peningkatan kapasitas pegawai 0,16 persen, serta belanja Infrastruktur 25% dari transfer umum di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu

- Prioritas II,

Dialokasikan untuk pendanaan:

1. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati periode 2022-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
2. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- Prioritas III,

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan



desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021

BAB IV.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu penting dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah dan kondisi masyarakat yang belum ideal. Oleh karena itu rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2020 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 Tahap IV. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) tematik yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pada RPJMD dan Renstra. Adapun Hasil analisis permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hulu yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
Kualitas Sumberdaya manusia (Indeks Pembangunan Manusia)	Belum optimalnya akses pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Belum optimalnya capaian SPM Pengelolaan Pendidikan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan



Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
	Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan keagamaan	Belum optimalnya penyusunan kurikulum muatan lokal pada semua jenjang pendidikan	Pendidikan
Derajat Kesehatan Masyarakat (Usia Harapan Hidup)	Belum optimalnya capaian keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Belum terpenuhinya SPM Kesehatan, sehingga masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), bayi (AKB), Balita (AKABA) serta angka kesakitan	Kesehatan
			Belum optimalnya kapasitas SDM Kesehatan	Kesehatan
			Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kesehatan
			Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan	Kesehatan
			Belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk	Pengendalian penduduk dan KB

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.

Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
Kesejahteraan Masyarakat (Angka Kemiskinan)	Belum optimalnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan masyarakat miskin (DTKS)	Belum optimalnya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial	Sosial
			Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah terjadinya bencana	Sosial
Tingkat Pengangguran Terbuka	Masih tingginya angka pengangguran terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja	Ketenagakerjaan
			Rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Ketenagakerjaan



Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
Daya Saing Ekonomi (PDRB Perkapita)	Pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19 serta masih rendahnya kontribusi sektor-sektor ekonomi dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan investasi belum optimal, kurangnya pengawasan dan pengendalian penanaman modal di daerah, kemudahan pelayanan perizinan penanaman modal di daerah	Penanaman Modal
			Belum Optimalnya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Rokan Hulu seperti Atraksi (attractions), aksesibilitas (accessibilities), Amenitas atau fasilitas (amenities), dan Ancillary services (organisasi kepariwisataan)	Pariwisata
			Persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan dan jumlah UMKM yang mandiri sedikit	Koperasi dan UKM
			Belum optimalnya nilai ekspor perdagangan yang bersumber dari Industri Kecil	Perdagangan
			Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal	Pariwisata dan kominfo
			Pengembangan IKM belum Optimal	perindustrian
			Belum optimalnya kinerja sektor pertanian	Pertanian
			Belum optimalnya perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
			Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
Belum optimalnya penanganan dan pengawasan kerawanan pangan	Pangan			
Belum optimalnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pangan			



3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat desa dan kota secara merata dan proporsional dengan memperhatikan tata ruang dan berwawasan lingkungan

Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan	
Ketersediaan Infrastruktur Dasar (persentase infrastruktur dasar)	Belum optimalnya layanan transportasi	Persentase keterhubungan jalan	Belum optimalnya kondisi jalan	PU-PR	
		Tingkat pelayanan jalan	Belum optimalnya kapasitas jalan dan penyelenggaraan angkutan lalulintas dan angkutan jalan	Perhubungan	
	Belum optimalnya cakupan layanan minum air dan limbah	Rasio akses air minum terhadap jumlah penduduk	Belum optimalnya sapsras air bersih	PU-PR	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Belum optimalnya cakupan layanan limbah domestik	PU-PR	
	Belum optimalnya cakupan layanan sampahan perkotaan	Persentase layanan persampahan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah	Lingkungan Hidup	
			Belum optimalnya sarpras penanganan sampah	Lingkungan Hidup	
	Kualitas Pemukiman (Persentase perumahan dan permukiman tidak kumuh)	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh	Persentase pemenuhan komponen perumahan dan permukiman tidak kumuh	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Perumahan dan Permukiman
				Belum optimalnya penyelenggaraan jalan lingkungan permukiman	PU-PR
Belum optimalnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan				Perumahan dan Pemukiman	
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase peningkatan kawasan peruntukan budidaya	Masih rendahnya kepatuhan IMB	PU-PR	
			Masih lemahnya pengawasan penataan ruang	PU-PR	
	Tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Belum optimalnya sapsras pengolah limbah	Lingkungan Hidup	
	Belum optimalnya tutupan hutan	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	



Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
Banjir (Penurunan luas genangan)	Penataan sistem drainase yang belum optimal	Luas genangan	Belum optimalnya kapasitas saluran dan diperlukan normalisasi dan penambahan ruas saluran drainase	PU-PR

4. Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda

Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
Kondisivitas Wilayah (Konflik Sosial)	Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan karakter kebangsaan	Urusan Pemerintahan Umum
			Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Urusan Pemerintahan Umum
Pelestarian Seni Budaya (Persentase seni budaya yang dilestarikan)	Terbatasnya event seni budaya yang diselenggarakan	Persentase penyelenggaraan event	Infrastruktur kebudayaan masih terbatas	Kebudayaan
			Pengelolaan komunitas budaya belum optimal	Kebudayaan
			Sinergi pemerintah, perguruan tinggi dan komunitas belum optimal	Kebudayaan
			Belum adanya Museum	Kebudayaan
	Belum optimalnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Masih adanya kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsif gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya pengarusutamaan hak anak	Kategori Kota Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif

Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
Tatakelola pemerintahan (Indeks Reformasi)	Implementasi Sistem Pemerintahan berbasis	Indeks SPBE	Belum optimalnya domain tata kelola SPBE	Kominfo



Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
Birokrasi)	Elektronik yang belum optimal		Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dan satu data	Statistik
			Belum optimalnya manajemen keamanan	Persandian
	Kualitas layanan publik belum optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Publik belum seluruhnya berbasis elektronik	Kominfo, semua urusan
			Belum optimalnya penanganan bencana	Trantibun
			Belum optimalnya pelayanan perpustakaan	Perpustakaan
			Belum optimalnya pelayanan publik administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
			Terbatasnya kapasitas SDM Layanan Publik	Semua Urusan
			Penegakan aturan hukum daerah untuk kewibawaan daerah dan mengatur serta mensejahterakan rakyat	Unsur Penunjang
			Implementasi Manajemen ASN yang belum optimal	Indeks Merit System
	Kompetensi ASN belum sesuai dengan bidang pekerjaan	Kepegawaian, Diklat		
	Akuntabilitas Kinerja perlu ditingkatkan	Nilai SAKIP	Konsistensi Perencanaan, Penganggaran Masih perlu ditingkatkan	Perencanaan
			Implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan	Non Urusan, Sekretariat Daerah
			Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah



Masalah Utama	Masalah Daerah	Data Capaian Masalah Daerah	Masalah OPD	Urusan
	Akuntabilitas Keuangan perlu ditingkatkan	Opini BPK atas laporan keuangan	Mempertahankan opini WTP dari BPK	Keuangan
			Manajemen pengelolaan asset masih perlu ditingkatkan	Keuangan
			PAD yang belum optimal	Keuangan
	Penerapan Zona Integritas belum optimal	OPD menyandang WBK/WBBM	Belum optimalnya pengawasan internal OPD dan implementasi Zona Integritas	Semua Urusan
			Belum optimalnya kapabilitas APIP	Pengawasan

4.2 Isu Strategis Pembangunan

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.



4.2.1 Isu Internasional

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDG's)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rumusan SDG's terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Rokan Hulu, rumusan SDG's dan target pencapaian menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018.

4.2.1.2 Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan.

4.2.1.3 Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan mampu menembus ruang dan waktu, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai luhur kepribadian masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

4.2.1.4 Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan dan mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*) bahkan melakukan *lockdown* (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Dampak yang paling dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 kemungkinan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus. Disisi lain masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Pandemi covid-19 juga berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai Visi Pembangunan Nasional yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu: 1) peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya



saing, 3) pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga, 8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, 9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terdapat 7 (tujuh) prioritas nasional dan isu strategis dalam pembangunan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dengan isu strategisnya: keberlanjutan sumberdaya alam; efektifitas tata kelola sumberdaya ekonomi; transformasi struktural berjalan lambat; dan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; dengan isu strategisnya: ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan tingginya kemiskinan dikawasan timur indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi dikawasan barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dengan isu strategisnya: pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; pemenuhan layanan dasar; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktifitas dan daya saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dengan isu strategisnya: melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa; belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti; masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai nilai ajaran agama; belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan; belum optimalnya peran keluarga; dan rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreatifitas.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dengan isu strategis: penyediaan akses dan pemukiman layak, aman dan terjangkau; penyediaan akses air minum, dan sanitasi layak dan aman; pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; keselamatan dan keamanan transportasi; ketahanan kebencanaan; infrastruktur waduk multiguna dan modernisasi irigasi; konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau; energi kelistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan kecukupan; penyediaan transformasi digital meliputi



- penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan isu strategis: peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan iklim pembangunan rendah karbon.
 - 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; dengan isu strategis: konsolidasi demokrasi; optimalisasi kebijakan luar negeri; penegakan hukum nasional, reformasi birokrasi dan tata kelola; dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan lokus di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan agenda pembangunan tersebut, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 5,4-6,0% per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3,0-5,0%. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, dengan target 2,0-4,0%. Selain itu, tingkat kemiskinan dan TPT diproyeksikan turun menjadi 6,5-7,0% dan 4,0-4,6% pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Merujuk kepada target makro pembangunan nasional tersebut, maka daerah perlu melakukan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kondisi umum daerah.

Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional terhadap pembangunan daerah perlu diperhatikan dengan melihat program dan kegiatan prioritas pembangunan berkewilayahan nasional 2020-2024, sehingga dapat disinkronisasikan melalui strategi dan arah kebijakan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024 berbasis kewilayahan pada wilayah Sumatera Prioritas pengembangan Wilayah terdiri atas 3 (tiga) prioritas yakni: 1.) Penguatan Ketahanan Bencana pantai barat Sumatera 2.) Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan (agroindustri) 3.) Pengembangan SDM terampil untuk mendukung kawasan industri.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Riau

Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 diarahkan untuk mencapai Visi Riau yaitu **“Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu: 1) mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkeuletan dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya, 2) mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 3) mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, 4) mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dan 5) mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Isu strategis pembangunan Provinsi Riau tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berdaya Saing, dilakukan dengan: peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan; peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, upaya peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan dan penyembuhan; pelayanan warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui peningkatan produktivitas lapangan usaha masyarakat. Peningkatan sumberdaya manusia yang beriman, dilakukan melalui; peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berprestasi dalam bidang keagamaan; dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.
- 2) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, dilakukan melalui: peningkatan konektivitas untuk penguatan daya saing melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi; peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas air baku serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan; peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat; peningkatan rasio elektrifikasi melalui peningkatan akses dan infrastruktur energi keseluruhan wilayah dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; peningkatan infrastruktur sumber daya air; dan peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pemulihan kawasan kritis dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan.
- 3) Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan, dilakukan melalui; peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal; peningkatan kemandirian dan daya saing industri dengan peningkatan produksi industri dan nilai tambah dan peningkatan keunggulan kompetitif untuk pasar regional dan global; peningkatan daya tarik investasi; peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Penanggulangan kemiskinan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin; dan peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
- 4) Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dan Pengembangan Pariwisata, dilakukan melalui: peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;



- peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau; peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. Pengembangan pariwisata dilakukan melalui: pemanfaatan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan pengelolaan pariwisata.
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi, dilakukan melalui: peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

4.2.4 Hasil Telaah RPJPD Kabupaten Rokan Hulu

Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 adalah: **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Dilandasi Imtaq dan Iptek Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Agribisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut : 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Rokan Hulu yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; 2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal; 3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan dari masing-masing misi pada tahap rencana pembangunan lima tahunan keempat (2021-2025), diarahkan pada:

1. Pengembangan SDM

Kualitas SDM dalam periode ini sudah berada dalam kondisi mapan, tingkat dan kualitas pendidikan membaik, kesehatan rata-rata masyarakat tinggi, peran wanita dan pemuda dalam berbagai program pembangunan semakin menampakkan hasil. Dalam konteks ini maka kemandirian masyarakat telah mencapai tingkat mapan, dan daya saingnya tinggi.

2. Pengembangan Ekonomi Wilayah

Perubahan struktur ekonomi masyarakat sudah menunjukkan pola yang semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumber daya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang, industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup regional dan nasional. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian semakin tinggi, dan masyarakat banyak semakin tergabung dalam koperasi dan berbagai UKM.

3. Pelayanan Dasar



A. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan perandan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Rokan Hulu. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara hierarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan.

Adapun rencana pengembangan pusat kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Pasir Pangaraian sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup kabupaten meliputi Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan Rambah Hilir;
2. Penetapan Kecamatan Ujung Batu sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal;
3. Penetapan 14 (empat belas) ibukota kecamatan lainnya sebagai PPK, yaitu:
 - a. PPK Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - b. PPK Pendalian di Kecamatan Pendalian IV Koto;
 - c. PPK Tandun di Kecamatan Tandun;
 - d. PPK Kabun di Kecamatan Kabun;
 - e. PPK Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo;
 - f. PPK Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir;
 - g. PPK Tangun di Kecamatan Bangun Purba;
 - h. PPK Dalu-dalu di Kecamatan Tambusai;
 - i. PPK Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 - j. PPK Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam;
 - k. PPK Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
 - l. PPK Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam;
 - m. PPK Rantau Kasai berada di Kecamatan Tambusai Utara;
 - n. PPK Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan.
4. Penetapan 27 desa sebagai PPL:
 - a. Desa Sikeubau Jaya, Desa Lubuk Bendahara, Desa Cipang Kiri Hilir, dan Cipang Kanan di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - b. Desa Suligi di Kecamatan Pendalian IV Koto;
 - c. Desa Dayo di Kecamatan Tandun;
 - d. Desa Aliantan di Kecamatan Kabun;
 - e. Desa Pematang Tebih di Kecamatan Ujung Batu;
 - f. Desa Sungai Kuning dan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo;
 - g. Desa Rambah dan Desa Rambah Muda di Kecamatan Rambah Hilir;
 - h. Desa Bangun Purba Jaya Timur dan Desa Rambah Jaya di Kecamatan Bangun Purba;
 - i. Desa Batang Kumu dan Desa Suka Maju di Kecamatan Tambusai;
 - j. Desa Mahato dan Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara;
 - k. Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Baru di Kecamatan Kepenuhan;
 - l. Desa Muara Jaya di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 - m. Desa Muara Dilam di Kecamatan Kunto Darussalam;



- n. Desa Rimba Jaya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- o. Desa Bonai dan Desa Kasang Mungkal di Kecamatan Bonai; dan
- p. Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan di Kecamatan Rambah.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Rencana sistem jaringan prasarana Kabupaten Rokan Hulu, terdiri atas rencana system jaringan transportasi sebagai prasarana utama, dan rencana pengembangan prasarana lainnya, meliputi rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan, rencana system jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana system jaringan prasarana wilayah lainnya mencakup prasarana lingkungan, seperti air bersih, drainase, pengelolaan persampahan, air limbah, listrik, dan telepon.

1) Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang wilayah Kabupaten, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi Provinsi. Selain itu, pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman dengan sector kegiatan ekonomi daerah.

Sistem Jaringan Transportasi Darat

1. Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal.

Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, meliputi: a) Rencana jalan arteri primer (Rencana pengembangan jalan arteri primer di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada ruas jalan Rantau Berangan – Tandun, Tandun – Pasir Pengaraian, dan Pasir Pengaraian – Batas Sumut dengan panjang lebih kurang 140,85 km); b) Jalan kolektor primer; c) Rencana jalan strategis nasional (Rencana pengembangan jalan strategis nasional di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada ruas jalan Dalu-dalu – Mahato, Simpang Kumu – Kota Tengah, Kota Tengah – Sontang, Sontang – Simpang Jurong – Batas Duri, dan Ujung batu – Rokan – Batas Sumut dengan panjang lebih kurang 223 km); d) dan jalan lokal primer.

2. Pengembangan Terminal



Rencana pengembangan terminal di wilayah Kabupaten Rokan Hulu meliputi rencana terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang meliputi: Terminal tipe B berada di Pasir Pengaraian dan Terminal tipe C berada di Ujung Batu, Dalu-Dalu, Kabun, Simpang Kumu, Rantau Kasai, Kota Tengah dan Rokan.

Terminal barang meliputi: Terminal barang di Perkotaan Pasir Pengaraian di Kecamatan Rambah; PKL Ujung Batu di Kecamatan Ujung Batu; PPK Koto Tengah di Kecamatan Kepenuhan; PPK Rantau Kasai di Kecamatan Tambusai Utara.

Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Rencana pengembangan transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah transportasi penyeberangan. Transportasi penyeberangan Kabupaten Rokan Hulu merupakan penyeberangan kelas III yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Adapun lintas penyeberangan dalam kabupaten meliputi beberapa kecamatan, yaitu: 1) Penyeberangan Sei Rokan berada di Rokan – Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto – Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu; 2) Penyeberangan Sei Batang Lubuh berada di Kasimang – Ulak Patian – Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan; dan 3) Penyeberangan Sei Rokan berada di Sontang – Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pengembangan sistem perkeretaapian di Kabupaten Rokan Hulu meliputi pengembangan jaringan rel kereta api dan pengembangan stasiun kereta api. Pengembangan jalur rel kereta api meliputi jalur Rokan IV Koto – Ujung Batu –Kandis – Duri – Dumai dan jalur Rokan IV Koto – Ujung Batu – Pasir Pengaraian – Kota Tengah – Kandis Duri – Dumai. Sedangkan pengembangan stasiun kereta api terletak di sepanjang jalur kereta api tersebut.

Sistem Transportasi Udara

Sistem Transportasi Nasional fasilitas Bandar Udara untuk pelayanan umum berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan atas: Bandara Pusat Penyebaran Primer (PPP), Bandara Pusat Penyebaran Sekunder (PPS), Bandara Pusat Penyebaran Tersier (PPT), dan Bandara Bukan Pusat Penyebaran (BPP).

Pengembangan transportasi udara di Kabupaten Rokan Hulu berupa bandar udara dengan fungsi bandara pusat penyebaran tersier atau bandara pengumpan yaitu Bandar Udara Tuanku Tambusai (Bandara Pasir Pengaraian) berada di Desa Danau Sati, Kecamatan Rambah Samo berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM. No. 69 tahun 2013 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional.

2) Rencana Sistem Jaringan Energi

1. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kabupaten Rokan Hulu merupakan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang tempat penyimpanan dan kilang pengolahan. Untuk jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen tidak ada karena distribusi dari kilang penyimpanan yang ada di



Kabupaten Rokan Hulu didistribusikan ke kilang pengolahan yang ada di Dumai/Duri.

Adapun pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

- a. Pengembangan kilang minyak. Pengembangan kilang minyak di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari: Kilang Minyak Lapangan Pendalian 1 Kecamatan Pendalian IV Koto; Kilang Minyak Langgak di Kecamatan Tandun; Kilang Minyak Lisah 1 di Kecamatan Bonai Darussalam; Kilang Minyak Lampu Rorokiri di Kecamatan Bonai Darussalam; Kilang Minyak Pelita di Kecamatan Bonai Darussalam; Kilang Minyak Retak 1 di Kecamatan Bonai Darussalam; Kilang Minyak Obor di Kecamatan Bonai Darussalam; Kilang Minyak Rangau di Kecamatan Bonai Darussalam; Kilang Minyak Putih di Kecamatan Bonai Darussalam; Kilang Minyak Jingga Kelabu di Kecamatan Bonai Darussalam.
- b. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan jaringan pipa minyak dari fasilitas produksi ke kilang tempat penyimpanan di Kabupaten Rokan Hulu tersebar di 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Pendalian IV Koto; Kecamatan Tandun; Kecamatan Bonai Darussalam.

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pengembangan jaringan ketenagalistrikan meliputi:

- 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi: PLTA Sungai Rokan Kiri dan PLTA Sungai Rokan Kanan.
- 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi: PLTU Tanjung Belit dan PLTU Tambusai Utara.
- 3) Pengembangan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) distribusi berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir.
- 4) Pengoptimalan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi: PLTS di Desa Rokan Koto Ruang, Desa Tanjung Belit, Desa Sialang Jaya, Desa Sontang.
- 5) Pengoptimalan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi: PLTMH di Desa Pemandang, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Rokan Timur.
- 6) Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya EBT Limbah Kelapa sawit di seluruh kecamatan.

Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas:

- 1) Rencana jaringan listrik interkoneksi wilayah tengah berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: Kecamatan Kabun, Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah;
- 2) Rencana jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas sebesar 20 (duapuluh) kilovolt meliputi: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan;
- 3) Jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas sebesar 6 (enam) kilovolt meliputi: Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan

Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara.

3) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan social ekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya. Penyediaan telepon sampai saat ini masih didominasi oleh PT. Telkom Tbk melalui penyediaan beberapa Sentral Telepon Otomatis (STO) yang tersebar pada beberapa Kecamatan.

4) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air meliputi system jaringan sumber daya air lintas provinsi, sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten, sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

5) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Sistem prasarana lainnya yang akan dikembangkan di Kabupaten Rokan Hulu, terdiri atas:

- a. Pengembangan sistem pengelolaan prasarana persampahan;
- b. Pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolahan limbah;
- c. Pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase;
- d. Pengembangan sistem jaringan air minum;
- e. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi.

4.2.5.2 Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya. Kawasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi kawasan hutan lindung dan resapan air serta kawasan lindung gambut.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat. Menurut klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten, kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk atau kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kawasan perlindungan setempat diarahkan pada kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk.
- c. Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi hanya meliputi kawasan pelestarian alam. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu Kawasan Taman Hutan Raya memiliki luas kurang lebih 1.345 (seribu tiga ratus empat



- puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah.
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan rawan banjir. Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana:
- a) Rawan longsor: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan Tandun;
 - b) Kawasan sempadan patahan; Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, dan Kecamatan Pendalian IV Koto;
 - c) Rawan banjir: Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rokan IV Koto, , Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Tandun.
- e. Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Rokan Hulu berupa cagar budaya situs tersebar diseluruh wilayah Kabupaten.
- f. Kawasan Peruntukan Budidaya. Kawasan peruntukan budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Berikut penetapan kawasan peruntukan budidaya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040.
- g. Kawasan Hutan Produksi. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Total kawasan hutan produksi di Kabupaten Rokan Hulu adalah 338,575.81 hektar.
- h. Kawasan Hutan Rakyat. Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau ulayat (adat) baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang berpotensi untuk dikembangkan. Pemanfaatan lahan di kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan untuk berlokasi pada peruntukan lahan



- kawasan perkebunan, dan atau kawasan pertanian Tanaman Pangan dan kawasan pertanian hortikultura. Total kawasan hutan rakyat Kabupaten Rokan Hulu adalah 6,835.16 hektar.
- i. Kawasan Pertanian. Kawasan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu meliputi:
- a) Kawasan tanaman pangan Sebaran pengembangan kawasan pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana lebih kurang 20.385 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar.
 - b) Kawasan Hortikultura Untuk pengembangan kawasan hortikultura, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luasan mencapai 8.016,81 Ha. Kecamatan Pendalian IV Koto dan Kecamatan Rokan IV Koto merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan hortikultura terbesar, yaitu kurang lebih masing-masing 4.024 (empat ribu dua puluh empat) hektar dan 3.417 (tiga ribu empat ratus tujuh belas) hektar.
 - c) Kawasan perkebunan Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kopi, kakao, karet, pala, cengkeh, kayu manis dan lain-lain. Adapun produk unggulan bidang perkebunan yang mendukung ekonomi kerakyatan yaitu:
(1) Kelapa sawit (2) Kopi; (3) Karet; (4) Kelapa.
 - d) Kawasan perternakan Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada. Kawasan peternakan diarahkan di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah dengan luas lebih kurang 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar.
- j. Kawasan Perikanan. Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, danau, telaga, kolam, dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antara lain ikan patin, lele, mas, nila, kalui, bawal, baung, ruting, sepat. Selais, dan sebagainya.
- k. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi. Proses mineralisasi dan pembentukan bahan galian non logam yang terjadi di daerah ini telah menghasilkan beberapa jenis bahan galian yang termasuk ke dalam kelompok bahan galian non logam, yaitu antara lain adalah pasir kuarsa, kaolin, lempung, kuarsit, granit, sirtu, felspar, andesit, ballclay, bentonit, batugamping, dan marmer. Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu terletak menyebar diseluruh kecamatan. Kawasan pertambangan tersebut meliputi: Kawasan pertambangan mineral, Kawasan pertambangan batubara, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.



1. Kawasan Peruntukan Industri. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hulu, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri dan industri kecil dan menengah. Kawasan industri sebagaimana diarahkan berada di Kecamatan Ujung Batu dan Kepenuhan. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar di seluruh Kecamatan.
- m. Kawasan Pariwisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kabupaten Rokan Hulu sangat beruntung memiliki pesona alam yang tidak dimiliki daerah lain seperti pesona alam yang membentang di daerah bukit barisan serta tempat-tempat bersejarah di wilayah kabupaten Rokan Hulu. Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Kawasan pariwisata alam, Kawasan pariwisata buatan, dan Kawasan pariwisata budaya.
- n. Kawasan Permukiman. Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Rencana kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2040, terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 43.531 (empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar.
- o. Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:
 - a. Koramil 0313-02 berada di Kecamatan Rambah;
 - b. Koramil 0313-08 berada di Kecamatan Tandun;
 - c. Koramil 0313-10 berada di Kecamatan Kunto Darussalam;
 - d. Koramil 0313-11 berada di Kecamatan Tambusai;
 - e. Koramil 0313-13 berada di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - f. Koramil 0313-14 berada di Kecamatan Kepenuhan;
 - g. Kepolisian Resor berada di Kecamatan Rambah;
 - h. Kepolisian Sektor tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten.
- p. Kawasan Peruntukan Lainnya. Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu meliputi kawasan perkantoran dan kawasan transportasi yang luasan secara keseluruhan lebih kurang 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar.

4.2.5.3 Telaah Terhadap Rencana Strategis

1. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Rokan Hulu

Kawasan strategis nasional di Kabupaten Rokan Hulu adalah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Hutan Lindung Mahato (I/B/1), yaitu dengan tahapan pengembangan I dengan arah pengembangan untuk rehabilitasi/revitalisasi kawasan. Kawasan Hutan Lindung Sungai Mahato mempunyai luas areal sekitar 29.552,954 Ha berada di sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Kecamatan Tambusai Utara.

2. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Rokan Hulu

Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Rokan Hulu adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dalam hal ini, tidak ada wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yang diprioritaskan penataan ruangnya karena dinilai belum mempunyai pengaruh yang sangat penting atau besar bagi provinsi, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan pada wilayah kabupaten Rokan Hulu yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

- a. Kawasan Strategis Kabupaten Pada Aspek Ekonomi, kawasan strategis Kabupaten Rokan Hulu pada aspek ekonomi adalah Kawasan Industri di Kecamatan Kepenuhan dan Kawasan Industri Ujung Batu.
- b. Kawasan Strategis Kabupaten Pada Aspek Sosial Budaya, arahan penetapan kawasan strategis sosial budaya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan yang sebagai berikut: Kawasan Istana Raja Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto, Kawasan Benteng Tujuh Lapis (Benteng Dalu-Dalu) di Kecamatan Tambusai, Kawasan Makam Raja-Raja Rambah di Kecamatan Rambah, Kawasan Istana Kepenuhan di Kecamatan Kepenuhan, Kawasan Istana dan Masjid Tua Kunto Darussalam di Kecamatan Kunto Darussalam.
- c. Kawasan Strategis Pada Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan, didasari analisa yang bertumpu kepada fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah kawasan konservasi ikan arwana di Kecamatan Tambusai Utara dengan luas sekitar 3.770 Ha dan kawasan Kebun Raya Pasir Pengaraian dengan luas sekitar 109,61 Ha.

Program-program yang direncanakan, dikelompokkan dalam beberapa program kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai indikasi program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV- 1

Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4
A	Perwujudan Struktur Ruang						
1	Perwujudan pusat kegiatan						



No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4
	1.1 Pengembangan dan penataan PKW Pasir Pangaraian	Penyusunan/revisi Rencana detail tata Ruang kawasan Perkotaan pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	✓			
		Peningkatan fungsi jaringan jalan kolektor primer menjadi arteri primer	Ruas jalan kolektor primer menjadi arteri primer di Kabupaten Rokan hulu	✓			
		Pengembangan Bandar Udara Tuanku Tambusai	Danau Sati/Rambah Samo	✓			
		Peningkatan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu menjadi tipe B	Pasir Pangaraian	✓			
		Pengembangan pasar regional	Pasir Pangaraian	✓			
		Pembangunan/relokasi terminal tipe B	Pasir Pangaraian	✓			
		Peningkatan kapasitas dan cakupan layanan air minum di perkotaan	Pasir Pangaraian	✓			
		Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pasir Pangaraian	✓			
		Pengembangan INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH TINJA (IPLT)	Pasir Pangaraian	✓			
		Pengembangan jaringan drainase perkotaan	Pasir Pangaraian	✓			
		Pengembangan TPA Tanjung Belit	Pasir Pangaraian	✓			
	1.2 Pengembangan dan penataan PKL Ujung Batu	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Ujung Batu	Ujung batu	✓			
		Pengembangan Rumah Sakit tipe C	Ujung batu	✓			
		Peningkatan sarana pasar lokal utama	Ujung batu	✓			
		Pengembangan terminal tipe C	Ujung batu	✓			
		Peningkatan kapasitas dan cakupan layanan air minum di perkotaan	Ujung batu	✓			
		Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Ujung batu	✓			
		Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	Ujung batu	✓			
		Pengembangan jaringan drainase perkotaan	Ujung batu	✓			
		Pengembangan TPA Ujung Batu	Ujung batu	✓			
	1.3 Pengembangan PPK	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang PPK	Ibukota Kecamatan	✓			
		Pengembangan puskesmas		✓			
		Pengembangan dan pembangunan pasar		✓			



No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4
		lingkungan kecamatan					
		Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan air minum di perkotaan (ibukota Kecamatan/ikk)			✓	✓	
		Pengembangan jaringan drainase perkotaan			✓	✓	
		Pembangunan TPS masing-masing kecamatan			✓	✓	
		Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			✓	✓	✓
		Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)			✓	✓	✓
	1.4	Pengembangan PPL pada masing-masing pusat desa/ kelurahan	Seluruh PPL	✓	✓		
		Pembangunan pasar lingkungan		✓	✓		
		Peningkatan cakupan layanan air minum		✓	✓		
		Pengembangan jaringan drainase		✓	✓		
	2	Perwujudan system jaringan prasarana					
	2.1	Perwujudan system jaringan prasarana transportasi	Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓		
		Program pengembangan transportasi udara	Danau Sati/ Rambah samo	✓	✓		
	2.2	Perwujudan sistem jaringan prasarana energi	PLN ranting Pasir Pangaraian	✓			
		Pengembangan pembangkit listrik eksisting di PLTD Sungai Kuning	PLTD Sungai Kuning	✓			
		Pengembangan pembangkit energy baru terbarukan	Seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan jalur distribusi minyak bumi		✓	✓	✓	✓
		Pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLTMH, PLTS, PLTU, PLTA DAN PLEBT)		✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan Gardu Induk Tegangan Rendah (GITR)		✓	✓	✓	✓
		Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan		✓	✓	✓	✓



No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan				
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4	
		Rendah (SUTR)						
	2.3	Perwujudan system jaringan telekomunikasi	Pembangunan tower BTS bersama di PKW, PKL, PPK	PKW, PKL dan PPK	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan cakupan layanan internet		✓	✓	✓	✓
			Pengembangan jaringan serat optic		✓	✓	✓	✓
			Penyusunan kajian teknis Rencana Tata Letak Menara (RTL)		✓	✓	✓	✓
			Penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak Menara (RTL)		✓	✓	✓	✓
			Pengembangan/ peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk layanan kegiatan industri		✓	✓	✓	✓
	2.4	Perwujudan system prasarana sumber daya air	Peningkatan cakupan layanan dan pengembangan Daerah Irigasi (DI)	Seluruh daerah irigasi di Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	
			Peningkatan kawasan sempadan danau melalui pembangunan pengaman danau.	Wilayah yang Terdapat danau di Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan jaringan irigasi desa	Seluruh daerah irigasi di Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	✓
	2.5	Perwujudan pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan	Sistem penyediaan air minum	Kabupaten Rokan Hulu	✓			
			Prasarana pengelolaan air limbah	Kabupaten Rokan Hulu	✓			
			Pengelolaan persampahan	Kabupaten Rokan Hulu	✓			
			Sistem jaringan drainase	Kabupaten Rokan Hulu	✓			
B	Perwujudan Pola Ruang							
	1	Perwujudan kawasan lindung						
	1.1	Pemantapan kawasan yang memberika perlindungan dibawahnya	Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung		✓	✓	✓	✓
			Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung	Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	✓
			Evaluasi kawasan terbangun pada kawasan lindung		✓	✓	✓	✓
			Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi lindung		✓	✓	✓	✓
			Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung		✓	✓	✓	✓



No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan				
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4	
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung		✓	✓	✓	✓	
	1.2	Pemantapan kawasan perlindungan setempat	Penataan kawasan sempadan sungai, sekitar waduk/danau, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	✓
		Rehabilitasi dan pengamanan sempadan danau dan waduk	Danau dan waduk di Kabupaten Rokan Hulu		✓	✓	✓	✓
		Peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)			✓	✓	✓	✓
	1.3	Pemantapan kawasan konservasi	Peningkatan fungsi kawasan konservasi Taman Hutan Rakyat (TAHURA)	Kecamatan Bangun Purba dan Rambah	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan fungsi kawasan konservasi ikan arwana		Kecamatan Tambusai Utara	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan kawasan kebun raya Pasir Pengaraian		Kecamatan Rambah	✓	✓	✓	✓
	1.4	Pemantapan kawasan lindung geologi	Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan lindung geologi		✓	✓	✓	✓
	1.5	Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana	Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam	Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu	✓			
		Pemasangan papan informasi, peta, rambu, dan jalur kebencanaan di kawasan rawan bencana, perdagangan, perkantoran dll.			✓	✓		
		Penyediaan lahan/zona evakuasi, hunian sementara, dan relokasi			✓	✓		
		Rehabilitasi lahan masyarakat di kawasan rawan bencana			✓	✓		
	1.6	Pemantapan kawasan cagar budaya	Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan cagar budaya daerah	Seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	✓
		Perumusan program dan pengembangan kawasan cagar budaya daerah			✓	✓	✓	✓
	1.7	Pemantapan kawasan lindung lainnya	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa hutan kota & taman kota	Kawasan Perkotaan Pasir Pengaraian	✓	✓	✓	✓
		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa taman kecamatan dan taman desa		Seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓	✓	✓
2	Perwujudan Kawasan							



No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4
	Budidaya						
	2.1 Pengembangan kawasan hutan produksi	Identifikasi dan penetapan kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi konservasi	Seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hulu	✓			
		Evaluasi pengelolaan hutan produksi dengan studi kelayakan dan studi amdal oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang		✓	✓		
		Pengembangan budidaya Agroforestry sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan		✓	✓		
	2.2 Pengembangan kawasan hutan rakyat	Identifikasi dan penetapan kawasan hutan rakyat		✓			
		Optimalisasi pengelolaan hutan rakyat		✓			
	2.3 Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan	Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓		
		Pengembangan kawasan hortikultura		✓	✓		
		Pengembangan kawasan perkebunan		✓	✓		
		Pengembangan kawasan peternakan		✓	✓		
	2.4 Pengembangan kawasan perikanan	Penyusunan database potensi kawasan perikanan	Seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu	✓	✓		
		Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar		✓	✓		
		Pengembangan produktivitas perikanan tangkap di perairan danau dan sungai	Danau Sipogas (Kecamatan Rambah), Danau Ombak (Kecamatan Junto Darussalam), Danau Baru (Kecamatan Kepenuhan), Danau Pomutuh (Kecamatan Bonai Darussalam)	✓	✓		
	2.5 Pengembangan kawasan pertambangan dan energi	Inventarisasi kawasan/ daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan dan energi	Tersebar di seluruh kecamatan	✓	✓		
		Relokasi dan lokalisasi tambang rakyat		✓	✓	✓	✓
		Rehabilitasi lahan pasca tambang		✓	✓	✓	✓
	2.6 Pengembangan kawasan industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Ujung batu, Kepenuhan	✓			
		Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan	Seluruh kecamatan	✓	✓	✓	✓



No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4
		menengah					
		Pengembangan kawasan industri	Ujung batu, Kepenuhan	✓	✓	✓	✓
	2.7	Pengembangan kawasan pariwisata	Penyusunan profil kawasan wisata daerah	✓			
			Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	✓			
			Peningkatan dan pengembangan objek wisata prioritas	✓	✓	✓	✓
	2.8	Pengembangan kawasan permukiman	Kawasan permukiman perdesaan	✓	✓	✓	✓
			Kawasan permukiman perkotaan	✓	✓	✓	✓
	2.9	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kerjasama dengan pihak terkait	✓			
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten						
	1	Perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi	Pengembangan kawasan industri	✓			
	2	Perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut social budaya	Penyusunan rencana induk pengembangan kawasan social budaya Rokan Hulu				
			1. Kawasan Istana Raja Rokan; 2. Kawasan Benteng Tujuh Lapis; 3. Kawasan Makam Rajaraja Rambah; 4. Kawasan Istana Kepenuhan; dan 5. Kawasan Istana Dan Masjid Tua Kunto Darussalam.	✓			
			Penetapan status kawasan dan bentuk pengelolaannya melalui Perda atau SK Bupati	✓			
			Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata/tempat pelestarian social budaya	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan manajemen pengelolaan wisata/tempat pelestarian social budaya seperti pengadaan tour travel, paket wisata, dll	✓	✓	✓	✓
	3	Perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan	Kajian studi kelayakan pengembangan kebun raya Pasir Pengaraian	✓			
			Penetapan/penataan	✓			



No	Program utama	Kegiatan	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				PJ M 1	PJ M 2	PJ M 3	PJM 4
		batas (Delineasi) kawasan					
		Master plan pengembangan kebun raya Pasir Pengaraian		✓			
		Pembangunan kebun raya Pasir Pengaraian		✓			

Sumber: RTRW Kab. Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Perizinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu. Namun, RTRW belum cukup operasional untuk dijadikan dasar pemberian izin pemanfaatan ruang yang lebih rinci, untuk itu hendaknya Pemerintah Daerah segera menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kurangnya kemampuan SDM dibidang penataan ruang, minimnya pengawasan terhadap kesesuaian perizinan yang telah diterbitkan juga menjadi permasalahan di bidang penataan ruang.

4.2.6 Hasil Telaah KLHS Kabupaten Rokan Hulu

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Rokan Hulu yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menunjukkan bahwa terdapat 220 indikator TPB di Kabupaten Rokan Hulu. Kategori yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional berjumlah 114 indikator, kategori yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional berjumlah 45 indikator, kategori yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 32 indikator dan kategori tidak/belum ada data (NA) berjumlah 29 indikator Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Capaian Indikator TPB disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV- 2

Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Perangkat Daerah	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
1	Bapenda	2	1	0	1	4
2	Bappeda	2	2	1	0	5
3	BPBD	11	1	0	0	12
4	BPKAD	2	1	0	2	5
5	Dinas Informatika dan statistik	9	6	2	0	17
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4	0	7	0	11
7	Dinas Lingkungan Hidup	1	3	9	2	15
8	Dinas Perhubungan	0	0	0	4	4



No	Perangkat Daerah	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	0	0	2	3
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42	10	3	9	64
11	Dinas TPH	1	0	0	0	1
12	Disdikpora	10	4	0	0	14
13	Disdukcapil	5	0	0	0	5
14	Disparbud	3	1	0	1	5
15	DKPP	1	2	0	1	4
16	DPMD	4	1	0	0	5
17	DPMPTSP	1	0	0	0	1
18	DPPKB	6	4	0	0	10
19	Inspetorat	0	0	1	0	1
20	Kesbangpol	1	4	0	4	9
21	Keuangan	0	0	2	0	2
22	PUPR	7	4	7	2	20
23	Sekretariat Daerah	1	1	0	1	3
Jumlah		114	45	32	29	220

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kab. Rokan Hulu Tahun 2021-2026

Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS Kabupaten Rokan Hulu ini terdiri dari 13 isu strategis, yaitu:

1. Rendahnya akses pelayanan dasar, Perlindungan bencana sosial pada kelompok miskin/rentan, dan terbatasnya anggaran.
2. Tingginya konsumsi rokok (31,2%) dan alkohol serta penyalahgunaan narkoba.
3. Belum tersedianya sistem pelacakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak serta menurunnya unmeet need KB.
4. Terbatasnya Akses air minum, rendahnya partisipasi dan belum optimalnya instalasi lumpur tinja dan fasilitas kebersihan.
5. Rendahnya rasio energi terbarukan dan intensitas energi primer.
6. Rendahnya pertumbuhan PDB, daya saing pariwisata dan budaya serta infrastruktur perbankan.
7. Rendahnya anggaran riset dan terbatasnya perkembangan teknologi dan informasi.
8. Belum optimalnya implementasi hukum dan tatakelola, kebebasan sipil dan pelayanan penyandang difabilitas
9. Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada permukiman.
10. Belum optimalnya pengelolaan sampah daur ulang.
11. Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB).
12. Belum optimalnya kinerja kelembagaan penegakan hukum dan rendahnya kesetaraan gender.
13. Rendahnya kemitraan para pihak dalam layanan telekomunikasi dan data statistik melalui website.



Hasil penentuan isu utama yang didasarkan pada penentuan isu strategis berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah:

1. Rendahnya akses pelayanan dasar, perlindungan bencana sosial pada kelompok miskin/rentan, dan terbatasnya anggaran (tingginya angka kemiskinan).
2. Terbatasnya akses air minum, rendahnya partisipasi dan belum optimalnya instalasi lumpur tinja dan fasilitas kebersihan.
3. Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada pemukiman.
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah daur ulang.

4.2.7 Isu Strategis Kabupaten Rokan Hulu

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia

Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu pembangunan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu lima tahun kedepan. Hal ini ditandai masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Rokan Hulu dibandingkan rata-rata Provinsi Riau dan nasional yang diukur melalui; 1) usia harapan hidup, 2) angka harapan lama sekolah dan 3) angka rata-rata lama sekolah 4) pengeluaran. Keempat indikator pengukuran tersebut, merupakan komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan karena belum optimalnya tumbuh kembang anak, tingginya tingkat gizi buruk dan stunting, sehingga akan berdampak terjadinya kehilangan generasi (*loss generation*) dimasa mendatang. Selain itu, adaptasi terhadap situasi pembelajaran pasca pandemi Covid-19, seperti peningkatan kualitas guru dan anak didik.

a. Pendidikan

Sektor pendidikan perlu penanganan yang lebih diprioritaskan lima tahun kedepan. Hal ini ditandai angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2020 sebesar 12,84 tahun. Angka tersebut, menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan pendidikan formal hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. Rendahnya harapan lama sekolah juga diikuti dengan rendahnya rata-rata lama sekolah, hingga tahun 2020 sebesar 8,39 tahun. Angka tersebut, menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Rokan Hulu lama mengenyam pendidikan formal sampai kelas II SLTP.

Rendahnya rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tersebut perlu menjadi perhatian dalam penanganan isu pendidikan melalui sistem pendidikan untuk semua (*inclusif education*). Artinya setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang berkualitas serta dapat mengakses pendidikan pada jenjang



pendidikan menengah dan tinggi serta pemerataan pendidikan guna mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat. Untuk menjawab isu strategis tersebut, perlu adanya kebijakan pembangunan pada sektor pendidikan yang lebih efektif dan terukur dan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan dasar SPM bidang pendidikan.

b. Kesehatan

Kualitas hidup manusia erat kaitannya dengan sektor kesehatan. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sebesar 70,06 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,06 tahun.

Penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepannya karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Isu stunting saat ini menjadi isu nasional karena berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dimasa yang akan datang.

Selain stunting, Kasus Tuberkulosis juga menjadi isu nasional. Di Kabupaten Rokan Hulu, kasus tuberkulosis masih cukup tinggi dan proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 hanya sebesar 63,78% proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS. Ini artinya peran DOTS masih perlu lebih dioptimalkan dalam penanganan TB di Rokan Hulu.

Ada 8 (delapan) Area kunci reformasi sistem kesehatan yang saling terkait untuk memastikan target pengendalian TB dapat tercapai di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan Puskesmas, peningkatan kualitas Rumah Sakit, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat, maka untuk itu masih perlu peningkatan melalui Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Reformasi sistem kesehatan sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya adalah Penempatan Tenaga Kesehatan masih menunjukkan ketimpangan terutama belum terpenuhinya 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas) dan pemenuhan tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu juga belum bisa dilakukan secara digital dan belum berkembang dengan baik.

Selain itu, adanya gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi akan berdampak pada beban pembiayaan jaminan kesehatan, sehingga upaya-upaya kesehatan masyarakat mulai mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut harus didukung dengan upaya penurunan



disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Disamping itu, tekanan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular semakin berat tantangannya kedepan, seiring munculnya covid-19 yang mewabah dari awal tahun 2020 secara global. Menyikapi tantangan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Rokan Hulu lima tahun mendatang, isu peningkatan kualitas dan mutu pelayanan dasar SPM bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlu dicermati dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang.

c. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas kepemudaan pemuda dan prestasi olahraga merupakan salah satu isu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Permasalahan di Kabupaten Rokan Hulu saat ini diantaranya adalah infrastruktur dan fasilitas olahraga yang merupakan prasyarat dasar bagi pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Rokan Hulu masih minim, belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan dan belum optimalnya peran serta/partisipasi pemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan kedepannya untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. Pengembangan komoditas unggulan untuk menopang perekonomian daerah

Saat ini sektor pertanian masih menjadi andalan dan memberikan kontribusi penerimaan terbesar dari sektor lainnya. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai andalan baru dalam penerimaan daerah. Sektor perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan begitu pula dengan sektor perikanan, dengan daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar maka potensi perikanan cukup besar untuk dikelola dengan baik.

Disisi lain, sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu menjadi perhatian dan dikembangkan.

a. Pertumbuhan ekonomi

Pengembangan ekonomi merupakan isu strategis yang perlu dijadikan perhatian utama dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berada diangka 1,51%. Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 lebih utama disebabkan karena efek pandemi Covid-19 yang membuat beberapa sektor ekonomi tidak bekerja dengan maksimal.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu sektor penyangga perekonomian Kabupaten Rokan Hulu di masa pandemi covid-19, dapat dibuktikan secara riil sektor pertanian Rokan Hulu masih tumbuh sebesar 3,69%, hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi pergerakan



perkembangan output disektor pertanian Kabupaten Rokan Hulu, 3,44% bersumber dari perkebunan kelapa sawit dan 0,25% bersumber dari lainnya (Perikanan, Ternak, dan Kehutanan).

Sementara itu, kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu masih bersumber dari luar daerah sehingga perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas kedepannya. Dimana pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama beras mencapai angka 102.954,14 ton sementara produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu hanya sebesar 45.381,64 ton.

b. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini karena sejalan dengan target SDG's tingkat kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang berada di bawah garis kemiskinan hingga tahun 2020 sebanyak 73.350 jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 10,31% yang diukur melalui indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 2,04 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,57.

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Rokan Hulu lima tahun mendatang berpeluang meningkat akibat dampak krisis ekonomi global empat tahun terakhir dan dampak pandemi covid-19 secara global yang terjadi pada tahun 2020 sampai saat ini. Sehingga berimplikasi terhadap pendapatan masyarakat, terutama petani dan tenaga kerja informal. Terkait hal ini, maka pengentasan kemiskinan perlu menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah.

c. Pariwisata dan ekonomi kreatif

Isu strategis pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia.

3. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan cakupan dan layanan sarana dan prasarana wilayah dengan memperhatikan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Infrastruktur dasar merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang baik menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan pemerintah daerah.

Isu pembangunan ini merupakan isu aktual yang terjadi saat ini, mengingat masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar. Sehingga berimplikasi terhadap rendahnya daya saing daerah dan investasi di Kabupaten Rokan Hulu. Seyogyanya, dalam menciptakan peluang investasi dibutuhkan daya saing ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Untuk menjawab permasalahan ini maka perlu peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar yang tentunya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang



Wilayah (RTRW). Sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan dan berbasis lingkungan. Penanganan isu strategis daerah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah. Disamping itu juga, berdampak terhadap pemerataan pembangunan seluruh wilayah baik di perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Rokan Hulu, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.

Pengentasan Isu strategis ini dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi pada kawasan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses distribusi barang dan jasa masyarakat secara efektif dan efisien serta mengurangi biaya transportasi dan hasil produksi pertanian masyarakat terdistribusi dengan baik dan lancar.

Dalam upaya perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hulu terkoneksi desa dan antar desa, kecamatan dan antar kecamatan se-Kabupaten, menjadi hal yang harus diprioritaskan ke depan dalam pembangunan. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dasar seperti sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih masyarakat serta pengembangan infrastruktur ibukota kabupaten yang terintegrasi masih perlu diprioritaskan .

Isu pelestarian lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim dan pemeliharaan ekosistem sungai/darat.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Kabupaten Rokan Hulu merupakan isu strategis daerah. Hal ini disebabkan karena terganggunya kawasan tangkapan air (catchment area) dan daerah aliran sungai, sehingga kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Cenderung meningkatnya kejadian bencana alam, terutama banjir, kebakaran hutan disebabkan karena perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat terkait alih fungsi lahan pada catchment area dan daerah aliran sungai, buang sampah sembarangan bahkan penggundulan hutan. Dilain pihak, kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana masyarakat dan tanggap bencana masyarakat dalam mengantisipasi bencana banjir belum optimal. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

Isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk. Pelayanan pada sektor ini secara total masih rendah dengan persentase cakupan area



pelayanan hingga tahun 2020 hanya mencapai 3,73 %. Saat ini Kabupaten Rokan Hulu hanya memiliki 1 (satu) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *sanitary landfill* di Kecamatan Rambah yang berfungsi menampung sampah masyarakat di 2 (dua) kecamatan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lainnya belum bertipe *sanitary landfill* yang menangani sampah masyarakat di 1 (satu) kecamatan yaitu di Kecamatan Ujungbatu. Sementara Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan yang tentunya memerlukan ketersediaan tempat pembuangan akhir sampah yang memadai. Selain itu, isu penanganan limbah industri yang bernilai ekonomis perlu juga menjadi prioritas lima tahun mendatang.

Isu-isu pelestarian lingkungan hidup tersebut, jika dibiarkan tanpa ada penanganan yang efektif maka akan berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kedepannya. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan pengawasan dan penanganan maupun pengelolaannya berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat.

4. Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda

Dalam pelaksanaan pembangunan, disamping melakukan pembangunan fisik juga diperlukan pembangunan non fisik dalam kehidupan masyarakat agar tercipta keharmonisan, keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Rokan Hulu dijuluki Negeri Seribu Suluk dengan mayoritas penduduk muslim. Masyarakat Rokan Hulu terdiri dari berbagai macam agama, etnis dan budaya yang tersebar diseluruh wilayah.

Perbedaan dan keragaman yang ada menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Pelestarian warisan budaya adalah upaya perlindungan terhadap produk atau hasil budaya dari tradisi yang berbeda dan prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa yang terdiri dari segala bentuk seni, nilai-nilai tradisi dan budaya yang bersifat kebendaan. Pada tahun 2020, benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Rokan Hulu yang dilestarikan baru mencapai 5,25% dari 381 total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah.

Dalam rangka penanganan isu diatas, maka diperlukan kebijakan berupa fasilitasi masyarakat untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, mengembangkan dan melestarikan adat budaya, sesuai dengan etniknya sehingga diharapkan akan terwujud kerukunan hidup, terciptanya lingkungan aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.



5. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif

Pada dasarnya tata kelola pemerintahan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu 1) reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas; 2) reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia; 3) reformasi pelayanan publik yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang baik meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi yang efektif, tata laksana yang optimal, akuntabilitas kinerja pembangunan, sistem pengawasan yang efektif, pelayanan publik yang prima dan kualitas serta profesionalisme aparatur. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap reformasi birokrasi pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Menindak lanjuti Peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan manajemen perubahan melalui, deregulasi kebijakan dan penataan organisasi yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta pengembangan teknologi informasi sebagai sarana efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintah yang diukur melalui Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini juga berfungsi sebagai media transparansi publik dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan sampai pelayanan publik di tingkat kecamatan juga harus semakin ditingkatkan yang ditandai meningkatnya kepuasan masyarakat.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target nilai SAKIP yang optimal, maka diperlukan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dimana saat ini SAKIP Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 masih bernilai B.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional juga menjadi kunci dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Sehingga terwujudnya penguatan kelembagaan, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan sampai Pemerintah Desa. Implikasi terhadap penanganan isu peningkatan kualitas ASN dan penguatan kelembagaan akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang terpercaya akuntabel dan transparan.

Isu lain yang berkaitan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tidak terlepas dari sistem pengendalian dan pengawasan internal



pemerintah yang lebih efektif yang didukung tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan tingkat kapabilitas Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) serta terbangunnya zona integritas setiap unit layanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehingga dapat menurun indeks persepsi anti korupsi pada tatanan Pemerintah Daerah lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu lima tahun terakhir, terlihat capaiannya belum optimal sesuai dengan tuntutan era reformasi dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, lima tahun kedepan penanganan isu tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya akuntabel dan transparan merupakan sebuah keharusan dalam rangka mendukung pencapaian visi reformasi birokrasi pemerintah tahun 2025.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

**BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021**



BAB V.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Rokan Hulu 2005-2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai-nilai Agama Menuju Masyarakat Sejahtera”

dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Lebih Maju** dapat diartikan sebagai Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pembangunan dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya ekonomi dan daya beli masyarakat, meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar, pemerataan pembangunan dan terbukanya lapangan kerja, memiliki sumberdaya manusia yang unggul, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, mempunyai aparatur pemerintahan yang handal, berkualitas dan menguasai teknologi, mempunyai watak dan kepribadian berdasarkan kepada norma budaya yang luhur dan nilai-nilai keagamaan yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- 2) **Berdaya Saing** diartikan sebagai keadaan Kabupaten Rokan Hulu yang mampu dan sanggup mengoptimal potensi yang dimiliki, baik ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia serta mampu bekerjasama dengan pihak lain dengan saling menguntungkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan berwawasan lingkungan.
- 3) **Keragaman Adat dan Budaya** diartikan sebagai Kabupaten Rokan Hulu mempunyai adat dan budaya yang berbeda – beda yang apabila potensi ini dikembangkan dengan baik dan optimal maka akan menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan yang ditandai dengan kehidupan masyarakat harmonis, yang memiliki watak dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti dan budaya luhur, hidup secara rukun dan damai, berdasarkan kepada etika, moral dan agama serta hukum negara.



- 4) **Nilai Nilai Agama** diartikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata bersifat fisik namun juga pembangunan yang bersifat nonfisik, meliputi: mental, perilaku, karakter sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepercayaannya. Dengan harapan dapat terwujud kerukunan kehidupan beragama yang baik serta meningkatnya peran lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah.
- 5) **Masyarakat Sejahtera** diartikan sebagai Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak dan baik, dalam suasana hidup yang aman, tenteram dan damai.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan, sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi ini diarahkan untuk pembangunan kualitas hidup manusia seutuhnya dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hulu yang produktif, kreatif dan berdaya saing melalui peningkatan kemandirian ekonomi untuk menurunkan kesenjangan pendapatan antar penduduk, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan kemandirian ekonomi daerah juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata daerah melalui peningkatan daya tarik objek wisata sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia daerah.

Misi 3: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang berimbang sampai ke desa-desa dan mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah dicapai melalui peningkatan pelayanan transportasi, peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman dan peningkatan infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumberdaya air. Sedangkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dilakukan melalui peningkatan kualitas

lingkungan hidup yang ditandai oleh peningkatan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

Misi 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misi ini juga diarahkan pada upaya meningkatkan pemajuan budaya daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis berlandaskan adat dan budaya melalui peningkatan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat dan budaya daerah.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dan tertib hukum, profesional dan akuntabel melalui peningkatan penerapan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah, peningkatan cakupan penerapan e-government, peningkatan pelayanan publik yang handal dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu merupakan cita-cita masyarakat Rokan Hulu yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memiliki makna dan tujuan luhur untuk mewujudkan Rokan Hulu yang lebih maju dan berdaya saing dalam keragaman adat dan budaya. Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hulu akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (*impact*) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 sampai dengan 2026.



Tabel V- 1

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026

VISI: Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera

Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1; Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	IPM	69,38	69,47	69,67	69,86	69,93	69,98
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	a. Angka Harapan Lama Sekolah	12,84	12,9	12,93	12,96	12,98	13
		b. Rata rata Lama Sekolah	8,39	8,36	8,4	8,45	8,5	8,6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,06	70,55	71,01	71,56	72,03	72,42	
Misi 2 ; Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah.	Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	1,51	2,06	2,50	3,00	3,50	4,00
	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB (milliar rupiah)	36.083,71	37.449,48	38.385,71	39.537,28	40.921,09	42.557,93
		Indeks Gini	0,314	0,279	0,278	0,277	0,276	0,275
		PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	50,23	50,29	50,45	50,95	51,23	51,67
		Persentase PAD terhadap total pendapatan	10,33	11,86	12,77	13,75	14,84	15,98
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (milliar rupiah)	4817,27	4926,26	5000,15	5087,65	5189,41	5319,14
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	53,24	58,03	63,25	68,95	75,15	81,92
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	10,31	10,14	10,06	9,97	9,89	9,8	
	Tingkat pengangguran	4,42	4,33	4,3	4,27	4,24	4,21	



Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					
				2022	2023	2024	2025	2026	
	dan pengangguran	terbuka							
	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah)	2.497,825	2.722,63	2.967,67	3.234,76	3.525,88	3.843,21	
	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	876.535	876.535	964.118	1.060.607	1.166.667	1.283.334	
Misi 3 ; Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur dasar (%)	25,06	41,00	43,77	71,50	72,10	72,70	
	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	-34,56	10	10,50	11	11,50	12	
	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	51,10	60,52	65,13	69,23	74,00	78,98
			Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	66,33	76,20	80,90	86,00	91,30	96,32
			0	100	100	100	100	100	
			Persentase kawasan kumuh yang ditangani	15,23	15,69	15,93	16,17	16,41	16,66
		Persentase perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	46,45	51	54	56	59	62	
	Meningkatnya cakupan dan	Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik	70	71,40	73,19	75,01	76,89	78,81	

Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
	kualitas gedung negara							
	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	70	71	72,25	73,25	74	75
	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,41	65,37	65,85	66,33	66,81	67,29
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	70	59,37	59,47	59,57	59,67	59,77
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	90,21	87,34	87,44	87,54	87,64	87,74
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	31,4	35,06	36,89	38,72	40,55	42,38
Misi 4 ; Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	100	100	100	100	100	100
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	52,08	56	56,5	57	57,5	58
	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka kejadian konflik SARA	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	6	6	5	4	3	1
		Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	82,8	83	85,3	87	90,1	95,7
	Meningkatkan	Persentase Pemajuan Budaya	7	7	8	9	10	11

Misi	Tujuan dan sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Pemajuan Budaya Daerah	Daerah						
	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	41	41	42	43	45	46
Misi 5 ; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan	Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	C (48,06)	CC	CC	B	B	BB
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	34,48	100	100	100	100	100
	Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,75	3	3,25	3,5	4
	Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	79,75	80	80,5	81,5	82,5	83,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021



BAB VI.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka disusun sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang sistematis berdasarkan strategi yang telah ditentukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kepala daerah dan kebijakan yang terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Adapun strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 tersaji pada tabel VI-1 sebagai berikut.

Tabel VI- 1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI: Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera				
Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa				
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	a. Angka Harapan Lama Sekolah b. Rata rata Lama Sekolah	Peningkatan pemerataan kualitas dan tata Kelola pendidikan dasar sembilan tahun	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Layanan Dasar Lainnya
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Pemantapan akses dan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penciptaan Lingkungan sehat Meningkatkan Keluarga sejahtera
			Peningkatan kepemudaan dan Olahraga Daerah	Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan kepemudaan dan Olahraga
Misi 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah.				
Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan	-Nilai PDRB ADHB -Indeks Gini -PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	Peningkatan daya saing sektor unggulan dan pemulihan ekonomi daerah	Meningkatkan produksi hasil industri Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan
			Peningkatan Penerimaan PAD	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Penataan dan penyesuaian semua Peraturan tentang penerimaan daerah
		Persentase PAD terhadap total pendapatan		
	Meningkatnya investasi	Nilai Pembentukan Modal Tetap	Peningkatan daya tarik investasi	Memperbaiki iklim dan promosi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	daerah	Bruto (PMTB)		Investasi
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa
				Meningkatkan peran lembaga desa
		Peningkatan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin Perlindungan dan jaminan sosial Pasca Covid-19	
Tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja		
Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan pengelolaan destinasi wisata	Meningkatkan aksesibilitas, amenities dan atraksi destinasi wisata
			Peningkatan promosi pariwisata	Meningkatkan promosi pariwisata
				Meningkatkan kelembagaan pariwisata (ancillary) dan ekonomi kreatif
Misi 3: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.				
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	Membangun konektivitas	Memantapkan jalan dan jembatan Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
		Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Peningkatan cakupan pelayanan air minum/bersih
	Persentase Rumah tinggal bersanitasi baik		Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Membangun sarana prasarana sanitasi
	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana atau		Penyediaan rumah layak huni korban bencana atau terkena	Membangun rumah layak huni bagi korban bencana atau



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		terkena relokasi program pemerintah daerah	relokasi program pemerintah daerah	terkena relokasi program pemerintah daerah	
		Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Penanganan kawasan kumuh permukiman	Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh	
		Persentase perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan/ permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/ permukiman	
		Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung Negara	Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik	Pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Membangun dan memelihara gedung negara
		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	Peningkatan pengaturan air/ irigasi dan penanganan abrasi/ banjir	Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir
Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Indeks Kualitas Air - Peningkatan Indeks Kualitas Udara - Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan	
			Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan Kesesuaian pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	
			Peningkatan kualitas mitigasi bencana	Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana	
			Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.				
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Angka kejadian konflik SARA	Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
			Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kewaspadaan dini
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban Meningkatkan penanganan masalah pertanahan dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	-Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani -Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	Peningkatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah	Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terkelola, dimanfaatkan, berkembang dan terbina	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan daerah
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan				
Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
				Meningkatkan kualitas



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel				manajemen kearsipan
				Meningkatkan kualitas informasi pemerintahan daerah
				Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan
				Meningkatkan Inovasi Daerah
Meningkatnya penerapan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk menunjang kinerja birokrasi	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi	
Meningkatnya pelayanan Publik yang handal	Indek Kepuasan Masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan Publik	Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik	
Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang transparan dan Akuntabel	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah	

6.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan dalam periode lima tahun pembangunan ini dirumuskan lagi menjadi rencana kerja tahunan pembangunan daerah dengan berfokus kepada penetapan tema dan prioritas sasaran makro yang akan dicapai.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Rokan Hulu dengan fokus atau penekanan arah pembangunan tahunan yang dideskripsikan pada gambar berikut:



Gambar VI- 1
Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2022 (Tahun Pertama RPJMD)

Pada tahun pertama pembangunan Kabupaten Rokan Hulu difokuskan penguatan produktifitas pertanian dan perikanan serta produk olahan turunan secara berkelanjutan; memantapkan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar daerah mendukung pembangunan pariwisata daerah dan pertanian; memantapkan kualitas sumberdaya manusia dengan memastikan tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas serta layanan dasar lainnya secara berkelanjutan; pemantapan kualitas tata kelola pemerintah dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegratif yang berorientasi hasil untuk pelayanan publik yang memuaskan; menjamin keberlanjutan keadaan yang kondusif dan keharmonisan hubungan dalam keanekaragaman budaya dan agama untuk mendukung investasi dalam peningkatan ekonomi daerah. ini diharapkan pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik kembali dan meningkatkan



kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.

Tahun 2023 (Tahun Kedua RPJMD)

Pada tahun kedua ini diharapkan dampak *Covid-19* terhadap perekonomian daerah sudah mulai teratasi. Pembangunan daerah difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian daerah yang produktif dan kreatif; menyediakan infrastruktur yang berimbang dan berwawasan lingkungan; mewujudkan pendidikan yang bermutu dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; yang diperoleh dengan meningkatkan pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.

Tahun 2024 (Tahun Ketiga RPJMD)

Pada penggalan ketiga pembangunan jangka menengah ini difokuskan untuk mengembangkan lebih lanjut ekonomi produktif dan investasi serta pariwisata daerah; melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan menata kota secara berkelanjutan; serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat, budaya dan agama yang berbeda.

Tahun 2025 (Tahun Keempat RPJMD)

Pada penggalan keempat pada RPJMD ini diarahkan pada meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas dan sehat; melanjutkan pengembangan ekonomi produktif berbasis kerakyatan; melanjutkan penyediaan infrastruktur yang berimbang secara berkelanjutan; mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram; serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Tahun 2026 (Tahun Kelima RPJMD)

Pada penggalan kelima atau penggalan terakhir pada RPJMD ini diarahkan pada memantapkan capaian-capaian yang telah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kemajuan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat dalam keragaman adat dan budaya berdasarkan nilai agama. Penggalan terakhir ini difokuskan pada upaya untuk mewujudkan SDM yang cerdas dan sehat; pembangunan ekonomi produktif; ketersediaan infrastruktur yang berimbang; memantapkan kehidupan masyarakat yang harmonis; serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif.

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial

Pembangunan dengan pendekatan spasial dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah sehingga lebih terfokus dan mudah dikoordinasikan. Pembangunan dengan pendekatan spasial di Kabupaten Rokan Hulu diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:

- 1) pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan;



- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- 3) pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten dan mengembalikan fungsi hutan lindung dalam mendukung Catchmen area; dan
- 4) pengelolaan kawasan budidaya pendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan.

Strategi perwujudan pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan meliputi:

- 1) meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan lokal;
- 2) mengoptimalkan fungsi pusat kegiatan yang sudah ada;
- 3) mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota; dan
- 4) mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten.

Strategi perwujudan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan meliputi:

- 1) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan transportasi udara serta keterpaduan intra dan antar moda;
- 2) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- 3) meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal;
- 4) mengembangkan sistem jaringan jalan antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan di wilayah Kabupaten; dan
- 5) meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.

Strategi perwujudan pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten dan menambah kawasan lindung dalam kewenangan Kabupaten meliputi:

- 1) mempertahankan kawasan lindung;
- 2) memulihkan fungsi kawasan lindung;
- 3) mengembangkan kawasan lindung skala Kabupaten sesuai dengan potensi fungsi yang ada pada kawasan; dan
- 4) mengusahakan terjaganya kawasan hutan paling sedikit 30% dari setiap DAS dalam keseluruhan wilayah Kabupaten.

Strategi perwujudan pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan meliputi:

- 1) meningkatkan ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas pengadaan;
- 2) meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan pertanian;

- 3) Pengembangan sentra produksi dan produk turunan sektor perkebunan;
- 4) mengembangkan kawasan agrowisata sebagai ikon baru Kabupaten Rokan Hulu;
- 5) mengembangkan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah;
- 6) menjamin keberadaan sumber daya hutan secara berkelanjutan;
- 7) mengembangkan keterkaitan kawasan pariwisata lokal, regional dan nasional; dan
- 8) meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang yang ramah lingkungan.

6.3.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu meliputi:

1. Sistem perkotaan meliputi: a. PKW; b. PKL; c. PPK; dan d. PPL
 - PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu PKW Pasir Pengaraian, meliputi Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan Rambah Hilir;
 - PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yaitu PKL Ujung Batu, yaitu Kecamatan Ujung Batu
 - PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdiri atas:
 - a) PPK Rokan di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - b) PPK Pendalian di Kecamatan Pendalian IV Koto;
 - c) PPK Tandun di Kecamatan Tandun;
 - d) PPK Kabun di Kecamatan Kabun;
 - e) PPK Danau Sati di Kecamatan Rambah Samo;
 - f) PPK Muara Rumbai di Kecamatan Rambah Hilir;
 - g) PPK Tangun di Kecamatan Bangun Purba;
 - h) PPK Kota Tengah di Kecamatan Kepenuhan;
 - i) PPK Pekan Tebih di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 - j) PPK Kota Lama di Kecamatan Kunto Darussalam;
 - k) PPK Pagaran Tapah di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
 - l) PPK Sontang di Kecamatan Bonai Darussalam;
 - m) PPK Dalu – Dalu di Kecamatan Tambusai; dan
 - n) PPK Rantau Kasai di Kecamatan Tambusai Utara.
2. Sistem Jaringan Prasarana yang meliputi
 - A. sistem jaringan transportasi;
Sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - Sistem jaringan jalan meliputi:
 1. Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten :
 - a) Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), terdiri atas:
 - ✓ ruas Rantau Berangin – Tandun;
 - ✓ ruas Tandun – Pasir Pengaraian; dan



- ✓ ruas Pasir Pengaraian – Batas Sumut.
- b) Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3), terdiri atas:
 - ✓ ruas Rokan – Pendalian – Dusun Batas;
 - ✓ ruas Ujung Batu – Rokan – Batas Sumbar;
 - ✓ ruas Pasir Pengaraian – Tangun – Batas Sumut;
 - ✓ ruas Dalu-dalu – Mahato;
 - ✓ ruas Simpang Suram – Simpang Bagan 7 – Sontang;
 - ✓ ruas Simpang Kumu – Kota Tengah;
 - ✓ ruas Kota Tengah – Sontang;
 - ✓ ruas Tapung – Tandun;
 - ✓ ruas Sontang – Simpang Jurong – Duri; dan
 - ✓ ruas Ujung Batu – Kota Lama – Simpang Bagan 7.
- 2. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten :
 - ✓ jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4);
 - ✓ jalan lokal primer; dan
 - ✓ jalan strategis kabupaten
- 3. jalan desa;
- terminal penumpang:
 - 1.) terminal penumpang tipe B, berada di Kecamatan Rambah; dan
 - 2.) terminal penumpang tipe C, berada di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Ujung Batu, dan Kecamatan Kepenuhan. Terminal barang berada di Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Kepenuhan.
- terminal barang; dan
- jembatan timbang berada di Kecamatan Ujung Batu.

Sistem Jaringan Perkeretaapian

- Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
 - a) Jalur Rokan IV Koto – Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai; dan
 - b) jalur Rokan IV Koto – Ujung Batu – Pasir Pengaraian – Kota Tengah – Kandis – Duri – Dumai.
- Stasiun kereta api meliputi:
 - a. stasiun penumpang, terdiri atas:
 - ✓ Stasiun penumpang berada di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - ✓ Stasiun penumpang berada di Kecamatan Ujung Batu;
 - ✓ Stasiun penumpang berada di Kecamatan Rambah; dan
 - ✓ Stasiun penumpang berada di Kecamatan Kepenuhan.
 - 2) stasiun barang, berada di Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Ujung Batu.

Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, meliputi:

- Alur pelayaran kelas III yang kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:



- a) Kecamatan Rokan IV Koto – Kecamatan Ujung Batu – Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam – Kecamatan Kunto Darussalam – Kecamatan Bonai Darussalam; dan
 - b) Kecamatan Kepenuhan – Kecamatan Kepenuhan Hulu – Kecamatan Rambah Hilir – Kecamatan Rambah – Kecamatan Bangun Purba.
- Lintas penyeberangan dalam Kabupaten meliputi:
 - 1) Kecamatan Rokan IV Koto;
 - 2) Kecamatan Bonai Darussalam;
 - 3) Kecamatan Kepenuhan; dan
 - 4) Kecamatan Rambah Hilir.
 - Pelabuhan sungai, dan danau terdiri atas:
 - a) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - b) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Kunto Darussalam;
 - c) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Bonai Darussalam;
 - d) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Kepenuhan;
 - e) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 - f) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Rambah Hilir;
 - g) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam; dan
 - h) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan di Kecamatan Ujung Batu.

Sistem Transportasi Udara

- Bandar udara berupa bandar udara pengumpan Pasir Pengaraian di Kecamatan Rambah Samo.
- c) sistem jaringan energi
- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan, meliputi:
 - 1) jaringan minyak Jingga-Libo Tenggara;
 - 2) jaringan minyak Langgak (01) – Kasikan (01);
 - 3) jaringan minyak Jorang – Cucut;
 - 4) jaringan minyak Rintis – Hitam;
 - 5) jaringan minyak Ronda – Kopar;
 - 6) jaringan gas bumi Waduk – Libo; dan
 - 7) jaringan gas bumi Libo – Libo Tenggara.
 - Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Rambah;
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:



1. PLTA Sungai Rokan Kiri berada di Kecamatan Rokan IV Koto; dan
 2. PLTA Sungai Rokan Kanan berada di Kecamatan Rambah.
- c) Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBG) berada di Kecamatan Ujung Batu, dan Kecamatan Tambusai Utara;
- d) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi:
- 1) PLTD Sungai Kuning berada di Kecamatan Rambah Samo; dan
 - 2) PLTD Rokan berada di Kecamatan Rokan IV Koto.
- e) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), berada di seluruh Kecamatan; dan
- f) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di seluruh kecamatan.

Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

- 1) jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bangkinang-Pasir Pengaraian, melalui:
 - ✓ Kecamatan Kepenuhan;
 - ✓ Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 - ✓ Kecamatan Rokan IV Koto;
 - ✓ Kecamatan Ujung Batu;
 - ✓ Kecamatan Tandun;
 - ✓ Kecamatan Pendalian IV Koto;
 - ✓ Kecamatan Rambah Samo;
 - ✓ Kecamatan Rambah; dan
 - ✓ Kecamatan Rambah Hilir.
- 2) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - ✓ Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR) berada di seluruh kecamatan; dan
 - ✓ Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada di seluruh kecamatan.
- 3) Gardu Induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik, yaitu gardu induk Pasir Pengaraian, terletak di Kecamatan Rambah.

d) sistem jaringan telekomunikasi

e) sistem jaringan sumber daya air

Sistem Jaringan Sumber Daya Air Sistem jaringan sumber daya air meliputi:

1. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten, meliputi:
 - ✓ Wilayah Sungai Rokan; dan
 - ✓ Wilayah Sungai Siak.
2. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a) Daerah Aliran Sungai Rokan, meliputi:
 - Sub Daerah Aliran Sungai Kumu;
 - Sub Daerah Aliran Sungai Lubuh; dan
 - Sub Daerah Aliran Sungai Rokan Kiri.



- b) Daerah Aliran Sungai Siak berupa Sub Daerah Aliran Sungai Siak. Sumber air meliputi:
- air permukaan pada sungai, mata air, danau, waduk, embung, dan sumber air lain yang terdapat pada permukaan tanah di wilayah Kabupaten, tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten, yaitu CAT Pekanbaru.
- c) sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.

Sistem jaringan persampahan wilayah meliputi:

- a) Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan;
- b) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), meliputi:
- 1) TPA Tanjung Belit berada di Kecamatan Rambah;
 - 2) TPA Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu;
 - 3) TPA Tambusai Utara berada di Kecamatan Tambusai Utara;
 - 4) TPA Kepenuhan berada di Kecamatan Kepenuhan; dan
 - 5) TPA Tandun berada di Kecamatan Tandun
- f) sistem jaringan prasarana lainnya

6.3.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang berisi rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi kawasan peruntukan lindung; dan kawasan peruntukan budidaya.

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

- a) kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 72.941 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu) hektar
- b) kawasan lindung gambut seluas kurang lebih 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) hektar dan
- c) kawasan resapan air seluas kurang lebih 6.081 (enam ribu delapan puluh satu) hektar.

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- Sempadan sungai seluas kurang lebih 11.498 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar, tersebar diseluruh kecamatan;
- Kawasan sekitar danau atau waduk seluas kurang lebih 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan)
- Kawasan Konservasi yaitu Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu Taman Hutan Raya seluas kurang lebih 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar, berada di Kecamatan Bangun Purba, dan Kecamatan Rambah.

Kawasan cagar budaya meliputi:

- a) situs cagar budaya, terdiri atas:
 - Makam Sutan Laut Api berada di Kecamatan Rambah;
 - Makam Kahar (Raja Tambusai) berada di Kecamatan Tambusai;
 - Makam Raja-Raja Rambah berada di Kecamatan Rambah Hilir;
 - Makam Raja-Raja Rokan berada di Kecamatan Rokan IV Koto;



- Kampong Daloe-Daloe (Kampung Dalu-Dalu) berada di Kecamatan Tambusai;
 - *Kubu Awuo Duri* (Kubu Aur Duri) berada di Kecamatan Tambusai;
 - *Benteng Tujuh Lapis* (Benteng Tujuh Lapis) berada di Kecamatan Tambusai; dan
 - Benteng Tuanku Tambusai berada di Kecamatan Tambusai.
- b) bangunan cagar budaya, terdiri atas:
- *Controleur* Belanda (Rumah Dinas Wakil Bupati Rokan Hulu) berada di Kecamatan Rambah;
 - Istana Raja Rokan berada di Kecamatan Rokan IV Koto;
 - Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu (Kantor *Controleur*) berada di Kecamatan Rambah;
 - Sekolah Belanda (SDN 001 Rambah) berada di Kecamatan Rambah; dan
 - Masjid Tua Kunto (Malayasni) berada di Kecamatan Kunto Darussalam.

Kawasan Peruntukan Budidaya, meliputi:

- a) kawasan hutan produksi;
- b) kawasan hutan rakyat;
- c) kawasan pertanian;
- d) kawasan perikanan;
- e) kawasan pertambangan dan energi;
- f) kawasan peruntukan industri;
- g) kawasan pariwisata;
- h) kawasan permukiman;
- i) kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j) kawasan transportasi.

Kawasan Pariwisata berdasarkan Destinasi Wisata Religi, alam, buatan dan Minat Khusus sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Rokan Hulu. Kawasan pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar. Berikut rincian Destinasi Wisata Kabupaten Rokan Hulu:

a) Destinasi Wisata Alam :

1. Air Panas Hapanasan berada di Pawan Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah
2. Goa Mata Dewa berada di Pawan Desa Rambah Tengah Barat
3. Air Panas Suaman berada di Pawan Desa Rambah Tengah Barat
4. Danau Cipogas berada di Desa Sialang Jaya
5. Air Terjun Aek Martua berada di Tangun
6. Air Terjun dan Pemandian alami Rura Limbat berada di Sei Limbat Desa Langgarpayung Kecamatan Bangun Purba
7. Danau Kembang berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
8. Danau Kobu berada di Desa Muara Musu
9. Pantai Rengas berada di Lubuk Bendahara Timur
10. Danau Puar berada di Desa Bunga Tanjung
11. Air Terjun Berseri berada di Cipang Hulu
12. Air Terjun Sungai Tolang berada di Rokan IV Koto



13. Rumah Batu Serombow berada di Tanjung Botong, Sempurna Alam
14. Danau Ombak berada di Kota Lama
15. Gua Tujuh Serangkai berada di Tandun
16. Arung Jeram berada di Sungai Rokan Kiri bagian hulu
17. Huta Sikapir dan beberapa guanya di berada di Pawan Desa Rambah Tengah Barat
18. Air Terjun Rura Pamontasan berada di Sei Bungo
19. Air Terjun Bukik Paninjauan berada di Hulu Pawan Desa Rambah Tengah Barat
20. Air Panas Rokan berada di Rokan IV Koto
21. Air Terjun Hujan Lobek berada di pinggir Sungai Rokan
22. Air Terjun Landasan berada di pinggir Sungai Rokan
23. Gua Sei Nigi berada di Desa Kabun
24. Gua Sei Puo berada di Desa Kabun

b) Destinasi Wisata Buatan

1. Taman Simare berada di Komplek Perkantoran Perkebunan Hutahean Tambusai
2. Arena Terbang Layang berada di Rokan IV Koto
3. Pemandian Bongkaran berada di Kecamatan Rambah
4. Pasar Agro Wisata berada di Danau Sati
5. Pasar Wisata/Pujasera berada di Pasir Pengaraian
6. Komplek Islamic Center dan Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu
7. Pawan Resort berada di Pawan Desa Rambah Tengah Barat
8. Kampung Seni Tradisional Suku Sakai Bonai Ulakpatian berada di Desa Ulak Patian
9. Desa Wisata Sungai Bungo berada di Sungai Bungo, Sialang Jaya
10. Taman Bungo berada di Sungai Bungo

c) Destinasi Wisata Budaya

1. Luhak Rokan IV Koto dengan pusat wisata budaya Istana Raja Rokan sebagai Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rokan IV Koto serta makam raja-raja Kerajaan Rokan IV Koto berada di Desa Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto
2. Komplek Kerajaan Rantau Binuang Sakti, benteng serta surau Syekh Abdul Wahab Rokan beserta makam guru-guru dan Raja Rantau Binuang berada di Bunga Tanjung Kecamatan Kepenuhan
3. Surau Suluk Naqsabandiyah berada di Surau Gading Kecamatan Rambah Samo
4. Benteng Tujuh Lapis berada di Kecamatan Tambusai
5. Luhak Tambusai dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Tambusai berada di Dalu-Dalu Kecamatan Tambusai
6. Luhak Rambah dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Rambah berada di Nogori Kecamatan Rambah
7. Jembatan Batang Lubuh I dan II sebagai tempat Potang Balimau atau festival Sungai Rokan berada di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah



8. Rumah peninggalan Sultan Zainal Abidin berada di Kecamatan Tambusai Utara
9. Nogori Tingga berada di kecamatan Kepenuhan
10. Komplek Kerajaan dan Makam Raja-Raja Rambah berada di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir
11. Komplek Surau Suluk Ismailiyah berada di Desa Surau Gadiang dan Surau Teluk Aur berada di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo
12. Luhak Kepenuhan dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kepenuhan berada di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan
13. Luhak Kunto Darussalam dengan pusat wisata budaya Gedung Lembaga Kerapatan Adat Luhak Kunto Darussalam berada di Kecamatan Kunto Darussalam;
14. Kawasan budaya dan sejarah Lubuk Bendahara terdiri dari Makam Tengku Joman beserta kubunya, 5 (lima) rumah tua berarsitektur tradisional berada di kecamatan Rokan IV Koto
15. Rumah Harangan dan Makam Suri Andung Jati, termasuk di dalamnya Makam Sutan Laut Api berada di Kaiti III kecamatan Rambah
16. Istana Kerajaan Kunto Darussalam berada di kecamatan Kunto Darussalam
17. Komplek Istana dan Masjid Tuo Kunto bersama Makam Syekh Burhanuddin dan makam keramat berada di Kecamatan Kunto Darussalam
18. Prosesi Pemandian Mayat berada di kecamatan Pendalian IV Koto
19. Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Ujung Batu berada di Kecamatan Ujung Batu
20. Rumah berarsitektur tradisional berada di Jalan Melati Kecamatan Ujung Batu
21. Bangunan Lembaga Kerapatan Adat Tandun berada di Kecamatan Tandun;
22. Rumah Sopo Godang sebagai pusat kegiatan budaya Napitu Huta di Luhak Rambah berada di Kecamatan Bangun Purba;
23. Tugu Janji Raja berada di Janji Raja Kecamatan Bangun Purba;
24. Situs Kerajaan Bukit Langgak berada di Kecamatan Ujung Batu; dan
25. Istana Kersik Putih berada di Kersik Putih Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto.

d) Destinasi Wisata Minat Khusus :

1. Lompatan Harimau Kecamatan Rokan Iv Koto
2. Air Terjun Hujan Lobek Kecamatan Rokan Iv Koto
3. Air Terjun Kajatan Baru Kecamatan Rokan Iv Koto
4. Arung Jeram Sungai Rokan Tanjung Medan Kecamatan Rokan Iv Koto
5. Air Terjun Corocai Manih Kecamatan Rokan Iv Koto
6. Bukit Tungkuh Nasi Dan Paralayang Kecamatan Rokan Iv Koto
7. Goa Kelambu Kuning Kecamatan Rokan Iv Koto



8. Suligi Hill Kecamatan Kabun
9. Puncak Ranah Kecamatan Kabun
10. Bukit Sunset Kecamatan Rambah
11. Puncak Anabawa Kecamatan Rambah
12. Puncak Kabur Kecamatan Rokan Iv Koto
13. Bukit Villa Kecamatan Rokan Iv Koto
14. Puncak Batu Hayland Kecamatan Rokan Iv Koto

6.3.3 Penetapan Kawasan Strategis wilayah Kabupaten

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- ✓ kawasan industri Kepenuhan; dan
- ✓ kawasan industri Ujung Batu.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- ✓ kawasan Istana Raja Rokan;
- ✓ kawasan Benteng Tujuh Lapis;
- ✓ kawasan Makam Raja – Raja Rambah;
- ✓ kawasan Istana Kepenuhan; dan
- ✓ kawasan Istana dan Mesjid Tua Kunto Darussalam.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan kebun raya Pasir Pengaraian.

6.4 Integrasi KLHS Terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupaten Rokan Hulu

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Daerah, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Mengingat pentingnya KLHS RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusun RPJMD.

Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata Kelola kelembagaan yang terjadi saat ini sesuai hasil dari KLHS RPJMD.

Dari total 178 target yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat sebanyak 80 (44,49%) target yang terlaksana dan telah mencapai target nasional, sedangkan sebanyak 52 target (30,34%) belum mencapai target akan tetapi sudah dilakukan, target yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 7,30% atau sebanyak 13 target dan kategori yang belum/tidak ada yaitu sebanyak 31 target (17,42%). Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target dan indikator yang belum/tidak ada data menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam

pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan.

Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 isu strategis, yaitu:

1. Rendahnya akses pelayanan dasar, Perlindungan bencana sosial pada kelompok miskin/rentan, dan terbatasnya anggaran.
2. Tingginya konsumsi rokok (31,2%) dan alkohol serta penyalahgunaan narkoba.
3. Belum tersedianya sistem pelacakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak serta menurunnya *unmeet need* KB.
4. Terbatasnya Akses air minum, rendahnya partisipasi dan belum optimalnya instalasi lumpur tinja dan fasilitas kebersihan.
5. Rendahnya rasio energi terbarukan dan intensitas energi primer.
6. Rendahnya pertumbuhan PDB, daya saing pariwisata dan budaya serta infrastruktur perbankan.
7. Rendahnya anggaran riset dan terbatasnya perkembangan teknologi dan informasi.
8. Belum optimalnya implementasi hukum dan tatakelola, kebebasan sipil dan pelayanan penyandang difabilitas
9. Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada permukiman.
10. Belum optimalnya pengelolaan sampah daur ulang.
11. Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB).
12. Belum optimalnya kinerja kelembagaan penegakan hukum dan rendahnya kesetaraan gender.
13. Rendahnya kemitraan para pihak dalam layanan telekounikasi dan data statistik melalui website.

Dari 13 isu strategis, kemudian disaring lagi menjadi 4 isu utama antara lain;

1. Rendahnya akses pelayanan dasar, Perlindungan bencana sosial pada kelompok miskin/rentan, dan terbatasnya anggaran.
2. Terbatasnya Akses air minum, rendahnya partisipasi dan belum optimalnya instalasi lumpur tinja dan fasilitas kebersihan.
3. Belum optimalnya pengelolaan kebencanaan dan persampahan pada permukiman.
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah daur ulang.
- 5.

Skenario rekomendasi penyempurnaan Kebijakan Rencana Program merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Rokan Hulu, serta indikator kinerja daerah maupun indikator urusan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026. Perumusan skenario dalam bab sebelumnya memprakirakan kondisi lingkungan hidup dan juga target indikator TPB yang belum tercapai dan belum ada data (NA). Untuk indikator yang sudah mencapai target nasional (Perpres Nomor 59 Tahun 2017) rekomendasi terkait dengan rumusan isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021 – 2026 dapat mengacu pada rumusan isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 – 2021.

Tabel VI- 2
Rekomendasi Skenario dengan upaya tambahan dan Rekomendasi untuk
RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026

No.	TPB	Isu Prioritas	Upaya Tambahan
1	1	Rendahnya akses pelayanan dasar, Perlindungan bencana sosial pada kelompok miskin/rentan, dan terbatasnya anggaran	a. Peningkatan anggaran dalam program akses pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan. b. Peningkatan program perlindungan dan jaminan social menghadapi pandemic covid-19
2	5	Belum tersedianya sistem pelacakan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak serta menurunnya <i>unmeet need</i> KB.	a. Pengembangan sistem pelacakan kesetaraan gender. b. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana
3	8	Rendahnya pertumbuhan PDB, daya saing pariwisata dan budaya serta infrastruktur perbankan	a. Melakukan revitalisasi destinasi, pemasaran pariwisata dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal. b. Peningkatan PDB dengan pengembangan infrastruktur perbankan.
4	9	Rendahnya anggaran riset dan terbatasnya perkembangan teknologi dan informasi.	Meningkatkan anggaran riset untuk meningkatkan <i>e-goverment</i> dan <i>ciber city</i>
5	13	Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB).	Penyusunan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB).
6	16	Belum optimalnya kinerja kelembagaan penegakan hukum dan rendahnya kesetaraan gender	Penerapan program sadar hukum melalui Sosialisasi kepada parapihak (Korporasi, Masyarakat)
7	17	Rendahnya kemitraan para pihak serta layanan telekounikasi dan data statistik melalui website	Program pengembangan kemitraan multipihak dalam penyediaan data statistik melalui web

Program pembangunan daerah, disamping sebagai media untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dan SPM, juga menjadi media dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keterkaitan indikator kinerja tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap program pembangunan daerah Tahun 2022-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel VI- 3
Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Program
Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
2	1	1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
3	1	1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	1	1.3.1 (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	1	1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	1	1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
7	1	1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
8	1	1.4.1 (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Berencana
9	1	1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10	1	1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11	1	1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12	1	1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
13	1	1.4.1 (j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	1	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan non PLN.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
15	1	1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	1	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	1	1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
18	1	1.5.1 © Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	1	1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana).		
20	1	1.5.1 (e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	1	1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	1	1.5.3 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	1	1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	1	1.a.2 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	2	2.1.1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
26	2	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	2	2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.		
28	2	2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
29	2	2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
30	2	2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	2	2.2.2 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	2	2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
33	2	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
34	2	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
35	2	2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
36	3	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI).	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
37	3	3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
38	3	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
39	3	3.2.1 Angka Balita (AKBa) per 1000 Kematian kelahiran hidup.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
40	3	3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
41	3	3.2.2 (a) Angka Bayi (AKBa) per 1000 Kematian kelahiran hidup.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
42	3	3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
43	3	3.1.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
44	3	3.3.2 (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
45	3	3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
46	3	3.3.3 (a) Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		malaria)		
47	3	3.3.4 (a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 37)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
48	3	3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
49	3	3.3.5 (a) Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
50	3	3.3.5 (b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
51	3	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
52	3	3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
53	3	3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
54	3	3.4.2 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
55	3	3.4.2 (a) Jumlah kabupaten/kota (Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menye-lenggarakan upaya kesehatan jiwa.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
56	3	3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
57	3	3.5.2 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
58	3	3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga



No. Urut	No. TPB	Indikator Kinerja Pembangunan Berkelanjutan	Program Pembangunan Kab. Rokan Hulu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		Berencana
59	3	3.7.1 (a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
60	3	3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	3	3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
62	3	3.7.2 (a) Total Fertility Rate (TFR).	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
63	3	3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
64	3	3.8.2 (a) Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
65	3	3.8,2 (a) Cakupan Kesehatan (JKN) Jaminan Nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
66	3	3.9,3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
67	3	3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
68	3	3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026



6.5 Kebijakan Khusus Daerah

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk pembangunan daerah dan dalam rangka pembangunan antar daerah/wilayah, keikutsertaan stakeholder lainnya dan kerjasama antar daerah juga diperlukan dalam pengentasan permasalahan-permasalahan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan dimaksud, dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, untuk itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan lainnya dan kerjasama antar daerah.

a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha daerah yang dibentuk dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba/keuntungan. Kehadiran BUMD juga dimaksudkan untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan mampu berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah sesuai dengan tujuan pendiriannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya tanggal 24 bulan September tahun 2021. Sebagaimana pasal 5 Peraturan Daerah tersebut, BUMD ini dapat menyelenggarakan kegiatan usaha yang terdiri dari:

- a) Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan.
- b) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- c) Bidang Pertambangan dan Energi
- d) Bidang Jasa
- e) Bidang Pariwisata
- f) Bidang Ekonomi kreatif
- g) Bidang Jasa Konstruksi

Selain Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya, Kabupaten Rokan Hulu juga memiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu yang kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah



melalui aktifitas pelayanan dibidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Tujuan Pembentukan Perumda BPR Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu adalah untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mendirikan BPR dengan Prinsip tata kelola yang baik; dan
- e. Memperoleh laba atau keuntungan.

Dalam rangka menjalankan tujuannya BUMD memerlukan pembiayaan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dalam rangka peningkatan kapasitas BUMD dimaksud. Disamping itu, terkait penyertaan modal daerah yang telah ada diberikan pada BUMD dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendiriannya dan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kerjasama Pembangunan Daerah

Dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan di semua bidang, baik dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dalam daerah maupun dukungan pembangunan antar daerah/ wilayah termasuk perbatasan, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat melakukan kerjasama, baik antar pemerintah daerah/ pemerintah provinsi maupun dengan pihak swasta serta Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta/pihak ketiga adalah melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, TJSP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2015.

c. Kebijakan Khusus Daerah Lainnya

Dalam rangka mendukung kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 terhadap 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yakni: Memperkuat Ketahanan



Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, maka kebijakan strategis yang akan dilaksanakan daerah adalah kebijakan dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera:
 - KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan, berupa pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit dengan kegiatan Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat.
 - KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, berupa Pembangunan Desa Terpadu, Desa Digital (P3PD), Penetapan Batas Desa, Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa, Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional, Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD), Pendampingan pada 74.957 Desa, Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes, dan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.
2. Prioritas Pembangunan Nasional lainnya dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau yang harus didukung dengan kebijakan dan alokasi anggaran dalam rangka sinergitas pembangunan daerah.
3. Sebagai tindak lanjut visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satunya melalui peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga. Infrastruktur dan fasilitas olahraga merupakan prasyarat dasar bagi pengembangan prestasi olahraga di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bercita-cita untuk membangun Pusat Olahraga (*Sport Center*) yang dibiayai APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.

6.6 Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Rokan Hulu akan dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pada subbab ini akan disajikan program pembangunan daerah, yaitu program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program



pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 disajikan per misi yang selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasarannya masing-masing. Lebih detail mengenai program ini disajikan pada tabel dibawah.



Tabel VI- 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Rokan Hulu

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa						70.933.474.728		215.332.354.543		216.729.105.677		208.109.297.874		209.321.170.073		920.425.402.897			
Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan		IPM		69,38	69,47	70.933.474.728	69,67	215.332.354.543	69,86	216.729.105.677	69,93	208.109.297.874	69,98	209.321.170.073	69,98	920.425.402.897			
Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Derajat Pendidikan		a. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,9	37.090.633.408	12,93	162.934.558.433	12,96	166.669.097.248	12,98	161.015.219.767	13	161.978.146.138	13	689.687.654.994			
		b. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,39	8,36		8,4		8,45		8,5		8,6		8,6				
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	85	90	37.019.829.308	95	161.246.981.899	97	164.765.630.399	98	159.009.050.699	100	160.004.247.829	100	682.045.740.134	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	80	85		90		92,5		95		95		95		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	75	80		82,5		85		87,5		90		90		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	14,92	16		17		18		20		25		25		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	85	87		89		91		93		99		99		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99,78	107,63		108,98		108,79		109,41		109,12		109,12		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	85,92	98,41		99,2		99,98		100		100,79		100,79		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	98	99		99		99		99		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	90	92		94	924.245.000	96	924.245.000	98	924.245.000	100	924.245.000	100	3.696.980.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	449	459		469		479		489		499		499		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan	Persen	80	88	-	92	50.000.000	96	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
				Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1539	1559	1586		1622		1664		1718		1718		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	4011	4061	4111		4161		4311		4311		4311		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1852	1872	1892		1912		1942		1942		1942		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	227	242	259		278		229		252		252		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin	Lembaga		516	-	516	450.000.000	516	450.000.000	516	450.000.000	516	450.000.000	516	1.800.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	eksemplar	49.319	49.319	-	49.519	80.000.000	50.755	215.000.000	51.405	315.500.000	52.405	281.005.000	52.405	891.505.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan	Naskah			-	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	8	16.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	0,0002	0,0003	70.804.100	0,0003	122.731.534	0,0004	203.055.849	0,0004	204.686.408	0,0005	206.333.272	0,0005	807.611.163	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	persen	0,0016	0,0022	-	0,0025	56.600.000	0,0029	57.166.000	0,0037	57.737.660	0,0041	58.315.037	0,0041	229.818.697	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Harapan Hidup	tahun	70,06	70,55	33.842.841.320	71,01	52.397.796.110	71,56	50.060.008.429	72,03	47.094.078.107	72,42	47.343.023.937	72,42	230.737.747.903	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	84,1	100	30.228.658.800	100	45.706.823.867	100	42.481.378.480	100	39.144.505.805	100	38.400.979.338	100	195.962.346.290	Dinas Kesehatan
				Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	84,5	100		100		100		100		100		100	0	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84,4	100		100		100		100		100		100	0	Dinas Kesehatan
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	49,6	100		100		100		100		100		100	0	Dinas Kesehatan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	yang aman																
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	Persen	100	366.000.000	100	384.300.000	100	403.515.000	100	423.690.750	100	427.927.658	100	2.005.433.408	Dinas Kesehatan	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate)	Rasio	2,5	2,47	54.827.800	2,45	434.000.000	2,43	852.662.392	2,42	896.309.818	2,41	697.581.023	2,41	2.935.381.033	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentasr Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74,33	74,75	139.257.900	75,4	1.459.028.612	75,8	1.432.354.898	76	1.541.481.846	76,5	1.575.433.088	76,5	6.147.556.344	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)	Persen	55,73	55,95	38.170.320	56,05	686.578.836	56,7	723.429.624	56,4	587.471.250	57	654.013.830	57	2.689.663.860	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,03	1.548.396.600	0,04	1.621.250.000	0,049	1.619.812.500	0,053	1.684.963.750	0,061	1.748.686.563	0,061	8.223.109.413	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Persentase wirausaha muda	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	-	0	734.429.900	Emas 2, Perunggu 2, perak 10	1.336.059.795	Emas 3, Perunggu 5, perak 13	1.778.612.785	Emas 5, Perunggu 5, perak 20	2.027.000.000	Emas 5, Perunggu 20, perak 15	2.797.000.000	Emas 5, Perunggu 20, perak 15	8.673.102.480	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	Persen	50	50	200.000.000	50	210.000.000	50	180.500.000	50	171.525.000	50	418.101.250	50	1.180.126.250	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Misi 2: Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah							33.280.374.906		70.063.544.231		74.062.768.178		72.646.845.426		76.009.373.469		326.307.906.210		
Tujuan 2.1: Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi		Persen	1,51	2,06	32.770.574.906	2,5	64.880.684.231	3	68.053.437.741	3,5	66.750.103.098	4	69.748.666.767	4	302.203.466.743		
Sasaran 2.1.1: Meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkannya kesenjangan pendapatan		a. Nilai PDRB ADHB (dalam miliar)		Rupiah	36.083,71	37.449,48		38.385,71		39.537,28		40.921,09		42.557,93		42.557,93			



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		b. Indeks Gini	Poin	0,314	0,279		0,278		0,277		0,276		0,275		0,275				
		c. PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	Juta Rupiah	50,23	50,29	19.766.798.306	50,45	44.061.067.211	50,95	46.794.993.162	51,23	46.135.184.193	51,67	47.729.255.353	51,67	204.487.298.225			
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	IKM	0	2	257.374.000	8	3.550.000.000	9	3.785.000.000	9	4.070.350.000	9	3.681.053.500	37	15.343.777.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	0	0	-	2	150.000.000	2	151.500.000	2	153.015.000	2	154.545.150	8	609.060.150	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS	Dokumen	0	0	-	1	30.000.000	3	230.300.000	1	30.603.000	2	130.909.030	7	421.812.030	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton/Tahun	45.381,64	26.375,06	956.283.900	26.604,52	5.218.223.000	27.038,40	4.975.723.770	27.509,40	5.118.223.000	27.992,80	5.772.781.000	27.992,80	22.041.234.670	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)	Ekor	67.105	68.438	3.532.907.696	69.114	3.865.000.000	69.798	4.058.250.000	70.487	4.261.162.500	71.184	4.474.220.625	71.184	20.191.540.821	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Populasi Sapi dan Kerbau	Ekor	49.409	50.402		50.906		51.415		51.929		52.449		52.449	0	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Populasi Kambing dan Domba	Ekor	17.696	18.036		18.208		18.382		18.558		18.736		18.736	0	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)	Ton/Tahun	771.314	775.620		776.396		777.172		777.949		778.727		778.727	0	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	689.931	694.074		694.768		695.463		696.158		696.855		696.855	0	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Karet	Ton/Tahun	81.367	81.530		81.612		81.693		81.775		81.857		81.857	0	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Aren	Ton/Tahun	15,62	15,65		15,67		15,68		15,70		15,71		15,71	0	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	65	68	681.500.000	72	1.029.750.000	75	1.829.750.000	78	1.504.550.000	80	1.644.777.000	80	6.690.327.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi	Persen		13	6.236.479.800	13	11.197.750.000	13	12.788.887.500	13	11.545.644.375	15	11.655.426.594	67	53.424.188.269	Dinas Peternakan dan Perkebunan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		Peternakan dan Perkebunan																	
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,89	4,75	132.319.010	4,51	461.809.961	4,29	484.900.459	4,07	509.145.481	3,87	534.602.756	3,87	2.122.777.667	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persen	100	100	188.029.000	100	309.943.000	100	309.943.000	100	309.943.000	100	341.143.000	100	1.459.001.000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persen		-		100	472.500.000	100	496.125.000	100	520.931.250	100	546.977.813	100	2.036.534.063	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Persen		100	107.984.500	100	408.000.000	100	428.400.000	100	449.820.000	100	472.311.000	100	1.866.515.500	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina	Persen	35	40	1.578.668.600	45	2.108.273.000	50	1.908.273.000	55	2.008.273.000	60	2.277.644.000	60	9.881.131.600	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	Kelompok		0	-	8	400.625.000	8	420.656.250	9	453.876.563	9	476.570.391	34	1.751.728.204	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1943,69	1.963,13	400.000.000	1.982,76	473.100.000	2.002,59	433.000.000	2.022,61	434.000.000	2.042,84	485.100.000	2.042,84	2.225.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6958,36	7.305,73	369.921.900	7.671,01	1.925.000.000	8.054,57	1.937.000.000	8.457,31	2.069.000.000	8.880,16	2.191.000.000	8.880,16	8.491.921.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Capaian Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan	Persen	100	0	-	100	200.000.000	100	220.000.000	100	240.000.000	100	260.000.000	100	920.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan	Persen	13,5	5	87.256.000	5	542.000.000	5	501.000.000	5	502.000.000	5	556.000.000	25	2.188.256.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang memiliki izin	Persen		21,6	55.000.000	21,85	65.000.000	22,09	65.650.000	22,32	66.306.500	22,56	66.969.565	22,56	318.926.065	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi	-	60	160.000.000	62	180.000.000	65	181.800.000	67	183.618.000	70	185.454.180	324	890.872.180	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		KOPERASI																Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	15,43	15,43	90.000.000	16,46	90.900.000	17,47	91.809.000	18,45	92.727.090	19,3	93.654.361	19,3	459.090.451	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	116	58	406.000.000	58	410.200.000	58	414.302.000	58	418.445.020	58	422.629.470	290	2.071.576.490	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan	Koperasi		2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.020.000.000	2	2.040.200.000	2	2.060.602.000	10	10.120.802.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	60	5000	430.000.000	5000	434.300.000	5000	438.643.000	5000	443.029.430	5000	447.459.724	25000	2.193.432.154	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan	UMKM	60	50	500.000.000	50	500.000.000	60	505.000.000	60	510.050.000	60	515.150.500	280	2.530.200.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	5,5	6	-	6,5	125.000.000	7	126.250.000	7,5	127.512.500	8	128.787.625	8	507.550.125	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	Persen	35	43	1.400.000.000	50	5.750.000.000	57	5.807.500.000	67	5.865.575.000	80	5.924.230.750	80	24.747.305.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dokumen	-	10	72.259.000	3	175.000.000	3	176.750.000	3	178.517.500	3	180.302.675	22	782.829.175	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	PROGRAM PEGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Ekspor yang dikembangkan	Produk	-	-	-	2	225.000.000	3	227.250.000	4	229.522.500	5	231.817.725	14	913.590.225	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang	Persen	7,68	15,75	124.814.900	23,89	1.383.000.000	32,03	1.396.830.000	40,05	1.410.798.300	47,81	1.424.906.283	47,81	5.740.349.483	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		Berlaku																	
3	30	7	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGRI	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali	16	-	-	4	380.693.250	4	384.500.183	4	388.345.184	4	392.228.636	16	1.545.767.253	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Pertumbuhan PAD	Persen	10,33	11,86	1.194.623.000	12,77	2.375.000.000	13,75	2.398.750.000	14,84	2.422.737.500	15,98	2.444.327.917	15,98	10.835.438.417		
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan	Persen	10,33	11,86	1.194.623.000	12,77	2.375.000.000	13,75	2.398.750.000	14,84	2.422.737.500	15,98	2.444.327.917	15,98	10.835.438.417	Badan Pendapatan Daerah
2.1.2 Meningkatnya investasi daerah				Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Milliar Rupiah)	Rupiah	4817,27	4926,26	1.085.192.000	5000,15	2.149.115.000	5087,65	1.191.302.000	5189,41	1.538.432.200	5319,14	1.560.839.500	5319,14	7.524.880.700	
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Investasi	Persen	0	4,21	198.451.000	4,76	993.700.000	4,94	-	5,06	228.000.000	6,09	-	6,09	1.420.151.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	0	2	528.000.000	3	580.800.000	2	687.764.000	3	756.540.400	2	951.558.520	12	3.504.662.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	Rupiah	911.865.180 000	975.000.000 000	358.741.000	990.000.000 000	394.615.000	1.060.000.000 000	473.538.000	1.113.000.000 000	520.891.800	1.160.000.000 000	572.980.980	5.298.000. 000.000	2.320.766.780	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	0	0	-	1	180.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	4	279.300.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.3 Meningkatnya ketahanan pangan daerah				Indeks Ketahanan Pangan		53,24	58,03	207.006.600	63,25	1.256.960.000	68,95	1.262.880.000	75,15	1.077.300.000	81,92	1.079.700.000	81,92	4.883.846.600	
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola	Persen	25	100	30.146.900	100	140.200.000	100	223.000.000	100	30.800.000	100	31.200.000	100	455.346.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,9	83,2	176.859.700	84	672.500.000	84,8	674.500.000	85	676.500.000	85,8	678.500.000	85,8	2.878.859.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan	Persen	86,79	89,79	-	92,79	394.260.000	95	315.380.000	97	320.000.000	100	320.000.000	100	1.349.640.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	persen	3,25		20			20		20		20		80		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	Persen	100	100	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.1.4 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran				Persentase penduduk miskin	Persen	10,31	10,14	8.855.355.000	10,06	13.211.243.900	9,97	14.218.412.579	9,89	13.832.078.205	9,8	14.652.729.287	9,8	64.769.818.971	
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen		40	891.850.000	50	1.313.000.000	60	1.326.130.000	70	1.339.391.300	90	1.352.785.213	100	6.223.156.513	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)	Persen		100	180.344.000	100	1.512.350.000	100	1.173.973.500	100	1.185.713.235	100	1.250.091.239	100	5.302.471.974	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Persen		85	308.161.000	90	1.059.893.900	95	1.199.049.079	100	1.405.009.570	100	1.514.059.665	100	5.486.173.214	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	18,55		100	1.801.000.000	100	1.819.010.000	100	1.837.200.100	100	1.855.572.101	100	7.312.782.201	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	23,08	7,69	850.000.000	15,38	985.000.000	23,08	994.850.000	30,77	1.154.798.500	38,46	1.166.346.485	38,46	5.150.994.985	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa	Desa	0	1	345.000.000	1	400.000.000	2	404.000.000	2	408.040.000	2	396.929.829	8	1.953.969.829	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	1,55	4.710.000.000	3,1	4.335.000.000	8,4	5.478.350.000	9,95	4.513.084.000	11,5	5.108.214.840	11,5	24.144.648.840	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase BUMDes yang Berkembang	Persen	49,64	55,14		61,14		67,64		74,54		81,74		81,74	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	1.570.000.000	100	1.805.000.000	100	1.823.050.000	100	1.988.841.500	100	2.008.729.915	100	9.195.621.415	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase Posyandu Aktif	Persen	75,17	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase LPM Berprestasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Tingkat pengangguran terbuka		4,42	4,33	1.661.600.000	4,3	1.827.298.120	4,27	2.187.100.000	4,24	1.744.371.000	4,21	2.281.814.710	4,21	9.702.183.830	
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen tenaga kerja	Dokumen			-	1	117.298.120							1	117.298.120	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Orang		178	1.140.000.000	212	1.030.000.000	212	1.390.300.000	212	1.050.703.000	212	1.461.210.030	1026	6.072.213.030	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	807	50	175.000.000	115	250.000.000	115	362.500.000	115	255.025.000	115	377.575.250	510	1.420.100.250	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	34,69	34,29	346.600.000	35	430.000.000	35,56	434.300.000	36	438.643.000	36,36	443.029.430	36,36	2.092.572.430	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tujuan 2.2 Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata				PAD Sektor Pariwisata (dalam juta)	Rupiah	2.497,83	2.722,63	509.800.000	2.967,67	5.182.860.000	3.234,76	6.009.330.437	3.525,88	5.896.742.328	3.843,21	6.260.706.702	3.843,21	24.104.439.467	
Sasaran 2.2.1 Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah				Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	876.535	876.535	509.800.000	964.118	5.182.860.000	1.060.607	6.009.330.437	1.166.667	5.896.742.328	1.283.334	6.260.706.702	1.283.334	24.104.439.467	
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan di Kelola	Persen	13,95	6,45	507.800.000	11,82	4.352.860.000	15,05	5.503.130.437	16,12	4.758.514.120	18,27	5.199.470.332	18,27	20.321.774.889	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	876.535	876.535	2.000.000	964.118	620.000.000	1.060.607	373.700.000	1,166.667	629.937.000	1.283.334	636.236.370	1.283.334	2.261.873.370	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		PARIWISATA																	
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI	Dokumen			5	245.000.000	0	-	6	247.450.000	0	-	11	492.450.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang dikembangkan	orang			60	210.000.000	40	132.500.000	60	260.841.208	90	425.000.000	250	1.028.341.208	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Misi 3: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.						131.639.991.728		207.103.703.149		213.849.432.196		208.746.741.668		211.335.886.580		973.925.755.321			
Tujuan 3.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah		Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar (%)	Persen	25,06	41	106.632.775.700	43,77	179.022.242.900	71,5	184.659.833.885	72,1	178.238.563.219	72,7	179.829.495.252	72,7	828.382.910.956			
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya		Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	-34,56	10	57.074.685.400	10,5	104.509.700.000	11	109.889.800.000	11,5	103.230.000.000	12	103.525.000.000	12	478.229.185.400			
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	54,14	55,49	54.530.000.000	57,47	77.985.000.000	59,46	80.985.000.000	61,44	71.985.000.000	63,43	71.985.000.000	63,43	357.470.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	23	23,25	1.704.727.000	23,5	17.864.700.000	23,75	25.124.800.000	24	27.145.000.000	24,25	28.590.000.000	24,25	100.429.227.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	Unit	20	25	15.000.000	25	20.000.000	25	22.000.000	25	24.000.000	25	26.000.000	25	107.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	8928	9800	489.996.000	10000	5.920.000.000	10200	1.002.000.000	10400	1.054.000.000	10600	1.136.000.000	10600	9.601.996.000	Dinas Perhubungan
				Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	-34,56	10	254.962.400	10,5	1.090.000.000	11	966.000.000	11,5	1.072.000.000	12	1.178.000.000	12	4.560.962.400	Dinas Perhubungan
				Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,000893	0,001	80.000.000	0,002	80.000.000	0,002	85.000.000	0,003	90.000.000	0,003	95.000.000	0,003	430.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang	Persen	0	0	-	20	1.550.000.000	30	1.705.000.000	55	1.860.000.000	70	515.000.000	70	5.630.000.000	Dinas Perhubungan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
	PELAYARAN	dibangun																	
Sasaran 3.1.2 Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dan gedung negara		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	51,1	60,52	11.284.847.400	65,13	13.035.000.000	69,23	12.932.447.400	74	12.945.000.000	78,98	14.552.447.400	78,98	64.749.742.200			
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara	unit	16	1	1.532.447.400	1	500.000.000	1	1.532.447.400	1	250.000.000	1	1.282.447.400	5	5.097.342.200	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	51,1	60,52	9.752.400.000	65,13	12.535.000.000	69,23	11.400.000.000	74	12.695.000.000	78,98	13.270.000.000	78,98	59.652.400.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	66,33	76,2	20.932.500.000	80,9	25.558.000.000	86	23.717.750.000	91,3	24.901.025.000	96,32	26.312.627.500	96,32	121.421.902.500			
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	-	-	-	1	5.000.000.000	1	575.000.000	1	575.000.000	1	-	4	6.150.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	66,33	76,2	15.810.000.000	80,9	17.158.000.000	86	19.742.750.000	91,3	20.926.025.000	96,32	22.912.627.500	96,32	96.549.402.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.148.500.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	13.348.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persen	100	75	3.624.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	75	3.624.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Perentase jumlah penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persen		31	350.000.000	31	350.000.000	31	350.000.000	31	350.000.000	31	350.000.000	31	1.750.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Persen	0	100	559.000.000	100	603.000.000	100	647.000.000	100	691.000.000	100	735.000.000	100	3.235.000.000	



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Unit	0	7	559.000.000	9	603.000.000	11	647.000.000	13	691.000.000	15	735.000.000	55	3.235.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	15,23	15,69	1.720.000.000	15,93	760.000.000	16,17	770.000.000	16,41	860.000.000	16,66	870.000.000	16,66	4.980.000.000	
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	63,33	67,71	1.220.000.000	69,7	220.000.000	72,08	170.000.000	73,52	220.000.000	74,99	150.000.000	74,99	1.980.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	1,9	1,71	500.000.000	1,52	540.000.000	1,33	600.000.000	1,14	640.000.000	0,96	720.000.000	6,66	3.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	46,45	51	9.709.542.900	54	15.778.542.900	56	17.024.836.485	59	16.433.538.219	62	15.656.420.352	62	74.602.880.856	
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	46,45	51	9.709.542.900	54	15.278.542.900	56	16.519.836.485	59	16.433.538.219	62	15.141.269.852	62	73.082.730.356	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	32	4	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	3			1	500.000.000	1	505.000.000			1	515.150.500	3	1.520.150.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara				Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik	Persen	70	71,4	2.100.000.000	73,19	3.900.000.000	75,01	5.000.000.000	76,89	4.500.000.000	78,81	3.500.000.000	78,81	19.000.000.000	
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	70	71,4	2.100.000.000	73,19	3.900.000.000	75,01	5.000.000.000	76,89	4.500.000.000	78,81	3.500.000.000	78,81	19.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sasaran 3.1.4 Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air				Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	Persen	70	71	3.252.200.000	72,25	14.878.000.000	73,25	14.678.000.000	74	14.678.000.000	75	14.678.000.000	75	62.164.200.000	
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	68,95	71,04	2.502.200.000	73,49	5.278.000.000	75,77	5.078.000.000	75,85	5.078.000.000	78,59	5.078.000.000	78,59	23.014.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio Luas Kawasan	Persen	75,1	75,4	750.000.000	76	9.600.000.000	76,3	9.600.000.000	76,5	9.600.000.000	76,8	9.600.000.000	76,8	39.150.000.000	Dinas Pekerjaan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		Permukiman rawan banjir Yang terindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir																Umum dan Penataan Ruang	
Tujuan 3.2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	64,41	65,37	25.057.043.328	65,85	28.233.778.913	66,33	29.346.532.909	66,81	30.672.959.778	67,29	31.679.411.724	67,29	144.989.726.652			
Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Peningkatan Indeks Kualitas Air	Point	70	59,37		59,47		59,57		59,67		59,77		59,77				
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Point	90,21	87,34	25.057.043.328	87,44	28.233.778.913	87,54	29.346.532.909	87,64	30.672.959.778	87,74	31.679.411.724	87,74	144.989.726.652			
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	31,4	35,06		36,89		38,72		40,55		42,38		42,38				
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persen	100	100	362.554.098	100	380.681.803	100	399.715.893	100	419.701.688	100	440.686.772	100	2.003.340.254	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)	Dokumen	3	2	473.414.700	2	389.949.735	3	659.447.222	3	692.419.583	3	725.949.562	13	2.941.180.802	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Point	70	59,37	1.309.850.000	59,47	1.375.342.500	59,57	1.444.109.625	59,67	1.516.315.106	59,77	1.592.130.862	59,77	7.237.748.093	Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Point	90,21	87,34		87,44		87,54		87,64		87,74		87,74		Dinas Lingkungan Hidup
				Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	31,4	35,06		36,89		38,72		40,55		42,38		42,38		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati	Lokasi	1	3	4.087.735.883	2	4.292.122.677	2	4.506.728.811	2	4.732.065.252	2	4.968.668.514	11	22.587.321.137	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun)	Persen	100	100	125.000.000	100	131.250.000	100	137.812.500	100	144.703.125	100	151.938.281	100	690.703.906	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100.000.000	100	155.000.000	100	160.250.000	100	165.762.500	100	171.550.625	100	752.563.125	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Persen	100	100	67.000.000	100	70.350.000	100	73.867.500	100	77.560.875	100	81.438.919	100	370.217.294	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	-	ada	153.000.000	ada	160.650.000	ada	168.682.500	ada	177.116.625	ada	185.972.456	ada	845.421.581	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	Persen	100	100	49.827.300	100	152.318.665	100	156.934.598	100	164.781.328	100	173.020.395	100	696.882.286	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	18,83	18,87	5.240.708.127	18,95	5.502.743.533	19,03	6.825.255.710	19,11	6.066.774.746	19,18	7.469.857.233	19,18	31.105.339.349	Dinas Lingkungan Hidup
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,31	45,71	500.000.000	57,14	1.890.000.000	68,57	1.860.000.000	80	1.780.000.000	91	1.780.000.000	91	7.810.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	67,22	71,31	1.400.000.000	73,45	2.570.000.000	75,66	2.700.000.000	77,93	3.700.000.000	80,26	2.600.000.000	80,26	12.970.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	100	1.225.000.000	100	2.948.250.000	100	3.206.457.500	100	2.655.515.450	100	2.874.152.605	100	12.909.375.555	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100	-	Badan Penanggulangan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18	
																		Bencana Daerah
			Orang	7301	7100	-	7100	-	7100	-	7100	-	7100	-	36350	-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	Persen	100	100	6.925.623.100	0	-	0	-	0	-	0	-	100	6.925.623.100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persen	100	100	3.037.330.120	100	8.215.120.000	100	7.047.271.050	100	8.380.243.500	100	8.464.045.500	100	35.144.010.170		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persen	18,06	18,06		26,41		51,7		74,46		89,7		89,7			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persen	100	100		100		100		100		100		100			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Misi 4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda.						13.533.509.000		24.176.836.980		25.096.952.858		23.031.077.546		21.611.175.324		107.449.551.708		
Tujuan 4.1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis			Persen	100	100	12.234.884.500	100	15.444.756.980	100	17.367.320.866	100	14.784.133.838	100	13.413.727.575	100	73.244.823.759		
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya kerukunan umat beragama			Kali	0	0	3.722.714.900	0	5.454.419.580	0	6.000.943.776	0	4.537.843.214	0	3.033.349.389	0	22.749.270.859		
4	1	2	Persen	80	90		90		90		95		95		95			Sekretariat Daerah
8	1	2	Orang	100	160	605.471.900	160	675.000.000	160	681.750.000	160	688.567.500	160	695.453.175	800	3.346.242.575		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	Persen	100	100	1.407.243.000	100	2.647.967.300	100	3.169.446.973	100	1.629.081.443	100	50.000.000	100	8.903.738.716	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas dan LSM yang aktif	Ormas/L SM	100	25	440.000.000	25	646.000.000	25	649.440.000	25	704.884.400	25	757.433.244	125	3.197.757.644	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	370.000.000	100	407.000.000	100	411.070.000	100	415.180.700	100	419.332.507	100	2.022.583.207	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Persen	100	100	900.000.000	100	1.078.452.280	100	1.089.236.803	100	1.100.129.171	100	1.111.130.463	100	5.278.948.717	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, ekonomi, dan agama/SARA yang dapat di redam	Persen		100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 4.1.2 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat				Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada	Persen	100	100	8.512.169.600	100	9.990.337.400	100	11.366.377.090	100	10.246.290.624	100	10.380.378.186	100	50.495.552.900	
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	8.248.165.60 0	100	9.069.933.00 0	100	10.410.632.2 50	100	9.252.238.30 0	100	9.344.760.30 0	100	46.325.729.450	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan	Persen	90	90	264.004.000	90	290.404.400	95	319.444.840	95	351.389.324	95	386.528.256	95	1.611.770.820	Sekretariat Daerah
2	10	7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	Persen	0	0	-	90	230.000.000	90	232.300.000	95	234.623.000	95	236.969.230	95	933.892.230	Sekretariat Daerah
5	6	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	Persen	0	0	-	90	400.000.000	90	404.000.000	95	408.040.000	95	412.120.400	95	1.624.160.400	Sekretariat Daerah
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	52,08	56	119.104.500	56,5	2.802.000.000	57	2.385.620.000	57,5	2.409.476.200	58	2.433.570.962	58	10.149.771.662	
Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak				Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani		4	4	119.104.500	3	2.802.000.000	2	2.385.620.000	1	2.409.476.200	0	2.433.570.962	0	10.149.771.662	
				Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani		83	85,3		87		90,1	92,5	100	100					
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen		5	49.873.000	5,5	550.000.000	5,7	555.500.000	5,8	561.055.000	6	566.665.550	6	2.283.093.550	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio		0,007	-	0,005	238.000.000	0,004	240.380.000	0,003	242.783.800	0,002	245.211.638	0,002	966.375.438	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	Persen		100	-	100	905.000.000	100	914.050.000	100	923.190.500	100	932.422.405	100	3.674.662.905	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)	Dokumen			-	1	210.000.000		-		-			1	210.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen		70	18.052.000	80	479.000.000	85	367.640.000	90	371.316.400	95	375.029.564	95	1.611.037.964	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Persen		100	51.179.500	100	420.000.000	100	308.050.000	100	311.130.500	100	314.241.805	100	1.404.601.805	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 4.2 Meningkatkan Pemajuan				Persentase Pemajuan	Persen	7	7	1.179.520.000	8	5.930.080.000	9	5.344.011.992	10	5.837.467.508	11	5.763.876.787	11	24.054.956.287	



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18	
Budaya Daerah		Budaya Daerah																
Sasaran 4.2.1 Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terkelola, termanfaatkan, berkembang dan terbina	Persen	41	41	1.179.520.000	42	5.930.080.000	43	5.344.011.992	45	5.837.467.508	46	5.763.876.787	46	24.054.956.287		
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	Persen	2,93	66.720.000	36,68	2.661.000.000	36,82	2.256.000.000	36,96	2.463.895.000	37,1	2.614.783.950	37,1	10.062.398.950	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Grup	6	1.000.000.000	34	2.050.000.000	17	1.959.400.000	29	1.978.994.000	34	1.998.783.940	120	8.987.177.940	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah didokumentasikan	Dokumen	-	-	4	350.000.000	5	97.841.192	5	353.500.000	8	98.819.604	22	900.160.796	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	5,25	112.800.000	9,97	331.080.000	10,76	484.390.800	10,76	489.234.708	11,02	494.127.055	25,98	1.911.632.563	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	Persen	7,87	-	11,81	538.000.000	15,74	546.380.000	19,68	551.843.800	23,62	557.362.238	23,62	2.193.586.038	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan						371.960.281.145		358.281.109.102		362.800.234.585		367.658.418.366		371.113.480.675		1.831.813.523.872		
Tujuan 5.1 Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C (48,06)	CC	371.960.281.145	CC	358.281.109.102	B	362.800.234.585	B	367.658.418.366	BB	371.113.480.675	BB	1.831.813.523.872		
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi	Persen	34,48	100	89.489.809.455	100	105.691.049.459	100	107.124.718.794	100	108.445.067.784	100	109.537.853.113	100	520.288.498.604		
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	9.500.000	3	243.500.000	4	307.000.000	4	367.500.000	4	429.130.000	4	1.356.630.000	Inspektorat
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	Perangkat Daerah	10	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	Inspektorat
				Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas	Perangkat daerah /	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	Inspektorat



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		(ZI)	Unit Kerja Pelayanan																
		Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	0	5		9		10		11		11		46			Inspektorat	
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	82,6	100	6.713.720.400	100	11.089.503.589	100	11.627.380.603	100	11.742.804.960	100	11.859.341.086	100	53.032.750.638	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Rasio PNS Pendidikan Tinggi (PT)	Rasio	1,37	1,65		1,78		1,93		2,06		2,21		2,21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	3,72	3,79		3,94		4,02		4,1		4,17		4,17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
				Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Dilayani	Persen	0,53	0,52		0,51		0,51		0,45		0,45		0,45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	Persen	0,13	1,37	-	1,37	1.664.338.998	1,37	1.747.555.948	1,37	1.765.031.507	1,37	1.782.681.822	1,37	6.959.608.275	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal	Persen	0,11	2,97		2,97		2,97		2,97		2,97		2,97	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, rumah tangga, protokoler dan komunikasi pimpinan	Persen	80	80		85		85		90		90		90	59.686.484.676,09	Sekretariat Daerah
				Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	B (61,28)	B	12.349.216.6 35,00	B	11.669.179.7 88,50	B	11.778.538.8 66,39	BB	11.888.994.5 65,50	BB	12.000.554.8 20,70	BB	90	Sekretariat Daerah
				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C (48,06)	CC		CC		B		B		BB		BB	90	Sekretariat Daerah
				Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Indeks	88	88		88		88		88		90		90	90	Sekretariat Daerah



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor LPPD	Skor	Tinggi (2,97)	Sangat Tinggi (305)	11.610.092.102	Sangat Tinggi (305)	13.511.162.272	Sangat Tinggi (310)	13.838.192.805	Sangat Tinggi (315)	13.808.472.744	Sangat Tinggi (320)	14.438.056.592	Sangat Tinggi (320)	67.205.976.515	Sekretariat Daerah
				Indeks Kinerja Kecamatan	Indeks	Baik (84)	Baik (86)		Baik (87)		Baik (88)		Sangat Baik (90)		Sangat Baik (90,5)		Sangat Baik (90,5)		Sekretariat Daerah
				Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	34	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase Penetapan Produk Hukum	Persen	90	95		95		95		95		95		95		Sekretariat Daerah
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	Persen	-	93	2.110.071.600	93	2.798.651.060	93	2.826.637.570	94	2.854.903.946	95	2.883.452.985	95	13.473.717.161	Sekretariat Daerah
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	96	97		97		97		98		98		98		Sekretariat Daerah
				Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	14,32	15		16		17		18		19		19		Sekretariat Daerah
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	41,63	42		43		44		45		46		46		Sekretariat Daerah
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	2	2		3		3		3		4		4		Sekretariat Daerah
				Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif	Persen	80	80		85		85		90		90		90		Sekretariat Daerah
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	Persen	90	95	24.767.230.554	97,5	26.005.592.456	100	26.675.645.410	100	26.528.487.424	100	26.793.774.589	100	130.770.730.433	Sekretariat DPRD
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	80	85	22.495.240.628	87,5	27.243.406.000	90	25.941.669.000	92,5	26.228.417.000	95	25.587.618.250	95	127.496.350.878	Sekretariat DPRD
				Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	80	85	6.816.569.936	87,5	7.473.530.000	90	8.043.280.000	92,5	8.213.080.000	95	8.582.932.500	95	39.129.392.436	Sekretariat DPRD
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara	persen	33,33	40	30.000.000	53,33	71.600.000	53,33	96.600.000	60	77.367.000	60	83.040.670	60	358.607.670	Dinas Perpustakaan dan Arsip



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		baku																	
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	Arsip Statis	225	400	-	500	17.000.000	1000	17.000.000	1500	17.000.000	1800	17.000.000	5200	68.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Izin		2	-	3	1.000.000	5	5.000.000	5	5.500.000	7	6.000.000	22	17.500.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Ketersediaan	Ada	ada	-	ada	192.000.000	ada	211.200.000	ada	232.320.000	ada	254.552.000	ada	890.072.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terjadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	70	75	130.710.000	80	143.781.000	85	158.159.100	90	173.975.010	95	191.372.511	95	797.997.621	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	0	100	446.413.500	100	498.132.295	100	742.644.547	100	899.248.744	100	674.464.292	100	3.260.903.378	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase e-database yang dimanfaatkan pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	0	100	172.319.000	100	262.948.400	100	289.650.365	100	319.433.595	100	352.685.378	100	1.397.036.738	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi	Persen	0	100	102.194.800	100	173.730.800	100	196.372.500	100	225.830.000	100	632.324.200	100	1.330.452.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18	
			Persen	0	100	517.000.000	100	568.700.000	100	625.570.000	100	688.127.000	100	756.939.700	100	3.156.336.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persen	0	100	239.530.300	100	372.292.800	100	409.522.080	100	450.474.288	100	495.521.717	100	1.967.341.185	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persen	0	100	520.000.000	100	710.000.000	100	590.000.000	100	960.000.000	100	695.000.000	100	3.475.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persen	0	100	460.000.000	100	981.000.000	100	997.100.000	100	998.100.000	100	1.021.410.000	100	4.457.610.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Sasaran 5.1.2 Meningkatnya penerapan e-government		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,13	2,75	4.902.536.000	3	7.090.400.000	3,25	7.254.866.812	3,5	7.648.480.000	4	7.395.866.136	4	34.292.148.948		
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat	Cukup Informatif	Menuju Informatif	2.566.136.000	Menuju Informatif	4.170.800.000	Informatif	3.837.800.000	Informatif	4.687.800.000	Informatif	4.337.800.000	Informatif	19.600.336.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persen	31,25	50	160.000.000	68,75	176.000.000	87,5	193.600.000	93,75	212.960.000	100	234.256.000	100	976.816.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persen	100	100	120.000.000	100	132.000.000	100	145.200.000	100	159.720.000	100	175.692.000	100	732.612.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persen	24,14	34,48	2.056.400.000	51,72	2.551.600.000	86,2	3.033.266.812	100	2.368.000.000	100	2.603.118.136	100	12.612.384.948	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persen	50	50		60		70		80		90		90		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persen	0	30	-	50	-	80	-	90	-	100	-	100		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persen	17,24	20	-	30	60.000.000	40	45.000.000	50	220.000.000	60	45.000.000	60	370.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah																	
Sasaran 5.1.3 Meningkatnya pelayanan Publik yang handal		Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,75	80	6.288.884.815	80,5	9.022.634.154	81,5	9.174.707.235	82,5	9.815.669.420	83,5	9.884.623.252	83,5	44.186.518.876			
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan	Jumlah izin	2083	2187,15	223.233.000	2296,51	245.556.000	2411,33	297.967.200	2531,9	595.363.920	2658,49	654.900.312	12085,38	2.017.020.432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	Rupiah	452.441.461 .514	475.000.000.00 0	-	498.750.000.00 0	-	524.687.500. 000	-	552.650.000.0 00	-	588.500.000. 000	-	2.639.587.5 00.000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	79,75	80		80,5		81,5		82,5	-	83,5		83,5	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	Persen	92,62	97,92	338.422.500	98,47	950.000.000	99,13	890.000.000	99,52	1.060.000.000	100	1.080.000.000	100	4.318.422.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	19,62	25,25	-	30,72	-	36,42	-	49,71	-	61,44	-	61,44	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Rasio	0,93	0,95	0	0,98		0,98		1		1		1	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	92,89	95,61		96,11	525.000.000	97,1	515.000.000	97,59	545.000.000	98,09	420.000.000	98,09	2.005.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,4	0,4		0,41		0,42		0,42		0,55		0,55	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan SIAK	Ada/Tida k Ada	ada	ada	-	ada	190.000.000	ada	190.000.000	ada	190.000.000	ada	190.000.000	ada	760.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen		-		1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	450.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	Persen	60	100	17.128.000	100	42.984.400	100	43.414.244	100	43.848.386	100	44.286.870	100	191.661.900	Kecamatan Rambah



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
	PELAYANAN PUBLIK																		
			Persen	50	100	16.732.000	100	43.405.200	100	43.839.252	100	44.277.645	100	44.720.421	100	192.974.518	Kecamatan Tambusai		
			Persen	0	100	36.000.000	100	37.800.000	100	39.690.000	100	40.086.900	100	40.487.769	100	194.064.669	Kecamatan Rokan IV Koto		
			Persen	50	100	25.714.400	100	52.000.120	100	52.520.121	100	53.045.322	100	53.575.776	100	236.855.739	Kecamatan Kepenuhan		
			persen	100	100	19.763.500	100	20.751.675	100	21.789.259	100	22.878.722	100	24.022.658	100	109.205.814	Kecamatan Kunto Darussalam		
			Persen	40	100	50.000.000	100	70.000.000	100	70.700.000	100	71.400.000	100	72.100.000	100	334.200.000	Kecamatan Ujung Batu		
			Persen	0	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kabun		
			Persen	100	100	14.000.000	100	14.700.000	100	14.847.000	100	14.995.470	100	15.145.425	100	73.687.895	Kecamatan Tandun		
			Persen	100	100	12.934.000	100	13.580.700	100	13.716.507	100	13.853.672	100	13.992.209	100	68.077.088	Kecamatan Rambah Samo		
			Persen	100	100	11.237.700	100	11.799.585	100	11.917.581	100	12.036.757	100	12.157.124	100	59.148.747	Kecamatan Rambah Hilir		
			Persen	100	100	45.000.000	100	47.250.000	100	47.722.500	100	48.199.725	100	48.681.722	100	236.853.947	Kecamatan Bangun Purba		
			Persen	100	100	21.065.200	100	22.118.460	100	22.339.645	100	22.563.041	100	22.788.671	100	110.875.017	Kecamatan Tambusai Utara		
			Persen	100	100	14.000.000	100	14.700.000	100	14.847.000	100	14.995.470	100	15.745.244	100	74.287.714	Kecamatan Bonai Darussalam		
			Persen	100	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
			Persen	100	100	16.984.000	100	17.833.200	100	18.724.860	100	18.912.109	100	19.857.714	100	92.311.883	Kecamatan Pagaran Tajah Darussalam		
			Persen	100	100	10.580.250	100	11.109.263	100	11.220.355	100	11.332.559	100	11.445.884	100	55.688.311	Kecamatan Pendalian IV Koto		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Persen	50	100	662.722.200	100	725.858.310	100	732.816.893	100	739.845.062	100	746.943.513	100	3.608.185.978	Kecamatan Rambah
					Persen	55,87	100	362.783.030	100	537.211.213	100	589.189.265	100	596.181.158	100	603.653.702	100	2.689.018.368	Kecamatan Tambusai
					Persen	60	100	297.000.000	100	311.850.000	100	327.442.500	100	330.716.925	100	334.024.094	100	1.601.033.519	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	64,66	100	383.723.800	100	432.909.990	100	437.239.090	100	441.611.481	100	446.027.596	100	2.141.511.957	Kecamatan Kepenuhan
					persen	86,65	100	332.340.000	100	405.000.000	100	425.250.000	100	446.512.500	100	468.838.125	100	2.077.940.625	Kecamatan Kunto Darussalam



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18	
			Persen	70	100	625.588.000	100	750.705.600	100	758.212.656	100	765.719.712	100	773.226.768	100	3.673.452.736	Kecamatan Ujung Batu	
			Persen	100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	21.210.000	100	21.422.100	100	21.636.321	100	105.268.421	Kecamatan Kabun	
			Persen	60	100	33.000.000	100	60.000.000	100	60.600.000	100	61.206.000	100	61.818.060	100	276.624.060	Kecamatan Tandun	
			Persen	100	100	47.104.800	100	49.460.040	100	49.954.640	100	50.454.187	100	50.958.729	100	247.932.396	Kecamatan Rambah Samo	
			Persen	63.64	100	37.838.200	100	39.730.110	100	40.127.411	100	40.528.685	100	40.933.972	100	199.158.378	Kecamatan Rambah Hilir	
			Persen	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	15.907.500	100	16.066.575	100	16.227.241	100	78.951.316	Kecamatan Bangun Purba	
			Persen	100	100	31.596.000	100	33.175.800	100	33.507.558	100	33.842.634	100	34.181.060	100	166.303.052	Kecamatan Tambusai Utara	
			Persen	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	15.907.500	100	16.066.575	100	16.869.904	100	79.593.979	Kecamatan Bonai Darussalam	
			Persen	100	100	27.600.000	100	28.980.000	100	29.269.800	100	29.562.498	100	29.858.123	100	145.270.421	Kecamatan Kepenuhan Hulu	
			Persen	100	100	28.123.300	100	57.875.000	100	60.768.750	100	61.376.438	100	64.445.259	100	272.588.747	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
			Persen	100	100	33.914.000	100	42.392.500	100	42.816.425	100	43.244.589	100	43.677.035	100	206.044.549	Kecamatan Pendalian IV Koto	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	100	200.000.000	100	220.000.000	100	222.600.000	100	224.826.000	100	227.074.260	1.094.500.260	Kecamatan Rambah
					Persen	0	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	268.862.000	1.197.062.000	Kecamatan Tambusai
					Persen	0	100	80.691.935	100	82.709.233	100	86.844.695	100	87.713.142	100	88.590.273	426.549.278	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	50	100	200.000.000	100	220.000.000	100	222.200.000	100	224.422.000	100	226.666.220	1.093.288.220	Kecamatan Kepenuhan
					persen	0	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	1.105.126.250	Kecamatan Kunto Darussalam
					Persen	0	100	200.000.000	100	240.000.000	100	242.400.000	100	244.800.000	100	247.200.000	1.174.400.000	Kecamatan Ujung Batu
					Persen	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	108.181.605	526.342.105	Kecamatan Kabun
					Persen	0	100	100.000.000	100	102.500.000	100	103.525.000	100	104.560.250	100	105.605.853	516.191.103	Kecamatan Tandun
					Persen	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	500.000.000	Kecamatan Rambah Samo
					Persen	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	500.000.000	Kecamatan Rambah Hilir
					Persen	0	100	100.000.000	100	102.500.000	100	103.525.000	100	104.560.250	100	105.605.853	516.191.103	Kecamatan Bangun Purba



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
			Persen	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	108.181.605	100	526.342.105	Kecamatan Tambusai Utara		
			Persen	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	112.466.025	100	530.626.525	Kecamatan Bonai Darussalam		
			Persen	20	100	100.000.000	100	102.500.000	100	103.525.000	100	104.560.250	100	105.605.853	100	516.191.103	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
			Persen	20	100	100.000.000	100	102.500.000	100	107.625.000	100	108.701.250	100	114.136.313	100	532.962.563	Kecamatan Pagaran Tajah Darussalam		
			Persen	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	108.181.605	100	526.342.105	Kecamatan Pendalian IV Koto		
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Persen	0	100	26.248.000	100	27.560.400	100	27.836.004	100	28.114.364	100	28.395.508	100	138.154.276	Kecamatan Rambah
					Persen	80	100	22.890.100	100	25.179.110	100	25.430.901	100	25.685.210	100	25.942.062	100	125.127.383	Kecamatan Tambusai
					Persen	80	100	14.000.000	100	14.700.000	100	15.435.000	100	15.589.350	100	15.745.244	100	75.469.594	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	60	100	12.000.000	100	12.600.000	100	12.726.000	100	12.853.260	100	12.981.793	100	63.161.053	Kecamatan Kepenuhan
					persen	60	100	25.000.000	100	25.000.000	100	26.250.000	100	27.562.500	100	28.940.625	100	132.753.125	Kecamatan Kunto Darussalam
					Persen	80	100	15.000.000	100	15.375.000	100	15.528.750	100	15.682.500	100	15.836.250	100	77.422.500	Kecamatan Ujung Batu
					Persen	0	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kabun
					Persen	60	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	18.514.815	100	63.966.315	Kecamatan Tandun
					Persen	80	100	18.388.000	100	19.307.400	100	20.272.770	100	21.286.409	100	22.350.729	100	101.605.308	Kecamatan Rambah Samo
					Persen	80	100	7.947.900	100	8.345.295	100	8.428.748	100	8.850.185	100	9.292.695	100	42.864.823	Kecamatan Rambah Hilir
					Persen	60	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Bangun Purba
					Persen	80	100	14.900.000	100	15.645.000	100	15.801.450	100	15.959.465	100	16.119.059	100	78.424.974	Kecamatan Tambusai Utara
					Persen	100	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	11.246.603	100	53.062.653	Kecamatan Bonai Darussalam
					Persen	20	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Persen	20	100	20.959.200	100	22.007.160	100	22.557.339	100	22.782.912	100	23.352.485	100	111.659.096	Kecamatan Pagaran Tajah Darussalam



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
			Persen	60	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	15.454.515	100	60.906.015	Kecamatan Pendalian IV Koto		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu	Persen	0	100	-	100	125.000.000	100	126.850.000	100	128.118.500	100	129.399.685	100	509.368.185	Kecamatan Rambah
					Persen	08.33	100	-	100	40.000.000	100	40.400.000	100	40.804.000	100	20.606.020	100	141.810.020	Kecamatan Tambusai
					Persen	60	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.050.000	100	22.270.500	100	22.493.205	100	107.813.705	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	16,66	100	20.000.000	100	126.000.000	100	127.260.000	100	128.532.600	100	129.817.926	100	531.610.526	Kecamatan Kepenuhan
					persen	100	100	16.000.000	100	36.800.000	100	38.640.000	100	40.572.000	100	42.600.600	100	174.612.600	Kecamatan Kunto Darussalam
					Persen	40	100	20.000.000	100	24.000.000	100	24.240.000	100	24.480.000	100	24.720.000	100	117.440.000	Kecamatan Ujung Batu
					Persen	60	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.302.500	100	5.355.525	100	5.409.080	100	26.317.105	Kecamatan Kabun
					Persen	40	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	15.454.515	100	60.906.015	Kecamatan Tandung
					Persen	40	100	-	100	12.000.000	100	12.600.000	100	13.230.000	100	13.891.500	100	51.721.500	Kecamatan Rambah Samo
					Persen	20	100	7.752.000	100	8.139.600	100	8.220.996	100	8.632.046	100	9.063.648	100	41.808.290	Kecamatan Rambah Hilir
					Persen	80	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.302.500	100	5.355.525	100	5.409.080	100	26.317.105	Kecamatan Bangun Purba
					Persen	35	100	18.480.000	100	19.404.000	100	19.598.040	100	19.794.020	100	19.991.961	100	97.268.021	Kecamatan Tambusai Utara
					Persen	50	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.302.500	100	5.355.525	100	5.623.301	100	26.531.326	Kecamatan Bonai Darussalam
					Persen	0	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Persen	20	100	17.499.800	100	94.374.790	100	74.418.530	100	75.162.715	100	78.920.851	100	340.376.686	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
					Persen	80	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	15.454.515	100	60.906.015	Kecamatan Pendalian IV Koto
Sasaran 5.1.4 Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Prediat	WTP	WTP	271.279.050.875	WTP	236.477.025.489	WTP	239.245.941.744	WTP	241.749.201.162	WTP	244.295.138.174	WTP	1.233.046.357.444			



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	711.530.000	3	2.045.400.000	4	2.470.000.000	4	2.605.500.000	4	2.760.000.000	4	10.592.430.000	Inspektorat
				Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	72	80		85		85		85		90		90		Inspektorat
				Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	Persen	50	60		75		80		85		90		90		Inspektorat
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	269.594.316. 575	Tepat Waktu	233.409.760. 974	Tepat Waktu	235.743.858. 584	Tepat Waktu	238.101.297. 170	Tepat Waktu	240.482.310. 142	Tepat Waktu	1.217.331.543.445	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase realisasi dana mandatory dan Pembiayaan Daerah	Persen	99,98	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan terukur	Persen	40	50	973.204.300	55	1.021.864.515	60	1.032.083.160	65	1.042.403.992	70	1.052.828.032	70	5.122.383.999	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021



BAB VII.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif untuk perodesasi RPJMD ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2021-2026, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan di tiap perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya diadakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di setiap urusan wajib dan pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu terpilih;
- berbasis pada target pencapaian dalam indikator sasaran;
- pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
- penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026 berjumlah 139 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah tertuang dan dianalisis pada Bab III dokumen ini.

Kerangka pendanaan pembangunan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada tabel VII-1. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2022-2026 disajikan pada tabel VII-2.



Tabel VII- 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026

Kapabilitas Riil / Belanja	Proyeksi				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	1.401.922.075.215	1.442.283.785.907	1.480.354.920.132	1.507.138.928.415	1.518.401.081.567
BELANJA	1.659.933.667.330	1.705.934.483.269	1.748.416.205.463	1.778.182.123.631	1.792.510.412.519
BELANJA OPERASI	1.173.815.110.205	1.196.473.278.340	1.225.209.146.166	1.246.901.249.756	1.254.504.545.936
Belanja pegawai	648.056.931.223	661.018.069.847	674.238.431.244	684.352.007.713	687.773.767.752
Belanja Barang dan Jasa	471.215.907.745	480.640.225.899	495.059.432.676	504.960.621.330	507.990.385.058
Belanja bunga					
Belanja subsidi					
Belanja hibah	53.470.815.162	53.738.169.237	54.812.932.622	56.457.320.601	57.586.467.013
Belanja bantuan sosial	1.071.456.075	1.076.813.355	1.098.349.622	1.131.300.111	1.153.926.113
BELANJA MODAL	227.634.977.517	245.807.953.729,17	254.280.743.073,73	259.366.357.935,21	263.136.346.494,09
Belanja Modal Tanah	726.512.500	762.838.125	778.094.887	793.656.785	801.593.353
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.769.066.960	49.430.592.316	50.913.510.086	51.931.780.287	52.451.098.090
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	78.196.025.016	84.451.707.017	86.985.258.227	88.724.963.392	89.612.213.026
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	102.676.262.807	110.890.363.832	115.325.978.385	117.632.497.953	119.985.147.912
Belanja Asset tetap lainnya	267.110.234	272.452.438	277.901.487	283.459.516	286.294.112
Belanja Aset Lainnya					
BELANJA TIDAK TERDUGA	31.750.741.920	22.225.519.344	22.670.029.730	23.123.430.325	23.585.898.932
Belanja tidak terduga	31.750.741.920	22.225.519.344	22.670.029.730	23.123.430.325	23.585.898.932
Belanja TRANSFER	238.921.265.721	236.258.060.264	240.983.221.468	245.802.885.898	248.328.617.008
Belanja Bagi Hasil	6.849.820.005	6.507.329.005	6.637.475.584	6.770.225.096	6.905.629.598
Belanja Bantuan Keuangan	232.071.445.716	229.750.731.259	234.345.745.884	239.032.660.801	241.422.987.409

Sumber : BPKAD Tahun 2021 (Data diolah)



Tabel VII- 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					699.706.902.533		1.026.149.003.449		1.035.480.652.381		1.035.139.511.476		1.042.443.491.948		4.838.919.561.787			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				338.813.281.592		584.761.207.088		590.228.876.767		595.662.391.322		600.779.551.060		2.710.245.307.829			
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	100	301.042.009.284	100	421.162.627.189	100	423.092.169.918	100	434.246.359.523	100	438.328.826.921	100	2.017.871.992.835	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	50	55	751.443.000	60	927.353.000	70	946.831.450	80	982.736.100	100	1.022.231.310	100	4.630.594.860	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	85	90	37.019.829.308	95	161.246.981.899	97	164.765.630.399	98	159.009.050.699	100	160.004.247.829	100	682.045.740.134	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	80	85		90		92,5		95		95		95		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	75	80		82,5		85		87,5		90		90		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	14,92	16		17		18		20		25		25		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	85	87		89		91		93		99		99		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99,78	107,63		108,98		108,79		109,41		109,12		109,12		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	85,92	98,41		99,2		99,98		100		100,79		100,79		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	98	99		99		99		99		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	90	92		94	924.245.000	96	924.245.000	98	924.245.000	100	924.245.000	100	3.696.980.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	449	459		469		479		489		499		499		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan	Persen	80	88	-	92	50.000.000	96	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
				Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1539	1559		1586		1622		1664		1718		1718	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	4011	4061		4111		4161		4311		4311		4311	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1852	1872		1892		1912		1942		1942		1942	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	227	242		259		278		229		252		252	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin	Lembaga		516	-	516	450.000.000	516	450.000.000	516	450.000.000	516	450.000.000	516	1.800.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				180.462.122.154		202.227.573.122		204.249.848.853		206.292.347.343		208.355.270.817		1.001.587.162.289		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		100	149.334.363.354	100	155.576.694.255	100	160.777.212.623	100	166.107.020.900	100	168.903.062.634	100	800.698.353.766	Dinas Kesehatan
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen													Dinas Kesehatan	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	84,1	100	30.228.658.800	100	45.706.823.867	100	42.481.378.480	100	39.144.505.805	100	38.400.979.338	100	195.962.346.290	Dinas Kesehatan
				Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	84,5	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84,4	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	49,6	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia	Persen	60,4	100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		Pendidikan Dasar Sesuai Standar																	
		Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	14,5	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan		
		Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	1,8	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	9,9	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar	Persen	88,4	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC sesuai Standar	Persen	30,6	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Sesuai Standar	Persen	53,2	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Persen	18,4	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan		
		Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	49	60		70		80		90		100		100		Dinas Kesehatan		
		Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD	Persen	3	5		5		5		5		5		5		Dinas Kesehatan		
		Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD Puskesmas	Persen	3	5		5		5		5		5		5		Dinas Kesehatan		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi	Persen	80	85	235.900.000	90	247.695.000	95	260.079.750	100	273.083.738	100	275.814.575	100	1.292.573.063	Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman	Persen	100	297.200.000	100	312.060.000	100	327.663.000	100	344.046.150	100	347.486.612	100	1.628.455.762	Dinas Kesehatan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase drainase dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.148.500.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	13.348.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persen	100	75	3.624.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75	3.624.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	70	71,4	2.100.000.000	73,19	3.900.000.000	75,01	5.000.000.000	76,89	4.500.000.000	78,81	3.500.000.000	78,81	19.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	54,14	55,49	54.530.000.000	57,47	77.985.000.000	59,46	80.985.000.000	61,44	71.985.000.000	63,43	71.985.000.000	63,43	357.470.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,31	45,71	500.000.000	57,14	1.890.000.000	68,57	1.860.000.000	80	1.780.000.000	91	1.780.000.000	91	7.810.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	67,22	71,31	1.400.000.000	73,45	2.570.000.000	75,66	2.700.000.000	77,93	3.700.000.000	80,26	2.600.000.000	80,26	12.970.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					33.429.892.370		38.518.134.510		40.140.548.455		40.232.128.314		39.008.359.947		191.329.063.596	
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	85	100	19.119.096.470	100	19.122.146.470	100	19.158.958.970	100	19.130.837.095	100	19.165.337.095	100	95.696.376.100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	50	100	2.322.253.000	100	2.754.445.140	100	3.044.753.000	100	3.116.753.000	100	3.096.753.000	100	14.334.957.140	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Unit	0	7	559.000.000	9	603.000.000	11	647.000.000	13	691.000.000	15	735.000.000	55	3.235.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	63,33	67,71	1.220.000.000	69,7	220.000.000	72,08	170.000.000	73,52	220.000.000	74,99	150.000.000	74,99	1.980.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	1,9	1,71	500.000.000	1,52	540.000.000	1,33	600.000.000	1,14	640.000.000	0,96	720.000.000	6,66	3.000.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	46,45	51	9.709.542.900	53,55	15.278.542.900	56,23	16.519.836.485	59,04	16.433.538.219	62	15.141.269.852	62	73.082.730.356	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				28.209.123.522		31.468.942.581		31.783.046.959		32.101.437.874		32.421.935.449		155.984.486.385		
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	100	2.190.320.785	100	2.174.462.581	100	2.187.997.759	100	2.279.566.774	100	2.339.452.994	100	11.171.800.893	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persen	100	100	6.099.681.267	100	6.544.249.000	100	6.609.691.200	100	6.675.787.850	100	6.742.545.400	100	32.671.954.717	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen		172.324.530	100	680.000.000	100	465.700.000	100	984.236.000	100	764.390.300	100	3.066.650.830	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Persen	100	100	310.678.120	100	1.836.928.000	100	1.855.297.200	100	1.873.850.000	100	1.892.588.350	100	7.769.341.670	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	8.248.165.600	100	9.069.933.000	100	10.410.632.250	100	9.252.238.300	100	9.344.760.300	100	46.325.729.450	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis	Persen	100	100	1.225.000.000	100	2.948.250.000	100	3.206.457.500	100	2.655.515.450	100	2.874.152.605	100	12.909.375.555	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		prioritas																	
		Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	7301	7100	-	7100	-	7100	-	7100	-	7100	-	36350	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	Persen	100	100	6.925.623.100	-	-	-	-	-	-	100	6.925.623.100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	3.037.330.120	100	8.215.120.000	100	7.047.271.050	100	8.380.243.500	100	8.464.045.500	100	35.144.010.170	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	18,06	18,06		26,41		51,7		74,46		89,7		89,7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100		100		100		100		100		100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.168.569.500		10.158.779.850		10.704.767.649		10.811.815.325		10.919.933.477		47.763.865.801	
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen		100	3.505.401.500	100	3.981.441.650	100	4.329.399.827	100	4.073.271.773	100	4.154.404.491	100	20.043.919.241	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen			282.813.000		491.094.300		857.205.243		971.229.347		793.020.768		3.395.362.658	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen		40	891.850.000	50	1.313.000.000	60	1.326.130.000	70	1.339.391.300	90	1.352.785.213	90	6.223.156.513	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	Persen		100	180.344.000	100	1.512.350.000	100	1.173.973.500	100	1.185.713.235	100	1.250.091.239	100	5.302.471.974	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM)																	
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Persen		85	308.161.000	90	1.059.893.900	95	1.199.049.079	100	1.405.009.570	100	1.514.059.665	100	5.486.173.214	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	18,55	-	100	1.801.000.000	100	1.819.010.000	100	1.837.200.100	100	1.855.572.101	100	7.312.782.201	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				105.573.745.097		157.399.030.424		160.779.824.176		162.108.627.714		167.190.343.214		753.051.570.625		
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.661.600.000		1.827.298.120		2.187.100.000		1.744.371.000		2.281.814.710		9.702.183.830		
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen tenaga kerja	Dokumen		-	1	117.298.120							1	117.298.120	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Orang		178	1.140.000.000	212	1.030.000.000	212	1.390.300.000	212	1.050.703.000	212	1.461.210.030	1026	6.072.213.030	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	807	50	175.000.000	115	250.000.000	115	362.500.000	115	255.025.000	115	377.575.250	510	1.420.100.250	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	34,69	34,29	346.600.000	35	430.000.000	35,56	434.300.000	36	438.643.000	36,36	443.029.430	36,36	2.092.572.430	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				119.104.500		2.802.000.000		2.385.620.000		2.409.476.200		2.433.570.962		10.149.771.662		
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen		5	49.873.000	5,5	550.000.000	5,7	555.500.000	5,8	561.055.000	6	566.665.550	6	2.283.093.550	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																	
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio		0,007	-	0,005	238.000.000	0,004	240.380.000	0,003	242.783.800	0,002	245.211.638	0,002	966.375.438	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	Persen		100	-	100	905.000.000	100	914.050.000	100	923.190.500	100	932.422.405	100	3.674.662.905	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)	Dokumen		-	1	210.000.000	-		-		-		1	210.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen		70	18.052.000	80	479.000.000	85	367.640.000	90	371.316.400	95	375.029.564	95	1.611.037.964	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Persen		100	51.179.500	100	420.000.000	100	308.050.000	100	311.130.500	100	314.241.805	100	1.404.601.805	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.795.996.362		6.048.714.000		6.191.252.100		6.081.801.200		6.316.241.100		28.434.004.762		
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	3.374.652.122	100	4.417.394.000	100	4.605.794.100	100	4.677.901.200	100	4.830.861.100	100	21.906.602.522	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	100	214.337.640	100	374.360.000	100	322.578.000	100	326.600.000	100	405.680.000	100	1.643.555.640	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola	Persen	25	100	30.146.900	100	140.200.000	100	223.000.000	100	30.800.000	100	31.200.000	100	455.346.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,9	83,2	176.859.700	84	672.500.000	84,8	674.500.000	85	676.500.000	85,8	678.500.000	85,8	2.878.859.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan	Persen	86,79	89,79	0	92,79	394.260.000	95	315.380.000	97	320.000.000	100	320.000.000	100	1.349.640.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18
		Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	persen	3,25			20		20		20		20		80	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	9	5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persen	100	100	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				614.004.000		870.404.400		901.744.840		936.012.324		973.497.486		4.295.663.050	
2	10	4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persen	90	90	264.004.000	90	290.404.400	95	319.444.840	95	351.389.324	95	386.528.256	95	1.611.770.820	Sekretariat Daerah
2	10	5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persen		31	350.000.000	31	350.000.000	31	350.000.000	31	350.000.000	31	350.000.000	31	1.750.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	7 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persen	0	0	-	90	230.000.000	90	232.300.000	95	234.623.000	95	236.969.230	95	933.892.230	Sekretariat Daerah
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				17.142.723.170		18.099.433.628		20.258.240.310		20.130.868.576		22.195.524.754		97.826.790.438	
2	11	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100	4.126.922.372	100	4.296.228.491	100	4.472.999.915	100	4.658.609.911	100	4.853.500.406	100	22.408.261.095	Dinas Lingkungan Hidup
			Persen			1.409.264.788		1.573.478.027		1.652.151.929		1.734.759.525		1.821.497.501		8.191.151.770	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen	3	2	473.414.700	2	389.949.735	3	659.447.222	3	692.419.583	3	725.949.562	13	2.941.180.802	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Point	70	59,37	1.309.850.000	59,47	1.375.342.500	59,57	1.444.109.625	59,67	1.516.315.106	59,77	1.592.130.862	59,77	7.237.748.093	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Point	90,21	87,34		87,44		87,54		87,64		87,74		87,74		Dinas Lingkungan Hidup		
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	31,4	35,06		36,89		38,72		40,55		42,38		42,38		Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati	Lokasi	1	3	4.087.735.883	2	4.292.122.677	2	4.506.728.811	2	4.732.065.252	2	4.968.668.514	11	22.587.321.137	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun)	Persen	100	100	125.000.000	100	131.250.000	100	137.812.500	100	144.703.125	100	151.938.281	100	690.703.906	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100.000.000	100	155.000.000	100	160.250.000	100	165.762.500	100	171.550.625	100	752.563.125	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Persen	100	100	67.000.000	100	70.350.000	100	73.867.500	100	77.560.875	100	81.438.919	100	370.217.294	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	-	ada	153.000.000	ada	160.650.000	ada	168.682.500	ada	177.116.625	ada	185.972.456	ada	845.421.581	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	Persen	100	100	49.827.300	100	152.318.665	100	156.934.598	100	164.781.328	100	173.020.395	100	696.882.286	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	18,83	18,87	5.240.708.127	18,95	5.502.743.533	19,03	6.825.255.710	19,11	6.066.774.746	19,18	7.469.857.233	19,18	31.105.339.349	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					9.484.565.493		11.635.700.000		11.752.057.000		11.869.577.570		11.988.273.346		56.730.173.409	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18				
2	12	1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen																
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen																
					Persen	100	8.765.742.993	100	9.391.600.000	100	9.685.957.000	100	9.054.977.570	100	9.548.673.346	100	46.446.950.909	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
					Persen		380.400.000		479.100.000		371.100.000		899.600.000		619.600.000		2.749.800.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	Persen	92,62	97,92	338.422.500	98	950.000.000	99	890.000.000	100	1.060.000.000	100	1.080.000.000	100	4.318.422.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	19,62	25,25	0	30,72	0	36,42	0	49,71	0	61,44	0	61,44	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Rasio	0,93	0,95	0	0,98		0,98		1		1		1	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	92,89	95,61		96,11	525.000.000	97,1	515.000.000	97,59	545.000.000	98,09	420.000.000	98,09	2.005.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Rasio pasangan berakte nikah	Persen	0,4	0,4		0,41		0,42		0,42		0,55		0,55	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan SIAK	Ada/Tidak Ada	ada	ada	-	ada	190.000.000	ada	190.000.000	ada	190.000.000	ada	190.000.000	ada	760.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu	Dokumen				1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	450.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					14.363.576.000		15.441.253.600		15.595.666.136		15.751.622.797		15.909.139.025		77.061.257.558			
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen				100	6.888.576.000	100	7.916.253.600	100	6.895.416.136	100	7.686.858.797	100	7.228.917.956	100	36.616.022.489	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan	Persen	100			100				100				100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18			
				perengkapan kerja														Pemerintahan Desa		
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	23,08	7,69	850.000.000	15,38	985.000.000	23,08	994.850.000	30,77	1.154.798.500	38,46	1.166.346.485	38,46	5.150.994.985	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerja sama antar Desa	Desa	0	1	345.000.000	1	400.000.000	2	404.000.000	2	408.040.000	2	396.929.829	8	1.953.969.829	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	1,55	4.710.000.000	3,1	4.335.000.000	8,4	5.478.350.000	9,95	4.513.084.000	11,5	5.108.214.840	11,5	24.144.648.840	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
				Persentase BUMDes yang Berkembang	Persen	49,64	55,14		61,14		67,64		74,54		81,74		81,74			
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	1.570.000.000	100	1.805.000.000	100	1.823.050.000	100	1.988.841.500	100	2.008.729.915	100	9.195.621.415	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
				Persentase Posyandu Aktif	Persen	75,17	100		100		100		100		100		100			
				Persentase LPM Berprestasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.101.583.536		7.240.856.176		7.377.207.738		7.373.452.765		7.376.447.102		33.469.547.317		
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen			100	3.743.734.970	100	3.971.097.482	100	4.126.208.065	100	4.184.819.565	100	4.202.807.172	100	20.228.667.254	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja					125.592.546		690.151.246		242.552.759		163.370.286		246.611.989		1.468.278.826	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate)	Rasio	2,5	2,47	54.827.800	2,45	434.000.000	2,43	852.662.392	2,42	896.309.818	2,41	697.581.023	2,41	2.935.381.033	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentasr Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74,33	74,75	139.257.900	75,4	1.459.028.612	75,8	1.432.354.898	76	1.541.481.846	76,5	1.575.433.088	76,5	6.147.556.344	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA)	Persen	55,73	55,95	38.170.320	56,05	686.578.836	56,7	723.429.624	56,4	587.471.250	57	654.013.830	57	2.689.663.860	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14.739.849.936		46.661.215.148		47.127.815.148		47.599.015.148		48.075.015.148		204.202.910.528		
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	100	3.608.927.216	100	4.385.610.228	100	4.542.610.228	100	4.699.610.228	100	4.856.610.228	100	22.093.368.128	Dinas Perhubungan
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	100	8.586.237.320	100	15.750.904.920	100	13.680.404.920	100	11.654.404.920	100	11.678.404.920	100	61.350.357.000	Dinas Perhubungan
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	23	23,25	1.704.727.000	23,5	17.864.700.000	23,75	25.124.800.000	24	27.145.000.000	24,25	28.590.000.000	24,25	100.429.227.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola	Unit	20	25	15.000.000	25	20.000.000	25	22.000.000	25	24.000.000	25	26.000.000	25	107.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	8.928	9.800	489.996.000	10.000	5.920.000.000	10.200	1.002.000.000	10.400	1.054.000.000	10.600	1.136.000.000	10.600	9.601.996.000	Dinas Perhubungan
				Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	-34,56	10	254.962.400	10,5	1.090.000.000	11	966.000.000	11,5	1.072.000.000	12	1.178.000.000	12	4.560.962.400	Dinas Perhubungan
				Rasio Ijin Trayek	Indeks	0,0009	0,001	80.000.000	0,002	80.000.000	0,002	85.000.000	0,003	90.000.000	0,003	95.000.000	0,003	430.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun	Persen	-	-	-	20	1.550.000.000	30	1.705.000.000	55	1.860.000.000	70	515.000.000	70	5.630.000.000	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.446.836.659		12.425.835.179		12.576.133.531		12.538.828.866		12.855.049.555		57.842.683.790		
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	60	75	2.413.463.509	100	3.813.336.329	100	3.935.266.719	100	4.394.348.866	100	4.393.183.419	100	18.949.598.842	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	60	75	130.837.150	100	1.582.098.850	100	1.431.000.000	100	716.000.000	100	1.111.000.000	100	4.970.936.000	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Anugrah keterbukaan informasi publik	Predikat	Cukup Informatif	Menuju Informatif	2.566.136.000	Menuju Informatif	4.170.800.000	Informatif	3.837.800.000	Informatif	4.687.800.000	Informatif	4.337.800.000	Informatif	19.600.336.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persen	31,25	50	160.000.000	68,75	176.000.000	87,5	193.600.000	93,75	212.960.000	100	234.256.000	100	976.816.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase aduan masyarakat terlayani	Persen	100	100	120.000.000	100	132.000.000	100	145.200.000	100	159.720.000	100	175.692.000	100	732.612.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE	Persen	24,14	34,48	2.056.400.000	51,72	2.551.600.000	86,2	3.033.266.812	100	2.368.000.000	100	2.603.118.136	100	12.612.384.948	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	50	50		60		70		80		90		90		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Kabupaten Rokan Hulu	Persen	0	30	-	50	-	80	-	90	-	100	-	100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.357.974.000		9.349.203.400		9.442.695.434		9.537.122.388		9.632.493.612		46.319.488.834	
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen		100	3.236.974.000	100	3.406.553.400	100	3.440.618.934	100	3.475.025.123	100	3.509.775.375	100	17.068.946.832	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen		100	1.480.000.000	100	2.262.250.000	100	2.284.872.500	100	2.307.721.225	100	2.330.798.437	100	10.665.642.162	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang memiliki izin	Persen		21,6	55.000.000	21,85	65.000.000	22,09	65.650.000	22,32	66.306.500	22,56	66.969.565	22,56	318.926.065	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi	-	60	160.000.000	62	180.000.000	65	181.800.000	67	183.618.000	70	185.454.180	324	890.872.180	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		PEMERIKSAAN KOPERASI																Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	15,43	15,43	90.000.000	16,46	90.900.000	17,47	91.809.000	18,45	92.727.090	19,3	93.654.361	19,3	459.090.451	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	116	58	406.000.000	58	410.200.000	58	414.302.000	58	418.445.020	58	422.629.470	290	2.071.576.490	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan	Koperasi		2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.020.000.000	2	2.040.200.000	2	2.060.602.000	10	10.120.802.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	60	5000	430.000.000	5000	434.300.000	5000	438.643.000	5000	443.029.430	5000	447.459.724	25000	2.193.432.154	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan	UMKM	60	50	500.000.000	50	500.000.000	60	505.000.000	60	510.050.000	60	515.150.500	280	2.530.200.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8.996.852.000		11.422.922.000		11.536.995.870		11.651.640.242		11.767.670.809		55.376.080.921	
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	100	7.450.132.000	100	7.869.118.000	100	7.949.999.710	100	8.236.144.466	100	8.271.061.375	100	39.776.455.551	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	100	238.295.000	100	1.159.133.000	100	2.097.726.960	100	1.281.699.656	100	1.280.869.622	100	6.057.724.238	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	0	4,21	198.451.000	4,76	993.700.000	4,94	-	5,06	228.000.000	6,09	-	6,09	1.420.151.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	0	2	528.000.000	3	580.800.000	2	687.764.000	3	756.540.400	2	951.558.520	12	3.504.662.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin yang diterbitkan	Jumlah izin	2.083	2.187	223.233.000	2.297	245.556.000	2.411	297.967.200	2.532	595.363.920	2.658	654.900.312	12.085	2.017.020.432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah nilai investasi PMA	Rupiah	452.441.461.514	475.000.000	-	498.750.000	-	524.687.500	-	552.650.000	-	588.500.000	-	2.639.587	-	Dinas Penanaman Modal



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18			
				dan PMDN			0.000		000			0.000		0.000		500.000		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	79,75	80		80,5			81,5		82,5	0	83,5		83,5	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	Rupiah	911.865.180.000	975.000.000.000	358.741.000	990.000.000.000	394.615.000	1.060.000.000.000	473.538.000	1.113.000.000.000	520.891.800	1.160.000.000.000	572.980.980	5.298.000.000.000	2.320.766.780	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	1	180.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	4	279.300.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2.482.826.500		3.167.309.795			3.578.925.285			3.883.488.750		4.963.787.813		18.076.338.143	
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen		0,03	1.548.396.600	0,04	1.621.250.000	0,049	1.619.812.500	0,053	1.684.963.750	0,061	1.748.686.563	0,061	8.223.109.413	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
				Persentase wirausaha muda	Persen	80	80		80			80		80		80		80	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	-	0	734.429.900	Emas 2, Perunggu 2, perak 10	1.336.059.795	Emas 3, Perunggu 5, perak 13	1.778.612.785	Emas 5, Perunggu 5, perak 20	2.027.000.000	Emas 5, Perunggu 20, perak 15	2.797.000.000	Emas 5, Perunggu 20, perak 15	8.673.102.480	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan	Persen	50	50	200.000.000	50	210.000.000	50	180.500.000	50	171.525.000	50	418.101.250	50	1.180.126.250	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				0		192.000.000			211.200.000			232.320.000		254.552.000		890.072.000	
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Ketersediaan	Ada	ada	-	ada	192.000.000	ada	211.200.000	ada	232.320.000	ada	254.552.000	ada	890.072.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Persen	100	100		100			100		100		100		100	Dinas Komunikasi dan Informatika	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
				pembangunan daerah															
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		-		60.000.000		45.000.000		220.000.000		45.000.000		370.000.000			
2	21	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persen	17,24	20	-	30	60.000.000	40	45.000.000	50	220.000.000	60	45.000.000	60	370.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.179.520.000		5.930.080.000		5.344.011.992		5.837.467.508		5.763.876.787		24.054.956.287	
2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persen		2,93	66.720.000	36,68	2.661.000.000	36,82	2.256.000.000	36,96	2.463.895.000	37,1	2.614.783.950	37,1	10.062.398.950	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Grup		6	1.000.000.000	34	2.050.000.000	17	1.959.400.000	29	1.978.994.000	34	1.998.783.940	120	8.987.177.940	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dokumen		-	-	4	350.000.000	5	97.841.192	5	353.500.000	8	98.819.604	22	900.160.796	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persen	5,25	5,25	112.800.000	9,97	331.080.000	10,76	484.390.800	10,76	489.234.708	11,02	494.127.055	25,98	1.911.632.563	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persen	7,87	-	-	11,81	538.000.000	15,74	546.380.000	19,68	551.843.800	23,62	557.362.238	23,62	2.193.586.038	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				11.056.732.941		4.135.204.978		4.149.558.792		4.211.695.380		4.252.348.335		27.805.540.426	
2	23	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	persen	97,03	97,2	2.517.080.540	97,4	3.210.557.976	97,55	3.134.768.056	97,59	3.162.246.736	97,6	3.231.995.204	97,6	15.256.648.512	Dinas Perpustakaan dan Arsip



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	persen			8.468.848.301		661.315.468		535.568.887		467.524.576		470.699.822		10.603.957.054	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Koleksi buku yang tersedia dipustakaaan daerah	eksemplar	49.319	49.319	-	49.519	80.000.000	50.755	215.000.000	51.405	315.500.000	52.405	281.005.000	52.405	891.505.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang di lestarikan	Naskah			-	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	8	16.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0002	0,0003	70.804.100	0,0003	122.731.534	0,0004	203.055.849	0,0004	204.686.408	0,0005	206.333.272	0,0005	807.611.163	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	persen	0,0016	0,0022	-	0,0025	56.600.000	0,0029	57.166.000	0,0037	57.737.660	0,0041	58.315.037	0,0041	229.818.697	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					30.000.000		89.600.000		118.600.000		99.867.000		106.040.670		444.107.670	
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	33,33	40	30.000.000	53,33	71.600.000	53,33	96.600.000	60	77.367.000	60	83.040.670	60	358.607.670	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga	Arsip Statis	225	400	-	500	17.000.000	1.000	17.000.000	1.500	17.000.000	1.800	17.000.000	5.200	68.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Izin		2	-	3	1.000.000	5	5.000.000	5	5.500.000	7	6.000.000	22	17.500.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					44.622.193.208		84.660.444.981		84.468.577.161		84.507.040.542		85.702.009.111		383.960.265.003	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					857.177.900		3.140.100.000		3.091.000.000		3.245.000.000		3.492.100.000		13.825.377.900	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1943,69	1.963,13	400.000.000	1.982,76	473.100.000	2.002,59	433.000.000	2.022,61	434.000.000	2.042,84	485.100.000	2.042,84	2.225.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6958,36	7.305,73	369.921.900	7.671,01	1.925.000.000	8.054,57	1.937.000.000	8.457,31	2.069.000.000	8.880,16	2.191.000.000	8.880,16	8.491.921.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Capaian Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Persen	100	-	-	100	200.000.000	100	220.000.000	100	240.000.000	100	260.000.000	100	920.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		dan Perikanan yang dilakukan																	
3	25	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan	Persen	14	5	87.256.000	5	542.000.000	5	501.000.000	5	502.000.000	5	556.000.000	25	2.188.256.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.925.537.576		10.484.438.880		11.234.652.078		10.906.983.202		11.148.018.429		47.699.630.165	
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	3.221.246.276	100	3.905.753.250	100	4.068.312.371	100	4.130.925.512	100	4.303.168.772	100	19.629.406.181		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen		194.491.300		1.150.825.630		1.157.009.270		879.315.362		584.142.955		3.965.784.517		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan di Kelola	Persen	13,95	6,45	507.800.000	11,82	4.352.860.000	15,05	5.503.130.437	16,12	4.758.514.120	18,27	5.199.470.332	18,27	20.321.774.889	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	876.535	876.535	2.000.000	964.118	620.000.000	1.060.607	373.700.000	1.166.667	629.937.000	1.283.334	636.236.370	1.283.334	2.261.873.370	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI	Dokumen		-	-	5	245.000.000	0	-	6	247.450.000	0	-	11	492.450.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang dikembangkan	orang		-	-	60	210.000.000	40	132.500.000	60	260.841.208	90	425.000.000	250	1.028.341.208	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					33.164.735.749		51.633.344.660		51.287.610.755		51.816.311.233		52.135.818.547		240.037.820.944	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	100	12.562.129.458	100	13.367.188.000	100	13.447.246.000	100	13.779.246.000	100	13.949.717.000	100	67.105.526.458	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
					Persen	100	100	6.664.636.775	100	7.507.328.129	100	7.670.297.536	100	7.999.004.912	100	8.456.956.658	100	38.298.224.010	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				Persentase pemenuhan	Persen			321.885.800		1.722.500.000		1.522.500.000		1.512.500.000		489.000.000		5.568.385.800	Dinas Tanaman Pangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
																		dan Holtikultura	
			Persen	100	100	201.911.210	100	3.564.454.570	100	946.658.240	100	1.843.991.152	100	1.043.690.710	100	7.600.705.882	Dinas Peternakan dan Perkebunan		
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton/Tahun	45.381,64	26.375,06	956.283.900	26.604,52	5.218.223.000	27.038,40	4.975.723.770	27.509,40	5.118.223.000	27.992,80	5.772.781.000	27.992,80	22.041.234.670	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)	Ekor	67.105	68.438	3.532.907.696	69.114	3.865.000.000	69.798	4.058.250.000	70.487	4.261.162.500	71.184	4.474.220.625	71.184	20.191.540.821	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Populasi Sapi dan Kerbau	Ekor	49.409	50.402		50.906		51.415		51.929		52.449		52.449		Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Populasi Kambing dan Domba	Ekor	17.696	18.036		18.208		18.382		18.558		18.736		18.736		Dinas Peternakan dan Perkebunan
				Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)	Ton/Tahun	771.314	775.620		776.396		777.172		777.949		778.727		778.727		Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	689.931	694.074		694.768		695.463		696.158		696.855		696.855		Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Karet	Ton/Tahun	81.367	81.530		81.612		81.693		81.775		81.857		81.857		Dinas Peternakan dan Perkebunan
				- Aren	Ton/Tahun	16	16		16		16		16		16		16		Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	65	68	681.500.000	72	1.029.750.000	75	1.829.750.000	78	1.504.550.000	80	1.644.777.000	80	6.690.327.000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Persentase Terpenuhi Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan	Persen		13	6.236.479.800	13	11.197.750.000	13	12.788.887.500	13	11.545.644.375	15	11.655.426.594	67	53.424.188.269	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,89	4,75	132.319.010	4,51	461.809.961	4,29	484.900.459	4,07	509.145.481	3,87	534.602.756	3,87	2.122.777.667	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persen	100	100	188.029.000	100	309.943.000	100	309.943.000	100	309.943.000	100	341.143.000	100	1.459.001.000	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Persentase Pengendalian	Persen			-	100	472.500.000	100	496.125.000	100	520.931.250	100	546.977.813	100	2.036.534.063	Dinas Peternakan dan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
																		Perkebunan	
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Persen		100	107.984.500	100	408.000.000	100	428.400.000	100	449.820.000	100	472.311.000	100	1.866.515.500	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM petani dan kelembagaan pertanian	Persen	35	40	1.578.668.600	45	2.108.273.000	50	1.908.273.000	55	2.008.273.000	60	2.277.644.000	60	9.881.131.600	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	Kelompok		-	-	8	400.625.000	8	420.656.250	9	453.876.563	9	476.570.391	34	1.751.728.204	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				362.554.098		380.681.803		399.715.893		419.701.688		440.686.772		2.003.340.254		
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persen	100	100	362.554.098	100	380.681.803	100	399.715.893	100	419.701.688	100	440.686.772	100	2.003.340.254	Dinas Lingkungan Hidup
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.597.073.900		8.038.693.250		8.119.080.183		8.200.270.984		8.282.273.694		34.237.392.011		
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	5,5	6	-	6,5	125.000.000	7	126.250.000	7,5	127.512.500	8	128.787.625	8	507.550.125	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik	Persen	35	43	1.400.000.000	50	5.750.000.000	57	5.807.500.000	67	5.865.575.000	80	5.924.230.750	80	24.747.305.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dokumen		10	72.259.000	3	175.000.000	3	176.750.000	3	178.517.500	3	180.302.675	22	782.829.175	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	PROGRAM PEGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Ekspor yang dikembangkan	Produk		-	-	2	225.000.000	3	227.250.000	4	229.522.500	5	231.817.725	14	913.590.225	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	7,68	15,75	124.814.900	23,89	1.383.000.000	32,03	1.396.830.000	40,05	1.410.798.300	47,81	1.424.906.283	47,81	5.740.349.483	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGRI	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali	16	-	-	4	380.693.250	4	384.500.183	4	388.345.184	4	392.228.636	16	1.545.767.253	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18	
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4.715.113.985		10.483.186.388		9.831.518.252		9.918.773.435		9.687.961.169		44.636.553.229		
3	31	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	3.644.385.685	100	4.171.664.373	100	4.269.381.017	100	4.255.514.827	100	4.298.069.975	100	20.639.015.877	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen			813.354.300		2.581.522.015		1.395.337.235		1.409.290.608		1.423.383.514		7.622.887.672	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	IKM	-	2	257.374.000	8	3.550.000.000	9	3.785.000.000	9	4.070.350.000	9	3.681.053.500	37	15.343.777.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	-	-	-	2	150.000.000	2	151.500.000	2	153.015.000	2	154.545.150	8	609.060.150	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS	Dokumen	-	-	-	1	30.000.000	3	230.300.000	1	30.603.000	2	130.909.030	7	421.812.030	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							500.000.000		505.000.000				515.150.500		1.520.150.500	
3	32	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Wilayah Transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	3			1	500.000.000	1	505.000.000		-	1	515.150.500	3	1.520.150.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				117.613.431.401		137.077.589.537		134.706.551.473		139.955.185.160		138.424.656.292		667.777.413.862		
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				54.083.338.987		65.175.363.146		62.085.302.818		66.607.724.019		64.343.720.539		312.295.449.508		
4	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	80	85	28.013.958.650,00	85	37.196.370.025,00	85	33.641.933.576,25	90	38.055.352.763,01	90	35.021.656.141,64	90	171.929.271.155,90	Sekretariat Daerah
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	%	80	80		85		85		90		90		90		Sekretariat Daerah
			Persentase Tingkat kepuasan terhadap	Persen	80	80	12.349.216.635,00	85	11.669.179.788,50	85	11.778.538.866,39	90	11.888.994.565,50	90	12.000.554.820,70	90	59.686.484.676,09	Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		layanan tata usaha, rumah tangga, protokol dan komunikasi pimpinan																	
		Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	B (61,28)	B		B		B		BB		BB		BB			Sekretariat Daerah	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C (48,06)	CC		CC		B		B		BB		BB			Sekretariat Daerah	
		Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Indeks	88	88		88		88		88		90		90			Sekretariat Daerah	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Skor LPPD	Skor	Tinggi (2,97)	Sangat Tinggi (305)	11.610.092.102	Sangat Tinggi (305)	13.511.162.272	Sangat Tinggi (310)	13.838.192.805	Sangat Tinggi (315)	13.808.472.744	Sangat Tinggi (320)	14.438.056.592	Sangat Tinggi (320)	67.205.976.515	Sekretariat Daerah
			Indeks Kinerja Kecamatan	Indeks	Baik (84)	Baik (86)		Baik (87)		Baik (88)		Sangat Baik (90)		Sangat Baik (90,5)		Sangat Baik (90,5)			Sekretariat Daerah
			Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	34	100		100		100		100		100		100			Sekretariat Daerah
			Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	80	90		90		90		95		95		95			Sekretariat Daerah
			Persentase Penetapan Produk Hukum	Persen	90	95		95		95		95		95		95			Sekretariat Daerah
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	Persen	-	93	2.110.071.600	93	2.798.651.060	93	2.826.637.570	94	2.854.903.946	95	2.883.452.985	95	13.473.717.161	Sekretariat Daerah
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	96	97		97		97		98		98		98			Sekretariat Daerah
			Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	100		100		100		100		100		100			Sekretariat Daerah
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	14,32	15		16		17		18		19		19			Sekretariat Daerah
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	41,63	42		43		44		45		46		46			Sekretariat Daerah
			Indeks Tata Kelola	Indeks	2	2		3		3		3		4		4			Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		Pengadaan Barang dan Jasa																	
		Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif	Persen	80	80		85		85		90		90		90			Sekretariat Daerah	
4	2	SEKRETARIAT DPRD				63.530.092.414		71.902.226.391		72.621.248.655		73.347.461.141		74.080.935.753		355.481.964.354			
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD	Persen	80	85	8.112.756.180	88	9.054.365.935	90	9.054.152.245	93	9.410.449.717	95	9.209.032.164	95	44.840.756.241	Sekretariat DPRD
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	75	80	1.338.295.116	83	2.125.332.000	85	2.906.502.000	88	2.967.027.000	90	3.907.578.250	90	13.244.734.366	Sekretariat DPRD
				Persentase layanan keuangan yang difasilitasi	Persen	90	95	24.767.230.554	98	26.005.592.456	100	26.675.645.410	100	26.528.487.424	100	26.793.774.589	100	130.770.730.433	Sekretariat DPRD
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	80	85	22.495.240.628	87,5	27.243.406.000	90	25.941.669.000	92,5	26.228.417.000	95	25.587.618.250	95	127.496.350.878	Sekretariat DPRD
				Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	80	85	6.816.569.936	87,5	7.473.530.000	90	8.043.280.000	92,5	8.213.080.000	95	8.582.932.500	95	39.129.392.436	Sekretariat DPRD
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				344.875.350.302		328.960.467.316		332.033.246.440		334.526.899.246		339.239.912.202		1.679.635.875.506			
5	1	PERENCANAAN				10.100.497.602		12.831.540.539		12.250.293.536		12.287.329.529		13.452.952.799		60.922.614.005			
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	0	100	7.726.995.724		8.631.337.538		8.686.007.968		8.805.315.343		9.551.330.139	100	43.400.986.712	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen			765.334.278		2.180.617.706		1.142.366.976		724.925.549		798.314.862		5.611.559.371	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terdapat dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	70	75	130.710.000	80	143.781.000	85	158.159.100	90	173.975.010	95	191.372.511	95	797.997.621	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	-	100	446.413.500	100	498.132.295	100	742.644.547	100	899.248.744	100	674.464.292	100	3.260.903.378	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase e-database yang dimanfaatkan	Persen	-	100	172.319.000	100	262.948.400	100	289.650.365	100	319.433.595	100	352.685.378	100	1.397.036.738	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan Daerah																	
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi	Persen	-	100	102.194.800	100	173.730.800	100	196.372.500	100	225.830.000	100	632.324.200	100	1.330.452.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	-	100	517.000.000	100	568.700.000	100	625.570.000	100	688.127.000	100	756.939.700	100	3.156.336.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	-	100	239.530.300	100	372.292.800	100	409.522.080	100	450.474.288	100	495.521.717	100	1.967.341.185	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	2		KEUANGAN					322.701.383.983		294.002.689.191		297.556.262.943		299.435.483.855		803.016.103.685		1.516.711.923.657	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	100	100	16.068.705.472	100	17.913.181.719	100	18.352.363.536	100	17.732.309.272	100	19.331.319.323	100	89.397.879.322	Badan Pendapatan Daerah
					Persen	100	100	33.660.810.795	100	34.937.359.453	100	35.763.779.908	100	36.440.075.989	100	37.391.741.739	100	178.193.767.884	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen			507.395.241		2.485.130.000		2.249.931.300		3.076.008.513		1.687.718.598		10.006.183.652	Badan Pendapatan Daerah
					Persen	100	100	702.328.600	100	1.860.392.530	100	2.015.496.455	100	620.651.419	100	625.857.934		5.824.726.938	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	269.594.316.575	Tepat Waktu	233.409.760.974	Tepat Waktu	235.743.858.584	Tepat Waktu	238.101.297.170	Tepat Waktu	240.482.310.142	Tepat Waktu	1.217.331.543.445	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase realisasi dana mandatory dan Pembiayaan Daerah	Persen	99,98	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	0	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	40	50	973.204.300	55	1.021.864.515	60	1.032.083.160	65	1.042.403.992	70	1.052.828.032	70	5.122.383.999	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		BARANG MILIK DAERAH	(BMD) yang tertib dan teratur															Daerah	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan	Persen	10,33	11,86	1.194.623.000	12,77	2.375.000.000	13,75	2.398.750.000	14,84	2.422.737.500	15,98	2.444.327.917	15,98	10.835.438.417	Badan Pendapatan Daerah
5	3		KEPEGAWAIAN					11.093.468.717		18.370.898.588		18.488.034.013		18.672.914.355		18.859.643.496		85.484.959.169	
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	83,69	100	3.937.834.617	100	4.687.385.614	100	4.745.703.931	100	4.794.010.421	100	4.842.842.447	100	23.007.777.030	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	92,38	100	441.913.700	100	2.594.009.385	100	2.114.949.479	100	2.136.098.974	100	2.157.459.963	100	9.444.431.501	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	82,6	100	6.713.720.400	100	11.089.503.589	100	11.627.380.603	100	11.742.804.960	100	11.859.341.086	100	53.032.750.638	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Rasio PNS Pendidikan Tinggi (PT)	Rasio	1,37	1,65		1,78		1,93		2,06		2,21		2,21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	3,72	3,79		3,94		4,02		4,1		4,17		4,17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
				Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Dilayani	Persen	0,53	0,52		0,51		0,51		0,45		0,45		0,45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					0		1.664.338.998		1.747.555.948		1.765.031.507		1.782.681.822		6.959.608.275	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	Persen	0,13	1,37	-	1,37	1.664.338.998	1,37	1.747.555.948	1,37	1.765.031.507	1,37	1.782.681.822	1,37	6.959.608.275	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal	Persen	0,11	2,97		2,97		2,97		2,97		2,97		2,97	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					980.000.000		1.691.000.000		1.587.100.000		1.958.100.000		1.716.410.000		7.932.610.000	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persen	-	100	520.000.000	100	710.000.000	100	590.000.000	100	960.000.000	100	695.000.000	100	3.475.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di	Persen	-	100	460.000.000	100	981.000.000	100	997.100.000	100	998.100.000	100	1.021.410.000	100	4.457.610.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18	
				daerah														
5	6	PENGLOLAAN PERBATASAN				-		400.000.000		404.000.000		408.040.000		412.120.400		1.624.160.400		
5	6	2 PROGRAM PENGLOLAAN PERBATASAN	Persentase penyelesaian tapal batas daerah	Persen	-	-	90	400.000.000	90	404.000.000	95	408.040.000	95	412.120.400	95	1.624.160.400	Sekretariat Daerah	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				11.765.910.134		16.051.822.500		16.212.288.395		16.372.581.239		16.537.340.511		76.939.942.779		
6	1	INSPEKTORAT DAERAH				11.765.910.134		16.051.822.500		16.212.288.395		16.372.581.239		16.537.340.511		76.939.942.779		
6	1	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	85	100	11.044.880.134	100	13.762.922.500	100	13.435.288.395	100	13.399.581.239	100	13.348.210.511	100	64.990.882.779	Inspektorat
			Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	100	100		100		100		100		100		100	Inspektorat	
6	1	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	711.530.000	3	2.045.400.000	4	2.470.000.000	4	2.605.500.000	4	2.760.000.000	4	10.592.430.000	Inspektorat
			Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	72	80		85		85		85		90		90	Inspektorat	
			Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	Persen	50	60		75		80		85		90		90	Inspektorat	
6	1	3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	9.500.000	3	243.500.000	4	307.000.000	4	367.500.000	4	429.130.000	4	1.356.630.000	Inspektorat
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	Perangkat Daerah	10	29		29		29		29		29		29	Inspektorat	
			Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	0	69		69		69		69		69		69	Inspektorat	
			Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	0	5		9		10		11		11		46	Inspektorat	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)																	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				42.238.752.952		49.889.577.441		49.821.394.457		51.106.143.042		50.873.994.612		243.929.862.504			
7	1	KECAMATAN				42.238.752.952		49.889.577.441		49.821.394.457		51.106.143.042		50.873.994.612		243.929.862.504			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	85,6	100	3.014.877.452	100	3.261.871.325	100	3.295.646.278	100	3.330.758.981	100	3.366.222.810	100	16.269.376.846	Kecamatan Rambah
					Persen	65,83	100	3.210.489.655	100	3.280.396.833	100	3.282.457.321	100	3.346.981.583	100	3.385.501.399	100	16.505.826.791	Kecamatan Tambusai
					Persen	95	100	2.628.626.100	100	2.635.701.100	100	2.673.331.581	100	2.711.202.157	100	2.721.340.343	100	13.370.201.281	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	100	100	3.120.320.431	100	3.357.586.453	100	3.391.162.317	100	3.425.073.940	100	3.478.381.780	100	16.772.524.921	Kecamatan Kepenuhan
					persen	90	100	2.857.409.899	100	3.150.280.394	100	3.307.794.414	100	3.473.184.134	100	2.757.335.867	100	15.546.004.708	Kecamatan Kunto Darussalam
					Persen	81,33	100	4.076.857.602	100	4.232.709.322	100	4.243.524.415	100	4.285.539.508	100	4.327.554.602	100	21.166.185.449	Kecamatan Ujung Batu
					Persen	62	100	2.200.512.000	100	2.312.717.600	100	2.335.944.776	100	2.359.304.224	100	2.393.098.266	100	11.601.576.866	Kecamatan Kabun
					Persen	79,50.00	100	1.679.231.012	100	1.810.250.513	100	1.812.961.152	100	1.886.640.763	100	1.915.072.714	100	9.104.156.154	Kecamatan Tandun
					Persen	78,8	100	1.847.832.634	100	1.963.184.266	100	1.981.544.710	100	1.999.975.189	100	2.018.470.724	100	9.811.007.523	Kecamatan Rambah Samo
					Persen	72,47.00	100	1.820.036.780	100	1.971.508.619	100	2.017.723.705	100	2.038.234.952	100	2.058.918.013	100	9.906.422.069	Kecamatan Rambah Hilir
					Persen	76,67	100	1.542.353.250	100	1.624.970.913	100	1.641.220.622	100	1.657.632.828	100	1.674.209.156	100	8.140.386.769	Kecamatan Bangun Purba
					Persen	76,66	100	1.899.899.150	100	2.042.644.108	100	2.063.070.549	100	2.063.299.254	100	2.083.932.247	100	10.152.845.308	Kecamatan Tambusai Utara
					Persen	58	100	1.125.341.750	100	1.181.088.838	100	1.192.999.726	100	1.204.929.723	100	1.219.450.722	100	5.923.810.759	Kecamatan Bonai Darussalam
					Persen	100	100	1.548.600.000	100	1.631.530.000	100	1.668.045.300	100	1.663.725.753	100	1.675.613.011	100	8.187.514.064	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Persen	80	100	1.760.363.557	100	1.914.881.735	100	1.895.324.961	100	1.914.728.211	100	1.988.676.207	100	9.473.974.671	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
					Persen	76,67	100	1.293.660.376	100	1.376.143.050	100	1.376.724.480	100	1.385.441.725	100	1.399.296.142	100	6.831.265.773	Kecamatan Pendalian IV Koto
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	71,25	100	40.893.650	100	540.938.333	100	544.491.476	100	548.080.151	100	551.704.712	100	2.226.108.322	Kecamatan Rambah
					Persen	50	100	28.732.900	100	280.757.810	100	247.902.928	100	195.802.269	100	211.805.579	100	965.001.486	Kecamatan Tambusai



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
			Persen	64	100	99.500.000	100	230.848.603	100	203.161.250	100	180.957.903	100	185.988.732	100	900.456.488	Kecamatan Rokan IV Koto		
			Persen	55	100	13.573.500	100	515.592.175	100	520.748.097	100	525.955.578	100	512.158.033	100	2.088.027.383	Kecamatan Kepenuhan		
			persen			43.332.400		1.160.499.020		478.273.971		802.187.670		842.297.053		3.326.590.114	Kecamatan Kunto Darussalam		
			Persen	35	100	160.937.160	100	306.124.592	100	313.535.838	100	636.093.789	100	601.788.339	100	2.018.479.718	Kecamatan Ujung Batu		
			Persen	37,5	100	53.500.000	100	57.675.000	100	58.151.750	100	58.733.268	100	49.119.600	100	277.179.618	Kecamatan Kabun		
			Persen	58.25.00	100	57.940.925	100	168.079.098	100	185.151.755	100	131.453.273	100	120.141.962	100	662.767.013	Kecamatan Tandun		
			Persen	58	100	43.919.250	100	273.592.773	100	277.347.803	100	281.191.338	100	285.126.812	100	1.161.177.976	Kecamatan Rambah Samo		
			Persen	34.17.00	100	37.143.300	100	319.000.465	100	296.690.470	100	299.657.374	100	302.653.948	100	1.255.145.557	Kecamatan Rambah Hilir		
			Persen	50.62	100	41.000.000	100	43.050.000	100	43.480.500	100	43.915.305	100	44.354.458	100	215.800.263	Kecamatan Bangun Purba		
			Persen	43.50.00	100	54.249.704	100	692.962.189	100	699.891.811	100	727.292.729	100	734.565.656	100	2.908.962.089	Kecamatan Tambusai Utara		
			Persen	45.83	100	39.500.000	100	48.225.000	100	48.607.250	100	49.093.323	100	40.942.989	100	226.368.562	Kecamatan Bonai Darussalam		
			Persen	100	100	59.000.000	100	96.950.000	100	77.719.500	100	99.496.695	100	105.241.662	100	438.407.857	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
			Persen	95	100	63.503.900	100	178.679.095	100	232.613.050	100	234.489.180	100	171.125.514	100	880.410.739	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		
			Persen	50.62	100	48.385.300	100	217.060.065	100	232.410.666	100	239.784.772	100	242.182.620	100	979.823.423	Kecamatan Pendalian IV Koto		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	Persen	60	100	17.128.000	100	42.984.400	100	43.414.244	100	43.848.386	100	44.286.870	100	191.661.900	Kecamatan Rambah
					Persen	50	100	16.732.000	100	43.405.200	100	43.839.252	100	44.277.645	100	44.720.421	100	192.974.518	Kecamatan Tambusai
					Persen	-	100	36.000.000	100	37.800.000	100	39.690.000	100	40.086.900	100	40.487.769	100	194.064.669	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	50	100	25.714.400	100	52.000.120	100	52.520.121	100	53.045.322	100	53.575.776	100	236.855.739	Kecamatan Kepenuhan
					persen	100	100	19.763.500	100	20.751.675	100	21.789.259	100	22.878.722	100	24.022.658	100	109.205.814	Kecamatan Kunto Darussalam
					Persen	40	100	50.000.000	100	70.000.000	100	70.700.000	100	71.400.000	100	72.100.000	100	334.200.000	Kecamatan Ujung Batu
					Persen	-	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kabun
					Persen	100	100	14.000.000	100	14.700.000	100	14.847.000	100	14.995.470	100	15.145.425	100	73.687.895	Kecamatan Tandun
					Persen	100	100	12.934.000	100	13.580.700	100	13.716.507	100	13.853.672	100	13.992.209	100	68.077.088	Kecamatan Rambah Samo
					Persen	100	100	11.237.700	100	11.799.585	100	11.917.581	100	12.036.757	100	12.157.124	100	59.148.747	Kecamatan Rambah Hilir
					Persen	100	100	45.000.000	100	47.250.000	100	47.722.500	100	48.199.725	100	48.681.722	100	236.853.947	Kecamatan Bangun Purba
					Persen	100	100	21.065.200	100	22.118.460	100	22.339.645	100	22.563.041	100	22.788.671	100	110.875.017	Kecamatan Tambusai Utara
					Persen	100	100	14.000.000	100	14.700.000	100	14.847.000	100	14.995.470	100	15.745.244	100	74.287.714	Kecamatan Bonai Darussalam
					Persen	100	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kepenuhan Hulu



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
			Persen	100	100	16.984.000	100	17.833.200	100	18.724.860	100	18.912.109	100	19.857.714	100	92.311.883	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		
			Persen	100	100	10.580.250	100	11.109.263	100	11.220.355	100	11.332.559	100	11.445.884	100	55.688.311	Kecamatan Pendalian IV Koto		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	Persen	50	100	662.722.200	100	725.858.310	100	732.816.893	100	739.845.062	100	746.943.513	100	3.608.185.978	Kecamatan Rambah
					Persen	55,87	100	362.783.030	100	537.211.213	100	589.189.265	100	596.181.158	100	603.653.702	100	2.689.018.368	Kecamatan Tambusai
					Persen	60	100	297.000.000	100	311.850.000	100	327.442.500	100	330.716.925	100	334.024.094	100	1.601.033.519	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	64,66	100	383.723.800	100	432.909.990	100	437.239.090	100	441.611.481	100	446.027.596	100	2.141.511.957	Kecamatan Kepenuhan
					persen	86,65	100	332.340.000	100	405.000.000	100	425.250.000	100	446.512.500	100	468.838.125	100	2.077.940.625	Kecamatan Kunto Darussalam
					Persen	70	100	625.588.000	100	750.705.600	100	758.212.656	100	765.719.712	100	773.226.768	100	3.673.452.736	Kecamatan Ujung Batu
					Persen	100	100	20.000.000	100	21.000.000	100	21.210.000	100	21.422.100	100	21.636.321	100	105.268.421	Kecamatan Kabun
					Persen	60	100	33.000.000	100	60.000.000	100	60.600.000	100	61.206.000	100	61.818.060	100	276.624.060	Kecamatan Tandun
					Persen	100	100	47.104.800	100	49.460.040	100	49.954.640	100	50.454.187	100	50.958.729	100	247.932.396	Kecamatan Rambah Samo
					Persen	63,64	100	37.838.200	100	39.730.110	100	40.127.411	100	40.528.685	100	40.933.972	100	199.158.378	Kecamatan Rambah Hilir
					Persen	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	15.907.500	100	16.066.575	100	16.227.241	100	78.951.316	Kecamatan Bangun Purba
					Persen	100	100	31.596.000	100	33.175.800	100	33.507.558	100	33.842.634	100	34.181.060	100	166.303.052	Kecamatan Tambusai Utara
					Persen	100	100	15.000.000	100	15.750.000	100	15.907.500	100	16.066.575	100	16.869.904	100	79.593.979	Kecamatan Bonai Darussalam
					Persen	100	100	27.600.000	100	28.980.000	100	29.269.800	100	29.562.498	100	29.858.123	100	145.270.421	Kecamatan Kepenuhan Hulu
					Persen	100	100	28.123.300	100	57.875.000	100	60.768.750	100	61.376.438	100	64.445.259	100	272.588.747	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
					Persen	100	100	33.914.000	100	42.392.500	100	42.816.425	100	43.244.589	100	43.677.035	100	206.044.549	Kecamatan Pendalian IV Koto
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen	-	100	200.000.000	100	220.000.000	100	222.600.000	100	224.826.000	100	227.074.260	100	1.094.500.260	Kecamatan Rambah
					Persen	-	100	200.000.000	100	220.000.000	100	242.000.000	100	266.200.000	100	268.862.000	100	1.197.062.000	Kecamatan Tambusai
					Persen	-	100	80.691.935	100	82.709.233	100	86.844.695	100	87.713.142	100	88.590.273	100	426.549.278	Kecamatan Rokan IV Koto
					Persen	50	100	200.000.000	100	220.000.000	100	222.200.000	100	224.422.000	100	226.666.220	100	1.093.288.220	Kecamatan Kepenuhan
					persen	-	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	100	1.105.126.250	Kecamatan Kunto Darussalam
					Persen	-	100	200.000.000	100	240.000.000	100	242.400.000	100	244.800.000	100	247.200.000	100	1.174.400.000	Kecamatan Ujung Batu
					Persen	-	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	108.181.605	100	526.342.105	Kecamatan Kabun
					Persen	-	100	100.000.000	100	102.500.000	100	103.525.000	100	104.560.250	100	105.605.853	100	516.191.103	Kecamatan Tandun
					Persen	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Kecamatan Rambah Samo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
			Persen	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Kecamatan Rambah Hilir		
			Persen	-	100	100.000.000	100	102.500.000	100	103.525.000	100	104.560.250	100	105.605.853	100	516.191.103	Kecamatan Bangun Purba		
			Persen	-	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	108.181.605	100	526.342.105	Kecamatan Tambusai Utara		
			Persen	-	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	112.466.025	100	530.626.525	Kecamatan Bonai Darussalam		
			Persen	20	100	100.000.000	100	102.500.000	100	103.525.000	100	104.560.250	100	105.605.853	100	516.191.103	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
			Persen	20	100	100.000.000	100	102.500.000	100	107.625.000	100	108.701.250	100	114.136.313	100	532.962.563	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		
			Persen	-	100	100.000.000	100	105.000.000	100	106.050.000	100	107.110.500	100	108.181.605	100	526.342.105	Kecamatan Pendalian IV Koto		
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Persen	-	100	26.248.000	100	27.560.400	100	27.836.004	100	28.114.364	100	28.395.508	100	138.154.276	Kecamatan Rambah
			Persen	80	100	22.890.100	100	25.179.110	100	25.430.901	100	25.685.210	100	25.942.062	100	125.127.383	Kecamatan Tambusai		
			Persen	80	100	14.000.000	100	14.700.000	100	15.435.000	100	15.589.350	100	15.745.244	100	75.469.594	Kecamatan Rokan IV Koto		
			Persen	60	100	12.000.000	100	12.600.000	100	12.726.000	100	12.853.260	100	12.981.793	100	63.161.053	Kecamatan Kepenuhan		
			persen	60	100	25.000.000	100	25.000.000	100	26.250.000	100	27.562.500	100	28.940.625	100	132.753.125	Kecamatan Kunto Darussalam		
			Persen	80	100	15.000.000	100	15.375.000	100	15.528.750	100	15.682.500	100	15.836.250	100	77.422.500	Kecamatan Ujung Batu		
			Persen	-	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kabun		
			Persen	60	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	18.514.815	100	63.966.315	Kecamatan Tandun		
			Persen	80	100	18.388.000	100	19.307.400	100	20.272.770	100	21.286.409	100	22.350.729	100	101.605.308	Kecamatan Rambah Samo		
			Persen	80	100	7.947.900	100	8.345.295	100	8.428.748	100	8.850.185	100	9.292.695	100	42.864.823	Kecamatan Rambah Hilir		
			Persen	60	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Bangun Purba		
			Persen	80	100	14.900.000	100	15.645.000	100	15.801.450	100	15.959.465	100	16.119.059	100	78.424.974	Kecamatan Tambusai Utara		
			Persen	100	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	11.246.603	100	53.062.653	Kecamatan Bonai Darussalam		
			Persen	20	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211	Kecamatan Kepenuhan Hulu		
			Persen	20	100	20.959.200	100	22.007.160	100	22.557.339	100	22.782.912	100	23.352.485	100	111.659.096	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam		
			Persen	60	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	15.454.515	100	60.906.015	Kecamatan Pendalian IV Koto		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase desa menetapkan Peraturan	Persen	-	100	-	100	125.000.000	100	126.850.000	100	128.118.500	100	129.399.685	100	509.368.185	Kecamatan Rambah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Desa tepat waktu																	
			Persen	08.33	100	-	100	40.000.000	100	40.400.000	100	40.804.000	100	20.606.020	100	141.810.020		Kecamatan Tambusai	
			Persen	60	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.050.000	100	22.270.500	100	22.493.205	100	107.813.705		Kecamatan Rokan IV Koto	
			Persen	17	100	20.000.000	100	126.000.000	100	127.260.000	100	128.532.600	100	129.817.926	100	531.610.526		Kecamatan Kepenuhan	
			persen	100	100	16.000.000	100	36.800.000	100	38.640.000	100	40.572.000	100	42.600.600	100	174.612.600		Kecamatan Kunto Darussalam	
			Persen	40	100	20.000.000	100	24.000.000	100	24.240.000	100	24.480.000	100	24.720.000	100	117.440.000		Kecamatan Ujung Batu	
			Persen	60	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.302.500	100	5.355.525	100	5.409.080	100	26.317.105		Kecamatan Kabun	
			Persen	40	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	15.454.515	100	60.906.015		Kecamatan Tandun	
			Persen	40	100	-	100	12.000.000	100	12.600.000	100	13.230.000	100	13.891.500	100	51.721.500		Kecamatan Rambah Samo	
			Persen	20	100	7.752.000	100	8.139.600	100	8.220.996	100	8.632.046	100	9.063.648	100	41.808.290		Kecamatan Rambah Hilir	
			Persen	80	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.302.500	100	5.355.525	100	5.409.080	100	26.317.105		Kecamatan Bangun Purba	
			Persen	35	100	18.480.000	100	19.404.000	100	19.598.040	100	19.794.020	100	19.991.961	100	97.268.021		Kecamatan Tambusai Utara	
			Persen	50	100	5.000.000	100	5.250.000	100	5.302.500	100	5.355.525	100	5.623.301	100	26.531.326		Kecamatan Bonai Darussalam	
			Persen	-	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.605.000	100	10.711.050	100	10.818.161	100	52.634.211		Kecamatan Kepenuhan Hulu	
			Persen	20	100	17.499.800	100	94.374.790	100	74.418.530	100	75.162.715	100	78.920.851	100	340.376.686		Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
			Persen	80	100	-	100	15.000.000	100	15.150.000	100	15.301.500	100	15.454.515	100	60.906.015		Kecamatan Pendalian IV Koto	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					6.775.904.600		10.998.528.250		9.784.053.533		7.883.781.068		6.712.746.622		42.155.014.073			
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.775.904.600		10.998.528.250		9.784.053.533		7.883.781.068		6.712.746.622		42.155.014.073			
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persen	88	100	2.875.078.700	100	3.133.186.570	100	3.145.228.436	100	3.146.077.720	100	3.177.538.497	100	15.477.109.923	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja	Persen	65	100	178.111.000	100	2.410.922.100	100	637.881.321	100	199.860.134	100	501.858.736	100	3.928.633.291	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI, PANCASILA DAN KARAKTER	Jumlah masyarakat yang memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter	Orang	100	160	605.471.900	160	675.000.000	160	681.750.000	160	688.567.500	160	695.453.175	800	3.346.242.575	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18		
		KEBANGSAAN	bangsa																
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	Persen	100	100	1.407.243.000	100	2.647.967.300	100	3.169.446.973	100	1.629.081.443	100	50.000.000	100	8.903.738.716	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas dan LSM yang aktif	Ormas/LSM	100	25	440.000.000	25	646.000.000	25	649.440.000	25	704.884.400	25	757.433.244	125	3.197.757.644	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	370.000.000	100	407.000.000	100	411.070.000	100	415.180.700	100	419.332.507	100	2.022.583.207	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Persen	100	100	900.000.000	100	1.078.452.280	100	1.089.236.803	100	1.100.129.171	100	1.111.130.463	100	5.278.948.717	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, ekonomi, dan agama/SARA yang dapat di redam	Persen		100		100		100			100		100			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021



BAB VIII.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan Indikator Kinerja Utama didasarkan pada pencapaian *outcomes* dan *impact* yang dirumuskan berdasarkan target pencapaian Visi dan Misi yang diseralaskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan IKU akan menjadi alat ukur tingkat pencapaian keberhasilan, efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berikut disajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2021-2026.

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Rokan Hulu terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Rokan Hulu, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.



Tabel VIII- 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,51	2,06	2,50	3,00	3,50	4,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69,38	69,47	69,67	69,86	69,93	69,98
3	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	10,33	11,86	12,77	13,75	14,84	15,98
4	PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	Juta Rp/Kapita/Tahun *ADHB	50,23	50,29	50,45	50,95	51,23	51,67
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,42	4,33	4,30	4,27	4,24	4,21
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,31	10,14	10,06	9,97	9,89	9,80
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	64,41	65,37	65,85	66,33	66,81	67,29
8	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Gini	Point	0,314	0,279	0,278	0,277	0,276	0,275
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C (48,06)	CC	CC	B	B	BB
11	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	54,14	55,49	57,47	59,46	61,44	63,43

Tabel VIII- 2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,51	2,06	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,42	4,33	4,30	4,27	4,24	4,21	4,21
1.3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,31	10,14	10,06	9,97	9,89	9,80	9,80
1.4	Indeks Gini	Point	0,314	0,279	0,278	0,277	0,276	0,275	0,275
1.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,26	66,22	66,88	67,29	67,77	68,3	68,3
1.6	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	Persen	10,33	11,86	12,77	13,75	14,84	15,98	15,98
1.7	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	90,69	91,45	91,82	92,19	92,56	92,93	92,93
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69,38	69,47	69,67	69,86	69,93	69,98	69,98
2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,55	71,01	71,56	72,03	72,42	72,42
2.3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,9	12,93	12,96	12,98	13	13
2.4	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,39	8,36	8,4	8,45	8,5	8,6	8,6
2.5	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
2.6	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	52,08	56	56,5	57	57,5	58	58
2.7	(IPG) Indeks Pembangunan Gender	Indeks	81,88	91,5	92	92,5	93	93,5	93,5
2.8	Persentase pemajuan kebudayaan daerah	Persen	7	7	8	9	10	11	11
B	Aspek Pelayanan Umum								



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.1	Pendidikan								
1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	15,25	25,75	26	26,25	26,5	26,75	26,75
1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI	Persen	94,94	94,67	95,8	96,92	98,05	100	100
1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS	Persen	62,48	95,12	96,44	97,76	99,09	100,41	100,41
1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	114,77	114,77	115,77	114,77	116,77	114,77	114,77
1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun PAUD	Persen	85	87	89	91	93	99	99
1.1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun SD/MI / Paket A	Persen	94,55	94,67	95,8	96,92	98,05	100	100
1.1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun SMP/MTs / Paket B	Persen	82,48	95,12	96,44	97,76	99,09	100,41	100,41
1.1.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan	Persen	85	90	95	97	99	100	100
1.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	85	87	89	91	93	99	99
1.1.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99,78	107,63	108,98	108,79	109,41	109,12	109,12
1.1.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	85,92	98,41	99,2	99,98	100	100,79	100,79
1.1.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	98	99	99	99	99	100	100
1.1.13	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persen	85	87	89	91	93	99	99
1.1.14	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Paket A	Persen	90,28	98,27	98,32	98,37	98,42	98,47	98,47



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.15	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Paket B	Persen	79,68	98,06	90,29	91,52	92,74	93,97	93,97
1.1.16	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan	Persen	85	87	89	91	93	99	99
1.1.17	Angka Putus Sekolah PAUD	Persen	20	20	10	5	5	0	0
1.1.18	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,8	0,68	0,62	0,56	0,5	0,44	0,44
1.1.19	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,4	0,33	0,29	0,25	0,21	0,17	0,17
1.1.20	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	85	90	95	97	98	100	100
1.1.21	Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	80	85	90	92,5	95	95	95
1.1.22	Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	75	80	82,5	85	87,5	90	90
1.1.23	Persentase sekolah yang terakreditasi Kesetaraan	Persen	98	100	100	100	100	100	100
1.2	Kesehatan								
1.2.1	Status Akreditasi RSUD	Status	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna
1.2.2	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita	Persen	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30	2,25	2,25
1.2.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	2	2
1.2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	46	45	44	43	42	40	40
1.2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada BALITA	Persen	17,9	17	15	14	12	10	10
1.2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,004	0,0041	0,0041	0,0042	0,0043	0,0043	0,0043
1.2.7	Cakupan puskesmas (per 30.000 penduduk)	Rasio	1,18	1,18	1,23	1,28	1,28	1,34	1,34
1.2.8	Cakupan puskesmas Pembantu (seluruh desa)	Persen	89,7	92,4	93,8	96,6	97,9	100	100
1.2.9	Persentase penduduk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	62	72	82	92	92	100	100
1.2.10	Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	49	60	70	80	90	100	100



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.11	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	84,1	100	100	100	100	100	100
1.2.12	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	84,5	100	100	100	100	100	100
1.2.13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84,4	100	100	100	100	100	100
1.2.14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	49,6	100	100	100	100	100	100
1.2.15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	60,4	100	100	100	100	100	100
1.2.16	Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	14,5	100	100	100	100	100	100
1.2.17	Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	1,8	100	100	100	100	100	100
1.2.18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	9,9	100	100	100	100	100	100
1.2.19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar	Persen	88,4	100	100	100	100	100	100
1.2.20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC sesuai Standar	Persen	30,6	100	100	100	100	100	100
1.2.21	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Sesuai Standar	Persen	53,2	100	100	100	100	100	100
1.2.22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Persen	18,4	100	100	100	100	100	100
1.2.23	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,00146	0,00147	0,00148	0,00149	0,00150	0,00151	0,00151
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Pekerjaan Umum:								
1.3.1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	54,14	55,49	57,47	59,46	61,44	63,43	63,43
1.3.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	Persen	68,95	71,04	73,49	75,77	75,85	78,59	78,59



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang dilayani oleh jaringan irigasi								
1.3.3	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	75,1	75,4	76	76,3	76,5	76,8	76,8
1.3.4	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,31	45,71	57,14	68,57	80	91	91
1.3.5	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	51,10	60,52	65,13	69,23	74,00	78,98	78,98
1.3.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	66,33	76,20	80,90	86,00	91,30	96,32	96,32
1.3.7	Jumlah unit pengelolaan air bersih	Unit	16	16	16	16	16	16	16
1.3.8	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	70	71,4	73,19	75,01	76,89	78,81	78,81
	Penataan Ruang:								
1.3.9	Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.10	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1.4.1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Persen	0	100	100	100	100	100	100
1.4.2	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	1,9	1,71	1,52	1,33	1,14	0,96	6,66
1.4.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	63,33	67,71	69,7	72,08	73,52	74,99	74,99
1.4.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	Persen	46,45	51	54	56	59	62	62

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sarana dan Utilitas Umum)								
1.5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat								
1.5.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
1.5.2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5.3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kebencanaan								
1.5.4	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5.5	Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5.6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	7301	7100	7200	7250	7300	7500	36350
1.5.7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	7301	7100	7200	7250	7300	7500	36350
1.5.8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	7301	7100	7200	7250	7300	7500	36350
1.5.9	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	Persen	100	100	-	-	-	-	-
	Kebakaran								
1.5.10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
1.5.11	Tingkat Waktu Tanggap (respond time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5.12	Cakupan pelayanan bencana	Persen	18,06	18,06	26,41	51,7	74,46	89,7	89,7

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kebakaran kabupaten								
1.5.13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Sosial								
1.6.1	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen	-	40	50	60	70	90	90
1.6.2	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	76	100	100	100	100	100	100
1.6.3	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	69	79	84	89	94	100	100
1.6.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	Persen	18,55	-	100	100	100	100	100
1.6.5	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	96	97	98	99	100	100	100
1.6.6	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6.7	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
2.1	Tenaga Kerja								
2.1.1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan ditempatkan	Orang	807	50	115	115	115	115	510
2.1.2	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	0	178	212	212	212	212	1.026
2.1.3	Besaran kasus yang diselesaikan	Persen	34,69	34,29	35,00	35,56	36,00	36,36	36,36



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan Perjanjian Bersama (PB)								
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	-	5	5,5	5,7	5,8	6	6
2.2.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	-	0,007	0,005	0,004	0,003	0,002	0,002
2.2.3	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	Persen	82,8	83	85,3	87	90,1	95,7	95,7
2.2.4	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	-	Madya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama
2.3	Ketahanan Pangan								
2.3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	53,24	58,03	63,25	68,95	75,15	81,92	81,92
2.3.2	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,9	83,2	84	84,8	85	85,8	85,8
2.3.3	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Persen	3		20	20	20	20	20
2.3.4	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	Persen	86,79	89,79	92,79	95,00	97,00	100,00	100,00
2.4	Pertanahan								
2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	46,4	55,68	60,32	64,96	69,6	74,24	74,24
2.4.2	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan	Persen	90	90	90	95	95	95	95
2.4.3	Rekomendasi izin lokasi	Persen		90	90	95	95	95	95
2.5	Lingkungan Hidup								
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	64,41	65,37	65,85	66,33	66,81	67,29	67,29
2.5.2	Peningkatan Indeks Kualitas Air	point	70	59,37	59,47	59,57	59,67	59,77	59,77
2.5.3	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	point	90,21	87,34	87,44	87,54	87,64	87,74	87,74
2.5.4	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	point	31,4	35,06	36,89	38,72	40,55	42,38	42,38
2.5.5	Persentase jumlah sampah yang	persen	18,83	18,87	18,95	19,03	19,11	19,18	19,18



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tertangani								
2.5.6	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.5.7	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,93	0,95	0,98	0,98	1	1	1
2.6.2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	23,08	50	60	70	80	90	90
2.6.3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	92,89	95,61	96,11	97,10	97,59	98,09	98,09
2.6.4	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	94	100	100	100	100	100	100
2.6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks	91	93	95	97	98	98	98
2.6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	92,62	97,92	98	99	100	100	100
2.6.7	Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.7.1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen		1,55	3,1	8,40	9,95	11,5	11,5
2.7.2	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	49,64	55,14	61,14	67,64	74,54	81,74	81,74
2.7.3	Persentase PKK Desa yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.7.4	Persentase Posyandu yang Aktif	Persen	75,17	100	100	100	100	100	100



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.7.6	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	23,08	7,69	15,38	23,08	30,77	38,46	38,46
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,46	0,39	0,33	0,26	0,2	0,2
2.8.2	TFR (Total Fertility Rate)	Rasio	2,50	2,47	2,45	2,43	2,42	2,41	2,41
2.8.3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65	67	69	69	70	70	70
2.8.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,5	17,5	15,5	15,5	14,5	14,5	14,5
2.8.5	Ratio Akseptor KB	Persen	74,33	74,45	74,5	74,6	74,75	75	75
2.8.6	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	Rasio	0,5	0,5	0,3	0,25	0,2	0,15	0,15
2.8.7	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,18	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4
2.9	Perhubungan								
2.9.1	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	23	23,25	23,50	23,75	24,00	24,25	24,25
2.9.2	Jumlah pengujian kendaraan bermotor	Unit	8.928	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
2.9.3	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	-34,56	10	10,5	11	11,5	12	12
2.10	Komunikasi dan Informatika								
2.10.1	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	2,13	2,75	3	3,25	3,5	4	4
2.10.2	Persentase Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo								
2.10.3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	50	60	70	80	90	90
2.10.4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persen	31,25	50	68,75	87,50	93,75	100	100
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.11.1	Persentase koperasi berkualitas	Persen	15,43	15,43	16,46	17,47	18,45	19,30	19,30
2.11.2	Persentase koperasi aktif	Persen	43,7	48,66	51,01	53,35	55,7	58,04	58,04
2.11.3	Jumlah UMKM yang dikembangkan	UMKM	50	50	50	60	60	60	280
2.11.4	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	60	5000	5000	5000	5000	5000	25000
2.12	Penanaman Modal								
2.12.1	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	0	4,21	4,76	4,94	5,06	6,09	6,09
2.12.2	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	rupiah	452.441.461.514	475.000.000.000	498.750.000.000	524.687.500.000	552.650.000.000	588.500.000.000	588.500.000.000
2.12.3	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	rupiah	911.865.180.000	975 M	990 M	1060 M	1113 M	1160 M	1160 M
2.12.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79,75	80,00	80,50	81,50	82,5	83,50	83,50
2.13	Kepemudaan dan Olahraga								
2.13.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen		0,03	0,04	0,049	0,053	0,061	0,061
2.13.2	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	-	0	Emas 2, Perunggu 2, perak 10	Emas 3, Perunggu 5, perak 13	Emas 5, Perunggu 5, perak 20	Emas 5, Perunggu 20, perak 15	Emas 5, Perunggu 20, perak 15
2.13.3	Persentase wirausaha muda	Persen	80	80	80	80	80	80	80
2.14	Statistik								
2.14.1	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	ketersediaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14.3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Persandian								
2.15.1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	17,24	20	30	40	50	60	60
2.16	Kebudayaan								
2.16.1	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya	Kali	204	20	40	50	60	70	240
2.16.2	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	5,25	5,25	9,97	10,76	10,76	11,02	25,98
2.16.3	Jumlah warisan budaya tak benda/karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	WBTB	9	3	4	4	4	4	19
2.16.4	Persentase koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	Persen	7,87	-	11,81	15,74	19,68	23,62	23,62
2.17	Perpustakaan								
2.17.1	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	4,64	10	20	30	40	50	50
2.17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	8,91	9,06	9,12	9,24	9,31	9,46	9,46
2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0002	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005	0,0005
2.17.4	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	2,287	5.245	10.287	12.852	14.620	16.540	16.540
2.17.5	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Eksemplar	49.319	49.319	49,519	50.755	51.405	52.405	52.405
2.17.6	Rasio pustakawan, tenaga teknis	Rasio	0,0016	0,0022	0,0025	0,0029	0,0037	0,0041	0,0041

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan penilai yang bersertifikat								
2.18	Kearsipan								
2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	33,33	40	53,33	53,33	60	60	60
2.18.2	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persen	57,5	58	60,5	62	63,5	65	65
3	Layanan Urusan Pilihan								
3.1	Kelautan dan Perikanan								
3.1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	8.902,05	9268,86	9653,77	10057,16	10479,92	10923	10923
3.1.2	Pendapatan rata rata Pembudidaya ikan dan Nelayan	Rupiah	37.200.000	41.200.000	43.500.000	45.600.000	47.800.000	49.300.000	49.300.000
3.1.3	Cakupan bina kelompok Perikanan	Persen	15,88	8,1	9,4	9,4	9,4	9,4	45,7
3.2	Pariwisata								
3.2.1	PAD Sektor Pariwisata (Dalam Juta)	Rupiah	2.497,825	2.722,63	2.967,67	3.234,76	3.525,88	3.843,21	3.843,21
3.2.2	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan dan dikelola	Persen	13,95	6,45	11,82	15,05	16,12	18,27	18,27
3.2.3	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	876.535	876.535	964.118	1.060.607	1.166.667	1.283.334	1.283.334
3.2.4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	0,35	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
3.3	Pertanian								
3.3.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	Persen	54,22	54,32	54,37	54,42	54,47	54,50	54,50
3.3.2	Persentase peningkatan SDM petani dan kelembagaan pertanian	Persen	35	40	45	50	55	60	60
3.3.3	Produktivitas Padi	Kw/ Ha	42,26	42,39	42,54	43,00	43,50	44,00	44,00
3.3.4	Produksi Pertanian								
	Produksi Tanaman Pangan								
	Produksi Padi	Ton/Tahun	45.381,64	26.375,06	26.604,52	27.038,40	27.509,40	27.992,80	27.992,80



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Produksi Hortikultura								
	Produksi Bawang	Ton/Tahun	-	136	152	168	184	200	200
	Produksi Cabai	Ton/Tahun	360	380	400	420	440	460	460
	Produksi Perkebunan								
	Produksi Sawit	Ton/Tahun	689.931	694.074	694.768	695.463	696.158	696.855	696.855
	Produksi Karet	Ton/Tahun	81.367	81.530	81.612	81.963	81.775	81.857	81.857
	Produksi Aren	Ton/Tahun	15,62	15,65	15,67	15,68	15,70	15,71	15,71
	Produksi Peternakan								
	Populasi Sapi & Kerbau	Ekor	49.409	50.402	50.906	51.415	51.929	52.449	52.449
	Populasi Kambing & Domba	Ekor	17.865	18.036	18.208	18.382	18.558	18.736	18.736
3.3.5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,89	4,75	4,51	4,29	4,07	3,87	3,87
3.4	Perdagangan								
3.4.1	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8
3.4.2	Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Persen	35	43	50	57	67	80	80
3.4.3	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	7,68	15,57	23,89	32,03	40,05	47,81	47,81
3.4.4	Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.4.5	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam persen)	Persen	5,35	6,26	5,35	5,70	5,88	6,26	6,26
3.5	Perindustrian								
3.5.1	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	Persen	1,81	2,2	2,39	2,58	2,76	3	3
3.5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	Persen	25,26	25,99	26,21	26,42	26,64	26,85	26,85
3.5.3	Kontribusi Sektor industri	Rupiah	9.113.040	9.591,60	10.070,15	10.548,71	11.027,26	11.505,82	11.505,82



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terhadap PDRB (dalam Juta rupiah)								
3.5.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	2,82	3,52	4,11	4,70	5,29	5,88	5,88
3.6	Transmigrasi								
3.6.1	Jumlah wilayah transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	3	0	1	1	0	1	3
4	Unsur Pendukung								
4.1	Sekretariat Daerah								
4.1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B (61,28)	B	B	B	BB	BB	BB
4.1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C (48,06)	CC	CC	B	B	BB	BB
4.1.3	Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	80	90	90	90	95	95	95
4.1.4	Skor LPPD	Skor	Tinggi (2,97)	Sangat Tinggi (305)	Sangat Tinggi (305)	Sangat Tinggi (310)	Sangat Tinggi (315)	Sangat Tinggi (320)	Sangat Tinggi (320)
4.1.5	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.1.6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	14,32	15	16	17	18	19	19
4.1.7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	41,63	42	43	44	45	46	46
4.2	Sekretariat DPRD								
4.2.1	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	80	85	87,5	90	92,5	95	95
4.2.2	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	80	85	87,5	90	92,5	95	95
5	Unsur Penunjang								
5.1	Perencanaan								



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	95	97	99	100	100	100	100
5.1.2	Persentase e-database yang dimanfaatkan pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.1.3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten yang disusun tepat waktu	Dokumen	13	7	8	9	9	10	43
5.1.4	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terjadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	70	75	80	85	90	95	95
5.2	Keuangan								
5.2.1	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan terukur	Persen	40	50	55	60	65	70	70
5.2.2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.2.3	Penetapan APBD tepat waktu	tepat waktu/ tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
5.3	Kepegawaian								
5.3.1	Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	Persen	1,37	1,65	1,78	1,93	2,06	2,21	2,21
5.3.2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,72	3,79	3,94	4,02	4,1	4,17	4,17
5.3.3	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.3.4	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Fungsional	persen	0,13	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
5.3.5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	0,11	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
5.4	Penelitian dan Pengembangan								



NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	Persen		100	100	100	100	100	100
5.4.2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen		100	100	100	100	100	100
5.5	Pengelola Perbatasan Daerah								
5.5.1	Persentase penyelesaian Tapal batas daerah	Persen			90	90	95	95	95
6	Unsur Pengawas								
6.1	Inspektorat								
6.1.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
6.1.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
6.1.3	Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang di tindaklanjuti	Persen	72	80	85	85	85	90	90
6.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan RB	Perangkat daerah	10	29	29	29	29	29	29
6.1.5	Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	Persen	50	60	75	80	85	90	90
6.1.6	Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	0	5	9	10	11	11	46
7	Layanan Urusan Kewilayahan								
7.1	Kecamatan								
7.1.1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80	80	80
8	Urusan Pemerintahan Umum								
8.1	Jumlah masyarakat yang	Orang	100	160	160	160	160	160	800

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa								
8.2	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.3	Jumlah ormas dan LSM yang aktif	Ormas/LSM	100	25	25	25	25	25	125
8.4	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.5	Persentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, ekonomi, dan agama/SARA yang dapat di redam	Persen		100	100	100	100	100	100
C	Aspek Daya Saing								
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.1	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan)	Rupiah	1.199.755	1.272.820	1.311.005	1.350.335	1.390.845	1.432.570	1.432.570
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
2.1	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Rasio	0,6722	0,7131	0,7345	0,7566	0,7793	0,8026	0,8026
3	Fokus Iklim Investasi								
3.1	Kasus Kriminalitas yang tertangani	Kasus	59	53	57	60	63	67	67
3.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	0	1,55	3,1	8,40	9,95	11,5	11,5
4	Fokus Sumber Daya Manusia								
4.1	Rasio Ketergantungan	Persen	54,93	54	53,9	53	52,9	51,9	51,9



BAB IX

PENUTUP

**BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021**



BAB IX.

PENUTUP

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, untuk hal tersebut, Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,





LAMPIRAN

BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021



Lampiran 1
Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMD
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMN TAHUN 2020 - 2024						RPJMD PROVINSI RIAU TAHUN 2020 - 2024					RPJMD KABUPATEN ROKAN HULU 2021 - 2026							
		TARGET					INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET					INDIKATOR PEMBANGUNAN	KONDISI AWAL	TARGET					
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,12	1,80 - 2,49	2,06 - 2,71	2,33 - 3,01	2,75 - 3,27	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,51		2,06	2,50	3,00	3,50	4,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9,00	8,55	8,15	Persentase penduduk miskin (%)	7,04	6,72-6,84	6,55-6,68	6,24-6,15	6,05-5,97	Persentase penduduk miskin (%)	10,31		10,14	10,06	9,97	9,89	9,80
3	Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	4,20	4,00	3,80	3,40	3,10	Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	6,32	6,84 - 5,78	6,11 - 5,18	6,58 - 5,57	6,49 - 5,54	Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	4,42		4,33	4,30	4,27	4,24	4,21
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					74,60 - 84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,71	73,34 - 73,72	73,75 - 74,14	74,18 - 74,71	74,60 - 75,11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,38		69,47	69,67	69,86	69,93	69,98
5	Rasio Gini					0,360 - 0,474	Koefisien Gini (indeks)	0,321	0,319	0,317	0,315	0,313	Indeks Gini	0,314		0,279	0,278	0,277	0,276	0,275
6	Penurunan emisi GRK (%)					27,3	Penurunan Emisi GRK (GgCO ₂ -e)	222.518	164.663,32	121.850,86	90.169,63	66.725,53	Penurunan emisi GRK (%)							



Lampiran 2

Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi terhadap Program Prioritas Nasional

RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026								
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN																						
PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Bauran Energi		26,13	27,83	28,8	29,59									
PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas produksi SPAM Regional		440	440	440	440									
PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi		87	89,7	92,3	95	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81,9	83,2	84	84,8	85	85,8
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang fungsional			24	24	24									
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Inflasi			100	100	100									
	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0																
	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0																
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Under-nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan keamanan pangan segar		70	75	80	85	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	persen	3,25		20	20	20	20
	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan		48	42	39	36		Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan	Persen	86,79	89,79	92,79	95	97	100
KP : Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/tahun)	58,3	58,9	59,5	60,2	60,9																
	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95								Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
														Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Capaian Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan	Persen	100	-	100	100	100	100



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026									
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
KP : Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penggunaan Benih Bersertifikat (Persen)	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0																	
	Ketersediaan Beras (Juta ton)	39,2	42,7	44,0	45,4	46,8								Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Padi	Ton/Tahun	45.381,64	26.375,06	26.604,52	27.038,40	27.509,40	27.992,80	
	Produksi jagung (Juta ton)	30,9	31,9	33,0	34,1	35,3								Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	65	68	72	75	78	80	
	Produksi umbi-umbian (Juta ton)	24,3	24,6	24,9	25,2	25,5																	
	Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9								Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba)	Ekor	67,11	68,44	69,11	69,8	51,93	71,18	
	Produksi daging (Juta ton)	4,0	4,2	4,4	4,6	4,6								Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan	Persen		13	13	13	13	15	
KP : Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%) (%)	65 - 80	70-80	75-80	80-90	80-95								Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM petani dan kelembagaan pertanian	Persen	35	40,00	45	50	55	60	
															Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina	Kelompok		-	8	8	9	9	
	Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/lahun)	49,2	51,7	54,3	57,0	59,8																	
	Nilai tukar petani	103,0	103,0	104,0	104,0	105,0																	
PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)			16312,77	17944,05	19738,45										
	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	≤80	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)		46744,31	147176,78	152105,79	157199,87										
KP : Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Produksi ikan (Juta ton)	15,5	16,3	17,6	18,5	20,4								Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1943,69	1.963,13	1.982,76	2.002,59	2.022,61	2.042,84	
														Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6958,36	7.305,73	7.671,01	8.054,57	8.457,31	8.880,16	



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024					RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026										
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline	2020	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
														Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan	Persen	14	5	5	5	5	5
PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah izin koperasi usaha simpan pinjam (koperasi aktif)		5	5	9	15	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/USP yang memiliki izin	Persen	21,60	21,60	21,85	22,09	22,32	22,56
	Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM koperasi yang ditingkatkan kompetensinya (orang)		809	696	720	720	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	116	58	58	58	58	58
							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang berdayasaing		12	100	100	100	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	60	5000	5000	5000	5000	5000
							Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang skala usaha kecil menjadi usaha menengah		40	40	40	40	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan	UMKM	60	50	50	60	60	60
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang dibina		213	728	685	711									
	Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		12	9	9	9	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan	Koperasi		2	2	2	2	2
							Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif yang bersertifikasi (Koperasi Aktif)			9	9	9	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa	Koperasi	-	60	62	65	67	70
							Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi berprestasi		13	9	9	9	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	15,43	15,43	16,46	17,47	18,45	19,30
PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri besar			1	1	1									
	Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)			16312,77	17944,05	19738,45									
	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Kawasan Industri/Jumlah SIKIM/Persentase pertumbuhan industri		100	100	100	100									
	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata unggulan yang dikembangkan (destinasi)		3	5	8	12	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan di Kelola	Persen	13,95	6,45	11,82	15,05	16,12	18,27



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026								
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline	2020	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		320	350	380	410	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI	Dokumen		-	5	0	6	11
														Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang dikembangkan	Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang dikembangkan	orang		-	60	40	60	90
	Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event yang dilaksanakan		4	4	4	4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	0	4,21	4,76	4,94	5,06	6,09
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Pela dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO (laporan)		1	1	1	1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	0	2	3	2	3	2
														Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang diterbitkan	Jumlah izin	2,083	2,187	2,297	2,411	2,532	2,658
															Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	Rupiah	452.441.461.514	475.000.000.000	498.750.000.000	524.687.500.000	552.650.000.000	588.500.000.000
														Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	Rupiah	911.865.180.000	975.000.000.000	990.000.000.000	1.060.000.000.000	1.113.000.000.000	1.160.000.000.000
														Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	-	-	1	1	1	1
	Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan klaster berbasis kompetensi	-			20	30	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Orang		178	212	212	212	212
								Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		100	100	80	70									
							Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi Indikator dalam rencana tenaga kerja		96	96	97	98	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang disusun	dokumen			1			



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026								
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline	2020	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		20	25	40	45	Program penempatan tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Orang	807	50	115	115	115	115
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5																
	Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7																
	Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0																
	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0																
	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0																
KP : Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (Persen)	8,09-8,22	8,21-8,37	8,33-8,51	8,45-8,65	8,57-8,79																
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan(9.2.1*) (Persen)	19,7	19,8	20,0	20,4	21,0																
	Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen)	5,5	6,1	6,9	7,7	8,4																
	Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen)	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0																
	Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0								Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren)	Ton/Tahun	771,3	775,6	776,4	777,2	777,9	778,7
														Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Persen		100	100	100	100	100
	Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen)	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0																
	Peningkatan produksi buah-buahan (Persen)	3,9	4,3	4,7	5,2	5,7																
	Peningkatan produksi sayuran (Persen)	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1																
	Peningkatan produksi florikultura (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5																
KP : Pengembangan industri halal	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0								Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah	IKM	-	2	8	9	9	9



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026									
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
														Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	-	-	2	2	2	2	
														Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS	Dokumen	-	-	1	3	1	2	
PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor		100	100	100	100	Program pengembangan ekspor	Persentase Produk daerah yang diekspor	Persen	-	-	50	67	84	100	
	Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0																	
	Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0																	
KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0								Program pembangunan dan pemasaran produk dalam negeri	Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah	Kali	16	-	4	4	4	4	
KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (Juta orang)	18,0	19,0	20,0	21,0	22,3								Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	876.535	876.535	964.118	1.060.607	1.166.667	1.283.334	
	Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)	21,5-22,6	22,25-23,4	23-24,2	23,75-25	24,5																	
PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4																	
	Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0																	
	Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.																	
KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Skor Logistic Performance Index	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	35	43	50	57	67	80	
	Tingkat inflasi (Persen)	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7								Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dokumen		10	3	3	3	3	
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN																							
PP : Pembangunan Wilayah Sumalera																							
MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																							



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026									
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	25,11	25,93	26,75	27,57	28,39								Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentasr Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74,33	74,75	75,40	75,80	76,00	76,50	
														Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)	Persen	55,73	55,95	56,05	56,70	56,40	57	
KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	40	45	50	55	60																	
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	16,0	14,5	13,0	11,5	10,0																	
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	8,08	7,8	7,52	7,26	7,00																	
KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Persentase Orang Dengan HIV/AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	40	45	50	55	60																	
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	90	90	90	90	90																	
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405																	
	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100																	
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	416	436	458	482	514																	
	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	80	93	106	150	190																	
	Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28																	
	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	52	129	232	360	514								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar	Persen	88,4	100	100	100	100	100	
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514																	
KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas)	Jumlah kabupaten/kota sehat	110	220	280	380	420								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS)	Persen		100	100	100	100	100	
														Program Pemenuhan	Persentase Desa/Kelurahan	Persen	49	60	70	80	90	100	



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026								
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)						Kurikulum	yang menerapkan kurikulum muatan lokal														
KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	57,2 26,5 30,4	58,2 27,4 31,4	59,2 28,3 32,4	60,2 29,2 33,4	61,2 30,1 34,4																
	Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	67,5	70,9	74,6	78,2	81,8								Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan	Persen	80	88	92	96	100	100
															Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1539	1559	1586	1622	1664	1718
KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (Persen) Pendidikan Tinggi	33,4	35,4	37,4	39,5	41,7									Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	4011	4061	4111	4161	4311	4311
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	105,5	105,5	104,4	104,4	104,4									Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	1852	1872	1892	1912	1942	1942
KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan															Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Orang	227	242	259	278	229	252
KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B: SD/MI SMP/MTS SMA/MA	80,11 74,54 73,65	81,19 76,01 74,53	82,28 77,48 75,41	83,37 78,95 76,29	84,46 81,33 80,86								Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	85	90	95	97	98	100
															Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	80	85	90	92,50	95	95
															Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	75	80	82,50	85	87,50	90
	Perguruan Tinggi Terakreditasi A	135,0	160,0	185,0	205,0	225,0									Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen	14,92	16	17	18	20	25
															Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	85	87	89	91	93	99
															Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99,78	107,6	109	108,8	109,4	109,1
															Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	85,92	98,41	99,2	99,98	100	100,8
															Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	98	99	99	99	99	100



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026								
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline 2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
														Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	eksemplar	49,32	49,32	49,52	50,76	51,41	52,41
															Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang dilestarikan	Naskah			2	2	2	2
															Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0002	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005
KP : Peningkatan Tala Kelola Pendidikan														Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	90	92	94	96	98	100
															Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Satuan Pendidikan	449	459	469	479	489	499
														Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin	Lemba ga		516	516	516	516	516
PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan PUG yang aktif		55	60	64	70	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah)	Dokum en			1			
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen data gender dan anak di Provinsi Riau		1	1	1	1	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen		70	80	85	90	95
	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		75	80	90	90	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Persen		100	100	100	100	100
							Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif		75	78	80	85									
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,27794284	91,27896233	91,33469578	91,38627023	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan PUG yang aktif		55	60	64	70									
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga		75	83,33	83,33	91,6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen		5	5,5	5,7	5,8	6



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024					RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026											
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	dilegalisasi																						
PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1																	
	Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University																						
	a. Top 200	0	0	0	0	1																	
	b. Top 300	1	1	1	1	2																	
	c. Top 500	2	2	2	2	3																	
	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0																	
KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Peringkat Global Innovation Index	80-85	80-85	80-85	75-80	75-80								Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persen	-	100	100	100	100	100	
	Jumlah paten yang diberikan (resident)	900	925	950	975	1.000									Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	
KP : Prestasi Olahraga	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	meningkat	35,40	meningkat	meningkat	40																	
	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	2	N/A	N/A	N/A	3								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	-	0	Emas 2, Perunggu 2, perak 10	Emas 3, Perunggu 5, perak 13	Emas 5, Perunggu 5, perak 20	Emas 5, Perunggu 20, perak 15	
	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	1	N/A	N/A	N/A	3																	
	Peringkat pada Asian Games	N/A	N/A	5	N/A	N/A																	
	Peringkat pada Asian Para Games	N/A	N/A	4 s/d 6	N/A	N/A																	
REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN																							
PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER														Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Orang	100	160	160	160	160	160	



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026									
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	50	60	65	68	70									Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	219	387	427	472	540																	
	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)	1.700.000	1.900.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000									Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
															Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Persen	100	100	100	100	100	100
															Program Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	-	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)	5	7	7	8	7									Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS)	Dokumen	3	2	2	3	3	3
PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		100	100	100	100		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	100	100	100	100	100
																Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024					RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026											
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	sektor limbah (persen)							sampah sejenis sampah rumah tangga															
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9																	
	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Lahan pemanfaatan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Ha)		280497	280500	81554	220946										
MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK																							
PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI																							
PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia Internasional	5,07	5,27	5,47	5,67	5,67																	
PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	,65	,67	,69	,71	,73																	
PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	0	5	0	5	5																	
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	0	0	0	0	5																	
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	0	5	5	5	0	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tingkat kepatuhan laporan keuangan		100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
																Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu					
																Persentase realisasi dana mandatory dan Pembiayaan Daerah	Persen	99,98	100	100	100	100	100
															Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	Persen	10,33	11,86	12,77	13,75	14,84	15,98
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola		100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan terukur	Persen	40	50	55	60	65	70
							Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik		60	80	90	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B (61,28)	B	B	B	BB	BB
															Indeks Reformasi	Indeks	C (48,06)	CC	CC	B	B	BB	



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026									
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				Baseline	2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
														Birokrasi									
														Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD	Skor	Tinggi (2,97)	Sangat Tinggi (305)	Sangat Tinggi (305)	Sangat Tinggi (310)	Sangat Tinggi (315)	Sangat Tinggi (320)	
														Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	2	2	3	3	3	4	
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang terselesaikan		100	100	100	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	4	4	4	
															Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	72	80	85	85	85	90	
															Persentase penurunan jumlah rekomendasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	Persen	50	60	75	80	85	90	
														Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistansi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	4	4	4	
															Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB	Perangkat Daerah	10	29	29	29	29	29	
															Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	0	69	69	69	69	69	
															Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	0	5	9	10	11	11	



RPJMN Tahun 2020-2024							Revisi RPJMD Provinsi 2019-2024							RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2021-2026								
Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target					Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24																
	Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	55%	>60%	>60%																
	Indeks Keamanan dan Keterlibatan Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		75	75	75,05	75,1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
															Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100
														Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
														Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kuallitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Persen	100	100	100	100	100	100
		38.24	38.14	8.00	37.90	37.80									Persentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, ekonomi, dan agama/SARA yang dapat di redam	Persen		100	100	100	100	100